

*Nasionalis Tulus
Singa Podium*

KASMAN SINGODIMEDJO

Pemikiran dan Pergerakan

Kata Pengantar
Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si

*Nasionalis Tulen
Singa Podium*

KASMAN SINGODIMEDJO

Pemikiran dan Pergerakan

Editor:
Gunawan Budiyanto
Achmad Nurmandi
Hasse Jubba
Mega Hidayati
Dyah Mutiarin

**NASIONALIS TULEN SINGA PODIUM KASMAN SINGODIMEDJO:
PEMIKIRAN DAN PERGERAKAN**

Penulis:
Zuly Qodir, dkk

Kata Pengantar
Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si

Editor:
Gunawan Budiyanto
Achmad Nurmandi
Hasse Jubba
Mega Hidayati
Dyah Mutiarin

Diterbitkan oleh:
JUSUF KALLA SCHOOL OF GOVERNMENT (JKSG)
bekerjasama dengan
PROGRAM DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Telp. (0274) 387 656 Ex. 316 Fax. (0274) 387 646
Email: S3pi.umy@ac.id

Dicetak oleh:
CV. Arti Bumi Intaran
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Gunawan Budiyanto, et.al. (eds.).

Nasionalis Tulen Singa Podium Kasman Singodimedjo: Pemikiran dan Pergerakan
Cet. 1, Yogyakarta: JKSG & Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik UMY, 2020
xii + 290 hlm. ; 23.5 cm
ISBN: 978-602-73900-8-9

KATA PENGANTAR

BELAJAR DARI MR. KASMAN SINGODIMEDJO

Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Kasman Singodimedjo adalah salah satu tokoh pergerakan yang berjasa dalam membentuk Republik Indonesia. Kontribusinya pada Sidang BPUPKI dengan Panitia Sembilan PPKI dalam merumuskan dasar Negara Indonesia tidak dapat dipandang sederhana. Kasman Singodimedjo merupakan sosok yang idealis, muslim yang taat, dan berintegritas. Ia tidak mudah goyah pandangannya sekalipun harus berhadapan dengan banyak rintangan. Segala yang tidak sesuai dengan nurani dan keyakinannya akan menjadi bagian dari yang dipersoalkan (dilawan). Akan tetapi, dalam kasus dasar Negara Republik Indonesia, Kasman Singodimedjo adalah sosok yang sangat nasionalis dan religius; yang tidak mengedepankan egoisme keagamaan, etnisitas maupun kelompok tertentu demi memperjuangkan kehendaknya. Kasman Singodimedjo, demi bangsa dan negara, hadir sebagai sosok nasionalis tulus yang tiada tandingannya. Kasman Singodimedjo seorang pelobi ulung sekaligus ahli berpidato. Ketika ia berpidato, hampir tidak ada seorang pun yang beranjak dari tempat duduknya atau acara yang diselenggarakan.

Sebagai aktivis pergerakan, Kasman Singodimedjo tidak diragukan lagi perannya baik dalam organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi politik maupun organisasi militer (pernah menjadi komandan Tentara PETA) zaman Jepang.

Selain itu, Kasman Singodimedjo juga berperan sebagai aktivis Masyumi, aktivis Muhammadiyah dan aktivis pergerakan *Jong Islamieten Bond*. Sosok Kasman Singodimedjo merupakan sosok yang lengkap sebagai pribadi, sebagai organisator serta sebagai pembela republik dari jarahan penjajah.

Sebagai aktivis Muhammadiyah, tentu kami Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, yang telah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Kasman Singodimedjo, terhitung sejak 28 Oktober 2018. Tentu saja hal ini merupakan “kebanggaan” pada Muhammadiyah yang telah memberikan kontribusi pada republik ini sejak sebelum kemerdekaan. Telah banyak pula aktivis Muhammadiyah menjadi Pahlawan Nasional. Tercatat beberapa tokoh penting di kalangan Muhammadiyah yang telah dianugrahi gelar pahlawan oleh Negara melalui pemerintah. Di antara nama tersebut, terdapat pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan, Nyai Walidah Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir, dan Kasman Singodimedjo.

Keterlibatan Kasman Singodimedjo dalam Muhammadiyah memang tidak sempat menjadi tokoh utama seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakkir maupun pimpinan tertinggi lainnya. Namun komitmennya dalam ber-Muhammadiyah tidak dapat diragukan. Ia selalu datang tepat waktu jika ada pertemuan dengan para pimpinan. Demikian pula, ketika ia ditugaskan oleh Pengurus Besar Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo selalu bersedia hadir sekalipun di pelosok yang sangat sulit dijangkau oleh kendaraan sekalipun. Meskipun hanya dengan menggunakan sepeda motor, ia bersedia datang dan hadir untuk memberikan pencerahan kepada warga Muhammadiyah.

Sosok Kasman Singodimedjo sungguh menjadi teladan banyak orang Muhammadiyah, terutama dalam hal ketegasan karena memiliki pandangan pribadi yang kuat, khususnya dalam membela rakyat kecil. Ia memiliki sikap teguh yang pantang mundur dan tidak pernah takut menghadapi ancaman baik fisik maupun non-fisik. Pribadi Kasman Singodimedjo dikenal sangat sederhana namun tegas dalam pendirian. Perawakannya,

meskipun kecil, namun suaranya mantap sehingga yang mendengar pembicaraannya akan menyangka sebagai seorang dengan perawakan yang tinggi besar dan kekar. Kasman Singodimedjo merupakan orang Jawa tulen, asal Purworejo Bagelen, Jawa Tengah yang berhasil mengenyam pendidikan di tempat sekolah orang bergengsi, yakni HIS, MULO, dan STOVIA didikan Belanda.

Kini, Kasman Singodimedjo telah lama meninggalkan kita semua. Jasanya telah diakui oleh pemerintah sebagai Pahlawan Nasional. Jasanya pada Muhammadiyah pun telah diakui dari Aceh hingga ujung Papua. Di kalangan pimpinan Muhammadiyah, tentu akan mengenal sosok Kasman Singodimedjo. Akan tetapi, bagi kalangan muda bisa saja kurang mengenal sosok yang memiliki kekhasan sikap ini. Oleh karena itu, perlu ada semacam derivasi pemikiran, gagasan, dan aktivitas Kasman Singodimedjo, sehingga kaum muda (generasi milenial) dapat mengambil hikmah atas jasa-jasa beliau.

Kasman Singodimedjo dan keluarganya tentu tidak berharap diberi gelar kepahlawanan secara formal oleh pemerintah. Namun, puji syukur pun patut kita haturkan kepada Tuhan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Kasman Singodimedjo. Beliau adalah sosok yang memang pantas mendapatkan gelar tersebut dengan segala kontribusi yang telah diberikan kepada republik ini. Muhammadiyah pun berterima kasih kepada pemerintah yang berkenan memberikan gelar pahlawan kepada Kasman Singodimedjo. Pemberian gelar ini tentu saja tidak sekadar menambah daftar tokoh Muhammadiyah dengan gelar Pahlawan Nasional, tetapi juga menunjukkan adanya wujud apresiasi negara atas jasa-jasa para pendiri bangsa ini.

Sebagai aktivis dan tokoh Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo bukan hanya milik Muhammadiyah, tetapi milik bangsa ini. Oleh karena itu, jika pemikiran dan aktivitasnya diketahui banyak pihak tentulah bukan sesuatu yang berlebihan. Muhammadiyah pun tidak akan berbangga hati jika Kasman Singodimedjo menjadi salah satu rujukan oleh banyak pihak. Keteladanan dan pribadinya menjadi sosok yang dapat memberikan

nilai lebih di saat kondisi bangsa yang hampir kehilangan sosok teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan diterbitkannya buku *Nasionalis Tulen Singa Podium Kasman Singodimedjo: Pemikiran dan Pergerakan*, kami Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyambut baik dan berterima kasih kepada para pihak yang telah bekerja keras mewujudkan misi mulia ini. Inilah salah satu wujud kerja Perguruan Tinggi Muhammadiyah, khususnya Program Doktor Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam menyebarluaskan semangat para pendahulu bangsa. Secara khusus kepada Rektor Universitas Muhammadiyah bersama tim penulis dan tim editor yang telah berijtihad dan berjibaku mengumpulkan naskah terkait Kasman Singodimedjo, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat mengapresiasi upaya keras ini. Kami memahami bahwa penulisan sebuah buku semacam ini bukanlah pekerjaan mudah dan ringan untuk dikerjakan. Penulisan biografi seseorang adalah pekerjaan mulia, namun tidak banyak yang bersedia melakukan apalagi jika bahan yang tersedia itu dianggap tidak memadai.

Atas terbitnya buku ini, Pimpinan Muhammadiyah berharap akan diterbitkan lagi karya-karya lain tentang aktivis dan tokoh Muhammadiyah yang telah berkontribusi pada bangsa, agama, dan persyarikatan. Tentulah ini merupakan amal saleh dari para pendiri, penerus dan aktivis Muhammadiyah yang telah mendahului kita semua. Saat ini, kita tinggal mengambil hikmah atas sosok Kasman Singodimedjo yang ditulis dalam karangan biografi ini. Semoga membawa manfaat untuk bangsa ini.

Yogyakarta, 06 Januari 2020

SAMBUTAN

Dr. Ir Gunawan Budiyanto, M.P., IPM.

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Assalamu alaikum wr. wb.

Pertama-tama, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sangat bersyukur atas kepercayaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyusun dan menerbitkan buku berupa biografi tokoh-tokoh Muhammadiyah yang selama ini tidak banyak diketahui publik. Upaya ini merupakan wujud komitmen Muhammadiyah untuk menghadirkan kembali semangat para tokoh pendahulu yang terbukti memiliki kontribusi penting dalam perjalanan dan kehidupan bangsa ini. Setelah menerbitkan buku yang berjudul “Konstruksi Pemikiran Politik Ki Bagus Hadikusumo: Islam, Negara dan Pancasila”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kembali menerbitkan buku yang berjudul “Nasionalis Tulen Singa Podium Kasman Singodimedjo: Pemikiran dan Pergerakan” yang akan melengkapi referensi mengenai tokoh Muhammadiyah yang sangat minim dikaji sejauh ini. Setelah berhasil mengumpulkan tulisan mengenai pemikiran-pemikiran politik Ki Bagus Hadikusumo, buku ini mengulas secara rinci mengenai sepak terjang Kasman Singodimedjo yang juga merupakan sahabat karib Ki Bagus Hadikusumo. Kedua tokoh ini merupakan tokoh penting di balik berdirinya Republik Indonesia.

Selanjutnya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ingin mengapresiasi kerja keras khususnya kepada Tim Penyusun yang telah susah-payah mengumpulkan tulisan dari beberapa penulis. Demikian pula, penghargaan yang tinggi kepada para

penulis yang dengan suka rela bersedia menuliskan pokok-pokok pikiran Kasman Singodimedjo dari berbagai perspektif. Buku ini memuat beberapa aspek mengenai pemikiran dan kontribusi nyata seorang Nasionalis Tulen sang Singa Podium. Kasman Singodimedjo sangat dikagumi oleh banyak kalangan karena keikhlasan dan komitmennya yang tinggi untuk tegaknya Republik Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga secara khusus ingin menyampaikan apresiasi kepada Program Studi Doktor Politik Islam yang telah bekerja keras mengumpulkan naskah-naskah buku ini. Persiapan Tim Penyusun tidaklah lama, tetapi berhasil menunjukkan kinerja yang maksimal. Inilah wujud kontribusi yang tidak bisa dinilai harganya, seperti halnya sumbangan Kasman Singodimedjo untuk bangsa ini yang tidak bisa dikuantifikasi jumlahnya.

Terakhir, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berkomitmen untuk terus menerbitkan buku yang memuat pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain. Upaya ini dimaksudkan selain untuk mengulas kembali tokoh-tokoh kontributif Muhammadiyah, juga ditujukan untuk melengkapi berbagai kekurangan ulasan sejarah mengenai peran tokoh-tokoh bangsa ini. Saat ini, generasi bangsa seperti kehilangan teladan yang baik sehingga sering mengalami disorientasi dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sekali lagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak henti-hentinya akan mengambil bagian dalam pembangunan bangsa ini melalui berbagai cara, khususnya dalam publikasi pemikiran tokoh yang di dalamnya berisi tentang semangat perjuangan yang tiada henti demi kemaslahatan bersama. Semoga buku ini menjadi referensi publik pembaca dan akan membangkitkan kembali semangat kebangsaan seperti apa yang telah diwariskan oleh Kasman Singodimedjo untuk membangun Republik Indonesia di masa depan. Semoga bermanfaat.

Wassalamu alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 09 Januari 2020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Umum PP Muhammadiyah — v
Sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta — ix

Kasman Singodimedjo, Islam, dan Pancasila: Menegosiasikan Egoisme Individu dengan Nasionalisme — 1

Zuly Qodir

Kasman Singodimedjo: Pengamal Keislaman, Pengawal Kebangsaan — 27

Faisal Ismail

Kasman Singodimedjo: Negarawan, Muslim-Nasionalis, dan Inspirator Bangsa — 59

Suhartono Wiryopranoto

Mr. Kasman Singodimedjo: Pandangan tentang Nasionalisme dan Islam — 85

Sri Margana & Siti Utami Dewi Ningrum

Islam dan Pancasila: Pandangan Politik Kenegaraan Kasman Singodimedjo — 101

Mu'arif & David Efendi

Demokrasi Taqiyah dalam Dinamika Negara-Bangsa — 133

Abdul Munir Mulkhan

Nasionalisme Kasman Singodimedjo dalam Perspektif Modal Sosial dan Pendidikan Multikultural — 159

Siti Irene Astuti Dwiningrum

Dari *Dar-al Salam* hingga *Dar-al Sosialis*: Pemikiran Kasman Singodimedjo tentang Perempuan dan Rumah Tangga — 181

Siti Aisyah

Kasman Singodimedjo sebagai Pejuang Tidak Mengenal Lelah demi Persatuan Indonesia — 199

Martinus Sardi

“Nasionalisme Cemplang” Membaca Kembali Pesan-Pesan Kasman Singodimedjo di Depan Jong Islamieten Bond — 213

Siswanto Masruri

Gerilya Militer - Sipil Menciptakan Ruang Bersama di Masa Krisis Penggal Sejarah Perjuangan Mr. Kasman Singodimedjo — 243

G. Budi Subanar

Meneladani Perjuangan Kasman Singodimedjo — 255

Mundzirin Yusuf

Tentang Penulis dan Editor — 277

Indeks — 283

KASMAN SINGODIMEDJO, ISLAM, DAN PANCASILA: MENEGOSIASIKAN EGOISME INDIVIDU DENGAN NASIONALISME

Zuly Qodir

PENDAHULUAN

Salah satu tokoh pendiri bangsa ini adalah Kasman Singodimedjo. Aktivis Muhammadiyah dan Masyumi ini bersama H. Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Abdul Wahid Hasyim, Mohammad Yamin, Mohammad Hatta dan Soekarno menjadi tokoh yang sangat dikenal karena kontribusinya dalam merumuskan dasar negara. Kasman Singodimedjo bahkan dikenal dalam sejarah yang melakukan lobi politik terhadap Ki Bagus Hadikusumo wakil dari Muhammadiyah sehingga bersedia menerima usulan Panitia Sembilan yang merumuskan dasar negara Pancasila. “Kasman Singodimedjo merupakan pemersatu bangsa yang terlihat dalam proses pengesahan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Ia adalah tokoh Muhammadiyah yang menjadi pionir banyak lembaga baru Republik ini saat baru berdiri. Ia adalah ketua KNIP (parlemen) pertama, Jaksa Agung Kedua yang memelopori pembenahan organisasi Kejaksaan Agung, pemimpin Badan Keamanan Rakyat, dan selanjutnya memelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat sebagai cikal-bakal TNI. Kasman Singodimedjo merupakan orang yang kritis tidak hanya pada masa Soekarno, tetapi juga pada masa Suharto. Ia akan kritis saat negara ini salah urus, sebagai salah satu *founding fathers* bangsa ini ia sangat terpenggil untuk meluruskannya, siapapun

pemimpinnya,” demikian kata Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial dalam keterangan pers resminya (Republika, Jumat (09/11/2018).

Sosok Kasman Singodimedjo merupakan tokoh yang bisa dikatakan unik. Ia termasuk orang yang *multi-talent* sehingga menempati banyak posisi strategis sekalipun pernah dipenjara di era Soekarno karena perbedaan ideologi kepartaian (Soekarno dengan Partai Nasional Indonesia/PNI, sedangkan Kasman Singodimedjo adalah Masyumi). Kasman Singodimedjo seperti yang termuat dalam beberapa sumber, semasa mudanya, aktif menjadi anggota organisasi *Jong Islamieten Bond* yang menjadi salah satu peserta Kongres Pemuda tahun 1928. Ia juga merupakan Komandan PETA (Pembela Tanah Air) Jakarta.

Dalam proses perumusan dasar negara, tokoh-tokoh Islam dengan teguh mempertahankan argumentasinya mengenai pentingnya Islam sebagai dasar negara yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Namun demikian, banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengakomodasi kepentingan kelompok lain (non-Muslim). Mohammad Hatta kemudian mendekati tokoh-tokoh Islam agar mengganti tujuh kata “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” demi persatuan bangsa. Penghapusan tujuh kata tersebut juga merupakan permintaan perwakilan Indonesia bagian Timur. Kasman Singodimedjo berupaya meyakinkan golongan Islam, termasuk Ki Bagus Hadikusumo, bahwa persatuan lebih penting. Akhirnya, tercapailah mufakat untuk menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan menggantinya jadi berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Latief, 2010).

Peran serta Kasman Singodimedjo dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin tampak ketika terjadi perdebatan tentang perlunya dasar negara Indonesia yang baru saja lepas dari penjajahan kolonial Belanda. Perdebatan terjadi sangat sengit namun produktif sehingga menelurkan gagasan Indonesia yang dapat dikatakan kosmopolit dan mendunia melampaui zamannya. Perdebatan dalam Sidang BPUPKI dan PPKI adalah sidang yang memperlihatkan bahwa

para pendiri bangsa ini memiliki wawasan yang sangat luas. Mereka memiliki wawasan keagamaan, khususnya keislaman, wawasan sejarah Eropa, Asia Timur, Timur Tengah dan Amerika karena bacaan mereka memang sangat luas.

SEKILAS TENTANG SOSOK KASMAN SINGODIMEDJO

Gelar Pahlawan Nasional diberikan kepada salah satu pendiri bangsa yang berlatar belakang Muhammadiyah, selain Ki Bagus Hadikusumo, adalah Mr. Prof. (Dr HC) Kasman Singodimedjo, pada Kamis, 8 November 2018. Oleh pemerintah, Kasman Singodimedjo dinilai telah turut berjasa dan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Revolusi fisik dan non fisik yang dilaluinya memberikan pelajaran yang sangat berharga terhadap bangsa ini. Ia merupakan tokoh yang sangat berkarakter kuat dan tidak pernah mengeluh dalam perjuangan. Mempertahankan pendapat dan prinsip menjadi salah satu karakteristik Kasman Singodimedjo, sang *Singa Podium*.

Kasman Singodimedjo terlahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang *Modin* (perkataan dari Muadzin), seorang yang melakukan tugas-tugas keagamaan dan sosial, mengurus orang sakit, orang meninggal, dan kenduri. Bahkan, semua urusan sosial keagamaan di Kampung Jawa adalah tugasnya. Ayahnya, Singodimedjo, pernah menjadi seorang juru tulis Desa (Carik/ Sekretaris Desa). Singodimedjo juga pernah menjadi seorang polisi yang ditugaskan ke Tabanan dan Denpasar Bali, kemudian ke Gunung Sugih Lampung Tengah. Kasman Singodimedjo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada 25 Februari 1904. Ia adalah anak pertama dari tujuh bersaudara. Tiga saudaranya meninggal sejak kecil. Oleh karena himpitan ekonomi dan kehidupan serba kekurangan itulah, hanya empat anak yang mampu bertahan hidup hingga dewasa. Ibunda Kasman sendiri adalah seorang perempuan desa biasa dan buta huruf latin.

Kasman kecil tinggal bersama keluarganya di Desa Clapar atau Kalirejo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Karisidenan Kedu, Jawa Tengah. Ia memiliki tiga saudara perempuan yakni Kasmah, Kasiyem dan Suryati (Panitia, 1982).

Sekalipun terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, Kasman Singodimedjo dengan segala daya dan upaya berhasil masuk sekolah HIS, MULO, STOVIA dan akhirnya masuk Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau *Rechts Hige Scholl* (RHS) sehingga mendapat titel (gelar) *Meester in de Rechten* (Mr) atau sekarang dikenal dengan sebutan Sarjana Hukum. Menurut primbon Jawa dan menurut perhitungan ayahnya, Kasman Singodimedjo dilahirkan tanggal 25 Februari 1904. Ada pula yang menyebutnya berdasarkan surat-surat yang ada, Kasman Singodimedjo bukan lahir pada tahun 1904, tetapi pada tahun 1908. Perbedaan tahun lahir tersebut terjadi karena perubahan yang dilakukan saat hendak bersekolah ke HIS di Kwitang Jakarta. Dalam dokumen yang dibutuhkan ditulis tahun 1908 sehingga diterima di Kelas Satu HIS.

Kasman muda agak nakal sebagaimana anak-anak muda desa pada umumnya kala itu. Beberapa kenakalan yang dilakukan misalnya mencuri makanan dan buah-buahan. Namun demikian, sosok Kasman Singodimedjo merupakan sosok yang sangat ulet-rajin dan giat bekerja sehingga pekerjaan mencuci pakaian dan membersihkan alat-alat dapur pun dikerjakannya. Apalagi ketika Kasman Singodimedjo menumpang di salah satu anggota keluarga di Magelang untuk sekolah, ia sangat tekun membantu pekerjaan apapun. "Oleh karena itu setelah saya pikirkan secara mendalam, saya mengambil keputusan untuk pindah ke Purworejo," kata Kasman, dalam *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Setelah itu, ia bersekolah di Kutoarjo dan Magelang (Panitia, 1982:5). Adapun adik perempuannya, Kasmah, telah bersekolah di Batavia, di sekolah Kristen HIS Met de Bijbel dengan biaya dari seorang sersan di Gewapende Poltie Batavia, bernama Gimana alias Tjokroredjo. Kasmah telah diambil sebagai anak angkat atau dipelihara oleh Gimana yang tinggal di dekat tangsi militer Senen dan Kasman Singodimedjo diperbolehkan tinggal di rumah Gimana bersama adik perempuannya. Oleh Gimana, beradik kakak ini disekolahkan di sekolah yang sama dan Kasman Singodimedjo pun boleh ikut ujian di Sekolah di mana Kasmah sekolah, oleh pihak sekolah (Kepala Sekolah) (Panitia, 1982: 5).

Ketertarikan Kasman Singodimedjo dalam dunia pergerakan tampaknya memang sudah menjadi bakatnya. Ia

terlibat dalam banyak organisasi pergerakan massa, bahkan termasuk menerbitkan media massa. Dari sini dapat dilihat betapa sosok Kasman Singodimedjo, pemuda yang aktif dan pemberani dengan siapapun yang dianggap melanggar hak-hak asasi manusia, memenjarakan seseorang dan meminggirkan. Sosok Kasman Singodimedjo yang pemberani terbawa sampai dewasa hingga menjadi tokoh nasional melalui Masyumi sebagai Wakil Ketua dan aktif di Muhammadiyah.

Sosok Kasman Singodimedjo mulai menyita perhatian khalayak pada tahun 1940. Saat itu, Kasman Singodimedjo sempat berucap “Untuk Indonesia Merdeka!” dalam sebuah rapat Muhammadiyah di Bogor, Jawa Barat. Ucapan tersebut terdengar oleh polisi rahasia Belanda (*Politiek Inlichtingen Dienst/PID*). Ia pun dicitrak dan didakwa bersalah. Hukumannya empat bulan penjara. Namanya muncul di sejumlah media cetak seperti *Pemandangan, Pandji Islam, Adil, dan Berita NU*. “Nama Kasman tiba-tiba muncul menjadi buah pembicaraan di kalangan kaum pergerakan baik yang berasas nasionalisme maupun Islam,” kata Saifuddin Zuhri, mantan Sekretaris Jenderal Nahdlatul Ulama (Panitia, 1982:357). Sungguh Kasman muda memang cukup menggemparkan, tetapi namanya kemudian hilang beberapa lama hingga masa pendudukan Jepang. Namanya mengemuka lagi ketika ia diangkat oleh Jepang sebagai *daidanco* atau komandan batalyon pasukan Pembela Tanah Air (PETA), jabatan tertinggi untuk orang Indonesia di PETA.

Kasman Singodimedjo sebenarnya tidak berkenan masuk PETA. Ini erat hubungannya dengan suara hatinya yang menolak segala macam bentuk penjajahan. Ia pun berupaya merekayasa kondisi fisiknya supaya tidak lulus tes kesehatan. “Selama beberapa hari saya mengurangi tidur, sehingga badan saya tampak lesu, muka pucat dan mata menjadi kemerah-merahan. Saya juga berusaha agar air kencing saya menjadi kuning” (Panitia, 1982). Akan tetapi, hasil pemeriksaan kesehatan menyatakan Kasman Singodimedjo sehat dan layak menjadi *daidanco* Jakarta. Masuk PETA ternyata memperluas jaringan dan pengetahuannya. Ia semakin mengetahui watak asli orang Jepang dan penderitaan rakyat akibat pendudukan Jepang.

Ketika pemimpin militer Jepang di Indonesia meminta seluruh anggota PETA untuk menyerahkan senjatanya, Kasman Singodimedjo menolak perintah tersebut. Ia justru mengajak *daidanco* lainnya melakukan hal serupa dalam pertemuan para *daidanco* di Bandung. Sebagian *daidanco* mengiyakan ajakannya dan sebagian lainnya menolak. Hal ini terjadi ketika Jepang berada di ujung kekalahan pada 16 Agustus 1945. Sehari setelah pertemuan para *daidanco*, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kasman Singodimedjo sendiri masih di Bandung. Malam hari pukul 19.30, ia bergerak menuju ke Jakarta. "Kasman Singodimedjo dipanggil oleh Proklamator Bung Karno itu, diangkat menjadi anggota tambahan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia." (Panitia, 1982).

Jiwa aktivis dan gerakan terus bergelora, Kasman Singodimedjo sempat pula dituduh terlibat dalam pemberontakan yang dilakukan PRRI/Permesta sehingga mengalami nasib harus dipenjarakan tanpa pengadilan oleh Soekarno. Nasib nahas menimpa Masyumi pada akhir dekade 1950-an. Sebab, anggotanya terlibat dalam PRRI/Permesta sehingga memperuncing konflik mereka dengan Soekarno. Masyumi menjadi partai terlarang pada awal 1960-an dan Kasman Singodimedjo kemudian ditangkap pada November 1963 atas tuduhan upaya membunuh Presiden. Namun, Mohammad Roem dalam *Bunga Rampai Dari Sedjarah 3* menyebut tuduhan itu tidak pernah terbukti. Namun, demikian, Kasman Singodimedjo tetap dipenjara hingga 1966, ketika kekuasaan Soekarno mulai melemah.

Hal yang paling hebat ditunjukkan oleh Kasman Singodimedjo adalah ketika bebas dari penjara. Ia tidak dendam pada Soekarno. Sekeras apapun pertentangannya dengan Soekarno pada 1950-an, ia tetap menghargainya sebagai pemimpin besar dan sesama manusia. Bahkan, Kasman Singodimedjo turut mengantar jenazah kepergian Proklamor RI ini ke peristirahatan terakhirnya di Blitar pada Juni 1970. Demikian kesaksian A.M. Fatwa, mantan sekretaris pribadi Kasman Singodimedjo (Panitia, 1982:356). Itulah sosok pejuang, pahlawan, pemimpin revolusi melalui banyak organisasi pergerakan, seperti Muhammadiyah dan Masyumi sebagai basis utamanya. Terdapat banyak

pelajaran dan hikmah yang dapat diambil dari sejarah hidup dan perjuangan Kasman Singodimedjo dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kita tentu bisa berharap akan tumbuh dan bertambah tokoh pergerakan era sekarang yang memiliki kewibawaan, martabat, jiwa, integritas, dan fondasi yang kokoh dalam keagamaan (keislaman) dan nasionalisme keindonesiaan.

GAGASAN NEGARA MODERN DALAM KOLONI BELANDA

Pada paruh abad ke-19, dunia Islam mengalami keguncangan besar dikarenakan Turki mengalami kekalahan. Negara-negara di Eropa Timur, memerdekakan diri dari koloni Turki. Negara seperti Serbia, Bulgaria, Rumania, dan Yunani satu demi satu memproklamirkan dirinya “bebas dari Kerajaan Turki” yang memiliki kekuatan super *power* pada awal abad ke-19. Ilmuwan Muslim ternama Muhammad Abduh (1840-1905), serta Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935) memaparkan pandangannya bahwa jika Islam ingin tetap bertahan di muka bumi dalam percaturan peradaban modern, maka harus diperbaharui. Untuk itu, umat Islam harus memperbaiki diri dari segala bentuk kejumudan dan kembali pada dasar-dasar Islam yang otentik yakni al-Qur’an dan Hadis. Sebab, dari sinilah dasar otentik untuk umat Islam berijtihad (Simbolon, 2009).

Penjelasan di atas menjadi penting di sini jika dikaitkan dengan pandangan Kasman Singodimedjo tentang negara modern yang hendak didirikan, yang kelak bernama Republik Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, pergerakan-pergerakan lahir silih berganti karena adanya pelarangan dari pemerintah Belanda. Pelarangan terhadap Sarekat Islam (SI) tanggal 10 Agustus 1912 yang didirikan oleh Haji Samanhoedi di Laweyan Solo adalah salah satu bentuk pelarangan yang paling nyata. Namun, setelah Sarekat Islam dilarang beraktivitas oleh pemerintah Belanda, pada tanggal 06 September berdirilah pergerakan baru di Bandung bernama *Indische Partij* (IP) atau Partai Hindia. IP berbeda dengan Boedi Oetomo dan SI yang hendak memperjuangkan kelompok tertentu dalam naungan pemerintahan jajahan. IP hendak menyatukan seluruh penduduk yang mengakui Hindia sebagai tanah air mereka untuk mencapai “Hindia bebas dari Belanda”

(*Indie los van Holland*). Hal ini dengan sangat tegas dicantumkan sebagai tujuan organisasi *Indische Partij* (Simbolon, 2009).

Pelarangan atas berbagai organisasi pergerakan yang tumbuh di Hindia Belanda, tampaknya memberikan pelajaran serius untuk organisasi massa seperti SI yang pernah dilarang oleh Belanda di Residen Surakarta. Oleh karena itu, SI berusaha bangkit lagi dengan gagasan dan wajah yang baru sehingga Pemerintah Belanda tidak memberangusnya. Benar, SI kemudian berdiri kembali di luar Surakarta sebagai daerah larangan. SI berdiri kembali dengan Ketua Komisi Pusat Samanhoedi dan Wakilnya Tjokroaminoto. Setelah berdiri kembali dengan gagasan dan wajah baru, SI mendeklarasikan dirinya dengan tujuan yang lebih lunak dari sebelumnya yakni (1) memajukan perdagangan Bumiputra; (2) membantu anggota dalam kesulitan yang timbul bukan karena kesalahannya; (3) menaikkan tingkat hidup Bumiputra, materiil, dan spiritual; (4) mengikis salah paham tentang Islam serta memajukan kehidupan beragama Bumiputra sesuai dengan hukum agama tersebut. Semua tujuan tersebut hendak dicapai melalui jalan yang tidak bertentangan dengan ketertiban dan keamanan serta kesusilaan. Tjokroaminoto menegaskan bahwa SI bukanlah partai politik, tidak menghendaki revolusi dan setia kepada pemerintah (Simbolon, 2009).

Sarekat Islam pun berdiri dan tidak dilarang lagi oleh pemerintah Belanda. SI inilah yang sejak awal sebenarnya menjadi embrio organisasi pergerakan yang menghendaki adanya negara merdeka sebagai sebuah gagasan negara modern bersama dengan Boedi Oetomo, *Indische Partij*, dan Jong Islamieten Bond. Setelah terjadi kemenangan Partai Kristen Liberal di Hindia Belanda, pelarangan-pelarangan pendidikan agama dan pemisahan agama dan politik akhirnya dibuang. Di Hindia Belanda, sekolah-sekolah swasta boleh menyelenggarakan pendidikan agama untuk semua agama siswa Bumiputra atau non Bumiputra. Ini merupakan titik awal kebangkitan negara jajahan Nedherlands yang akhirnya merdeka sebagai negara modern di Asia (Latief, 2010).

Ada hal yang menarik dalam hubungannya dengan SI ketika masih dilarang oleh pemerintah Belanda di Yogyakarta.

Saat itu, KH. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi modern bernama Muhammadiyah, pada tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah didirikan sesuai dengan pemikiran Jamaluddin al Afghani, Muhammad Abduh, dan M. Rasyid Ridha. Tujuan pokoknya adalah menyebarkan Islam kepada Bumiputra di seluruh Jawa-Madura dan meningkatkan kehidupan beragama di kalangan anggotanya. Dengan sengaja, sejak awal Muhammadiyah menghindari lapangan politik yang penuh kesulitan dan bahaya. Muhammadiyah segera mendirikan sekolah, rumah sakit dan lembaga lain untuk melayani masyarakat. Sebulan setelah dibentuk, yakni pada tanggal 20 Desember 1912, Muhammadiyah meminta agar pemerintah Belanda mengakuinya sebagai Badan Hukum. Pemerintah Belanda pun mengakui Muhammadiyah sebagai organisasi yang wilayah kerjanya adalah Karesidenan (Residen Yogyakarta) saja bukan Yogyakarta dan Madura. Namun, pemerintah membuka pintu untuk membuka cabang-cabangnya di seluruh Yogyakarta (Simbolon, 2009).

Taktik untuk tidak mengurus lapangan politik akhirnya ditiru oleh organisasi pergerakan lainnya yang sebelumnya dilarang seperti Boedi Oetomo (BO), Indische Partij (IP), ataupun Sarekat Islam. Organisasi pergerakan ini mengikuti SI yang baru di bawah Samanhudi dan Tjokroaminoto serta Muhammadiyah di Yogyakarta. Rokeoan Minahasa berdiri di Semarang, di Minahasa berdiri Perhimpunan Beasiswa Minahasa dengan F. Laoh sebagai Ketua dan WJM. Ratulangi sebagai Wakil ketua. Berdiri pula Darmo Woro yang merupakan nama lain dari Boedi Oetomo. Demikian seterusnya, sampai akhirnya organisasi-organisasi massa ini bergerak untuk mempersatukan Bumiputra sehingga merdeka dari penjajah Belanda (Latief, 2012).

REVOLUSI MENUJU KEMERDEKAAN RI

Salah satu hal penting menjelang Indonesia merdeka adalah adanya persiapan menuju kemerdekaan tersebut. Jika ada persiapan kemerdekaan, entah sampai kapan bangsa ini hendak merdeka dari kolonial yang telah cukup lama “menghisap nusantara”. Panitia Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) adalah bukti otentik tentang kemerdekaan bangsa ini. Oleh karena itu, bangsa ini pun dapat menikmati kemerdekaan atas dasar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tentu dengan segala kekurangan yang ada. Karena kemerdekaan adalah gerbang pertama menuju pembangunan Indonesia setelah melepaskan diri dari penjajahan. Bung Karno menyatakan: "Kemerdekaan merupakan pintu gerbang untuk membangun bangsa!" (Latief, 2012).

Pada tanggal 07 Agustus 1945 atas persetujuan Komando Tertinggi Jepang, Jendral Terauchi, di Saigon dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritsu Junbi Inkai*. Pada struktur kepengurusan panitia ini, Soekarno diangkat sebagai ketua, sedangkan M. Hatta bertindak sebagai wakil ketua. PPKI ini mulai bekerja pada tanggal 09 Agustus 1945. Tugasnya adalah menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kemerdekaan, terutama mengenai UUD yang rancangannya telah ada, dan akan diserahkan kepada PPKI untuk diterima dan disahkan (Juniarto, 1996; Gie, 1993). Para anggota PPKI diizinkan untuk melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri, tetapi mereka diwajibkan memperhatikan dua hal, yaitu (1) syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan ialah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia; karena itu, bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya, dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya; (2) Negara Indonesia itu merupakan anggota lingkungan kesemakmuran bersama di Asia Timur Raya, maka cita-cita bangsa Indonesia itu harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat *Hakko Ichiu* (Poesponegoro & Notosusanto, 1992:77).

Anggota PPKI semula hanya 21 orang, namun kemudian atas usul Soekarno, ditambah menjadi 27 orang termasuk ketua dan wakilnya (Mahfud, 1993). Menurut rencana, PPKI akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945, sedangkan kemerdekaan Indonesia akan disahkan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945 (Gie, 1993). Rencana untuk kemerdekaan pada

24 Agustus itu, pada akhirnya berbeda sama sekali. Sekali lagi, medan Perang Pasifik ikut mempengaruhi kondisi sosial politik di Indonesia. Pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat dan penyerbuan pasukan Uni Sovyet ke Manchuria yang dikuasai Jepang besar pengaruhnya atas ketegaran Jepang terhadap perang pasifik. Dengan kondisi Perang Pasifik yang sudah sangat kritis tersebut, maka pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, suatu kondisi yang sangat tidak diduga sama sekali oleh para pemimpin bangsa Indonesia saat itu.

Setelah kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, maka keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk pertama kalinya. Dalam sidang tersebut, para anggota berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) hasil rancangan Panitia Kecil di dalam Panitia Hukum Dasar, yang diketuai oleh Soepomo. UUD ini kemudian dikenal sebagai UUD 1945. Meskipun demikian, UUD 1945 tidak sama persis dengan rancangan UUD yang dibuat oleh Panitia Kecilnya Soepomo. Ada beberapa perbedaan, yaitu; (1) Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan; (2) Sila Pertama yang semula (dalam Piagam Jakarta) berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan kalimat: "Ketuhanan Yang Maha Esa"; (3) Pasal 6 yang semula (dalam batang tubuh UUD) berbunyi: "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam", diganti dengan "Presiden ialah orang Indonesia asli"; (4) Pasal 28 yang semula (dalam batang tubuh UUD) berbunyi "Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti dengan "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; (5) (pasal ini kemudian menjadi Pasal 29) (Mahfud, 1993: 52; Bahar, dkk., 1995: 414-415); (6) Wakil presiden yang semula dua diubah menjadi satu (Mahfud, 1993: 20).

Peristiwa bersejarah tersebut merupakan hal yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Oleh karena itu, bangsa ini perlu mengambil hikmah dari sejarah pembentukan PPKI dan perjuangan para pendiri bangsa. Para pendiri bangsa telah

tiada. Mereka telah kembali menghadap sang khalik. Namun, jasa-jasa mereka tidak bisa dianggap remeh. Bangsa Indonesia harus berterima kasih kepada para pendiri bangsa yang telah berjuang di hadapan senapan-bedil, meriam dan molotov demi memperjuangkan hak-haknya sebagai bangsa. Mereka semua telah berani dan rela mengorbankan apa saja yang dimiliki. Oleh karena itu, menjadi tidak bijaksana jika ada pihak yang hendak mengubah apa yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa, seperti mengubah dasar negara, Pancasila, dengan dasar lain.

Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Syarikat Islam (SI), dan Persatuan Islam (Persis) pun telah bersepakat bahwa negara Pancasila ini harus terus dipertahankan. Tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dari seluruh sila-sila Pancasila. Para perumus Pancasila sebagai dasar negara merupakan pemimpin bangsa yang visioner. Mereka semua tidak meninggalkan egoisme individual, kesukuan, etnisitas, kelompok, dan agama sehingga memungkinkan adanya titik temu dalam merumuskan dan mendeklarasikan sebuah negara merdeka bernama Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan bukan negara agama. Kita mengetahui bahwa umat Islam sejak berdirinya republik hingga sekarang merupakan umat mayoritas dalam hal jumlahnya, tetapi tidak memaksakan kehendaknya melalui para pemimpin bangsa seperti H. Agus Salim, KH. Abdul Wahid Hasyim, Abikusno Cokrosuyoso, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo bahkan Soekarno dan Mohammad Hatta untuk memilih Islam sebagai dasar negara. Oleh karena itu, jika saat ini ada kelompok masyarakat dengan atas nama umat Islam menghendaki adanya perubahan dasar negara Pancasila menjadi negara agama, bahkan hendak mengubah negara bernama Republik Indonesia menjadi negara dengan nama yang lainnya, sejatinya merupakan generasi yang melawan sejarah. Generasi demikian adalah generasi yang tidak menghargai jasa para pendiri bangsa. Sikap bangsa saat ini adalah mengisi kemerdekaan, bukan mengubah dasar dan bentuknya. Sebab, seluruh sila yang terdapat dalam Pancasila tidak satu pun bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam (PP Muhammadiyah, 2015).

Apa yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa merupakan “jalan revolusioner” untuk perubahan sebuah bangsa. Peran pelbagai anak bangsa mendukung pergerakan revolusi fisik ditunjukkan dengan mengangkat senjata. Mengangkat bedil, parang, tombak, senapan, bambu runcing dan granat adalah sebuah peristiwa “revolusioner.” Inilah parade sejarah yang sesungguhnya, bukan parade atau festival sejarah pertunjukan kekuasaan yang arahnya adalah perpecahan karena egoisme kesukuan, keagamaan, kepertaian serta keterpurukan pikiran dalam kekalahan pertarungan. Parade sejarah adalah sebuah parade keadaban yang mampu memajukan bangsa dan membawa dalam “kebebasan asasi umat manusia.” Parade sejarah merupakan parade di mana umat manusia dapat hidup bersama, berdampingan, saling membantu atas dasar kesamaan derajat dan martabat kemanusiaan asasi. Inilah yang akan menolong kita dari keterjajahan dan keterpurukan sejarah bangsa.

KASMAN SINGODIMEDJO DAN ISLAM

Kasman Singodimedjo, sekali lagi, adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam pergerakan Indonesia. Bahkan, dalam Sidang BPUPKI bersama Panitia 9 pun, ia sangat berpengaruh. Semangat keislamannya memberikan warna tersendiri dalam menyampaikan gagasan di depan Sidang PPKI yang diketuai Soekarno. Sebab, sejak masa mudanya diisi dengan perjuangan lewat organisasi-organisasi Islamis. Ia pernah menjadi anggota organisasi *Jong Islamieten Bond* yang ikut Kongres Pemuda pada tahun 1928, membentuk *Partai Islam Indonesia* pada tahun 1938, serta menjadi aktivis Muhammadiyah, tokoh Masyumi, wakil Ketua semasa M. Natsir.

Kasman Singodimedjo, seperti yang telah disinggung di muka, bersama tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, tergabung dalam PPKI. Ia diberi tugas membujuk sikap politik Ki Bagus Hadikusumo yang hendak mempertahankan pendapatnya terkait tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Usaha ini pun berhasil. Kepentingan bersama seluruh bangsa akhirnya mengubah keputusannya untuk tetap mempertahankan tujuh kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di

dalamnya tertuang sila-sila Pancasila. Sebagai tokoh Islam dan aktivis Muslim, Kasman Singodimedjo tidak pernah ragu dengan kebenaran agamanya. Akan tetapi, juga bersifat sangat terbuka dengan gagasan-gagasan pembaruan bahkan nasionalisme yang dijunjung tinggi di atas kepentingan kelompok dan agamanya. Kasman Singodimedjo senantiasa mendahulukan kepentingan tanah air. Tidak ingin menang sendiri dengan egoisme politik dan ideologi keagamaan yang dianutnya. Hanya saja, karena persoalan politik yang terjadi sangat sengit, terjadi pertarungan politik “garis keras komunis” dengan kaum pergerakan lainnya.

Kasman Singodimedjo bahkan pernah dituduh menjadi bagian dari gerakan pemberontakan PRRI/Permesta. Sebagaimana pernah dikemukakan Daniel (1982), Kasman Singodimedjo pernah kena kasus mendukung Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Iswara N Raditya, (2019) menyebutkan bahwa Kasman Singodimedjo dituduh telah memberi bantuan kepada “musuh” yaitu pemimpin-pemimpin PRRI Sumatera melalui pidatonya di Bioskop Roxy, Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 31 Agustus 1959. Pada saat itu, pertarungan ideologi benar-benar terjadi sangat keras. Semua partai yang oleh rezim politik dituduh mendukung pemberontakan kemudian memprotes kebijakan Abdul Haris Nasution sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Menteri Abdul Haris Nasution memerintahkan penangkapan Kasman Singodimedjo pada tanggal 05 September 1959, berbarengan dengan pelarangan aktivitas Masyumi, PSI, Parkindo, dan IPKI di daerah yang bergolak meliputi Tapanuli, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, dan kepulauan dekat Irian, serta Nusa Tenggara. Sementara itu, PNI, NU, dan PKI mendukung kebijakan Nasution dan mengutuk Kasman Singodimedjo serta partai-partai yang dilarang oleh rezim tersebut.

Kasman Singodimedjo pun ditahan mulai tanggal 05 Desember 1958 di rumah tahanan militer Jakarta. Pada tahun 1960, perkaranya disidangkan di Pengadilan Magelang. Akan tetapi, diplomat ulung Mohamad Roem memberikan pembelaan pada Kasman Singodimedjo. Bahkan, ada enam nama lainnya yang ikut memberikan pembelaan kepada Kasman Singodimedjo.

Mereka berganti membacakan pembelaan, sehingga total waktu pembacaan pembelaan atas Kasman Singodimedjo adalah 12 jam 20 menit. Meski terdapat pembelaan panjang yang dibacakan, namun Kasman Singodimedjo tetap dijatuhi hukuman penjara. Hakim memutus hukuman untuknya yakni 3 tahun penjara, dipotong masa tahanan menjadi 2 tahun. Namun, Jaksa penuntut umum naik banding, karena tuntutan jaksa adalah 4 tahun.

Di lingkungan Muhammadiyah, sosok Kasman Singodimedjo memang tidak setenar Ki Bagus Hadikusumo ataupun KH. AR. Fachruddin. Sebab, Kasman Singodimedjo tidak pernah menjadi Ketua Umum Muhammadiyah. Namun demikian, prinsip keislaman dan pergerakannya sungguh tidak bisa dipandang remeh. Kasman Singodimedjo seorang hakim yang ulung. Penguasaannya terhadap ilmu agama pun Islam mumpuni. Ia adalah sosok pemberani, bertanggung jawab, dan tidak pendendam. Inilah sosok pejuang dan organisatoris ulung dari Muhammadiyah untuk bangsa ini (Thontowi, 2013). Yudi Latief, menyebut bahwa Kasman Singodimedjo merupakan pahlawan yang sangat lapang pikirannya dan wawasannya mendunia. Kasman Singodimedjo tidak sektarian sehingga tidak berkehendak memaksakan pendapatnya pada saat sidang BPUPKI bersama dengan tokoh lainnya dari Muslim dan non Muslim seperti AA. Maramis. Kasman Singodimedjo juga terbukti sebagai sosok Muslim yang taat, tegas dan nonkompromis. Hal tersebut dilakukan demi keutuhan bangsa dan persatuan negara yang baru merdeka tidak ingin paham kenegaraan yang dikehendaki menjadi pilihannya (Latief, 2012).

Pandangan keislaman, nasionalisme dan cinta tanah air yang dimiliki Kasman Singodimedjo sangat perlu mendapatkan perhatian. Sosok Kasman Singodimedjo yang tegas beragama, kuat dalam pendirian, ternyata sangat lemah lembut dengan lawan politiknya, yakni Soekarno yang telah memenjarakannya semasa terjadi konfrontasi ideologi politik dengan PNI dan Partai Kristen Indonesia. Kasman Singodimedjo tetap mengantarkan jenazah sang Proklamator hingga liang lahatnya. Inilah wujud cinta Kasman Singodimedjo terhadap sang Proklamator. Ia tetap hormat meskipun memiliki ideologi politik yang berbeda,

termasuk Kasman Singodimedjo tidak menjadikan gagasan Negara Islam sebagai pilihan politik Negara Indonesia.

MENEGOSIASIKAN ISLAM SEBAGAI DASAR NEGARA

Kasman Singodimedjo yang sangat kuat pendirian pada prinsip keagamaan dan kenegaraan menjadi sosok yang penting dalam perumusan Dasar Negara Republik Indonesia ketika hendak diproklamirkan. Kasman Singodimedjo bersama Ki Bagus Hadikusumo ketika itu dari Muhammadiyah, bersama KH. Abdul Wahid Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso mengehendaki Indonesia berdasarkan agama Islam. Alasan sebenarnya sederhana, Islam dalam pandangan Kasman Singodimedjo dan kawan-kawan telah mengatur semua hal untuk menjadikan sebuah negara makmur dan sejahtera. Namun, benar adanya bahwa detail bagaimana operasionalisasinya tidak tercantum di dalam al-Quran bahkan dalam hadis/sunnah nabi.

Sebagai salah satu representasi umat Islam ketika itu, Kasman Singodimedjo diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan-gagasannya terkait dengan Dasar Negara yang akan dibentuk. Ia pun membawakan pidato dalam Sidang BPUPKI-PPKI bersama kawan-kawan lainnya. Dalam pidatonya, Kasman Singodimedjo demikian runtut memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi gagasannya. Ia berkehendak bahwa negara yang akan diproklamirkan adalah negara berdasarkan Agama Islam sebab inilah yang diyakini sebagai Dasar Negara sempurna, bukan yang lainnya.

Terkait dengan pandangannya mengenai dasar Islam sebagai dasar negara, pada pidato di Konstituante Republik Indonesia, yang kemudian dinegosiasikan secara mufakat dalam Sidang PPKI, dapat dilihat sebagaimana kutipan berikut:

“Adapun pentingnya dasar negara tidak perlu lagi dikemukakan. Oleh karena, negara itu merupakan soko guru (tiang pokok) dari suatu negara dan segala tiang-tiang yang lain adalah berpangkal dari dasar negara itu. Oleh sebab itu, alasan-alasan bagi penetapan dasar negara haruslah: pertama universal dan dialektis Indonesia. Di dalam mencari alasan-alasan yang universal kuat

guna menetapkan dasar negara kita, mau tidak mau kita sampai pada pengertian “kedaulatan.” Apa yang harus kita perdaulatkan? Apa yang kita anggap sesuatu sebagai berdaulat, sebagai yang berkuasa sendiri? Maka bertemulah kita kepada empat pengertian, yakni: kedaulatan rakyat, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan Allah.” (Panitia, 1982:449).

Gagasan Kasman Singodimedjo tentang kedaulatan yang terdiri dari empat hal di atas merupakan landasan fundamental tentang sebuah negara yang merdeka. Merdeka dalam arti, merdeka dari penjajahan sesama umat manusia yang diciptakan Tuhan dengan segala harkat dan martabatnya. Manusia merdeka adalah manusia yang berdaulat, bukan manusia terjajah secara mentalitas maupun materialitas. Oleh karena itu, jika sepakat dengan gagasan Kasman Singodimedjo sejatinya bangsa ini merupakan bangsa yang harus terbebas dari berbagai macam jeratan “artifisial” belenggu kekuasaan politik duniawi yang sering menyesatkan, mengkaburkan, serta membuat kalap banyak orang. Orang menjadi tidak menyadari jika dirinya berperilaku melampaui kehendak Tuhan, sang pencipta, sehingga menindas sesama anak bangsa. Seseorang yang memiliki jabatan bertindak semena-mena kepada bawahannya/anak buahnya karena merasa paling memiliki hak atas apa yang dimilikinya. Seorang pendiri partai politik atau penasehat partai politik merasa paling berhak atas apa yang akan dilakukan, apa yang dikehendaki anak buahnya atau anggotanya sehingga setiap anggota yang berlawanan dengan pendapatnya akan dihabisi (dipaksa untuk mundur) dengan macam-macam alasan yang dibuatnya.

Setelah menguraikan empat dasar kedaulatan bernegara dan berbangsa, Kasman Singodimedjo kemudian menjelaskan Islam sebagai dasarnya, yang menurutnya merupakan objektivasi dari kondisi Indonesia yang sebenarnya. Islam tidak bertentangan dengan demokrasi-musyawaharah mufakat. Secara panjang lebar, Kasman Singodimedjo mengatakan:

“Dengan penyelidikan yang tidak usah mendalam, maka terbuktilah segera bahwa Islam itu adalah faktor nasional Indonesia yang terpokok dan menguasai rakyat Indonesia.

Apalagi dengan penyelidikan yang objektif dan agak mendalam, maka terbuka bahwa Islam itu adalah agama universal dan bersumber kepada kedaulatan Allah yang memungkinkan adanya dan menjiwai kedaulatan rakyat, kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. Berdasarkan kepada kedaulatan tersebut, maka Islam mewajibkan demokrasi yang berdasarkan musyawarah di atas wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu sendiri, demokrasi yang mendudukkan kebenaran hak. Islam mewajibkan pemimpin rakyat, pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan, penuh bertanggung jawab kepada rakyat. Islam itu memberantas kemelaratan dan kemiskinan. Islam juga menegakkan kemakmuran lahir dan batin atas dasar hidup keagamaan antara golongan dan kelas. Islam meletakkan dasar hidup antara bangsa-bangsa, antara suku bangsa dan suku bangsa lainnya, dasar saling menghargai, memberi dan menerima. Dan membersihkan hidup bangsa dan suku bangsa dari chauvinisme dan rasialis (*ashobiyah jahiliyah*) sehingga perdamaian dapat tercapai. Islam menjamin dan mempertahankan kemerdekaan menganut dan menjalankan agama oleh pemeluknya masing-masing. Islam menjamin hak-hak asasi manusia antara kaum wanita dan kaum pria, dengan tidak mengurangi kenyataan, bahwa perbedaan sifat dan bakat antara kaum wanita dan pria membawa pula pembagian tugas dan lapangan pekerjaan bagi masing-masing kaum. Oleh sebab itu, berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dasar negara yang seharusnya ditetapkan tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah Negara Republik Indonesia Berdasarkan Islam” (Panitia, 1982: 457-458).

Hal yang menarik dari pidato tersebut terkait dengan kedaulatan sebuah negara adalah uraiannya yang mendasarkan pada ajaran agama Islam yang dipahami dan dianut oleh Kasman Singodimedjo. Sekalipun berkehendak bahwa Republik Indonesia seharusnya berdasarkan Islam, pada kenyataannya, uraiannya sangat mencerminkan sebagai seorang nasionalis sejati. Uraiannya memberikan makna bahwa dalam dasar negara yang saat ini kita ikuti yakni Pancasila dengan lima sila sejatinya tidak ada yang bertentangan dengan gagasan Kasman Singodimedjo sehingga dapat diterima. Inilah jiwa nasionalis seorang Kasman Singodimedjo yang mampu menegosiasikan kehendak

pribadinya sebagai seorang tokoh Muslim di antara berbagai tokoh bangsa yang menghendaki lepas dari penjajahan – koloni-koloni yang menindas.

Kasman Singodimedjo dapat ditempatkan sebagai salah satu peletak dasar ideologis republik ini sehingga berdiri sampai sekarang. Perdebatan yang dilakukan di Sidang BPUPKI bersama-sama dengan Mohammad Yamin, Mohammad Hatta, Soekarno, dan lainnya memberikan pelajaran yang sangat berharga. Apa yang disampaikan bukanlah suatu gagasan tanpa landasan etik dan pengetahuan yang mumpuni. Akan tetapi, sungguh jelas mencerminkan seseorang dengan wawasan luas serta menguasai permasalahan bangsa dan rakyatnya. Inilah sebenarnya pemimpin bangsa.

Nasionalisme Kasman Singodimedjo dalam pembelaan terhadap rakyatnya dapat juga diperhatikan dari pidatonya sebagai Anggota Pengurus Besar di Majelis Jong Islamieten Bond di Batavia tahun 1925. Ia menyampaikan:

“Adalah suatu kenyataan yang nyata dan tidak dapat dibantah, bahwa terdapat keterasingan antara golongan intelektual dengan rakyat. Antara golongan intelektual dengan rakyat benar-benar ada jurang yang lebar, yang harus dijembatani jika kita benar-benar ingin menjadi pemimpin rakyat. Di mana rakyat dari segi manapun merupakan golongan terhina, rendah dan dianggap rendahan di masyarakat. Selama jurang ini masih terus menganga, maka setiap semboyan idealis tentang cinta tanah air dan nasionalisme hanya merupakan suatu yang cemplang (kosong) dan hampa. Sejauhmana kita sudah terasing dengan rakyat? Hal ini akan menjadi jelas jika saudara-saudara memperhatikan berbagai sebab. Bahasa, yang kita pergunakan, gaya hidup kita seperti Eropa dan sejenisnya dan buta kepada hati nurani rakyat” (Panitia, 1982: 435-436).

Pidato yang disampaikan Kasman Singodimedjo di atas menunjukkan bahwa sebagai seorang pemimpin, tidak bisa hanya memperkaya, mempertinggi jabatan, serta mencari keuntungan material semata. Seorang pemimpin hendaknya benar-benar memperhatikan rakyat yang dipimpinnya. Bagaimana keadaan rakyatnya, bagaimana kehidupannya, bagaimana nasibnya serta

bagaimana rakyat memiliki masa depan. Seorang pemimpin bukanlah mereka yang hidup dalam gelimang harta benda-material, hidup dalam glamor, pesta pora kemewahan duniawi, serta *perlente* dengan penggunaan bahasa yang rakyat tidak memahaminya. Seorang pemimpin adalah yang mampu mendengarkan “denyut nadi jantung rakyatnya”.

Hal inilah yang hendak diajarkan oleh Kasman Singodimedjo kepada para pemimpin partai politik, pergerakan, organisasi ataupun perkumpulan banyak orang lainnya. Dalam hal ini, pemimpin tidak harus “menjauhkan diri dari rakyat.” Seorang pemimpin tidak perlu menjadikan dirinya “sebagai tuan dan puan” karena rakyatnya mengabdikan dan bersujud di hadapannya. Bahkan, seorang pemimpin tidak perlu rakyatnya merasa ketakutan jika diperlakukan diskriminatif atau pun disingkirkan karena mengkritik dan memberikan kontribusi pemikiran demi kemajuan bangsanya. Inilah warisan Kasman Singodimedjo untuk bangsa ini. Saat ini, banyak pemimpin (ketua partai politik, ketua ormas keagamaan dan ormas non keagamaan, serta lainnya), bahkan ketua perkumpulan lebih menampakkan diri sebagai “pejabat” dan “birokrat” yang harus didengarkan pendapatnya, harus dipercaya bicarannya, dan cenderung memaksakan kehendaknya. Anehnya lagi, rakyat dan kita semua tidak berani mengatakan “TIDAK” di hadapannya. Sungguh suatu hal yang sangat berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo.

Nasionalisme Kasman Singodimedjo sangat jelas dalam membela Indonesia agar menjadi bangsa yang mendunia. Dalam pandangannya, nasionalisme tidak bertentangan dengan Islam, bahkan Islam menganjurkan nasionalisme karena ini adalah bagian dari bagaimana menduniakan Islam sehingga banyak orang mengenal ajaran Islam yang penuh dengan kebajikan. Kasman Singodimedjo berpendapat bahwa:

“Nasionalis-nasionalis idealis dari suku Jawa, Sunda, Minang, Batak dan lain-lain, yang bercita-cita menghidupkan kembali kejayaan masa lampau-masa silam, seolah-olah Jong Islamieten Bond hendak menjadikan Islam sebagai paham internasional sebelum kita memiliki kesadaran

nasional, merupakan kesalahan besar. Hal yang sebenarnya adalah bahwa anjuran berbuat baik, mengisi negara dengan hal terbaik merupakan anjuran dari Islam. Demikian itulah sifat internasional di dalam Islam. Islam tidak menolak nasionalisme apalagi membuang nasionalisme. Hal ini tidak perlu memiliki keahlian handal dalam ilmu menafsir. Sebab dengan adanya ajaran bermacam-macam suku bangsa, warna kulit, etnis, disebutkan sebagai tanda-tanda kebijaksanaan dari Allah. Adanya perbedaan ini membawa manusia pada kemajuan. Dengan saling menerima dan saling mengisi maka kemanusiaan akan semakin tambah berkembang maju, ilmu pengetahuan dan peradaban akan bertambah meluas. Tetapi sebelum sampai ke sana pada setiap umat manusia harus memiliki (dan timbulkan) akan rasa cinta tanah air dan bangsa” (Panitia, 1982: 446-447).

Gagasan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai *darul ahdi wa syahadah* pada Mukhtamar di Makassar pada tahun 2015 merupakan tonggak yang sangat nyata dari Muhammadiyah atas dukungannya pada Pancasila. Muhammadiyah berpandangan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila merupakan negara yang lahir atas dasar kesepakatan bersama seluruh elemen bangsa yang telah berjuang dalam melepaskan diri dari penjajahan baik fisik maupun non fisik, material dan spiritual. Oleh karena itu, masyarakat Islam khususnya warga Muhammadiyah hendaknya menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang secara terus-menerus dan tegas mengisi negara dengan aktivitas kebangsaan dan kemanusiaan demi kemaslahatan dan kemajuan bangsa. Aktivitas terbaiklah yang menjadi kesaksian umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas. Bukan berbagai aktivitas vandalisme yang mengancam dan merugikan bangsa ini (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015). Pernyataan resmi tersebut memperjelas posisi Muhammadiyah. Sebagaimana juga posisi Kasman Singodimedjo yang semula berkehendak menjadikan Dasar Negara Republik Indonesia dengan Dasar Islam, namun setelah bernegosiasi dengan kepentingan bangsa dan negara, sebagai bentuk nyata nasionalisme maka ia pun tidak memaksakan pendapatnya hanya untuk kepentingan golongan-kelompok suku tertentu.

Sebagai salah satu kader Muhammadiyah yang telah menjadi Pahlawan Nasional, sumbangan Kasman Singodimedjo tidaklah kecil. Muhammadiyah tidak perlu pula berkecil hati atas organisasi modern yang memiliki jamaah cukup banyak jumlahnya (dikatakan mencapai 45 juta jiwa). Atau jika tidak berlebihan sebagaimana dikatakan Abdurrahman Wahid, sebagian besar umat Islam Indonesia mendapatkan dampak dari dakwah Muhammadiyah. Abdurrahman Wahid menyatakan:

“Kalau tidak seluruh kaum muslimin di negeri ini secara resmi menjadi anggota Muhammadiyah, setidaknya dampaknya (*impact*) perubahan keyakinan gerakan Muhammadiyah terasa cukup besar di kalangan kaum muslimin yang menjadi pengikut gerakan Islam yang lainnya (seperti NU, SI, dan lain-lain)” (Wahid, 2009).

Penilaian yang jujur dari KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, Cucu Hadratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, anak dari KH. Abdul Wahid Hasyim, mantan Presiden RI (1999-2001) dan Ketua PBNU terlama sepanjang sejarah NU merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi seorang tokoh yang tidak hanya menjadi milik kelompok tertentu, namun menjadi milik bangsa Indonesia.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'thi menilai, pengukuhan tokoh Muhammadiyah Kasman Singodimedjo sebagai pahlawan nasional, sungguh sangat tepat dan sesuai dengan jasa-jasa beliau sebagai salah seorang tokoh pendiri bangsa. “Kasman Singodimedjo adalah salah seorang yang turut serta merumuskan dasar Negara Pancasila. Kasman Singodimedjo adalah seorang pemimpin Muslim yang sangat nasionalis. Komitmen keislamannya senantiasa menggerakkan jiwa dan raganya untuk melawan penjajahan, mewujudkan kemerdekaan, membangun, dan menegakkan kedaulatan Indonesia”. Ia menambahkan, Kasman Singodimedjo adalah sosok teladan yang pikiran dan sepek terjangnya penuh keteladanan (Hidayatullah, 18 Oktober 2018).

PENUTUP

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat diperoleh hikmah dan pelajaran yang sangat berharga untuk bangsa ini dan generasi penerus bangsa pasca meninggalnya para pendiri bangsa. Hikmah dan pelajaran yang dapat diambil antara lain kemampuan untuk berdialektika, berkompromi, serta menegosiasikan kepentingan individualisnya, kepentingan agamanya, dan kepentingan sukunya demi kepentingan bersama bernama sebuah bangsa yang merdeka. Tidak dapat dibayangkan jika setiap individu yang turut bersidang dalam PPKI dan BPUPKI tetap saling ngotot pada pendirian masing-masing. Boleh jadi, negara merdeka bernama Republik Indonesia berdasarkan Pancasila tidak akan pernah terwujud seperti yang ada saat ini.

Gagasan nasionalisme yang universal, dengan pijakan keagamaan Islam yang diyakini Kasman Singodimedjo ternyata tidak menghilangkan rasa cinta tanah air dan kesadaran nasionalisme. Kasman Singodimedjo, bahkan memberikan contoh bagaimana seorang pemimpin bangsa itu harus benar-benar menyadari akan posisinya sebagai pemimpin sehingga denyut nadi dan nasib rakyat dan bangsanya dapat dimengerti. Seorang pemimpin tidak boleh menjaga jarak dengan rakyatnya meskipun berbeda agama, suku, dan kelas sosialnya. Inilah jiwa kepemimpinan yang diajarkan oleh Kasman Singodimedjo kepada bangsa ini yang dapat diwarisi di saat banyak orang merasa dan mengaku dirinya sebagai pemimpin namun tidak memiliki sensitivitas dan kepedulian terhadap negara dan rakyat yang dipimpinnya.

Kasman Singodimedjo tentu tidak berharap dibuatkan buku biografi, bahkan tidak pernah menuntut kelak akan diberi gelar pahlawan. Namun sebagai anak bangsa, segala yang dilakukan menyangkut beliau merupakan wujud nyata penghargaan anak bangsa dalam mengenang jasa dan perjuangannya pada pendahulu bangsa yang manfaatnya sangat dirasakan hingga saat ini. Slogan "*Hidup itu Berjuang*" adalah bukti jika Kasman Singodimedjo adalah sosok yang benar-benar pejuang, sang nasionalis sejati, dan tidak sektarianistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Gie, Thee Liang. 1993. *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hatta, Mohammad. 1970. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Tintamas.
- Hakim, Lukman (ed.). 2013. *Dari Muhammadiyah untuk Indonesia: Pemikiran dan Kiprah Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo dan Abdul Kahar Muzakkir*. Jakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Hidayatullah, 18 Oktober 2018.
- Iswara N Raditya - 25 Februari 2019, "Sejarah 25 Februari 1904: Pancasila & Lahirnya Kasman Singodimedjo", <https://tirto.id/dhHF>.
- Juniarto. 1996. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lev, Daniel S. 1980. *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959*. New York: Cornell University Press.
- Mahfud, Mohammad. 1993. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Notosusanto, Nugroho. 1976. *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI.
- Latief, Yudi. 2010. *Negara Paripurna*. Jakarta: Gramedia.
- Latief, Yudi. 2012. *Mata Air Keteladanan*. Bandung: Mizan.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mukhtamar Muhammadiyah ke-47. . 2015. *Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah*. Makassar.
- Simbolon, Parakitri T. *Menjadi Indonesia*, Buku Kompas, 2009.
- Panitia Peringatan Ulah Kasman Singodimedjo, *Hidup itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang 1982.
- Majalah Tempo*, Edisi 5-11 Agustus 2019.
- Yamin, M. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yuniarti, Rini D. 2003. *BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI*.
Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Wahid, Abdurrahman. 2009. *Islamku, Islam Anda dan Islam Kita*.
Jakarta: Wahid Foundation. 

KASMAN SINGODIMEDJO: PENGAMAL KEISLAMAN, PENGAWAL KEBANGSAAN

Faisal Ismail

PENDAHULUAN

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Demikianlah ucapan Soekarno, presiden pertama RI, 1945-1966, yang sangat terkenal dan tidak pernah dilupakan. Kita yakin dan percaya sepenuhnya bahwa pandangan dan pernyataan tersebut adalah benar dan tidak diragukan kebenarannya. Sebagai bangsa, kita tentunya ingin menjadi bangsa besar yang tahu berterima kasih dan mengapresiasi jasa-jasa para pahlawan. Dalam konteks historis dan narasi kebangsaan inilah, pemerintah Republik Indonesia (RI) menghayati dan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh pejuang bangsa. Sudah menjadi visi kebangsaan dan tradisi kenegaraan bahwa setiap kali memperingati Hari Pahlawan 10 November, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh pejuang bangsa yang dinilai memiliki peranan strategis, kontribusi nyata, dan jasa besar dalam perjuangan, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan RI.

Sebagaimana sudah menjadi catatan dan rekaman sejarah nasional bangsa Indonesia, di Surabaya pada tanggal 10 November 1945, para pejuang dan rakyat Indonesia bertempur dengan penuh semangat, gigih pantang menyerah, dan dengan

matian-matian mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Ada baiknya jika fragmen sejarah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya tersebut diungkap secara ringkas untuk memahami latar belakang sejarah mengapa pemerintah RI pada tanggal yang bersejarah ini menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh pejuang bangsa.

Hindia Belanda atau Hindia Timur Belanda (Nederlands(ch)-Indië) adalah wilayah jajahan Belanda yang sekarang ini dikenal dengan nama Republik Indonesia. Hindia Belanda dibentuk sebagai hasil nasionalisasi koloni-koloni Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), yang pada tahun 1800 berada di bawah pemerintahan Belanda. Daerah jajahan dan hegemoni Belanda selama abad ke-19 sampai awal abad ke-20 terus diperluas hingga mencapai batas wilayah teritorial terbesar mereka. Di bawah kekuasaan imperium Belanda, Hindia Belanda dari abad ke-19 hingga awal abad ke-20 menjadi salah satu koloni yang paling berharga dan berkontribusi besar bagi keunggulan global Belanda dalam perdagangan rempah-rempah dan hasil bumi.

Tatanan sosial pemerintahan kolonial Belanda dibangun berdasarkan struktur rasial dan sosial yang kaku dalam arti para elite Belanda tinggal secara terpisah, tetapi tetap berhubungan dengan penduduk pribumi yang mereka jajah. Setelah tahun 1880, identitas dan istilah "Indonesia" mulai mengemuka dan dipergunakan untuk menyebut lokasi geografis. Para intelektual lokal pada awal abad ke-20 mulai memperkenalkan konsep Indonesia sebagai negara dan bangsa, dan memanfaatkan panggung politik untuk gerakan kemerdekaan. Pada masa Perang Dunia II, invasi dan pendudukan Jepang melemahkan sebagian besar pemerintahan kolonial dan ekonomi Belanda.

Tentara Jepang pada tanggal 1 Maret 1942 mendarat di Pulau Jawa dan tujuh hari kemudian, persisnya pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda berdasarkan Perjanjian Kalijati menyerah kepada Jepang tanpa syarat. Tiga tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Tentara Sekutu setelah Amerika Serikat pada bulan Agustus 1945 menjatuhkan

bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat kekosongan kekuasaan asing ini, Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca kekalahan Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata tentara Jepang dan gerakan ini memicu pecahnya gelombang pertempuran di banyak daerah. Di saat para pejuang dan rakyat Indonesia sedang menggebu-gebu melancarkan gerakan melucuti senjata pasukan Jepang, tentara Inggris pada tanggal 15 September 1945 mendarat di Jakarta dan kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945.

Atas nama Tentara Sekutu, tentara Inggris yang tergabung dalam Forces Netherlands East Indies (AFNEI) datang ke Indonesia dengan misi untuk melucuti senjata tentara Jepang, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, dan memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Selain misi ini, tentara Inggris juga membawa misi lain yaitu mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan sipil Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Pemerintahan Sipil Belanda (Netherlands Indies Civil Administration/NICA) membonceng pasukan Inggris dan situasi ini memicu gerakan-gerakan perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah melawan tentara AFNEI dan tentara NICA. Salah satu gerakan perlawanan dan pertempuran sengit terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Dalam pertempuran ini banyak pejuang dan rakyat Indonesia gugur sebagai martir dan pahlawan kusuma bangsa.

Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran pasukan tentara dan milisi pro-kemerdekaan Indonesia melawan tentara Inggris. Sebagaimana disebutkan di atas, klimaks pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya. Sutomo (akrab disapa Bung Tomo) terkenal sebagai seorang pejuang sangat gigih yang mampu memobilisasi dan menggerakkan perlawanan rakyat dalam pertempuran Surabaya melawan tentara Inggris. Selain Bung Tomo, tokoh-tokoh pejuang yang berlatar belakang pesantren seperti KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah beserta para santrinya mengambil bagian penting dan terjun aktif dalam pertempuran tersebut.

Pertempuran Surabaya berkobar dan berlangsung dengan sengit sekitar tiga minggu lamanya.

Akibat Pertempuran Surabaya ini, paling tidak 6.000-16.000 pejuang dan milisi Indonesia tewas dan sebanyak 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya (Ricklefs, 1993:217). Adapun korban di pihak pasukan Inggris dan India sebagaimana dicatat oleh Woodburn Kirby (1965), diperkirakan berjumlah 600 - 2000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang menelan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan semangat dan mengobarkan api perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melawan tentara asing. Banyaknya pejuang yang gugur sebagai kusuma bangsa dan banyaknya rakyat sipil yang menjadi korban dalam pertempuran Surabaya ini dikenang, ditetapkan, dan diperingati sebagai Hari Pahlawan pada setiap tanggal 10 November.

Pertempuran Surabaya yang berkobar dan berlangsung sengit itu merupakan perang pertama pasukan Indonesia melawan pasukan asing pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran tersebut juga merupakan pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran Surabaya sekaligus merupakan simbol heroisme dan patriotisme perlawanan rakyat Indonesia melawan kolonialisme. Pasca pertempuran ini, dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia dan juga dukungan dari dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin luas dan kuat. Belanda secara formal mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 sebagai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB).

Sudah menjadi tradisi kenegaraan bahwa tanggal 10 November dikenang dan diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Pada momen ini diselenggarakan upacara kenegaraan dengan kebesaran militer yang dihadiri oleh presiden. Inilah latar belakang sejarah yang dijadikan momentum oleh Pemerintah RI untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh pejuang bangsa pada setiap tanggal 10 November. Pada Hari Rabu tanggal 07 November 2018, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin, mengumumkan bahwa Pemerintah Republik

Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2018 akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada enam tokoh pejuang yang memainkan peranan penting dan strategis serta mempunyai kontribusi besar dan signifikan bagi perjuangan bangsa Indonesia. Salah satu dari enam tokoh terbaik yang akan menerima gelar pahlawan nasional itu adalah Mr. Kasman Singodimedjo. Kasman Singodimedjo mendapat gelar Pahlawan Nasional bersama lima tokoh pejuang lainnya, yaitu Abdurrahman Baswedan (Yogyakarta), Ir. H. Pangeran Mohammad Noor (Kalimantan Selatan), Agung Hajjah Andi Depu (Sulawesi Barat), Depati Amir (Bangka Belitung), dan Syam'un (Banten). Sebenarnya, pada tahun 2012 Kasman Singodimedjo sudah diusulkan kepada Pemerintah RI untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Akan tetapi, usulan ini baru terealisasi enam tahun kemudian, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.

KASMAN SINGODIMEDJO: SOSOK AKTIVIS DAN PEJUANG

Kasman Singodimedjo dilahirkan pada tanggal 25 Februari 1904 di Desa Clapar, Kalirejo, Kecamatan Bagelan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ia adalah anak H. Singodimedjo yang pernah bekerja sebagai *modin*, *carik* (sekretaris desa), *ambtenar* (pegawai negeri) pada Polisi Pamong Praja di Tabanan, Bali, dan Gunung Sugih, Lampung. Hidup dalam suasana rukun dan damai bersama sang istri tercinta, pasangan berbahagia ini dikaruniai enam orang anak. Tiga putrinya adalah Siam Saputro, Kabul (Sarjana Hukum) dan Katamsi (Dokteranda). Tiga putranya adalah Muhammad Sulaiman Wibisono (Insinyur), Bambang Bagus Toko dan Joko Bangun Mertani (Insinyur). Kasman sangat memperhatikan pendidikan putra putrinya dan ia berhasil mendidik sebagian mereka sehingga mencapai gelar sarjana.

Anugerah dan karunia usia panjang yang Allah berikan kepada Kasman Singodimedjo (78 tahun) tidak disia-siakannya. Ia gunakan dan manfaatkan usia panjangnya itu semaksimal mungkin untuk berbakti dan mengabdikan kepada-Nya dengan jalan memberikan kontribusi dan mewakafkan diri bagi misi

perjuangan umat dan bangsa yang sangat ia cintai. Anugerah dan usia yang panjang memberi Kasman Singodimedjo banyak kesempatan dan peluang untuk berdedikasi, berbakti, dan berkontribusi bagi kepentingan umat dan bangsa, baik pada masa sebelum maupun sesudah kemerdekaan Indonesia. Seluruh rekam jejak kehidupan Kasman adalah identik dengan perjuangan dan pengabdian kepada umat dan bangsa karena, bagi dia, hidup itu adalah perjuangan (Singodimedjo, 1982).

Kasman Singodimedjo memperoleh gelar Meester in Rechter (Mr.) dari Rechts Hoge School (Sekolah Tinggi Hukum) Jakarta. Sebagai ahli hukum, ia pernah menjadi asisten Profesor van Der Kolf sampai tahun 1940. Sebelum menggondol gelar sarjana hukum, ia dikenal sebagai sosok pemuda yang otodidak dengan cara mempelajari dan memahami ilmu agama, ilmu ketatanegaraan, dan ilmu pengetahuan umum melalui berbagai literatur yang ia peroleh dari teman-teman seperjuangannya dari luar negeri. Ia pernah mengabdikan sebagai guru dan pendidik di beberapa sekolah Muhammadiyah di Jakarta pada zaman kolonial Belanda. Sejak 1935, ia telah aktif dalam kancah perjuangan pergerakan nasional, terutama di Bogor yang sekarang markasnya menjadi Museum Perjuangan Bogor. Ia juga ikut aktif bergerilya. Kemudian, ia melanjutkan kariernya dan bekerja sebagai pegawai di jawatan pertanian kolonial Belanda hingga zaman pendudukan Jepang.

Kasman Singodimedjo adalah sosok aktivis-dinamis dan seorang tokoh pergerakan yang banyak terlibat dan berperan aktif di berbagai organisasi kepemudaan, sosial kemasyarakatan, dan keagamaan. Ia memainkan peran penting di organisasi Jong Islamieten Bond/JIB (Organisasi Pemuda Islam). Di lingkungan JIB, ia mengenal secara pribadi dan sangat dekat dengan tokoh-tokoh penting JIB seperti H Agus Salim, HOS Tjokroaminoto, KH. Ahmad Dahlan, Syaikh Ahmad Surkati (pendiri Al-Irsyad), Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, dan Jusuf Wibisono. Pergaulannya yang luwes dan intensitas interaksinya dengan tokoh-tokoh JIB tersebut ikut memperluas cakrawala pemikiran keagamaan dan memperluas wawasan kebangsaan Kasman Singodimedjo.

Basis keislaman dan kebangsaan Kasman Singodimedjo terus terbangun sejalan dengan intensitas pergaulan dan seringnya bertukar pikiran dengan banyak pemuda seangkatannya dari berbagai latar belakang. Ia adalah sosok aktivis lintas etnis dan lintas kultur. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaannya secara aktif di perkumpulan Jong Java (Perkumpulan Pemuda Jawa) dan menjadi peserta aktif Kongres Pemuda pada tahun 1928. Keikutsertaan dan keterlibatannya di Jong Islamieten Bond, Jong Java, dan Kongres Pemuda membuktikan dirinya sebagai sosok yang memahami, menghayati, dan memiliki visi keislaman dan visi kebangsaan yang baik, korelatif, dan integratif. Baginya, Islam dan nasionalisme atau nasionalisme dan Islam merupakan dua elemen penting yang terjalin secara beriringan dan bergandengan tangan dalam bingkai kuat keindonesiaan.

Sebagai seorang Muslim yang memiliki komitmen keislaman dan greget keumatan yang kuat, Kasman Singodimedjo juga berperan aktif menjadi anggota dan penggerak persyarikatan Muhammadiyah yang dikenal sebagai salah satu organisasi Muslim modernis di negeri ini. Pergaulan luwes dan luas di Muhammadiyah mengantarkannya mengenal dekat dan akrab dengan tokoh-tokoh teras Muhammadiyah seperti KH. Ahmad Dahlan dan Ki Bagus Hadikusumo. Faktor ini pulalah yang memberikan kontribusi pada pemikiran dan wawasan Kasman Singodimedjo dalam memperluas pandangan keagamaannya. Aktivitas, kiprah, dan keterlibatan Kasman Singodimedjo di pergerakan Muhammadiyah semakin menempa sosok kepribadian dan secara kuat meneguhkan filsafat hidupnya sehingga tidak mudah goyah dan digoyahkan oleh kepentingan-kepentingan nafsu duniawia yang bersifat destruktif. Kiprah dan dedikasinya yang berkesinambungan dalam gerakan pembumian ajaran Islam melalui amal-amal usaha Muhammadiyah menjadi pilihan lahan perjuangan baginya dan hal ini sangat terasa termanifestasikan ketika ia mengatakan:

“Sejak saat itu, saya belum pernah absen di dalam Muhammadiyah, bahkan dari anggota biasa telah meningkat menjadi guru sampai propagandis Muhammadiyah, kemudian meningkat lagi menjadi Ketua Muhammadiyah

Cabang Betawi sampai menjadi anggota Pusat Pimpinan Muhammadiyah sampai bertahun-tahun, saya juga pernah masuk dalam tahanan penjara Hindia Belanda sampai berbulan-bulan di Bogor karena saya ingin berjuang membela cita-cita Muhammadiyah” (Singodimedjo, 1978: 18).

Kasman Singodimedjo secara konkret berjuang membumikan ajaran dan cita-cita Islam atas dasar ketulusan dan keikhlasan kepada Allah Swt. Beramal dengan tulus dan ikhlas kepadaNya menjadi landasan filsafat hidup sepanjang hayatnya. Perasaan tulus dan ikhlas kepada Allah menjadi filsafat dan pandangan hidup yang mewarnai lika-liku perjalanan panjang perjuangan dan pengabdian Kasman Singodimedjo. Tentang filsafat hidup yang didasarkan pada ketulusan dan keikhlasan ini, Kasman Singodimedjo dengan penuh keyakinan mengatakan:

“Memang bagi saya *lillahi ta’ala* dan titik beratnya pada *lillahi ta’ala* itu, maka dari itu sebagai seorang muslim saya tidak menghitung-hitung hasil kongkrit yang harus saya peroleh, semuanya saya serahkan kepada Allah SWT. Yang penting dalam hal ini adalah keikhlasan” (Singodimedjo, 1978: 20).

Dalam Konferensi Muhammadiyah se-Jawa Barat yang digelar di Bogor pada bulan Mei 1940, Kasman Singodimedjo berpartisipasi aktif. Ia bahkan ikut berpidato menyampaikan pesan-pesan penting yang sangat inspiratif bagi para peserta konferensi khususnya dan bagi semua anggota Muhammadiyah pada umumnya. Di akhir pidatonya yang sangat impresif itu, ia mengucapkan: “... untuk Indonesia Merdeka” (Singodimedjo, 1978: 91). Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, ucapan Kasman Singodimedjo “untuk Indonesia Merdeka” terasa sangat menentang penguasa kolonial dan tentu sangat berisiko bagi dirinya. Ia pun ditangkap oleh polisi *Politieke Inlichtingen Dienst*, kemudian dibawa ke *Hoofdcommissaris van Politie Buitenzorg* dan ditahan di penjara setempat. Pada saat itu, Pemerintah Hindia Belanda baru saja mendeklarasikan *Staat van Oorlog en Beleg* (keadaan darurat dan perang). Secara politik, pemerintah

Hindia Belanda merasa benar-benar ditampar oleh Kasman Singodimedjo dengan ucapan “untuk Indonesia Merdeka” itu.

Kasman Singodimedjo meringkuk di rumah tahanan selama empat bulan di Bogor dan kemudian kasusnya disidangkan di *Landraat* (pengadilan). Pada sidang-sidang pengadilan, Kasman Singodimedjo didampingi oleh pengacara terkenal, yaitu RM. Sartono. Pengadilan akhirnya memvonis Kasman Singodimedjo bebas karena tidak terbukti adanya unsur kesengajaan dalam ucapannya “untuk Indonesia Merdeka” itu. Sepanjang hayatnya, semangat kiprah dan daya geraknya tidak pernah kendor, tidak pernah surut, dan tidak pudar. Kasman Singodimedjo tetap memberikan perhatian serius, berpartisipasi, dan berperan aktif dalam organisasi Muhammadiyah sampai akhir hayatnya.

Sebagai seorang tokoh pergerakan dan aktivis, Kasman Singodimedjo juga mempunyai minat besar di bidang politik. Di dunia politik, ia bergabung dan berjuang bersama sebuah partai berasas Islam, yaitu Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Intensitas pergaulan dan kiprah interaksinya dengan tokoh-tokoh politik di Masyumi dan di luar Masyumi memberikan nilai tambah yang sangat berharga dan memperkaya pengalamannya dari waktu ke waktu. Di Masyumi, Kasman Singodimedjo sangat dekat dan akrab dengan Mohammad Natsir, Mohammad Roem, dan tokoh-tokoh Masyumi lainnya. Visi, misi, dan gerakan politiknya menjadi sangat terlatih dan tertempa di Masyumi. Karena aktivitas dan kapasitasnya yang baik dan sukses dalam membangun relasi, komunikasi, interaksi dan organisasi, nama Kasman Singodimedjo terus naik daun dan muncul sebagai tokoh Masyumi yang diperhitungkan, dihormati, dan disegani.

Dalam forum Mukhtamar Masyumi yang digelar pada tanggal 7 November 1945, Kasman Singodimedjo terpilih menjadi Ketua Muda III bersama KH. Hasyim Asy'ari (Ketua Umum), Ki Bagus Hadikusumo (Ketua Muda I), dan KH Wahid Hasjim (Ketua Muda II). Pengurus teras lainnya adalah Mr. Moh Roem, Mohammad Natsir dan Dr. Abu Hanifah. Pada tahun 1938, Kasman Singodimedjo ikut membentuk Partai Islam Indonesia (PII) di Surakarta bersama KH. Mas Mansur, Farid Ma'ruf, Soekiman, dan

Wiwoho Purbohadidjojo. Aktivitas dan gerakan politiknya yang dinilai keras terhadap pemerintah kolonial Belanda, menyebabkan ia ditangkap dan ditahan pada bulan Mei 1940.

Pada masa pendudukan Jepang, Kasman Singodimedjo memikul tanggung jawab dan tugas kenegaraan yang besar. Ia bertugas sebagai komandan batalyon tentara Pembela Tanah Air (PETA) Jakarta. Ia melaksanakan tugas kewajiban tersebut dengan penuh amanah dan kesadaran sebagai anak bangsa. Penugasan sebagai komandan PETA kepada Kasman Singodimedjo sangat tepat karena ia adalah sosok pemimpin yang mempunyai karakter yang kuat, watak yang konsisten, dan sifat yang tegas. Dalam upacara apel PETA yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 1944 di Lapangan Ikada (sekarang Lapangan Monumen Nasional/Monas) Jakarta, Kasman Singodimedjo selaku komandan PETA menyampaikan pidatonya yang bersejarah:

“Di dalam PETA gembengan jiwa lebih penting, mereka harus dilatih tahan menghadapi kehidupan yang sukar. Gembengan semangat dan latihan bathin ini lebih penting daripada latihan badan. Dasar latihan bathin itu ialah agama Islam, yaitu agama yang dipeluk oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Jepang juga menghormati Islam. *Seiko Sikikan Kakka* memberikan janji kepada PETA dengan lambang bulan sabit dan bintang, lengkap dengan matahari bersinar. Hal ini melambangkan keberanian, kebenaran, keadilan, dan kesucian” (Muslim, 2005: 80).

Sebagai komandan PETA yang penuh amanah dan tanggung jawab, Kasman Singodimedjo memainkan peran penting dan strategis dalam mengamankan pelaksanaan upacara pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Tugas ini dilaksanakan olehnya dengan baik sehingga upacara pembacaan teks proklamasi berjalan lancar dan sukses. Sekali lagi, di sini sangat jelas bahwa ia membuktikan dirinya memiliki komitmen keislaman dan kebangsaan yang kuat. Sebagai warga negara yang loyal dan baik, Kasman Singodimedjo menyinergikan dan mengintegrasikan komitmen dan visi keislaman dan kebangsaan dalam bingkai keindonesiaan.

Patut dicatat, pasukan PETA terdiri dari 80.000 personel dan 400.000 tenaga paramiliter. Setelah PETA bubar, Badan Keamanan Rakyat (BKR) berdasarkan Keputusan Presiden dibentuk pada tanggal 23 Agustus 1945 sebagai organisasi ketentaraan Indonesia. Kasman Singodimedjo (mantan Komandan Batalyon PETA Jakarta) diangkat sebagai Ketua BKR Pusat. Jabatan Kepala Staf BKR diberikan kepada Daan Jahya dan jabatan Wakil Kepala Stafnya dipercayakan kepada Soebianto Djoyohadikusumo. Karier strategis Kasman Singodimedjo selanjutnya adalah diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang secara resmi dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945. Mengingat kedisiplinan, kecakapan, kecekatan, dan ketegasannya dalam menjalankan kepemimpinan, ia kemudian dipromosikan menjadi Ketua KNIP (parlemen pertama di Indonesia). Tokoh-tokoh lain yang mendampingi Kasman Singodimedjo di pucuk pimpinan KNIP adalah Sutardjo Kartohadikusumo sebagai wakil ketua I, Latuharhary sebagai wakil ketua III, dan Adam Malik sebagai wakil ketua III.

Sosok kepemimpinan dan rekognisi ketokohan Kasman Singodimedjo di panggung sejarah perjuangan bangsa dibuktikan oleh kenyataan bahwa ia banyak diikutsertakan dan memainkan peranan penting dalam berbagai forum kebangsaan dan tugas-tugas kenegaraan, misalnya sebagai anggota aktif Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ia berperan penting dalam menghapus frasa Islam yang tertera di sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta yang rencananya akan dijadikan Pembukaan UUD 1945. Frasa Islam yang dihapus dari Piagam Jakarta itu adalah tujuh kata yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya.” Untuk mengetahui latar belakang sejarah penghapusan frasa Islam ini dari Piagam Jakarta, berikut diungkap fragmen sejarahnya secara ringkas.

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada tanggal 24 April 1945 dengan agenda utamanya antara lain membahas tentang dasar negara Indonesia yang kemerdekaannya segera diproklamasikan. Pembentukan BPUPKI

merupakan respons para pemimpin bangsa Indonesia terhadap janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dilatarbelakangi oleh kepentingan politik, yaitu Jepang hendak memobilisasi bantuan rakyat Indonesia dalam konfrontasi tentara Jepang melawan tentara Sekutu dalam Perang Pasifik. Di muka sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno yang dikenal sebagai sosok pemikir, penggagas, dan tokoh nasionalis netral agama mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara (Yamin, 1959 : 61), sebagaimana berikut:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan

Sementara di kubu lain, tokoh-tokoh Nasionalis Muslim seperti Ki Bagus Hadikusumo dan KH. Abdul Wahid Hasyim mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Dalam menawarkan dan mengusulkan Islam sebagai dasar negara di hadapan para peserta sidang BPUPKI, Ki Bagus Hadikusumo antara lain mengatakan:

“Tuan-Tuan dan sidang yang terhormat! Dalam negara kita, niscaya tuan-tuan menginginkan berdirinya satu pemerintahan yang adil dan bijaksana, berdasarkan budi pekerti yang luhur bersendi permusyawaratan dan putusan rapat, ... tidak memaksa tentang agama. Kalau benar demikian, dirikanlah pemerintahan itu atas agama Islam ... Supaya negara Indonesia itu dapat berdiri tegak dan teguh, kuat dan kokoh, saya mengharapkan akan berdirinya negara Indonesia ini berdasarkan agama Islam. Sebab itulah yang sesuai dengan keadaan jiwa rakyat yang terbanyak sebagaimana yang sudah saya terangkan tadi. Janganlah hendaknya jiwa yang 90 % dari rakyat itu diabaikan saja, tidak dipedulikan” (Hadikusumo, t.t.: 21-22).

Peta politik di sidang BPUPKI memunculkan dua usulan tentang dasar negara, yaitu Pancasila (yang disuarakan oleh

kalangan Nasionalis Netral Agama) dan Islam (yang dikemukakan oleh kelompok Nasionalis Muslim). Pada akhirnya, tokoh-tokoh Nasionalis Netral Agama dan Nasionalis Muslim menyepakati untuk membentuk Tim Sembilan yang anggotanya terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, A.A. Maramis, dan Mohammad Yamin (kelima tokoh ini mewakili kelompok Nasionalis Netral Agama), KH. Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Abikusno Cokrosuyoso, dan KH. Abdul Wahid Hasyim (keempat tokoh ini mewakili kelompok Nasionalis Muslim). Penting dicatat, A.A. Maramis adalah satu-satunya tokoh yang beragama Kristen dalam kelompok Nasionalis Netral Agama, sementara empat tokoh yang lainnya beragama Islam.

Setelah melalui adu argumentasi dan serangkaian perdebatan yang panjang, hangat, dan alot di sidang-sidang BPUPKI, para wakil Nasionalis Netral Agama dan para wakil Nasionalis Muslim menghasilkan kompromi ideologis-politik yang sangat bersejarah yang oleh Mohammad Yamin disebut Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta ini, susunan redaksional dan tata urut Pancasila yang digagas dan diusulkan oleh Soekarno itu dirumuskan kembali sehingga reformulasinya yang baru berbunyi sebagai berikut (Yamin, 1959 : 154):

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Jakarta secara resmi ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 oleh sembilan pemimpin sebagai wakil dari kelompok Nasionalis Netral Agama dan faksi Nasionalis Muslim. Rumusan redaksional dan tata urut Pancasila seperti tertera di atas dicantumkan dalam draf Pembukaan UUD 1945. Dalam pandangan kelompok Nasionalis Muslim, kedudukan Islam dalam Negara Indonesia merdeka harus mendapatkan dasar konstitusional yang jelas sesuai aspirasi agama dan politik

umat Islam sebagai kelompok mayoritas di Indonesia. Kalangan Nasionalis Muslim berargumen bahwa dasar konstitusional “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” itu hanya diterapkan dan berlaku secara eksklusif kepada umat Islam dan sama sekali tidak diberlakukan kepada non-Muslim.

Frasa Islam “dengan kewajiban menjalankan syari’at bagi pemeluknya” menuai keberatan dari komunitas Kristen yang tinggal di bagian Timur Indonesia. Meskipun mereka mengakui bahwa ketentuan “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya” itu hanya berlaku bagi umat Islam, namun bagi mereka hal itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Mereka menyatakan akan berada di luar Republik Indonesia jika frasa Islam tersebut tetap dipertahankan. Seorang perwira Angkatan Laut Jepang menyampaikan keberatan dan ketidaksetujuan tersebut kepada Mohammad Hatta. Sebagai seorang pemimpin yang demokratis, Hatta merasa khawatir dan cemas Negara Indonesia akan pecah jika keberatan itu dibiarkan dan tidak dicarikan solusi yang tepat dan elegan.

Menghadapi persoalan krusial yang sangat pelik dan serius ini, Hatta berinisiatif dan cepat bergerak mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Nasionalis Muslim dengan agenda utama membicarakan frasa Islam yang tidak disetujui itu. Pertemuan ini digelar tidak lama sebelum sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 secara resmi dimulai. Tentang peristiwa ini, Hatta menuturkan:

“Saya ajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatra mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang melukai hati Umat Kristen itu dan menggantinya dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Hatta, 1982: 60).

Kasman Singodimedjo (dan tokoh-tokoh Nasionalis Muslim lainnya) dalam pertemuan dengan Mohammad Hatta itu setuju mencoret frasa Islam baik dalam draf Pembukaan UUD 1945 maupun dalam rancangan batang tubuhnya. Kasman Singodimedjo dengan cara yang sangat arif dan bijak membujuk

tokoh-tokoh Nasionalis Muslim agar frasa Islam dihilangkan untuk menghormati komunitas Kristen dan komunitas-komunitas non-Muslim lainnya. Kasman Singodimedjo berupaya meyakinkan tokoh-tokoh Muslim, termasuk Ki Bagus Hadikusumo, bahwa persatuan dan kesatuan bangsa jauh lebih penting, dan kepentingan bangsa dan negara harus dikedepankan. Akhirnya, dengan penuh kesadaran para tokoh Nasionalis Muslim sepakat menghapus tujuh kata (frasa Islam) dari Piagam Jakarta dan menggantinya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” seperti rumusan sila pertama Pancasila yang dikenal sekarang ini.

Dari data dan fakta sejarah di atas tergambar secara jelas bahwa - dengan menerima rumusan final Pancasila seperti yang dikenal sekarang ini terutama sila pertamanya (Ketuhanan Yang Maha Esa) - Kasman Singodimedjo dan tokoh Nasionalis Muslim sangat memahami pluralitas agama, realitas kemajemukan aliran politik, dan idealitas kebhinnekaan rakyat Indonesia yang eksistensi dan hak-haknya harus dihargai dan dihormati. Dalam konteks ini, visi keislaman, kepancasilaan, kebangsaan, dan keindonesiaan secara jelas sangat terlihat, termanifestasi, dan terintegrasi dalam jiwa Kasman Singodimedjo. Kasman Singodimedjo secara utuh memadukan keislaman dan kebangsaan. Ia memiliki visi nasionalisme religius.

KASMAN SINGODIMEDJO DAN PERSIAPAN PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Setelah menyelesaikan tugas-tugas beratnya secara cermat dan tuntas, BPUPKI pun dibubarkan. Tugas selanjutnya secara efektif dilaksanakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI; bahasa Jepang: *Dokuritsu Junbi inkai*). PPKI secara resmi dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan agenda utamanya mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Pada awalnya, PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Kemudian keanggotaan PPKI ditambah enam orang, salah satu di antara

enam anggota tambahan ini adalah Kasman Singodimedjo. Anggota PPKI dari non-Muslim adalah Johannes Latuharhary (asal Ambon), Sam Ratulangi (asal Minahasa), dan I.G. Ketoet Poedja (asal Bali).

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama rakyat Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan, PPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan secara kritis mereview dan membahas draf UUD 1945 sebelum diberlakukan secara resmi. Sebagai sebuah konstitusi, UUD 1945 akan dijadikan acuan berbangsa dan bernegara dan sebagai landasan konstitusional-operasional penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Secara bijak dan elegan, para tokoh bangsa dan Bapak Pendiri Republik di sidang PPKI ini menghasilkan kesepakatan:

1. Kata "Mukadimah" dirancangan awal UUD 1945 diganti menjadi "Pembukaan."
2. Sila pertama Pancasila yang semula berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa."
3. Pasal 28 UUD 1945 yang semula berbunyi "Negara berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" diubah menjadi pasal 29 UUD 1945 dan berbunyi "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."
4. Pada Pasal 6 Ayat (1) yang semula berbunyi "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam" diganti menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli."

Para tokoh bangsa dan Bapak Pendiri Republik (*founding fathers*) di sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 juga mencapai kesepakatan-kesepakatan yang sangat penting dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat bersejarah bagi kelangsungan eksistensi Negara RI, bagi kemaslahatan bangsa Indonesia yang baru merdeka dan berdaulat dan bagi pertumbuhan, pembinaan dan pengembangan kehidupan demokrasi ke masa depan.

Kesepakatan-kesepakatan signifikan dan keputusan-keputusan strategis yang mereka buat di sidang PPKI adalah:

1. Mengesahkan Undang-Undang 1945.
2. Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.
3. Tugas presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum MPR dan DPR dibentuk.

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berjalan lancar, efektif, dan produktif. Para tokoh bangsa dan Bapak Pendiri Republik dengan penuh kebesaran jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi mencapai kesepakatan-kesepakatan dan menghasilkan keputusan-keputusan penting yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia ke masa depan. Patut dicatat, peranan aktif Kasman Singodimedjo dalam proses penghapusan frasa Islam sangat penting dan strategis. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan dan iktikad baiknya (dan tokoh-tokoh Nasionalis Muslim lainnya) menghadiri pertemuan dengan Mohammad Hatta untuk membahas frasa Islam menjelang diselenggarakannya sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sebagaimana telah disinggung di atas, dialog Kasman Singodimedjo (dan tokoh-tokoh Nasionalis Muslim lainnya) dengan Mohammad Hatta dalam pertemuan itu menghasilkan kesepakatan penghapusan frasa Islam baik di sila pertama Pancasila (Piagam Jakarta) maupun di batang tubuh UUD 1945.

Sesuai dengan namanya "Singodimedjo" (Singa di meja), Kasman Singodimedjo pantas disebut sebagai "Singa Pelobi" yang cerdas dan ulung. Ia juga pantas digelari sang "Penyelamat" Republik ini karena secara cerdas berhasil melobi tokoh-tokoh Nasionalis Muslim sehingga mereka menyetujui penghapusan frasa Islam ("dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya") dan menggantinya dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan penghapusan frasa Islam ini, semua komunitas agama (dan semua kelompok etnis) di seluruh Indonesia merasa diayomi dan dinaungi di bawah payung Pancasila. Semua kelompok di seluruh Indonesia merasa memiliki Pancasila. Kasman Singodimedjo (dan para tokoh Nasionalis Muslim

lainnya) secara sadar dan penuh kebesaran jiwa menerima sepenuh hati predikat “Yang Maha Esa” yang dicantumkan di belakang kata “Ketuhanan” karena prinsip “Yang Maha Esa” itu mencerminkan akidah tauhid yang diajarkan Islam. Dengan demikian, Pancasila dengan tata urutan dan rumusan baku dan final seperti yang dikenal saat ini resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia.

KASMAN SINGODIMEDJO: PEMIMPIN DAN PENGABDI BANGSA

Pasca kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 1945, Kasman Singodimedjo diangkat menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Hal ini membuktikan bahwa sosok ketokohan dan kepemimpinannya di pentas nasional selalu dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam pemberian tugas kebangsaan dan kenegaraan. Karena kedisiplinan, kecakapan, dan kinerjanya yang baik, ia kemudian terpilih sebagai Ketua KNIP (parlemen pertama di Indonesia). KNIP merupakan cikal-bakal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ada sekarang ini. Kasman Singodimedjo juga pernah menjadi Jaksa Agung periode 1945-1946 (menggantikan pendahulunya, Gatot Taroenamihardja).

Posisi dan jabatan Jaksa Agung yang diamanahkan kepada Kasman Singodimedjo sangat tepat dan sesuai dengan profesi dan keahliannya sebagai tokoh dan pemimpin yang mendalami serta memahami seluk-beluk ilmu hukum. Sebagai Jaksa Agung, ia bergerak cepat dan tangkas dengan membuat terobosan baru yaitu mengeluarkan Maklumat Jaksa Agung Nomor 3 tanggal 15 Januari 1946 yang isinya meminta agar semua proses peradilan di seluruh tanah air benar-benar dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai kaidah-kaidah dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pandangan Kasman Singodimedjo, hukum harus ditegakkan secara adil, tepat, dan benar karena Indonesia adalah negara hukum. Dari November 1947 sampai Januari 1948, Kasman Singodimedjo menjabat sebagai Menteri Muda Kehakiman dalam Kabinet Amir Sjafruddin II.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum/Pemilu 1955 (pemilu pertama di Indonesia di era Presiden Soekarno 1945-1965),

Kasman Singodimedjo terpilih sebagai anggota Konstituante dari Partai Masyumi. Salah satu agenda utama Konstituante adalah membahas dasar negara dan menyusun UUD baru untuk menggantikan UUD 1945 susunan BPUPKI yang pada waktu itu dianggap sementara. Sidang Konstituante berlangsung lama (1955-1959). Hal ini disebabkan oleh 'pertarungan' ideologis antara kelompok Nasionalis Netral Agama dan kubu Nasionalis Muslim tentang dasar negara. Sama seperti perdebatan di sidang-sidang BPUPKI sebelum kemerdekaan, Faksi Nasionalis Netral Agama tetap mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan kelompok Nasionalis Muslim menghendaki Islam sebagai dasarnya. Kedua kubu saling bertukar pikiran dan beradu argumentasi untuk mengolkan usulan masing-masing.

Kasman Singodimedjo sebagai tokoh Nasionalis Muslim mengemukakan pandangan bahwa untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tentang dasar negara pada sidang Konstituante. Menurutnya, ada dua cara yang bisa ditempuh yaitu dengan cara kompromi atau dengan cara komparasi. Kasman Singodimedjo (dan tokoh-tokoh Nasionalis Muslim lainnya) tidak menyetujui jika persoalan dasar negara diselesaikan dengan cara kompromi karena masalah tersebut dipahami sebagai hal yang sangat esensial dan fundamental. Oleh karena itu, menurut visi politik Kasman Singodimedjo, metode yang harus ditempuh adalah cara komparasi, yaitu membandingkan usulan-usulan tentang dasar negara tersebut, kemudian memilih salah satu dari pilihan yang diusulkan yang diyakini paling baik dan benar.

Pada sidang Konstituante, Kasman Singodimedjo mengusulkan Islam sebagai dasar negara berdasarkan argumen yang disebutnya sebagai argumen yang bersifat universal dan argumen dialektis Indonesia. Argumen yang bersifat universal, menurutnya, adalah pengakuan terhadap kedaulatan hukum Tuhan yang termanifestasikan dalam doktrin agama. Adapun argumen dialektis merupakan pengakuan bahwa agama di Indonesia yang secara kuantitatif dan kualitatif berpengaruh adalah Islam. Islam secara riil dan faktual merupakan faktor strategis yang menguasai *psyche* bangsa Indonesia yang berkontribusi bagi kemunculan dan kebangkitan nasionalisme Indonesia.

Untuk menunjukkan prinsip universalitas Islam, Kasman Singodimedjo merujuk firman Allah dalam Q.S al-Hujurat ayat 13: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu sekalian dari seorang lelaki dan perempuan, dan telah Kami jadikan kamu menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu sekalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa." Berdasarkan ayat tersebut, Kasman Singodimedjo mengatakan bahwa Islam meletakkan prinsip hidup berbangsa berdasarkan asas saling menghargai dan menghormati. Demi terpelihara dan tegaknya kedamaian dan perdamaian dalam kehidupan manusia, Islam menolak segala bentuk dan praktik chauvinisme, rasisme, dan rasialisme. Dengan demikian, Islam dalam visi politik Kasman Singodimedjo menjamin hak-hak asasi manusia yang berlaku secara universal yang memberikan prinsip-prinsip perdamaian, kedamaian, kerukunan dan toleransi dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Islam menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai perikemanusiaan dengan penuh tanggungjawab baik terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan seluruh umat manusia.

Mengelaborasi poin-poin pandangan politiknya yang bernuansa agamis dan humanis, Kasman Singodimedjo mengemukakan enam argumen mengapa Islam cocok dan tepat untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia Merdeka. Enam argumen yang dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo tersebut adalah:

1. Islam mengajarkan dan mewajibkan pelaksanaan demokrasi berdasarkan musyawarah demi tercapainya dan tegaknya kebenaran dan hak;
2. Islam mewajibkan pemimpin rakyat, pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan mengemban amanah dan tanggung jawab penuh terhadap rakyat dan terhadap Tuhan;
3. Islam menegakkan kebebasan dan kemerdekaan lahir dan batin, menolak penjajahan, penindasan atau eksploitasi manusia atas manusia dalam bentuk apapun;

4. Islam memberantas kemelaratan dan menegakkan kemakmuran lahir dan batin atas dasar hidup keragaman antara golongan dan golongan (kelas);
5. Islam mewajibkan untuk menunaikan fardhu kifayah di samping menunaikan fardhu 'ain agar tidak timbul egoisme, sifat tamak atau bakhil. Kekayaan milik perseorangan tidak terlepas dari dimensi dan fungsi sosial sebagai cara melakukan pemerataan;
6. Islam mengajarkan kesamaan derajat bagi kaum wanita dan kaum pria (Fathurrohman, 2015).

Rival utama Masyumi (dan partai-partai Islam lainnya) di Konstituante adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Melalui para pemimpinnya seperti Sakirman, Kiai Haji Ahmad Dasuki Siradj, Njoto dan Wikana, PKI di sidang-sidang Konstituante memperjuangkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. PKI menolak baik Islam maupun Sosial-Ekonomi untuk digunakan sebagai dasar negara. PKI menolak Sosial-Ekonomi (yang diusulkan oleh Soedijono dari PSI) dengan alasan bahwa Pancasila telah mencakup semua prinsip yang ada dalam Sosial-Ekonomi. PKI juga menolak Islam untuk dijadikan dasar negara dengan argumen bahwa agama Islam tidak mewakili semua kelompok politik dan kelompok sosial keagamaan yang ada di Indonesia.

PKI menerima Pancasila, kata partai ini, karena berfungsi sebagai landasan ideologis bersama yang mempertemukan semua kekuatan politik yang ada di Indonesia. Politisi PKI Ahmad Dasuki Siradj (seorang Muslim yang berpredikat haji dan bergelar kiai) mengatakan bahwa PKI menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara karena selaras dengan perkembangan historis perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kemerdekaan (Yamin, 1959: 334). Kasman Singodimedjo (dan para politisi Nasionalis Muslim lainnya) di sidang-sidang Konstituante mencurigai PKI yang mengklaim menerima Pancasila hanya sebagai kedok politik atau sebagai kosmetika politik, karena komunisme dan marxisme yang menjadi ideologi PKI pada dasarnya menolak kepercayaan kepada Tuhan dan menganggap agama sebagai candu masyarakat yang harus dimusnahkan. Dalam pandangan Kasman Singodimedjo dan

para politisi Nasionalis Muslim, sebenarnya PKI mempermainkan Pancasila karena kaum komunis pada dasarnya tidak mengakui sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di sidang-sidang Konstituante yang berlangsung panas, Kasman Singodimedjo secara tegas menolak keras manuver politik PKI yang mengusulkan agar sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) diganti dengan kebebasan beragama. Kasman Singodimedjo menuduh PKI terus menyusun strategi dan taktik politik yang bertujuan memecah-belah rakyat dan menjerumuskan mereka ke jurang ateisme yang akan mengakibatkan kerusakan tidak saja kerusakan terhadap nilai-nilai agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga kerusakan terhadap nilai-nilai Pancasila (Yamin, 1959: 181). Semua politisi Nasionalis Muslim di sidang-sidang Konstituante, tidak terkecuali para politisi Masyumi yang menjadi rival utama PKI, melihat ateisme-marxisme-komunisme yang menjadi ideologi PKI merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi Islam dan umat Islam sehingga ancaman ini harus dilawan. Umat Islam harus menentang dan melawan komunisme karena paham ini bertujuan untuk merebut kekuasaan. Mohammad Natsir (Natsir, 1957) yang dikenal tokoh dan politisi Masyumi yang vokal mengatakan:

“Tujuan utama [Komunisme] ialah kekuasaan. Inilah inti Komunisme-Marxisme-Leninisme. Kekuasaan itu dilancarkan dalam sifat kediktatoran. Mana yang menghalangi harus disingkirkan, kalau perlu dengan jalan membunuh. Komunisme adalah suatu paham yang bertentangan seluruhnya dengan paham demokrasi”.

Sampai tahun 1959, adu argumentasi dan perdebatan alot tentang dasar negara di sidang Konstituante belum juga membuahkan hasil. Situasi ini diperburuk lagi oleh kondisi politik yang tidak stabil akibat terjadinya beberapa pemberontakan seperti pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan SM Kartosuwiryo. Keadaan krusial inilah yang mendorong pemerintah mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945. Presiden Soekarno bersama kabinetnya memutuskan untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin dalam rangka

menjaga stabilitas nasional. Pada tanggal 2 Maret 1959, Perdana Menteri Djuanda memberikan penjelasan kepada DPR mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945 yang digagas oleh Presiden Soekarno.

Gagasan Presiden Soekarno untuk kembali ke UUD 1945 juga disampaikan pada sidang Konstituante di Bandung pada tanggal 22 April 1955 melalui amanat Presiden. Merespons gagasan presiden untuk kembali ke UUD 1945, Konstituante bersidang dan mengadakan tiga kali *voting*, yaitu tanggal 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959, dengan hasil penghitungan suara sebagai berikut: 269, 264, dan 263 menyetujui kembali ke UUD 1945, sedang 199, 204, dan 203 menolak kembali ke UUD 1945 (Yamin, 1960: 618). Baik kelompok yang pro maupun yang kontra tidak memenuhi suara minimal yang dipersyaratkan.

Kondisi di sidang Konstituante tersebut dipandang oleh Presiden Soekarno telah mengalami kebuntuan politik. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Melalui Dekrit ini, Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang menetapkan pembubaran Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Dekrit ini kemudian dikukuhkan oleh DPR secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959. Dengan dimulainya era Demokrasi Terpimpin, kondisi politik dan pemerintahan mengalami pergeseran. Demokrasi Terpimpin yang secara konseptual dimaksudkan sebagai pelaksanaan demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan demi kepentingan bangsa dan negara lantas berubah menjadi demokrasi yang segalanya ditentukan oleh komando kepemimpinan. Dengan demikian, demokrasi menjadi kehilangan ruh dan esensinya karena dikalahkan oleh komando kepemimpinan.

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin juga dapat ditengarai dari kehidupan partai politik yang pada saat itu keberadaan dan geraknya sudah mulai dibatasi. Pada tanggal 13 Desember 1959, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-syarat dan Penyederhanaan Kepartaian. Penpres ini kemudian diubah dengan Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 1959. Sebagai tindak lanjut dari Perpres ini, dikeluarkan Perpres Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-partai yang kemudian diikuti dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 128 Tahun 1961 tentang Pengakuan Partai-partai yang Memenuhi Perpres Nomor 13 Tahun 1960. Partai-partai yang diakui adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Selain itu, dikeluarkan pula Keppres Nomor 129 Tahun 1961 tentang penolakan Pengakuan Partai-partai yang Memenuhi Perpres Nomor 13 Tahun 1960. Partai-partai yang ditolak pengakuannya adalah PSII Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebas Daeng Lalo, dan Partai Rakyat Nasional Djodi Gondokusumo. Di samping itu, melalui Keppres No. 440 Tahun 1961 diakui pula partai-partai politik, antara lain Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

Pada tanggal 21 Juli 1960, Presiden Soekarno memanggil para pemimpin Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). pemanggilan tersebut terkait dengan pemberian daftar pertanyaan yang harus dijawab dalam waktu satu minggu. Namun karena jawaban yang mereka berikan tidak memuaskan, pada tanggal 17 Agustus 1960 Presiden menerbitkan Keppres Nomor 200 Tahun 1960 dan Keppres Nomor 201 Tahun 1960 yang isinya meminta para pemimpin kedua partai itu membubarkan diri dalam waktu 30 hari. Jika hal itu tidak dilaksanakan, maka partai tersebut akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Akhirnya, pimpinan Masyumi dan PSI membubarkan partainya. Pembubaran Masyumi dan PSI ini terkait dengan tuduhan pemerintah terhadap beberapa tokoh Masyumi dan PSI yang disebut terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1957. Pembubaran Masyumi menjadi salah satu faktor pemicu konflik antara pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan pemimpin eks Masyumi. Pertentangan ini mengakibatkan penangkapan beberapa tokoh eks Masyumi seperti Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap yang dinilai kontra revolusi. Tokoh-tokoh Masyumi yang ditahan di era Orde Lama dibebaskan di awal Orde Baru.

SIMPULAN: KONSISTENSI KRITISISME KASMAN SINGODIMEDJO

Di era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) yang secara ketat dilaksanakan di bawah komando Presiden Soekarno, kritisisme Kasman Singodimedjo tetap tidak berubah. Ia tetap kritis sama seperti karakter, watak dan sikapnya sebelum era kemerdekaan RI. Kasman Singodimedjo tanpa tedeng aling-aling mengemukakan pandangan, ide, gagasan dan pemikirannya yang diyakini benar sebagai cara untuk mengingatkan dan mengoreksi kebijakan pemerintah yang dinilainya salah atau tidak tepat. Walaupun Kasman Singodiemdjo merupakan tokoh senior jika dilihat dari segi usia, tetapi pijar-pijar kritisismenya tidak mengalami perubahan sedikit pun.

Sikap kritis Kasman Singodimedjo terhadap pemerintahan Demokrasi Terpimpin berujung pada penahanannya pada tanggal 9 November 1963 oleh Komandan Korps Intelejen di Kantor Polisi Komisariat Jakarta Raya. Pada tanggal 16 November 1963, ia dipindah ke Ciloto, Cianjur, tepatnya di kompleks Sekolah Kepolisian Sukabumi bersama-sama dengan Hamka dan Ghazali Syahlan. Ia didakwa melanggar Pasal 169 ayat (1), (2), dan (3) KUHP yaitu turut serta dalam perkumpulan dan perserikatan lain yang bermaksud melakukan kejahatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam hukuman penjara maksimal enam tahun. Ia kemudian dipindah ke penjara Bogor dan dituduh mengadakan rapat gelap di Desa Cilendek bersama KH. Sholeh Iskandar. Tuduhan lain yang dikenakan kepadanya adalah sebagai ketua kelompok empat yang berniat membunuh Presiden. Selain itu, ia juga dituduh menyelewengkan Pancasila, merongrong kekuasaan negara dan mengajak orang untuk memusuhi pemeritahan Soekarno. Kasman Singodimedjo bahkan dituduh melanggar Penetapan Presiden No. 11 Tahun 1963 dan No. 5 tahun 1963. Akhirnya, kasus yang dituduhkan diputus pada 14 Agustus 1964 dengan hukuman penjara 8 tahun, yang pada tingkat banding hukumannya berubah menjadi 2 tahun 6 bulan.

Setelah kekuasaan Soekarno runtuh dan digantikan oleh pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966, narasi dan pemberitaan tentang aktivitas politik Kasman Singodimedjo

tidak banyak terdengar lagi. Namun demikian, sebagai tokoh pejuang yang konsisten, ia tetap aktif dalam organisasi dan pergerakan Muhammadiyah. Rasanya sulit untuk menerima tuduhan bahwa Kasman Singodimedjo akan membunuh presiden dan hendak menyelewengkan Pancasila jika dilihat dari rekam jejak loyalitas, kontribusi, dan signifikansi jasanya terhadap perjuangan bangsa di masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Bahwa ia adalah tokoh vokal dan kritis, memang sudah sejak awal menjadi watak dan karakter pembawaannya. Akan tetapi, secara logika dan akal sehat, sulit untuk menerima tuduhan bahwa ia hendak membunuh Presiden Soekarno dan menyelewengkan Pancasila yang ia bela dan perjuangkan.

Di era Orde Baru, Kasman Singodimedjo menepi dari ingar-bingar dan hiruk-pikuk ajang politik praktis. Sebagaimana disebutkan di awal tulisan ini, Presiden Joko Widodo menganugerahi gelar Pahlawan Nasional kepada enam tokoh pejuang, salah satunya adalah Kasman Singodimedjo yang dikenal luas sebagai salah satu tokoh penting Muhammadiyah. Tokoh-tokoh penting Muhammadiyah yang sudah mendapatkan gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah antara lain adalah Sudirman (Jenderal/Panglima Besar), KH. Ahmad Dahlan, Nyai Walidah Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo, dan KH Abdul Kahar Muzakkir. Sumbangsih besar Muhammadiyah kepada pemerintah, bangsa dan negara tidak saja direalisasikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, tetapi juga dikonkretkan di bidang politik kebangsaan.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Dr. (HC) Mr. Kasman Singodimedjo (bersama Abdurrahman Baswedan) oleh Presiden Joko Widodo semakin mengokohkan pengakuan pemerintah dan negara terhadap peran aktif dan kontribusi signifikan Muhammadiyah melalui tokoh-tokohnya. Kasman Singodimedjo patut dan pantas mendapatkan gelar Pahlawan Nasional dari pemerintah mengingat lika-liku perjuangan, dedikasi dan peran aktifnya sebagai salah satu pelaku sejarah, tokoh pejuang, dan Bapak Pendiri Republik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Ruslan. 1973. *Nationalism, Revolution, and Guided Democracy*. Melbourne: Monash University.
- Abdulgani, Ruslan. *Pancasila: The Prime Mover of the Indonesian Revolution*. Djakarta: Prapantja.
- Ali, Abdul Mu'ti. 1957. "The Muhammadiyah Movement: A Bibliographical Introduction." *Thesis MA*. Montreal: McGill University.
- Anshari, Saifuddin. 1976. "The Jakarta Charter of June 1945: A History of the Gentlemen's Agreement between the Islamic and Secular Nationalists in Modern Indonesia". *Thesis MA*. Montreal: McGill University.
- Anshary, Isa M. et al. 1955. *Bahaya Merah di Indonesia*. Bandung: Front Anti-Komunisme.
- Asyari, Muhammad. 1976. "The Rise of the Masyumi Party in Indonesia and the Role of the 'Ulamain its Early Development (1945-1952)." *Thesis MA*. Montreal: McGill University.
- Aziz, M. A. *Japan's Colonialism and Indonesia*. 1955. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Bajasut, S. U. 1972. *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito*. Surabaya: Documentica.
- Benda, Harry J. dan Ruth T. McVey. 1960. *The Communist Uprising of 1926-1927 in Indonesia: Key Documents*. Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University.
- Benda, Harry J. et al. 1965. *Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Ducoments*. New Haven: Yale University Press.
- Benda, Harry J. 1960. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945*. The Hague: W. Van Hoeve.
- Boland, B. J. 1982. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Brackman, A. C. 1969. *Communism Collapse in Indonesia*. New York: Praeger.

- Brackman, A. C. 1969. *Indonesia: the Gestapu Affair*. New York: American Asian Educational Exchange.
- Budiyanto, Gunawan et al (eds.). 2018. *Konstruksi Pemikiran Politik Ki Bagus Hadikusumo*. Yogyakarta: Program Doktor Politik Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Burns, Peter. 1981. *Revelation and Revolution: Natsir and the Pancasila*. Townsville, Old: James Cook University of North Queensland.
- Dahm, Bernhard. 1971. *History of Indonesia in the Twentieth Century*. Terj. P. S. Falla. New York: Praeger Publishers.
- Dahm, Bernhard. 1969. *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence*. Terj. F. Somers Heidhues. Ithaca: Cornell University Press.
- Fathurrohman, Muhamad Nurdin. 2015. <https://biografi-tokoh.ternama.blogspot.com/2015/08/biografi-kasman-singodimedjo.html>.
- Feith, Herbert dan Lance Castles (ed). 1977. *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Ithaca: Cornell University Press.
- Feith, Herbert. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University.
- Feith, Herbert. 1971. *The Indonesian Election of 1955*. Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University.
- Hadikusumo, Djarnawi. 1979. *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjuangan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*. Yogyakarta: Persatuan.
- Hadikusumo, Ki Bagus. tt. *Islam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*. Yogyakarta: Pustaka Rahayu.
- Harvey, Barbara S. 1977. *Permesta: A Half Rebellion*. Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University Press.
- Hatta, Mohammad. 1970. *Sekitar Pancasila*. Jakarta: Tintamas.
- Hatta, Mohammad. 1977. *Pengertian Pancasila*. Jakarta: Idayu Press.
- Hatta, Mohammad. 1982. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Tintamas.

- Hatta, Lembaga Soekarno. 1986. *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar dan Pancasila*. Jakarta: Idayu Press,
- Idris, Muhammady. "Kiyai H. Ahmad Dahlan: His Life and Thought." *Thesis MA*. Montreal: McGill University.
- Ismail, Faisal. 2017. *Panorama Sejarah Islam dan Politik di Indonesia: Sebuah Studi Komprehensif*. Yogyakarta: Ircisod.
- Kahin, George McTurnan. 1952. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Cornell University Press.
- Legge, J. D. 1972. *Sukarno: A Political Biography*. London: Allen Lane and the Penguin Press.
- Lev, Daniel S. 1966. *The Transition to Guided Democracy*. Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1980. "Islamic Politics under Guided Democracy in Indonesia (1959-1965)." *Thesis MA*. Ohio University.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1983. "Islam as the Basis of State: A Study of the Islamic Political Ideas as Reflected in the Constituent Assembly Debates in Indonesia." *Disertasi Doktor*. Chicago: University of Chicago.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Mangkusasmito, Prawoto. 1970. *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Refleksi*. Jakarta: Hudaya.
- McMillan, Richard. 2005. *The British Occupation of Indonesia 1945-1946: Britain, the Netherlands and the Indonesian Revolution*. London: Routledge.
- Muslim, Romdoni. 2005. *75 Tokoh Muslim Indonesia: Pola Pikir, Gagasan, Kiprah dan Falsafah*. Jakarta: Restu Ilahi.
- Nagazumi, Akira. 1972. *The Dawn of Indonesian Nationalism*. Tokyo: Institute of Developing Economics.
- Nakamura, Mitsuo. 1983. *The Crescent Arises Over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in Central Java*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nasution, A. H. 1976. *Sejarah Kembali ke UUD 45*. Jakarta: tp.

- Nasution, Harun. 1968. "The Islamic State in Indonesia: the Rise of the Ideology, the Movement for its Creation and the Theory of the Masyumi." *Thesis MA*. Montreal: McGill University.
- Nasution, Adnan Buyung. 1992. *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Natsir, Mohammad. 1954. *Some Observations Concerning the Role of Islam in National and International Affairs*. Ithaca: Southeast Asia Program, Department of Far Eastern Studies.
- Natsir, Mohammad. 1957. "Membela Nikmat yang Diberikan Demokrasi: Demokrasi Harus Ditebus dengan Perjuangan yang Besar," dalam *Harian Abadi*, 4 Maret.
- Natsir, Mohammad. 1957. *Islam sebagai Dasar Negara*. Bandung: Fraksi Masyumi dalam Konstituante.
- Noer, Deliar. 1973. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Noer, Deliar. 1984. *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*. Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafitipers.
- Notosusanto, Nugroho. 1971. *Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik*. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI Departemen Hankam.
- Notosusanto, Nugroho. 1981. *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Reid, Anthony. 1973. *The Indonesian National Revolution 1945-1950*. Melbourne: Longman Pty.
- Ricklefs, Merie Calvin. 1993. *A History of Modern Indonesia since C. 1300*. London: The Macmillan Press.
- Roem, Mohamad. tt. *Saya Menerima Pancasila Karena Saya Orang Islam*. Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
- Safrudin, Bahar et al (eds). 1996. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Sajad, Abdulah et al (eds.). 2016. *Ensiklopedi Pemuka Agama Nusantara*. Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Salam, Junus. 1968. *Riwayat Hidup K. H. A. Dahlan: Amal dan Perjuangannya*. Jakarta: Depot Pengajaran Muhammadiyah.
- Singodimedjo, Kasman. 1978. *Masalah Kedaulatan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Singodimedjo, Kasman. 1982. *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soeardjo, Achmad. 1970. *Lahirnja Republik Indonesia*. Jakarta: Jakarta Times.
- Soekarno. 1954. *Negara Nasional dan Cita-Cita Islam*. Djakarta: PP Endang.
- Soekarno. 1958. *The Birth of Pancasila: An Outline of the Five Principles of the Indonesian State*. Jakarta: Ministry of Information.
- Soekarno. 1964. *Di Bawah Bendera Revolusi 1-II*. Jakarta: Panitia Penerbitan Buku di Bawah Bendera Revolusi.
- Soekarno. 1964. *Piagam Djakarta Mewajibkan Sjari'at Islam bagi Pemeluknya*. Djakarta: Departemen Agama.
- Soekarno. 1965. *Sukarno: An Autobiography as Told to Cindy Adams*. New York: The Bobbs-Merrill Company, Inc.
- Soekarno. 1984. *Nationalism, Islam, and Marxism*. Terj. Karel H. Warouw dan Peter D. Weldon. Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University.
- Soekarno. 1986. *Pancasila sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno.
- Soekarno. 1990. *Bung Karno dan Islam: Kumpulan Pidato tentang Islam 1953-1966*. Disusun oleh CV Haji Masagung bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Soekarno-Hatta. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Syamsuddin, M. Sirajuddin. 1991. "Religion and Politics in Islam: The Case of Muhammadiyah in Indonesia's New Order." *Disertasi Doktor*. California: UCLA.

- Tantri, K'tut. 1960. *Revolt in Paradise*. London: William Heinemann.
- Van Dijk, C. 1981. *Rebellion under the Banner of Islam: the Darul Islam in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Woodburn Kirby, S. 1965. *The War against Japan Vol. V*. London: HMSO.
- Yamin, Muhammad. 1952. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Djakarta: Djambatan.
- Yamin, Muhammad. 1956. *Konstitusi Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi*. Djakarta: Djambatan.
- Yamin, Muhammad (ed). 1959. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. 3 jilid. Djakarta: Jajasan Prapantja.
- Yamin, Muhammad. tt. *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Djakarta: Jajasan Prapantja.
- Yatim, Badri. 1985. *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*. Jakarta: Inti Sarana Aksara. ❏

KASMAN SINGODIMEDJO: NEGARAWAN, MUSLIM-NASIONALIS, DAN INSPIRATOR BANGSA

Suhartono Wiryopranoto

PENDAHULUAN

Membicarakan seorang bernama Kasman Singodimedjo dalam sejarah biografi sama dengan membicarakan “biografi total”, artinya kita harus membedah kepemilikan Kasman sebagai manusia yang dianugerahi berbagai kemampuan sebagai manusia yang luar biasa. Dalam diri Kasman Singodimedjo terkandung kekuatan pribadi untuk belajar tanpa berkesudahan untuk menggapai yang semestinya hanya dimiliki oleh manusia “sempurna”. Bukankah ia selalu mencari alternatif terbaik dalam kehidupan diri dan kehidupan bermasyarakat? Pilihan hidup yang tepat ternyata membawanya ke jalan hidup dan karir yang mengarahkannya kepada kehidupan yang terpercaya (*trust*) dan kehidupan panutan (idola). Anak desa ini adalah kelahiran Purworejo 25 Februari 1904 (sumber lain menyebut 1908), yang tekun, agamis, dan kuat kepribadiannya dalam meniti karirnya sampai ke jenjang tertinggi untuk manusia Jawa waktu itu (Panitia Peringatan Kasman Singodimedjo 75 Tahun, 1982).

Pendidikan yang dilaluinya sejak dari bawah sampai ke tingkat tinggi adalah HIS, MULO, STOVIA, Rechts Hoge School yang tamat pada 1939 dengan gelar *Meester in de Rechten* (Mr.). Setelah tamat dari sekolahnya, ia mengajar di beberapa sekolah

Islam dan bekerja di Departemen Pertanian menjelang runtuhnya pemerintah Hindia Belanda (1942). Dalam sebuah buku kecil berjudul "100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20", tercatat nama Prof. Dr. Mr. Kasman Singodimedjo sebagai seorang negarawan. Kasman Singodimedjo dengan kemampuan diplomatiknya mampu mengakhiri polemik yang mengancam persatuan bangsa. Kasman adalah tokoh penting yang bisa dibilang membidani lahirnya Negara Republik Indonesia (Aning S, 2002: 101-102).

Dari pengalaman belajarnya yang dimulai dari level yang terendah sampai yang tertinggi, menjadi modal atau pengalaman ekstase intelektual. Sebagai insan akademik yang dibingkai dengan kerja keras, ia menghasilkan karir yang menonjol di pemerintahan dan masyarakat. Dalam kultur Jawa apa yang telah diraihinya dan sukses tersebut telah melampau batas kejawaannya, yaitu "*brojol selaning apapak*", artinya dia bukan sebagaimana manusia Jawa biasa tetapi telah berhasil melewati karir orang Jawa yang terbatas pada waktu itu. Dapat dibayangkan bagaimana sulitnya menggapai cita-cita dalam arti bisa memperoleh posisi mobilitas di masa kolonial tanpa kerja keras dengan jargon dan paradigma yang begitu tinggi. Ini semua hanya dimiliki manusia yang mempunyai kehidupan total itu tadi.

Sebagai manusia yang hidup dalam keluarga besar, ia berada dalam bingkai kehidupan kolegalitas, bersaudara, dan berkawan dengan komunitas di luar keluarganya, menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan untuk menyelami dan memahami kebutuhan pihak lain sehingga menghasilkan perkawanan (*friendshipness*). Dari sinilah, sejak muda Kasman bergabung dalam *Jong Islamieten Bond* (JIB), sebuah perkumpulan para remaja yang taat pada ajaran Islam dengan cita-cita sebagai Muslim sejati. Namun, sesungguhnya JIB tidak lain adalah organisasi lokal yang memiliki embrio kuat pada pembebasan di bawah dominasi kolonial yang marak berdiri di bumi nusantara pada awal abad XIX. Itulah sebabnya, ia memilih sekolah di bidang hukum yang pada masa kolonial hukum dipakai sebagai *judgement* hitam putih. Ia ingin mengeliminasi kesalahan dan

kekurangan anak negeri untuk tidak tersandung pada hukum kolonial, tetapi bisa berkelana mengikutinya untuk bisa sampai pada jenjang persamaan dengan masyarakat kolonial dengan pemahaman hukum kolonial. Jadi, Kasman Singodimedjo sudah tahu menempatkan diri bagaimana sebaiknya hidup dalam hukum kolonial, tetapi sebaliknya ada ketaatan luar biasa pada hukum Islam dan hukum tradisional sebagaimana dibingkai dalam kultur Jawa (Pranoto, 1994: 100).

Hasil didikan keluarga dalam kehidupan yang sederhana disertai cita-cita luhur dalam pembebasan diri dan bangsa menjadikan Kasman Singodimedjo kuat dalam pemikiran alternatif untuk mencari terobosan penyelesaian persoalan yang dihadapi. Sejak muda, ia sudah penuh dengan pengalamam untuk memecahkan persoalan diri, keluarga, dan masyarakat. Tentu saja hal tersebut dilakukan melalui tutur kata dan penyampaian dalam bahasa Jawa yang halus sehingga tidak menyakitkan hati lawan bicara yang dihadapinya. Hal ini nanti akan dibuktikan bagaimana kebuntuan persoalan bangsa harus dipecahkan dengan muatan peribahasa Jawa disertai asumsi dan prediksi mengalah sementara namun akhirnya menang. Peribahasa Jawa mengatakan "*Wong ngalah dhuwur wekasane*" diperkirakan kuat dalam pemikiran Kasman Singodimedjo. Meski tidak semua persoalan yang dihadapinya nantinya akan menang atau membahagiakan diri, masyarakat atau bangsa. Akan tetapi, melalui perasaan dan pikirannya yang teleologis dan disertai keyakinannya, segala persoalan akan tuntas dan tercapai di kemudian hari, Insya Allah, entah kapan. Bagi masyarakat Jawa, peribahasa adalah endapan pengalaman yang digunakan sebagai kompas kehidupan dan sudah tersebar serta dijalani masyarakat serta menghasilkan ketenangan hidup (Butir-Butir Budaya Jawa, 1986).

Kasman Singodimedjo adalah manusia terpilih meskipun dalam posisi "menyembunyikan" diri agar tidak terpilih sebagai pemimpin. Ternyata jalan hidup sudah ditentukan dan tidak dapat ditolak lagi ketika akhirnya ia diangkat menjadi Komandan Batalyon pada Pasukan Bumiputra pada masa fasisme Jepang. *Daidancho* adalah pangkat tertinggi bagi orang Indonesia dalam satuan militer yang dibina pemerintah pendudukan Jepang. Ia

termasuk *selected man*, yaitu manusia terpilih dari sekian banyak pemuda terpelajar waktu itu dengan syarat fisik dan intelektual yang prima. Jangan lupa pada rasionalisme bahwa fasisme ternyata memberi kontribusi positif kepada pembebasan untuk bangsa terjajah yang pada dasarnya semua masyarakat terjajah kena virus "*unintended result*" alias *salah kedadén*.

Pendirian kuat serta yang menurutnya berguna bagi masyarakat dan bangsa akan dibela sejalan dengan keyakinannya. Ia sudah mendalami kehidupan kemiliteran bahwa senjata adalah bagian integral atau kesatuan diri seorang militer yang analog dengan seorang berpakaian Jawa lengkap dengan keris. Model inilah yang dipertahankan Kasman ketika Pasukan PETA akan dilucuti karena Jepang telah kalah perang. Kasman bertahan dengan memegang senjatanya sebagai seorang prajurit dan pada hari Proklamasi itu ia harus mengawal jalannya ritual kebebasan bangsa Indonesia dari penjajahan. Itu adalah kekuatan kombinasi antara kekuatan rohani dan jasmani yang sudah tergembleng lama untuk merealisasikan cita-cita sebagai manusia pembebas (Rahardjo, 1993).

Nasib mujur tidak dapat diminta dan malang tidak dapat ditolak. Kekosongan jabatan pemerintahan membutuhkan orang-orang yang *the right man on the right place*. Benar juga kiranya meskipun ia merupakan produk didikan kolonial, namun sebagai seorang nasionalis tidak diragukan lagi. Posisi tinggi di jabatan negara merdeka memintanya menduduki posisi sebagai wakil ketua pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan kemudian dipercaya sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), walaupun hanya dalam hitungan bulan. Bukan jabatan sembarangan dalam negara yang baru merdeka memilih Kasman sebagai orang yang sangat tepat dalam jabatan itu. KNIP adalah adalah cikal-bakal parlemen Indonesia. Lembaga pemerintah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat tempat para anggota dewan mensahkan undang-undang dan garis-garis besar haluan negara. Kasman telah meletakkan landasan bagi terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten) yang sampai sekarang sangat besar perannya dalam pemerintahan.

Jalan politik mengarahkan Kasman Singodimedjo untuk diikuti dengan cermat. Dalam sistem demokrasi, kehidupan kenegaraan harus diusung oleh partai-partai politik. Jatuhlah pilihannya pada partai Masyumi. Setiap partai politik jelas mempunyai jargon dan tujuan kenegaraan untuk membawa masyarakatnya ke aliran politik yang berbeda-beda. Tampak jelas, Kasman Singodimedjo sebagai wakil partai Masyumi tetap memperjuangkan cita-cita awal sebagaimana yang pernah dibisikkan kepada Ki Bagus Hadikusumo dalam menarik tujuh kata dalam Piagam Jakarta (Anshari, 1983). Namun ternyata, di kemudian hari aliran politik yang diusungnya bersebarangan atau bertabrakan dengan aliran politik lain yang lebih kuat, yaitu partai penguasa yang menghegemoni perpolitikan nasional waktu itu. Mempertahankan keyakinan politik memang tidak ringan dan harus dibela sekuat tenaga meskipun akhirnya harus kalah dan mengakui supremasi lawan politiknya. Sebagai manusia yang bertakwa dan beriman, Kasman bisa memilah-milahkan antara kehidupan politik dengan kehidupan kemanusiaan. Mereka saling berkawan dengan lawan politiknya tanpa ada rasa permusuhan, lebih-lebih sebagaimana manusia biasa adalah makhluk Allah swt yang nantinya juga akan mengalami panggilan yang sama juga.

Dalam membuka biografi total untuk Kasman Singodimedjo, rasanya tidak ada yang kurang. Ia adalah manusia yang dipengaruhi lingkungan yang positif, dengan kehidupan dan cita-cita yang juga terpimpin mengarahkannya ke posisi yang benar guna membina umat dalam kehidupan birokrasi dan kehidupan sosial-religius. Kehidupan Kasman Singodimedjo bisa dipakai sebagai *role model* untuk generasi milenial yang sedang “kelaparan” terhadap model positif, moralis, religius, dan humanis, dan jangan luka dia berhasil karena kerja keras. Perilakunya harus diteladani untuk manusia Indonesia di masa mendatang.

PRIBADI TANGGUH KASMAN DAN KONSTRUK LINGKUNGANNYA

Untuk menjadi pribadi yang tangguh, Kasman Singodimedjo telah memulainya dari kehidupan anak-anak yang tidak selancar kehidupan orang berada. Ia harus menyadari kehidupan dari anak seorang pegawai kolonial yang tentu saja dalam keadaan

kesederhanaan dan harus pindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun, pengalaman berpindah-pindah ini memberikan dampak positif, yaitu bisa mengetahui watak setiap komunitas; apakah itu di Batavia, di Purworejo, Magelang, Lampung dan tempat-tempat lain sebagai domisilinya. Komunitas yang ia tempati inilah yang memperkaya pengalaman yang kemudian menjadi bekal dalam memimpin bangsa.

Kalau boleh disebut faktor genetik adalah faktor utama yang memberikan sumbangan luar biasa bagi lahirnya seorang pemimpin, cendekiawan religius seperti Kasman Singadimedjo. Pendidikan keluargalah (*family education*) yang menuntun menjadi manusia tertib, terarah dan takwa. Di sinilah pendidikan keluarga sejak dini mengawali kepemimpinan yang ia tempuh. Perlu diperhatikan, bagi masyarakat pada umumnya bahwa pendidikan keluarga adalah modal utama untuk dicermati sebagai jalan awal kehidupan manusia individu maupun kolektif. Meskipun sudah menjadi pemimpin bangsa, namun model atau corak pendidikan keluarga memberi warna pada corak kemepimpinannya (Darban, 2010).

Pengalaman yang banyak inilah kemudian diserap menjadi kekayaan pribadi yang sangat berguna bagi dirinya dan ternyata kekayaan ini tidak dimiliki oleh setiap orang. Itu semua adalah anugerah yang diberikan kepada seorang bernama Kasman Singodimedjo. Semua bentuk dan corak kehidupan dihadapinya dengan senang dan dengan keyakinan penuh sehingga mampu meningkatkan diri sebagai pribadi yang jujur, luhur, dan berguna bagi masyarakat. Tentu saja, Kasman Singodimedjo menjadi dambaan orang tua agar dapat meneruskan cita-cita orang tua sebagai seorang yang kembali ke dunia spiritual desa untuk mendoakan anaknya bisa membahagiakan dan menjadi panutan keluarga dan masyarakat sekelilingnya. Selebihnya, tentu cita-cita orang tua agar ia bisa menjadi panutan bangsa.

Menurut pakar psikologi dikatakan bahwa lingkungan adalah energi yang memperkuat kepribadian. Semakin banyak pengalaman artinya makin banyak tinggal di lingkungan yang berbeda di situ pengalaman akan bertambah dan di situ pula pengalaman menyelesaikan permasalahan masyarakat juga

berbeda-beda. *Environmental energy* tetap menjadi bekal memimpin bangsa ketika ia menjabat sebagai pemimpin organisasi massa maupun sebagai pejabat dalam birokrasi pemerintahan. Lebih-lebih pengalamannya sebagai prajurit PETA jelas memperkuat pribadi dan lingkungan (Sarwono, 1992).

Kombinasi kehidupan sebagai anggota masyarakat sipil yang dipadu dengan kehidupan militer menjadi semakin kuat dalam mengampu kepemimpinan. Sebagai *daidancho* misalnya, ia merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap anak buah satu batalyon dengan menggelar disiplin militer dan disertai tanggung jawab yang berat. Lebih-lebih ketika *daidan* Jakarta Raya ditugasi untuk menjaga berlangsungnya Proklamasi 17 Agustus 1945. Bagaimana caranya supaya proklamasi bisa berlangsung, tertib, dan aman, dan nyaman serta bebas dari inteligen Jepang yang sewaktu-waktu dapat menghentikan kegiatan besar bagi bangsa Indonesia? Jadi, di sini sudah tergabung antara kedisiplinan sipil dan militer yang menjadi bekal kuat untuk memobilisasi diri untuk jenjang kepemimpinan mendatang. Kasman Singodimedjo telah menggalang tipe kepemimpinan yang bervariasi (*multitype of leadershipness*). Dengan kata lain, Kasman Singodimedjo telah digembleng oleh pengalamam dan lingkungan yang mengarahkan ke karirnya sebagai pemimpin bangsa.

Paparan yang sekelumit di atas adalah pengalaman Kasman Singodimedjo dalam keluarganya; sejak masa anak-anak hingga dewasa yang hidup dalam arahan dan kesederhanaan dan telah menggumpal dalam pribadinya. Cita-citanya untuk menyebarkan kebaikan dan semua hal yang berguna bagi masyarakat mendorongnya bergabung dalam *Jong Java* pada 1923 dan JIB pada 1925-1929, serta sebagai Ketua JIB pada 1929-1935. JIB adalah organisasi remaja atau pemuda Muslim yang bercita-cita mewujudkan kemajuan menuju kebebasan. Karir Kasman Singodimedjo dalam organisasinya terus menanjak hingga kemudian menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah pada 1939-1941 di Jakarta. Ia memilih bergerak di bidang pers, karena pers adalah media sosial untuk bisa berinteraksi dengan para anggota JIB khususnya dan masyarakat muslim umumnya. Media sosial ternyata sudah memiliki peran sebagai *input* pikiran

kemajuan masyarakat sejak jaman penjajahan sampai masa kini. Oleh karena itu, tidak salah pilihan Kasman Singodimedjo untuk menjadi penyebar berita positif bagi kemajuan bangsa. Ketika diadakalah pertemuan dengan anggota Muhammadiyah di Bogor pada 1940, Kasman Singodimedjo menyampaikan pidato "Untuk Indonesia Merdeka". Bagi pemerintah kolonial, pikiran tersebut dianggap tabu dan ia berurusan dengan polisi kolonial (Panitia Peringatan Kasman Singodimedjo 75 Tahun, 1983; Pasha dan Darban, 2002).

Ada totalitas pengalamam yang kalau disimak, ternyata semuanya memberikan dampak positif bagi Kasman Singodimedjo yang berupa sintesa dan implikasi dari total pengalamam tersebut membuat energi positif dan mempunyai kekuatan luar biasa terhadap kepercayaan diri, dominasi, otonomi, ketaatan, bersosialisasi, daya tahan, dan adaptasi. Jadi, ia memiliki semuanya yang diperoleh dari pengalaman hidupnya, bahwa ternyata faktor genetik dan kombinasinya dengan energi lingkungan membawanya ke jenjang puncak karir dan terpuji di masyarakat. Pada dirinya kaya dengan faktor *stimulus and response* yang harus dihadapi dan dimanfaatkan setiap waktu.

Respons terhadap kondisi sosial politik masyarakat diperlukan strategi adaptasi sebagaimana yang dimiliki Kasman Singodimedjo, yaitu kemampuannya untuk memiliki kesadaran terhadap kehidupan masyarakat yang buruk. Dalam hal ini, diperlukan evaluasi sebab-akibat dalam masyarakat yang harus dibenahinya. Selanjutnya kemampuan untuk melakukan *trial-error* untuk meningkatkan kemampun memimpin, juga adaptasi adalah dengan selalu menyesuaikan dan mengembangkannya terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, Kasman harus ikut merasakan (*empaty*) beban masyarakat dan kondisi ini yang harus diperbaiki di masa kolonial dan masa paska kemerdekaan. Kembali lagi ke peribahasa Jawa "*dijiwit katut*", artinya "merasa ikut sakit karena dicubit". Jadi, kalau orang lain menderita maka dirinya juga merasa ikut menderita. Keberpihakan dan ikut merasakan inilah yang menjadi dorongan kuat bagi Kasman untuk terjun ke masyarakat, memperbaiki kondisi kehidupan yang dianggapnya belum stabil.

CITA-CITA MEMBANGUN BANGSA

Kalau ingat kembali pada teori besar sejarawan dan filsuf Inggris, Arnold J. Toynbee, rasanya sangatlah tepat jika diterapkan untuk mengobati masyarakat yang sedang sakit. Jika ada seseorang yang sedang sakit, maka diperlukan diagnosa untuk pengobatannya. Dalam hal ini, Toynbee menyebut adanya teori tantangan dan jawaban. Kasman Singodimedjo sangat sadar terhadap tantangan dalam masyarakat kolonial, yaitu dominasi dan opresi oleh masyarakat penjajah kepada masyarakat bumiputra sebagaimana dialami bangsa Indonesia pada kurun waktu yang cukup lama dan melelahkan. Oleh karena itu, pikiran Kasman untuk membebaskan bangsa dari hegemoni dan dominasi penjajah atau dominasi asing ini harus direalisasikan. Kasman juga hadir dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada tahun 1928.

Sejak berdirinya organisasi Budi Utomo (1908) yang kemudian terjadi skisme ideologi, ditegaskan bahwa dalam menghadapi kolonialisme seharusnya dan sangat tepat menggunakan model atau cara seperti yang digunakan penjajah. Meski tidak kelihatan dalam diri Kasman Singodimedjo yang diarahkan sebagai intelektual ahli hukum, tetapi sebenarnya sejak mudanya sudah ada benih-benih berorganisasi. Hanya dengan organisasi ia bisa menolong bangsanya. Kemampuannya berorasi bukan hanya disebut "singa di meja", tetapi juga dijuluki "singa podium". Kalau pemerintah kolonial menggunakan organisasi modern, maka orang bumiputera dalam menghadapinya juga harus menggunakan organisasi serupa. Organisasi modern harus dihadapi dengan organisasi modern pula, sebab organisasi tradisional selama ini yang selalu dipakai bisa dilumpuhkan oleh pemerintah kolonial. Kelemahan organisasi tradisional adalah unsur-unsur organisasi yang terdiri dari pemimpin, ideologi, dan massa sangat organis dan jika pemimpinnya nonaktif sulit mendapatkan penggantinya, sedangkan dalam organisasi modern pemimpin atau ketuanya setiap saat bisa diganti sehingga organisasi berjalan kembali (Pranoto, 1994).

JIB adalah organisasi lokal untuk menghimpun anggotanya pemuda Muslim. Organisasi ini lahir pada 1925 berbarengan

dengan organisasi lokal lainnya yang ingin menumbuhkan nasionalisme berdasarkan nilai-nilai agama Islam. Selain organisasi berwadah islamisme, ada juga organisasi yang berbasis nasionalisme dan sosialisme. Tentu saja, kondisi sosio-politik dulu lain dengan zaman sekarang. Artinya, pemerintah kolonial menghadapi realitas aliran politik dan ideologi yang berbeda dengan sekarang. Aktivitas Kasman dalam organisasi diawali dengan bergeraknya di JIB, nantinya setelah proklamasi dan era demokrasi mulai tumbuh di republik tercinta ini, yaitu berdirinya partai-partai politik, di mana ia masuk dalam organisasi politik. JIB terus berkembang yang dalam perkembangannya diwadahi oleh *Majlisul Islam A'la Indonesia* (MIAI, 1937). Posisi-posisi mana yang diduduki Kasman, tentunya tetap posisi pimpinan (Benda, 1983: 111-119).

Siapa saja yang ada di organisasi itu untuk meneruskan cita-cita membangun kekuatan Islam melawan pemerintah kolonial Belanda. Sudah pasti Kasman Singodimedjo menjadi murid pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan. Selain itu, kolegalitas sesama aktivis Muhammadiyah sangat kuat dan akrab, antara lain dengan Ki Bagus Hadikusumo, KH. Abdul Kahar Muzakkir, dr. Sukiman, Farid Ma'ruf, Mas Mansur, Kasman, dan Mohammad Natsir. Demikian pula Kasman Singodimedjo sangat dekat dengan Bung Karno yang diakuinya sebagai pemimpin bangsa. Sebaliknya, Bung Karno mengakui Kasman Singodimedjo sebagai orang yang berpandangan luas dan dekat dengan Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo bisa dicairkan keteguhan hatinya tentang betapa kuatnya pendirian mengenai "hilangnya" tujuh kata dalam Piagam Jakarta hanya oleh Kasman. Meskipun hilang, ia meyakinkannya dalam waktu dekat akan ditemukan pada Sidang Konstituante. Ada kemungkinan dalam diri Kasman memang "*born to be a leader*" atau "lahir untuk jadi pemimpin", meski tidak boleh dikatakan demikian. Melacak jejak kepemimpinannya dapat dilakukan melalui *track-records* yang panjang selama hidupnya. Jadi, bukan pengalaman karbitan, tetapi pengalaman yang sebenarnya terjadi (*really happened*) dan ditempuh dengan kerja keras.

Merupakan kenyataan bahwa pasukan Jepang dalam enam bulan pertama setelah pasukan Amerika Serikat dihancurkan oleh pasukan Jepang pada 8 Desember 1942 di Pearl Harbor, serangan Jepang terhadap sekutu seperti angin topan yang tidak mampu ditahan. Kekalahan pasukan sekutu di semua medan perang terus berlanjut. Akan tetapi, setelah pertempuran di pantai Timur Australia enam bulan berikutnya terjadi titik balik di mana Jepang harus mundur karena dihantam pasukan sekutu. Keadaan ini berpengaruh terhadap pertahanan di Indonesia. Itulah sebabnya kemudian lahir inisiatif pemerintah Jepang mendirikan Pasukan PETA (Pembela Tanah Air) atau *Jawa Bo-ei Giyu-gun* yang dimotori oleh Gatot Mangkupraja pada 3 Oktober 1943. Militerisasi pemuda Indonesia dalam Peta, juga *seinendan*, *keibodan*, dan *fujinkai* inilah yang memberi jalan kepada anak bangsa mendapat pendidikan militer yang kemudian berguna untuk mempertahankan tanah air (Pranoto, 1994: 129-131). Jadi, pemerintah pendudukan Jepang memberi jalan ke arah patriotisme yang nantinya bisa digunakan untuk melawan pemerintah pendudukan Jepang dan mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu serta agresi Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.

Demikian pula pada masa pendudukan Jepang yang waktu itu sedang dalam Perang Dunia II, Jepang harus mempertahankan Indonesia dari serangan sekutu. Untuk kepentingan itulah, terjadi rekrutmen perwira pribumi dan Kasman Singodimedjo akhirnya terpilih sebagai *daidancho* (komandan) batalyon pasukan PETA. Rekrutmen perwira PETA yang pertama dilakukan di pusat latihan Bogor. Kasman Singodimedjo ditempatkan di Jagamonyet Jakarta. Ia sebenarnya bermaksud menolak dengan cara mereduksi kesehatannya agar ditolak pada waktu tes kesehatan. Anugerah juga tidak dapat ditolak, bahkan setelah selesai latihan pasukan PETA pertama di Bogor, Kasman Singodimedjo harus memimpin batalyon PETA (Kertapati, 1961: 82-283).

Mengenai “semangat keprajuritan” yang dimiliki Kasman Singodimedjo, tidak diragukan lagi. Hal ini dapat dibuktikan betapa beratnya tanggung jawab sebagai *daidancho* dalam menjalankan tugas kemiliteran dalam pemerintahan fasisme

Jepang untuk berperang melawan sekutu. Terkait dengan tersebut, ia seperti dikutip H.J. Benda, mengatakan:

“The religion of Indonesian people ... orders them to become fighters... Remember that Muslims who die through participation in this war will die in holy cause, who in the hereafter will forever live by the side of Allah, blessed with His favors” (Benda, 1983: 141).

Dapat ditambahkan bahwa “semangat keprajuritan” Kasman Singodimedjo sudah merembet dan menyebabkan terjadinya resistensi di beberapa *daidan* di Jawa. Resistensi tersebut dipicu oleh tekanan-tekanan dan penderitaan masyarakat yang tidak manusiawi, seperti pengumpulan padi, pengerahan *romusha*, *yugun ianfu*, dan lain-lain. Nasionalisme dan perlawanan Peta terhadap Jepang terjadi di berbagai tempat; di Blitar perlawanan berlangsung di bawah *Shodancho* Supriyadi, 14 Februari 1945, Gumilir Cilacap di bawah *Shodancho* Kusaeri, 21 April 1945, juga resistensi di pesantren Sukamanah, Tasikmalaya di bawah pimpinan KH. Zainal Mustofa, Oktober 1944, dan juga terjadi di beberapa desa di Indramayu.

Pada 8 Februari 1944, dalam parade *Daidan* Peta Jakarta, Kasman Singodimedjo menerima pataka (*daidanki*) dari *Saiko Sikikan* Kumakichi Harada di Istana Gambir. Perwira Peta lainnya adalah *Chudancho* Abdul Latief Hendraningrat (Komandan Pasukan) dan *Shodancho* Singgih (Komandan Peleton). Dua perwira Peta ini ikut aktif dalam peristiwa upacara pembacaan teks Proklamasi 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56, Jakarta sebagai pengibar Bendera Merah Putih sekaligus bertanggung jawab atas keamanan dan jalannya upacara agar terbebas dari campur tangan mata-mata serdadu Jepang (*kempeitai*) dan kesemuanya itu ada di bawah perintah *Daidancho* Kasman (Kertapati, 1961: 82-83).

Mengenai bagaimana kuatnya pendirian Kasman Singodimedjo, dapat dituturkan sebagaimana berikut. Pada tanggal 16 Agustus, pagi-pagi semua *daidancho* Peta di Jawa dikumpulkan di Bandung. *Sebu Saka* (Jenderal yang mengepalai Peta di Jawa) memberitahukan bahwa Jepang telah menyerah

pada sekutu. Senjata-senjata dan alat perang harus diserahkan kepada Jepang, artinya Peta dilucuti. Pada malam hari, dalam pertemuan dengan para *daidancho*, ia mengatakan bahwa ia tidak mempunyai niat menjadi *daidancho* jika bukan karena paksaan. Ia menolak dilucuti, artinya dengan senjata itu ia akan terus berjuang. Ia pun mengusulkan supaya semua *daidancho* juga berpendirian seperti dirinya. *Daidancho* yang setuju diajak berjuang bersama dan yang tidak setuju agar tidak menghalang-halangi. Kalau menghalangi akan ditembak olehnya. Pernyataan terhadap para *daidancho* ini merupakan pendirian perjuangan kemerdekaan yang sangat kuat (Hatta, 1972: 40-41; Wirasoeminta, 1995). Ketika Republik Indonesia, sebagai negara merdeka belum mempunyai alat keamanan negara, maka untuk kepentingan dan mengawal republik harus dibentuk pasukan keamanan yang disebut Barisan Keamanan Rakyat (BKR). Otto Iskandardinata diangkat sebagai komandan BKR dan Kasman sebagai wakilnya. Akan tetapi, tidak berapa lamanya BKR berubah posisinya bukan lagi sebagai barisan keamanan namun menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945 yang akhirnya menjadi lebih sah sebagai tentara RI, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 1947 (Lubis, 2005).

Dalam sejarahnya, ketika republik ini membutuhkan anak bangsa terbaik, Kasman Singodimedjo terpilih sebagai Ketua KNIP. Namun jabatan ini tidak lama, karena setelah itu digantikan oleh Sutan Syahrir. Posisi Kasman Singodimedjo masih tetap di teras birokrasi pemerintahan Republik Indonesia, yaitu Wakil Jaksa Agung dan ia diangkat menjadi Jaksa Agung pada 6 November 1945. Pikiran-pikirannya yang kreatif, dinamis, dan reformis sudah sewajarnya jika memperbarui berbagai bidang kerja di kejaksanaan. Adapun reformasi yang dilakukan mencakup bidang birokrasi, administrasi, dan personalia. Ia yang berpandangan luas, meskipun hanya menjabat dalam waktu singkat namun sangat bermanfaat bagi kemajuan lembaga kejaksanaan saat itu.

Islam di Indonesia adalah kekuatan besar, termasuk kekuatan menentang kolonialisme Belanda atau fasisme Jepang. Oleh karena itu, pihak kolonial ingin mendekati kekuatan Islam

meskipun di dalamnya terjadi fragmentasi, seperti antara yang *urban* dan *rural*, antara elite modern dan elite tradisional, antara yang resisten dan yang kooperatif. Semua kelompok-kelompok tersebut telah diajak berunding dan oleh pihak penguasa dijadikan partner kerja secara internal dan eksternal. Oleh karena itu, pada 1943 Jepang membubarkan MIAI dan menggantikannya dengan *Majlisul Islam Ala Indonesia* (Masyumi). Pilihan pemerintah Jepang jatuh pada KH. Hasyim Asy'ari yang mewakili santri rural. Namun dalam perjalanannya, organisasi itu kemudian diisi oleh elite Islam modern. Pada kesempatan inilah Kasman bisa menduduki jabatan penting dalam organisasi itu. Ia memang mendambakan kedudukan ketua organisasi guna menyatukan langkah umat Islam menghadapi pemerintah fasisme Jepang. Paska kemerdekaan, kemudian berdiri organisasi ini setelah pemerintah membuka kran berdirinya partai-partai politik pada 1946 dengan diumumkankannya Maklumat Wakil Presiden No. X. Hanya beberapa bulan paska proklamasi, dimulailah era demokrasi parlementer pada masa Perdana Menteri Sutan Syahrir pada November 1946 (Pranoto, 2001: 145-153).

Kasman Singodimedjo sendiri duduk di pimpinan teras Masyumi dan mewakili Masyumi dalam Dewan Konstituante pada 1955. Kasman Singodimedjo selaku politikus Masyumi tetap gigih dan konsisten membela kepentingan umat Islam. Sejalan dengan perkembangan politik Indonesia saat itu, politik Masyumi berada di luar jalur politik pemerintah Soekarno. Dapat dikatakan bahwa Masyumi menjadi partai oposisi terhadap pemerintah, meskipun gagal mengembalikan Piagam Jakarta. Di dalam Dewan Konstituante, tidak ada kata sepakat kembalinya dasar negara seperti yang diinginkan nasionalis religius. Perbedaan politik inilah yang menyebabkannya dianggap ingin menggulingkan pemerintahan Soekarno. Lebih-lebih ketika beberapa orang anggota Masyumi terlibat dalam Pemberontakan PRRI pada akhir dekade 50-an. Proses pengadilan pun menjebloskan Kasman ke dalam penjara selama 2,6 tahun pada 1963 dan baru keluar pada 1966 (Panitia Peringatan Kasman 75 Tahun, 1982; Abdullah, 2012: 376). Pada sisa hidupnya, digunakan untuk terus berpolitik secara formal di pemerintahan,

tetapi masih terus membina umat Islam dalam garis politik Masyumi dan dalam wadah keislaman. Kasman Singodimedjo ternyata tidak kapok dan sesuai dengan semboyannya ia masih terus berjuang: "Sekali berjuang tetap berjuang", berjuang tanpa istirahat (Panitia Peringatan Kasman 75 Tahun, 1982).

PERSIAPAN KEMERDEKAN: PENYATUAN BANGSA YANG TERKOYAK

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritu Tyunbi Tyoosakai* didirikan untuk membicarakan penyelidikan guna melakukan persiapan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian dan mengapa hal ini bisa terjadi? Kekuasaan fasisme Jepang yang sangat keras dan otoriter memberi kesempatan kepada elite nasionalis Indonesia dan diizinkan melakukan persiapan kemerdekaan. Harus diingat bahwa perkembangan lembaga-lembaga yang mengarah ke usaha kemerdekaan sangat tergantung pada kemajuan dan kemunduran pasukan Jepang dalam Perang Pasifik. Pikiran sehat mengatakan bahwa kekuasaan Jepang melemah karena pasukan Jepang mengalami kekalahan berlanjut di semua medan Perang Pasifik.

BPUPKI disahkan pada 28 Mei 1945, kemudian melakukan sidang-sidangnya sampai 01 Juni 1945. Sidang selanjutnya dilaksanakan pada 10-17 Juli 1945. Meski lembaga ini ada di bawah bayang-bayang pemerintah pendudukan Jepang, namun tetap mendapat kepercayaan. Bahkan, di sana berlangsung perdebatan mengenai semua hal yang berhubungan dengan berdirinya negara baru. Sidang-sidang BPUPKI meliputi Dasar Negara, Wilayah Negara, Warganegara dan Rancangan UUD 1945, dapat dilangsungkan meski terjadi perdebatan. Dr. Radjiman Wedyodiningrat selaku ketua BPUPKI memandu jalannya sidang. Di antara sidang-sidang yang terlaksana, pembahasan yang menuai perdebatan adalah mengenai dasar negara. Dalam sidang Panitia Sembilan terjadi perbedaan pendapat antara nasionalisme religius dan nasionalisme sekuler yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) pada 22 Juni 1945 (Anshari, 1983). Nasionalisme religius yang diwakili oleh Ki

Bagus Hadikusumo mengajukan usul agar dasar negara berbunyi “... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Hal inilah yang hampir menghanguskan tekad bangsa untuk menghasilkan persatuan Indonesia. Akan tetapi, patut disyukuri karena bisa dicapai kompromi di antara kedua belah pihak yang bersilang pendapat; antara nasionalis. Ki Bagus Hadikusumo yang semula gigih mempertahankan pendiriannya akhirnya dengan keluhuran pribadinya bisa lilih dan luluh serta bisa menerima saran Mohammad Hatta dan Teuku Muhammad Hasan. Kesemuanya itu demi persatuan Indonesia (Bahar, 1995; Kusuma, 2016).

Menjelang kapitulasi Jepang dengan Sekutu pada 15 Agustus 1945, pemerintah fasisme Jepang yang sudah sangat lemah mengizinkan didirikannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritu Tyunbi linkai* pada 12 Agustus 1945. Anggota PPKI berjumlah 26 orang termasuk 6 anggota tambahan. Diperlukannya tambahan anggota PPKI karena kompleksitas persoalan yang timbul setelah proklamasi dan posisi Indonesia sebagai negara baru merdeka dan berdaulat. Nama-nam yang terlibat adalah RAA Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singodimedjo, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr. Subardjo. Adanya tambahan anggota sebanyak 6 (enam) orang diperkirakan sudah direncanakan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta selaku Ketua dan Wakil Ketua PPKI. Sebab, masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah perbedaan pendapat tentang dasar negara sebagaimana dibicarakan dalam sidang BPUPKI yang tampaknya belum tuntas dan bakal terjadi perbedaan pendapat yang berlarut-larut. Untuk menyelesaikan hal tersebut, Dwi Tunggal Bung; Karno dan Bung Hatta sepakat minta pendapat Mr. Kasman, seorang yang mewakili elite religius, untuk bisa mengakhiri kontroversi mengenai Piagam Jakarta (Bahar, 1995).

Dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 akhirnya dicapai kesepakatan dua pihak yang berbeda pendapat, khususnya pihak nasionalis religius yang diwakili Kasman Singodimedjo, Mohammad Hatta, Wachid Hasyim, dan Ki Bagus Hadikusumo untuk menyelesaikan kontroversi itu. Meski sampai hari ini

kontroversi mengenai hal tersebut belum berakhir. Tujuh kata yang dihilangkan dari bagian kalimat: "... dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", berimplikasi sangat besar bagi kehidupan republik tercinta ini. Kebhinekaan Indonesia harus dijaga sehingga sejak awal harus dicapai konsensus meski di bawah permukaan masih saja terjadi konflik-konflik dalam berbagai bentuk. Akhirnya, Kasman lah yang bersedia menghapus tujuh kata Piagam Jakarta itu dan menyelesaikan masalah pelik yang mengancam persatuan bangsa di dalam Republik Indonesia muda. Hasil konsensus tersebut adalah bahwa Pembukaan UUD 1945 berisi teks yang kita kenal hingga sekarang (Aning S, 2002: 102; Kusuma, 2016).

Pada 19 Agustus 1945, para pemuda mengundang Soekarno, Hatta, Kasman, dan Sutan Syahrir untuk berembuk mengenai keberadaan tentara republik. Soekarno ragu dengan berdirinya tentara republik karena sekutu pasti tidak setuju. Namun, pemuda berpendapat bahwa eksistensi tentara republik adalah masalah perhitungan (politik). Keraguan lain adalah karena pasukan Jepang, meskipun sudah takluk pada sekutu tetapi masih bersenjata lengkap. Akhirnya keraguan itu bisa diselesaikan setelah Bung Karno dengan menanyakan kepada Kasman Singodimedjo, yang mantan *daidancho* PETA, bahwa yang harus dibentuk adalah badan keamanan (Wirasoeminta, 1995; Notosusanto, 1974; Rahardjo, 1993). Kemudian, Bung Karno mengumumkan berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Artinya, setelah Negara RI berdiri harus mempunyai tentara dan sebagai kelengkapan lain harus dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai cikal-bakal parlemen Indonesia (Malik, 1970: 67).

PERSATUAN BANGSA: MERAIH MASA DEPAN

Cita-cita *Majlisul Islamil A'laa Indonesia* (MIAI) yang berdiri pada tahun 1937, terus berjalan selama pemerintahan Hindia Belanda. Akan tetapi, setelah kekuasaan Jepang berakhir organisasi ini dianggap kurang efektif. Jepang kemudian berusaha membuat format baru berupa organisasi yang benar-benar menjadi aliansi Bala Tentara Dai Nippon. Terkait dengan upaya

tersebut, Jepang harus merekrut kekuatan Islam untuk membantu kemenangan Perang Pasifik (Benda, 1983). Meskipun organisasi-organisasi Islam terfragmentasi dan ada yang mendominasi, namun hal tersebut sangat realistis sebagai kekuatan umat sehingga harus dibina di bawah *shadow* penguasa Dai Nippon. Jepang tetap ingin sebagai penguasa sehingga organisasi Islam harus tersubordinasi sebagaimana kenyataannya perubahan dari MIAI ke Masyumi mula-mula terjadi pada 24 Oktober 1943. Beberapa tahun kemudian baru muncul pada 7 November 1945 sebagai partai politik Masyumi. Sejalan dengan perkembangan zaman, Masyumi berpedoman pada ajaran Islam dan politik untuk mencapai kesatuan umat. Meskipun demikian, partai ini dilarang pemerintah Soekarno pada 1960 karena mendukung gerakan PRRI.

Kembali lagi, “hilangnya” tujuh kata dalam Piagam Jakarta diterima dengan besar hati oleh elite nasionalis-religius. Meskipun pendapat mereka kuat dan dipertahankan dengan gigih, namun karena situasi persatuan sangat mendesak dan memerlukan penyelesaian segera akhirnya elite nasionalis-religius menerima konsensus dengan pihak nasionalis sekuler. Elite religius yakin bahwa yang “hilang” itu dalam waktu dekat bisa ditemukan kembali. Oleh karena itu, dengan besar hati mereka “mundur selangkah untuk maju beberapa langkah” dengan tetap membesarkan hati demi menjaga persatuan untuk keperluan kolektif dan tentunya dengan harapan akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Dengan mundur selangkah, elite nasionalis religius bukan berarti mereka tidak berjuang. Mereka terus memperjuangkan kembalinya tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu, meskipun gagal diperjuangkan di Konstituante.

Para elite-religius berpandangan luas bahwa kondisi Indonesia yang multi-etnik perlu dijaga demi persatuan. Kebhinekaan memang sesuatu *given* dan harus diterima serta dikelola dengan baik demi persatuan bangsa. Persatuan adalah modal utama terbentuknya NKRI dan eksistensi negara ini karena adanya persatuan. Masyumi yang semula merupakan perkumpulan umat Islam kemudian menjadi partai politik. Paska kemerdekaan dan iklim baru berupa situasi demokrasi

mendukung lahirnya partai-partai politik. Perebutan ketua parlemen terjadi dan kabinet jatuh bangun sehingga 1945-1959 ditandai dengan berlangsungnya kabinet parlementer yang setiap kabinet rata-rata hanya hidup kurang dari dua tahun. Rebutan kuasa sehingga yang menang menduduki kursi Perdana Menteri yang dimulai Sutan Syahrir. Perebutan pucuk pimpinan kemudian terjadi antara partai politik Islam dengan partai komunis, dan juga partai nasionalis (Pranoto, 2007: 145-153).

Pada tahun 1950, wakil partai Masyumi duduk dalam Konstituante dan tetap memperjuangkan kembalinya tujuh kata dalam Piagam Jakarta, namun gagal. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soekarno yang sentralistik dan dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendorong Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) melakukan oposisi terhadap pemerintah. Sejalan dengan perkembangan sejarah, yaitu munculnya gerakan PRRI yang menurut kacamata pemerintah adalah gerakan separatisme dan karena sebagian anggota Masyumi terlibat dalam gerakan itu, maka pemerintah mengambil keputusan untuk membubarkan Masyumi dan PSI pada 1960 (Abdullah, 2012: 376). Ia pun dituduh akan menggulingkan pemerintahan Soekarno. Ia kemudian ditangkap dan dipenjara selama 2,6 tahun dari 1963-1966. Sebagai pejuang, selepas dari penjara, Kasman Singodimedjo tetap sebagai umat Islam yang saleh. Kehidupan Kasman tidak tergantung dari jabatan formal. Ia sebenarnya adalah pengusaha yang mempunyai aktivitas di luar pemerintahan.

“Legawa karena hidup itu perjuangan” adalah semboyan hidup Kasman. Ternyata, sebagaimana dalam biografinya, hal tersebut memang menjadi kenyataan. Kasman tak habis-habisnya berjuang demi kemaslahatan umat dan kesejahteraan serta kebahagiaan bangsa. Karir yang diperolehnya ditempuh dengan kerja keras dan disertai ketakwaan dan doa menghasilkan karir yang gemilang. Semuanya itu adalah anugerah. Dalam diri Kasman memang terkandung motivasi yang kuat untuk memobilisasikan diri (*vertical mobility*). Hal ini belum banyak dilakukan oleh anak bangsa pada waktu itu. Kebanyakan yang berhasil memperoleh posisi saat itu karena berhasil mengenyam sekolah lanjut, dan mereka adalah anak priyayi atau ambtenar.

Di luar itu, anak *wong cilik* seperti Kasman, mestinya tidak dapat kebagian “kue kolonial” yang mengangkat dirinya menjadi seorang yang prestisius pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Hal yang penting bagi Kasman adalah “*onward*”, alias maju terus entah sampai di terminal mana. Akhirnya, *government reward* dari Pemerintahan Republik Indonesia menjemput pada 8 November 2018. Presiden H. Joko Widodo memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Prof. (Dr. HC). Mr. Kasman Singodimedjo bersama lima orang pahlawan nasional lainnya, yaitu AR Baswedan, Pangeran Mohammad Noor, KH. Sjam’u, Hj Andi Depu, dan Depati Amir.

Sudah barang tentu penghormatan pemerintah berupa gelar Pahlawan Nasional mengingat jasa dan pengorbanan mereka untuk kepentingan negara dan bangsa serta pengabdianya untuk pembangunan tiada batas. Dalam biografinya tertulis dengan tinta emas dan sekaligus dengan mottonya bahwa “Hidup itu Berjuang”. Dengan kata lain, jika ingin mengenal Kasman kenalilah mottonya itu. Pada 25 Oktober 1982, Kasman pulang ke rahmat Allah dalam usia 78 tahun. Riwayat dan perjuangannya masih bisa dibaca oleh generasi milenial dan generasi mendatang dalam ensiklopedia, kumpulan Pahlawan Nasional Indonesia, dan 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia, dan lain-lain. Buku-buku tersebut semua dapat dibaca guna menanamkan wawasan dan kepribadian pembacanya terutama dalam kehidupan seorang pemimpin yang selama hidupnya penuh dengan perjuangan.

Kiranya, dalam konteks Indonesia kontemporer ini, sangat penting untuk diperhatikan butir-butir kehidupan yang bisa disarikan sebagai *value and character education* berupa: keberanian (*courage*), patriotisme (*patriotism*), kewarganegaraan (*citizenship*), jujur (*honesty*), apa adanya (*fairness*), hormati orang lain (*respects for others*), kebaikan (*kindness*), kerjasama (*cooperative*), hormat dan kontrol pribadi (*self respect & self control*), kebaikan (*courtesy*), dan kasihan (*compassion*). Butir-butir itu dipastikan mampu menginspirasi generasi milenial sebagai model pembangunan karakter mereka. Bagi para remaja, umumnya butir-butir itu berfungsi sebagai inti pendidikan moral *for creating a better world*

dan membentuk *various achievements, attitude and value*. Sebagai kata kunci tentang biografi Prof. Kasman Singodimedjo, tidak ada kata lain jika tidak diabstraksikan sebagai “Muslim-Nasionalis Tangguh”, “Pahlawan Nasional Penginspirasi Bangsa”, atau “Tokoh Nasional Pencerah Disintegrasi Bangsa”.

PENUTUP

Prof. Dr. (Hon.). Mr. Kasman Singodimedjo adalah sosok panutan bagi manusia sezamannya dan juga bagi manusia milenial. Bagi manusia sezamannya, memang diperlukan karena gersangnya manusia mendapat kesempatan seperti dirinya. Akan tetapi, bagaimana dengan kondisi sekarang, terutama bagi generasi milenial sekarang ini kering dengan pencerahan? Melalui transformasi karakter dan pengalaman hidup yang sangat berharga di masa lampau dari seorang tokoh, sangat diperlukan. Transformasi ini masih tetap relevan dan berguna bagi generasi saat ini. Kesadaran tinggi memimpin bangsa yang masih dalam kondisi keterbelakangan (*backwardness*) ada pada pribadi Kasman. Hal ini terbukti pada kesediaannya bergabung hampir dalam organisasi massa setiap zaman sejak JIB, Muhammadiyah, MIAI, Masyumi, dan juga organisasi formal seperti Peta, BKR, KNIP, Kejaksaan, dan lain-lain.

Selama bergabung dalam beberapa organisasi, Kasman selalu tampak sukses dalam menjalankan tugas-tugasnya demi kemaslahatan umat. Ketika Kasman Singodimedjo masuk dan mewakili Masyumi di Dewan Konstituante pada tahun 1950-an, ia harus mewakili suara Masyumi dalam politik yang sebenarnya, tanpa basa-basi dan terus terang. Pada waktu itu, perkembangan politik di Indonesia sudah tampak terjadinya skisme antargolongan politik. Wahana partai politik khususnya Masyumi selalu berseberangan dengan sikap politik pemerintah yang di satu pihak memang ada pihak lawan politik antagonistik yang ada di belakang pemerintah. Kondisi politik ini terus berkelanjutan sehingga Masyumi dianggap lawan politik pemerintah, lebih-lebih ketika gerakan PRRI pecah, Partai Masyumi dianggap sebagai partai politik yang melawan kebijakan politik pemerintah pusat dan men-*back up* gerakan

separatisme. Aktivitas Masyumi pun dilarang oleh pemerintah dan para pemimpinnya diasingkan di dalam terali besi.

Konflik politik yang berhadap-hadapan berlangsung bahkan terus meruncing dan tampaknya tidak bisa diselesaikan secara mufakat. Kelompok PRRI yang di-*back up* Masyumi merupakan *dissatisfaction group* sosial-politik yang dianggap oleh pemerintah menyebarkan dan merealisasikan gagasan separatisme dan regionalisme. Sebagai Muslim-Nasionalis, Kasman selalu bergerak dalam etika dan bingkai keislaman. Meskipun berbeda politik dan di situ terjadi perbedaan politik yang sangat tajam, namun bisa dikendalikan dengan arif dan bijak. Sebab, politik adalah perebutan kuasa lewat perbandingan *power*, siapa kuat atau golongan mana yang lebih kuat di situ akan berkuasa dan tentu menghegemoni partai politik lain. Ini sudah sangat lumrah dalam dunia perpolitikan.

Figur humanis yang tampak pada diri Kasman Singodimedjo, memang sudah tampak sejak kecil. Ia berkawan dan membantu sesama tanpa ada rasa kurang nyaman. Baginya, hal tersebut merupakan kewajiban sebagaimana yang ditanamkan oleh keluarganya. Meskipun terjadi persaingan sengit dengan lawan politiknya, namun ia sebagai manusia menganggap bahwa lawannya juga makhluk ciptaan Allah swt yang memiliki status yang sama. Hal ini ditunjukkan oleh pengakuan dan perasaan yang luhur dalam pribadinya ketika melayat dan turut mengantarkan jenazah Almarhum Presiden Soekarno ke tempat peristirahatan terakhir di Blitar.

Kasman Singodimedjo berpendirian tegas namun fleksibel. Hal ini dibuktikan ketika ia membisik Ki Bagus Hadikusumo untuk melunakkan pendapatnya agar terbangun konsensus dengan pihak yang menolak Piagam Jakarta. Hal ini ternyata berhasil dan terjadilah suasana politik damai di permukaan, tetapi di bawahnya masih bergejolak. Ini merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri karena mayoritas umat Islam di Indonesia selayaknya memberikan *guide line* kepada mayoritas bangsa Indonesia. Namun demikian, berkat keluhuran para pemimpin Muslim akhirnya dicapai konsensus demi persatuan dan keselamatan bangsa.

Kasman Singodimedjo adalah tokoh yang harus diteladani generasi milenial saat ini. Harus diakui bahwa generasi milenial “kering contoh” atau panutan yang harus diteladani karena ditutup oleh “kesibukan teknologi informasi” sehingga tidak mampu menelorkan figur yang tertempa zamannya untuk memberikan panutan pada generasi berikutnya. Lagi pula, pejuang zaman kolonial berbeda dengan “pejuang” milenial. Pejuang dulu lebih terlibat kepentingan tanpa pamrih, sedangkan yang ada sekarang adalah pejuang yang telah sedikit banyak terlibat dalam komersialisasi dan komodifikasi. Revolusi Industri 4.0 memberikan kontribusi bagi terdegradasinya kesediaan diri untuk berkorban. Gaya hidup hari ini jika berkorban mesti ada *reward*-nya yang tentu saja materi menjadi parameternya. Lalu bagaimana caranya bagi generasi milenial untuk bisa mendapat figur panutan? Salah satu caranya adalah membuka-buka biografi tokoh bangsa seperti Kasman Singodimedjo yang karismatik, berkarakter, serta perilakunya yang jujur. Akan tetapi, jangan lupa bahwa setiap zaman tentu ada *way out*-nya sendiri untuk bisa memecahkan persoalan, artinya setiap zaman memiliki solusi sendiri dan itu merupakan anak zaman.

Jasa Kasman Singodimedjo tidak terhitung nilainya. Ia adalah manusia multitalenta, pemecah batu granit persoalan Kemerdekaan Indonesia dan tentunya sebagai pencair kebuntuan, penghilang gala konflik, penemu gagasan luhur, dan pembangun persatuan. Kasman benar-benar adalah seorang negarawan yang memiliki dedikasi tinggi untuk nusa dan bangsa. Ia adalah seorang Muslim yang taat pada ajaran agama dan sebagai seorang nasionalis yang tidak diragukan keperpihakan dan kecintaannya pada tanah air. Bagi generasi milenial yang menjadi penyambung estafet kepemimpinan bangsa di masa datang, berkacalah dan ikutilah keteladanannya sebagaimana yang tertulis dalam tinta emas biografi Prof. Mr. Kasman Singodimedjo untuk membangun bangsa Indonesia ke masa depan yang gemilang (Sujarwanto, *et al.*, 1990).

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, B.R.O'G. 1972. *Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1946*. Ithaca: Cornell U.P.
- Aning S, Floriberta. 2002. *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia. Biografi Singkat Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20*. Yogyakarta: Narasi.
- Anshari, Endang Saifuddin. 1983. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasionalis, Islami dan Nasionalis 'Sekuler' tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949*. Jakarta: Rajawali.
- Bahar, Saafoedin. 1995. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*. Jakarta: Setneg RI.
- Benda, H.J. 1983. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation*. Leiden: KITLV.
- Darban, Ahmad Adaby. 2010. *Sejarah Kauman*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Hatta, Mohammad. 1972. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Tintamas.
- Kertapati, Sidik. 1961. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Pembaruan.
- Kusuma, RM. A.B. 1916. *Lahirnya UUD 1945*. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Kusuma, RM. A.B. 2016. *Menggugat Arsip Nasional*. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Lubis, Nina Herlina, et al. 2005. *PETA: Cikal Bakal TNI*. Bandung: Lemlit Unpad.
- Malik, Adam. 1970. *Riwayat Proklamasi 17 Agustus 1945*. Jakarta: Wijaya.
- Manus, M.P.B. et al. 1983. *Tokoh-tokoh BPUPKI I & II*. Jakarta: Depdikbud.
- Notosusanto, Nugroho. 1974. *Tentara Peta pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman. 1982. *Hidup itu Berjuang Kasman Singodimedjo 75 Tahun. Hidup itu Berjuang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Pasha, Musthafa Kemal dan Ahmad Adaby Darban. 2002. *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah.
- Pranoto, Suhartono W. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi , 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pranoto, Suhartono W. 2001. *Revolusi Agustus: Nasionalisme Terpasung dan Diplomasi Internasional*. Yogyakarta: Lapera.
- Pranoto, Suhartono W. 2007. *Kaigun: Penentu Krisis Proklamasi*. Yogyakarta: Impulse Kanisius.
- Pusponegoro, Marwati Djoned (eds.). 1972. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Rahardjo, Pamoe. 1993. *Tentara Peta*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1992. *Psikologi Lengkap*. Jakarta: Grasindo.
- Sujarwanto, Haedar Nashir, dan M. Rusli Karim. 1990. *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan: Sebuah Dialog Intelektual*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Taufik Abdullah (Eds.) 2012. *Indonesia dalam Arus Sejarah*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Wirasoeminta, Sanusi. 1995. *Peta dan Proklamasi 17 Agustus 1945*. Yogyakarta: Pustaka Nusatama. 🗨

MR. KASMAN SINGODIMEDJO: PANDANGAN TENTANG NASIONALISME DAN ISLAM

Sri Margana & Siti Utami Dewi Ningrum

PENDAHULUAN

Mr. Kasman Singodimedjo merupakan salah satu putra terbaik Muhammadiyah. Kiprahnya dalam dunia politik tidak hanya bergerak di internal Muhammadiyah, tetapi juga secara luas dalam perjuangan bangsa Indonesia baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Untuk dapat memahami pemikiran Kasman Singodimedjo tentang nasionalisme dan Islam, kiranya perlu lebih dulu memahami perkembangan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi Islam di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan pemetaan pemikiran Muhammadiyah dalam berpolitik dengan sikap dan pemikiran politik Kasman Singodimedjo.

Merle Calvin Ricklefs melihat awal abad ke-20 sebagai masa munculnya gerakan-gerakan baru dari masyarakat yang berasal dari kalangan elite baru dan masyarakat biasa. Mereka muncul dalam organisasi-organisasi baik yang bersifat keagamaan, kebudayaan, pendidikan maupun politik dan ada pula yang bersifat saling silang (Ricklefs, 2008: 357). Fenomena ini tidak luput dari kalangan Islam yang sedikit banyak membawa pengaruh pada masa pergerakan nasional melalui organisasi-organisasi Islam, seperti Muhammadiyah (1912) dan *Jong Islamieten Bond* (1925). Tokoh-tokoh dan gerakan organisasi

tersebut tidak hanya bertujuan untuk kemajuan dan kemenangan Islam, tetapi juga melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap umat Islam sebagai sebuah bentuk nasionalismenya.

Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi gerakan Islam didirikan oleh keturunan ulama bangsawan Yogyakarta, Ahmad Dahlan, pada pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Ayahnya, KH. Abu Bakar bin KH. Sulaiman, adalah seorang khatib dan abdi dalem keraton Yogyakarta yang bertanggung jawab dalam urusan agama dan penyelenggaraan shalat Jumat di Masjid Agung Kasultanan Yogyakarta. Ide pendirian organisasi tersebut didapatkan oleh Ahmad Dahlan sepulang dari ibadah hajinya di Mekkah pada 1890 dan 1903, di mana ia terpengaruh oleh gagasan Syeikh Muhammad Abduh. Melalui Muhammadiyah, ia bertekad untuk mengembalikan kemajuan dan semangat Islam melalui beberapa cara, antara lain dengan membersihkan Islam dari ritual non-Islam, merumuskan kembali doktrin agama Islam yang disesuaikan dengan perkembangan zaman yang modern, pembaruan ajaran dan pendidikan Islam, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan dari luar dan melepaskan Indonesia dari kolonialisme (Suwarno, 2010: 12-14;22).

Muhammadiyah kemudian menjadi organisasi yang memasuki berbagai aspek, baik agama, sosial, kebudayaan, ekonomi maupun politik. Dalam berbagai aspek tersebut, Muhammadiyah menyebut dirinya sebagai gerakan Islam dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan sunah. Hal ini kemudian berpengaruh pada pandangan politik Muhammadiyah di mana tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk mengatur kehidupan manusia, tetapi juga bagian dari jalan dakwahnya atau dapat disebut sebagai organisasi non-politik namun tidak anti politik (Syaifullah, 1997: 2-3).

Menurut Syaifullah, setidaknya ada tiga corak perilaku politik Muhammadiyah. *Pertama*, corak revivalisme. Dalam corak ini para pendukungnya menginginkan negara yang bernafaskan Islam, seperti pemikiran Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Muzakir, Mas Mansur dan Sukiman Wirjosandjojo. *Kedua*, corak

modernisme. Corak ini menetapkan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi politik namun tidak anti terhadap politik. Kelompok ini menginginkan pembaruan ajaran Islam melalui usaha-usaha yang telah dilakukan dengan penyesuaian zaman dan mengupayakan kemenangan dunia Islam melalui kerjasama dengan seluruh potensi umat Islam, baik yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan dan politik maupun sebagai individu. Tokoh yang masuk dalam corak ini ialah KH. Ahmad Dahlan. *Ketiga*, corak sekularisme. Pendukung kelompok ini menginginkan agar Muhammadiyah menjadi partai politik. Pandangan tersebut disuarakan oleh H. Agus Salim dalam Muktamar Muhammadiyah 1918 (Syaifullah, 1997: 223-235).

Pada akhir masa pendudukan Jepang dan menjelang kemerdekaan Indonesia, gagasan dan perilaku politik tentang negara Islam mulai muncul di panggung politik, termasuk Muhammadiyah. Banyak tokoh Muhammadiyah yang terlibat dalam sidang-sidang yang merumuskan konsep negara, salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusumo dalam sidang BPUPKI. Ki Bagus Hadikusumo adalah orang yang pemikirannya sangat menginstitusionalisasi Islam. Ia menekankan pentingnya Islam dalam sebuah lembaga untuk alasan ideologi, politik, dan intelektual. Ia selalu mendorong agar Islam menjadi bagian penting dalam lembaga. Ki Bagus Hadikusumo berpendapat bahwa Islam sudah menjadi bagian yang mengakar dari Indonesia dan telah bertahan selama 6 (enam) abad dalam masyarakat Indonesia. Hukum Islam pun telah berlaku dalam masyarakat Indonesia dan menjadi bagian dalam adat istiadat. Hal-hal itulah yang menurutnya menjadikan Islam pantas digunakan sebagai dasar negara (Ending, 2005: 100-104).

Sidang BPUPKI yang bertugas merancang rumusan Undang-Undang Dasar (UUD) berhasil meresmikan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Unsur Islam dan Pancasila tertuang dalam rumusan tersebut dan disepakati oleh Panitia Sembilan yang di dalamnya ada Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, KH. Abdul Kahar Muzakir, H. Agus Salim, Achmad Soebardjo, KH. Abdul Wahid Hasyim, dan Mohammad Yamin (Syaifullah, 1997: 98). Kemenangan Islam

dalam politik Indonesia dalam sidang BPUPKI tersebut tiba-tiba harus direnggut saat sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Adanya unsur syariat Islam dalam dasar negara dinilai akan dapat mendiskriminasi pemeluk agama selain Islam dan menimbulkan perpecahan (Syaifullah, 1997: 120-121). Prawoto Mangkusasmito dan golongan nasionalis Islam, wakil dari Muhammadiyah, merasa kecewa dengan rencana tersebut dan menilainya sebagai sebuah pengkhianatan dan ditengarai sebagai kekalahan politik Islam. Meskipun demikian, ada pandangan pula dari Alamsyah Ratu Perwiranegara yang menyebutkan bahwa keputusan tersebut merupakan hadiah dari umat Islam untuk menjaga kesatuan Indonesia (Ending, 2005: 100-104; Syaifullah, 1997: 118-122). Masalah kedudukan Islam dalam masyarakat dan negara tersebut terus muncul hingga akhir tahun 1950-an. Kondisi tersebut, dalam pandangan Deliar Noer, lazim dialami oleh negara berkembang dengan mayoritas penduduknya Muslim, di mana di Indonesia, partai Islam berusaha memasukkan unsur Islam dalam kehidupan bernegara. Mereka berpendapat bahwa negara yang melaksanakan ajaran Islam tidak hanya memberikan keuntungan bagi umat Islam, namun bagi seluruh masyarakat (Noer, 1982: 5).

Dari latar belakang tersebut, muncul pertanyaan menarik, yaitu dalam corak perilaku politik yang seperti apa Kasman Singodimedjo dapat ditempatkan? Bagaimana pula hal tersebut kemudian mempengaruhi relasinya dengan Soekarno dan golongan nasionalis lainnya? Seperti apa pula pemikiran nasionalisme Kasman Singodimedjo serta pandangannya tentang minoritas dan mayoritas di Indonesia? Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penulis menemukan buku yang sangat menarik yang ditulis oleh Kasman Singodimedjo sendiri. "*Renungan Dari Tahanan*" adalah salah satu buku yang sangat penting yang tidak hanya sebagai memorinya pada masa terberat dalam hidupnya, tetapi juga secara rinci menjelaskan ideologinya. Buku tersebut ditulis saat Kasman Singodimedjo menjalani penahanan pada tahun 1960-an. Buku tersebut ditulis di Jl. Darmawangsa VI sejak 12 November 1963 dan selesai pada 03 Desember 1963 di tahanan Puntjak. Buku tersebut menjelaskan

pandangan-pandangannya tentang perjuangan Islam gaya baru, Pancasila, Manipol Usdek dan poros Nasakom. Selain itu, dalam bukunya secara implisit, ia banyak menilai kawan dan lawan politiknya saat itu. Melihat pentingnya pengalaman dan pemikiran tersebut, maka tulisan ini akan kembali menuangkan apa-apa yang telah diceritakan oleh Kasman Singodimedjo tentang nasionalisme dan Islam dalam bukunya.

PERGERAKAN, KAWAN DAN LAWAN MR. KASMAN DALAM PANGGUNG POLITIK

Kiprah Kasman Singodimedjo di dunia pergerakan dimulai sejak dirinya aktif di Muhammadiyah pada tahun 1920-an. Selain di Muhammadiyah, ia juga tergabung dalam *Jong Java* bersama Gus Muso (Ki Musa al-Mahfudz) dan Suhodo. Pemuda-pemuda tersebut kemudian mulai memikirkan cara-cara untuk menyatukan kerenggangan yang terjadi di kalangan pemuda. Menurut mereka, ajaran Islam merupakan hal yang dapat diterapkan sebagai pemersatu karena Islam merupakan agama mayoritas saat itu. Ide tersebut kemudian disetujui oleh Raden Sjamsuridjal, ketua *Jong Java* dan disampaikan dalam Kongres ke-7 *Jong Java* pada 27-31 Desember 1924 untuk menjadikan Islam sebagai pelajaran wajib dalam *Jong Java*. Sayangnya, usulan tersebut kemudian ditolak. Kelompok pengusul kecewa, namun bangkit kembali dan mendirikan perkumpulan baru bernama *Jong Islamieten Bond* pada 1 Januari 1925 (Bajasut dan Hakiem, 2014: 19-21) Sebagai salah satu pelopor organisasi, Kasman sempat menjabat sebagai ketua *Jong Islamieten Bond* periode 1930-1935. Melalui organisasi tersebut, ia kemudian berjudoh dengan Soepinah Isti Kasiati (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982: 41).

Dari *Jong Islamieten Bond*, gerakan politik Islam Kasman Singodimedjo semakin meluas. Pada tahun 1938, bersama KH. Mas Mansur, Farid Ma'ruf, Sukiman, dan Wiwoho Purbohadidjo ia mendirikan Partai Islam Indonesia di Surakarta.¹ Pada masa pendudukan Jepang, selain sebagai anggota Muhammadiyah, ia

1 (Rakhmat Nur Hakim, <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/21/03440091/Kisah.Kasman.Singodimedjo.Sang.Pemersatu.Islam.dan.Nasionalis>. diakses pada 30 Januari 2019, pukul 10.35 WIB).

juga aktif sebagai Komandan Pembela Tanah Air (Peta) Jakarta (Syaifullah, 1997: 119). Sehari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945, ia diundang oleh Soekarno untuk hadir dalam sidang PPKI mewakili golongan nasionalis Islam dari Muhammadiyah. Sejak saat itu, pergulatan Kasman Singodimedjo dalam dunia politik Islam di Indonesia semakin menguat. Pada saat sidang tersebut, ia menjadi orang yang sangat berjasa dalam menjaga persatuan Indonesia. Konflik yang terjadi antara Ki Bagus Hadikusumo dengan golongan nasionalis sekuler berhasil diselesaikan oleh lobi politiknya. Saat itu, Ki Bagus Hadikusumo yang tidak menyetujui penghapusan 7 (tujuh) kata dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara serta peraturan bernuansa Islam lainnya.

Kasman Singodimedjo menemui dan menjelaskan kepada Ki Bagus Hadikusumo bahwa kondisi Indonesia saat itu belum stabil dan Belanda masih mengintai Indonesia. Konflik yang terjadi di dalam pemerintahan Indonesia akan mempermudah usaha Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Secara bijaksana Kasman membujuk Ki Bagus Hadikusumo untuk menerima permohonan sidang PPKI dan memperjuangkan kembali kemenangan Islam saat kondisi Indonesia lebih stabil. Lobi yang dilakukan sesama orang Muhammadiyah tersebut pun berhasil dilakukan. Ki Bagus Hadikusumo bersedia menerima penghapusan unsur-unsur syariat Islam dalam dasar negara (Syaifullah, 1997: 124-125).

Tugas Kasman Singodimedjo dalam proses pengesahan dasar negara belum selesai pasca sidang PPKI. Ia kembali mengemban tugas untuk memimpin Komite Nasional atau dikenal KNIP. Badan tersebut memiliki tugas yang sangat penting, yaitu sebagai badan eksekutif yang membantu Presiden dalam mengesahkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 dan menyiarkannya secara lengkap di media surat kabar agar diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Ia bersama 137 anggotanya dalam KNIP bertugas menyempurnakan pengesahan konstitusi yang dilakukan oleh 27 orang dalam PPKI. Selama mengemban tugas tersebut, Kasman Singodimedjo memiliki relasi yang cukup dekat Presiden Soekarno. Hal ini karena Presiden perlu mendiskusikan

seluruh kebijakan yang akan ia putuskan dengan ketua KNIP. Kesepakatan yang diambil kemudian akan disampaikan oleh KNIP kepada rakyat Indonesia. Salah satu contoh ialah putusan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dalam putusan tersebut, KNIP mengeluarkan Maklumat tentang Mobilisasi Tentara Keamanan Rakyat yang ditandatangani oleh Kasman Singodimedjo (Bajasut dan Hakiem, 2014:6).

Selain dalam pemerintahan, Kasman Singodimedjo juga tetap aktif di Muhammadiyah. Pada masa Agresi Militer Belanda I dan II, kondisi politik dan keamanan Indonesia melemah. Pasca kemenangannya dalam Perang Dunia II, tentara sekutu datang dan berusaha merenggut kemerdekaan Indonesia. Pada kondisi tersebut, Muhammadiyah membentuk laskar *Hizbullah-Sabilillah* untuk melakukan perlawanan. Ia sendiri bertugas untuk melakukan indoktrinasi kepada para pemuda Muhammadiyah dan pemuda Islam di Klaten, Bojonegoro, Ponorogo, Madiun, dan Semarang. Dukungan-dukungan dari seluruh lapisan masyarakat berhasil membuat tentara sekutu mundur dan kembalinya kedaulatan RI pada 29 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (Syaifullah, 1997: 139-140).

Dalam ranah politik, sebagai warga Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo bergabung dengan Partai Masyumi. Partai tersebut dibentuk sebagai wujud semangat merebut kembali kemenangan Islam dalam panggung politik pasca kekalahannya pada sidang PPKI. Pembentukan partai tersebut dilakukan pasca adanya pengumuman 03 Oktober 1945 dari Wakil Presiden RI, Mohammad Hatta mengenai pembentukan partai politik. Kelompok Islam yang terdiri dari Muhammadiyah, NU, dan PSII bersepakat mengikrarkan diri dalam Kongres Muslimin Indonesia pada 03 November 1945. Mereka bersepakat bahwa Masyumi merupakan satu-satunya partai politik Islam di Indonesia dan Masyumi pula yang akan memperjuangkan nasib umat Islam Indonesia. Masyumi pun segera mendapatkan dukungan dari organisasi Islam lainnya, seperti Persis (1948), PUSA (1949), Al-Irsyad (1950), Al-Jami'ah Al-Washliyah, Al-Ittihadiyah, Mathla'ul Anwar dan Nahdatul Wathan pasca 1949 (Syaifullah, 1997: 141-142).

Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi, di mana terdapat 11 wakil Muhammadiyah di dalamnya sebagai Pengurus Besar Masyumi atau sekitar 45,83% dari total jumlah 24 pengurus. Dalam kepengurusan awal (1945) tersebut, Kasman Singodimedjo menempati jabatan sebagai Ketua Muda III. Pada kepengurusan ketiga (1951), ia naik jabatan sebagai Wakil Ketua I Presidium. Pada periode kepengurusan keempat (1952) dan kelima (1954), ia menjabat sebagai Wakil Ketua II. Jabatan terakhir di Masyumi ialah sebagai anggota, yaitu pada periode jabatan keenam dan ketujuh (1959) (Syaifullah, 1997: 148-157). Jabatan-jabatan tersebut menunjukkan bahwa Kasman Singodimedjo bukanlah anggota Muhammadiyah yang tidak diperhitungkan. Ia dikenal cakap dalam politik sehingga dipercaya menempati jabatan-jabatan penting dalam Masyumi.

Masyumi pun ikut dalam pertarungan Pemilu pertama Indonesia 1955. Sebelum maju ke medan laga, Masyumi harus kehilangan pendukungnya. NU keluar dari partai tersebut pada 1952 dan membentuk partai sendiri. Dengan sisa kekuatannya, Masyumi terus maju dalam Pemilu. Sebagai bagian yang berpengaruh dalam Masyumi, Muhammadiyah mengeluarkan edaran kepada warga Muhammadiyah untuk memilih Masyumi pada pemilu 1955 (Suwarno, 2010:74). Pemilu pun dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan konstituante pada 29 September dan 15 Desember 1955. Total peserta yang mengikuti Pemilu saat itu ialah 33 Partai Politik, di mana 6 di antaranya merupakan partai Islam, yaitu Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI (Partai Politik Tharikat Islam), dan AKUI (Angkatan Kesatuan Umat Islam). Lima partai dengan urutan suara terbanyak ialah PNI, Masyumi, NU, PKI dan PSII. Dalam pemilu tersebut, pihak Islam memperoleh 116 kursi dari 260 kursi DPR dan 228 kursi dari 520 kursi konstituante. Masyumi sendiri memperoleh kursi terbanyak di DPR dan Kostituante, yaitu sebanyak 57 kursi di DPR dan 112 kursi di konstituante (Syaifullah, 1997: 167).

Kondisi politik Indonesia pun tidak stabil dengan adanya konflik-konflik antara wilayah pusat dengan daerah. Di Sumatera Barat terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Banyak

tokoh Masyumi yang terlibat dalam kelompok tersebut, antara lain Mohammad Natsir, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dan Mr. Burhanuddin Harahap. Melalui Penpres No.7 1959 Pasal 9 tanggal 17 Agustus 1960, Presiden menyatakan pelarangan dan pembubaran partai yang sedang melakukan pemberontakan atau dengan terang-terangan memberikan bantuan terhadap pemberontakan tersebut dan tidak menegur para anggotanya yang terlibat di dalamnya. Pimpinan Partai Masyumi pun menerima surat dari Direktur Kabinet Presiden No.2730/TU/60. Surat tersebut berisi pernyataan sebagai berikut:

“[...] Paduka Yang Mulia Presiden telah berkenan memerintahkan kepada kami untuk menyampaikan Keputusan Presiden (Nomor 200/1960), bahwa Partai Masyumi harus dibubarkan. Dalam waktu 30 hari sesudah tanggal keputusan ini, yaitu 17 Agustus 1960, pimpinan Partai Masyumi harus menyatakan partainya bubar. Pembubaran ini harus diberitahukan kepada Presiden secepatnya. Kalau tidak, Partai Masyumi akan diumumkan sebagai ‘partai terlarang’ [...] (Noer 1987: 386, dalam Bajasut dan Hakiem, 2014: 13).

Pasca pernyataan tersebut, tokoh-tokoh Muhammadiyah sebagai bagian dari Masyumi juga mendapatkan dampaknya, di mana banyak anggota Muhammadiyah yang menjadi pengurus Masyumi dipenjara tanpa proses peradilan, salah satunya adalah Kasman Singodimedjo. Ia terindikasi melanggar KUHP Pasal 169. Dalam bukunya, Kasman Singodimedjo bercerita bahwa ia mendapatkan panggilan untuk menghadap Komandan Korps Intelejen di Kantor Polisi Komisariat Jakarta Raya dan Sekitarnya, Korps Intelejen Kamar No.36. Dari panggilan tersebut, ia kemudian dibawa dan ditahan sementara di Jl. Darmawangsa VI No.12 pada 9 November 1963. Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan surat No.46/S.II/drk/63, 9 November 1963 yang ditandatangani oleh Kombes Polisi, Penyelidik Umum, Kepala Dinas Reserse Kriminal Departemen Angkatan Kepolisian, Drs. Soedjono. Ia kemudian dipindahkan ke daerah Puntjak, Cianjur pada 16 November 1963 (Singodimedjo, 1969: 4 & 7).

Rasa kesepian Kasman Singodimedjo selama sehari-hari di dalam penjara diisi dengan membaca dan menulis. Ia meminjam buku dari seorang pemuda Komisarisi Polisi yang bernama Drs. Amin. Buku yang ia pilih ialah karya Soekarno. Ia berusaha mempelajari kembali pemikiran Soekarno. Dalam bukunya ia pun menuturkan sebagai berikut:

“Ada dua buah buku yang saya dapat pindjam [...] yaitu *Pantjasila Dasar Filsafat Negara*, kursus Bung Karno, dan *Laksana Malaekat yang menjerbu dari langit. Djalan Revolusi kita - The March of our Revolution*, pidato Presiden Soekarno pada hari ulang tahun RI yang ke XV, 17 Agustus 1960. Tetapi bukan itu yang mendorong saya menulis. Adapun yang mendorong saya menulis ialah pertanyaan dari Saudara Amin tersebut, apakah saya tidak menganggap urgent untuk menulis setjara bebas mengenai perjuangannya (Umat) Islam pada waktu tahanan justru sekarang ini, dimana revolusi sedang menggelora sehebat-hebatnya dibawah pimpinan Bung Karno” (Singodimedjo, 1969: 1).

Dalam bukunya, Kasman Singodimedjo melanjutkan pandangannya terhadap pemikiran dan pemerintahan Soekarno. Menurutnya, untuk mencapai revolusi Indonesia, Soekarno menerapkan Manipol (manifesto politik) Udek (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan kepribadian Indonesia) yang harus disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia. Mereka yang menolak akan dianggap kontra-revolusi. Pada titik itulah, Kasman Singodimedjo merasa tidak lagi memiliki harapan pada Soekarno. Ia sebagai umat Islam menolak gagasan tersebut dan merasa bahwa isi dan semangat Manipol bertentangan dengan Islam dan kepribadian Indonesia. Hal itulah yang membuat Kasman Singodimedjo melawan pemerintah hingga ditahan. Namun dalam masa tahanannya, ia meyakini bahwa ide Manipol yang diagungkan Soekarno akan jatuh (Singodimedjo, 1969: 156-157) Ungkapan tersebut merupakan salah satu bentuk kekecewannya terhadap Soekarno yang berupaya membubarkan Masyumi wadah semangat perjuangan Islam saat itu. Upaya tersebut tidak membuatnya gentar. Ia bahkan terus menyulut semangat perjuangan umat Islam. Dalam bukunya ia melanjutkan:

“Masjumi dapat di bubarkan, tetapi *perjuangan Islam harus diselamatkan dan dikerdjakan terus oleh si Muslim*, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Si muslim harus berdjung terus, terus! Hukumnja wadajib.[...] Djika sesuatu alat-seperti halnja dengan Masjumi-pada suatu waktu terbukti tidak dapat atau tidak boleh dipergunakan lagi, maka si Muslim harus mentjari alat lain jang dapat dipergunakan untuk berdjung terus, yakni alat baru jang lebih tepat dan lebih sesuai dengan kondisi dan situasi jang ada, tanpa meninggalkan Aqidah Islam, sjari’at Islam. Dan sesungguhnya, bagi Muslim aqidah/sjari’at Islam itu tidak perlu harus ditulis atau dituangkan didalam sesuatu bentuk perundang-undangan negara, sebab sebagai perintah Allah hal itu telah merupakan wadajib (hukum wadajib) untuk diamalkan. Alhamdulillah, sjari’at Islam tersebut dengan tegas-tegas via Dekrit Presiden 5 Djuli 1959 kini telah mendjadi konsensus nasional RI untuk diamalkan oleh si Muslim (Piagam Djakarta)” (Singodimedjo, 1969: 10-11).

Kegagalan Masyumi dalam memperjuangkan penetapan syariat Islam di Indonesia kemudian ia pasrahkan kepada Muhammadiyah, sebuah organisasi yang telah merawat Kasman Singodimedjo sejak tahun 1921 dan mendorongnya untuk terlibat dalam Masyumi sebagai partai politik. Ia bahkan sempat dipercaya menjadi ketua Muhammadiyah cabang Betawi (Jakarta) hingga anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia juga bahkan sempat dipenjara pada masa Hindia Belanda karena membela cita-cita Muhammadiyah. Muhammadiyah dipilih untuk kembali memperjuangkan semangat Masyumi karena, menurutnya, organisasi tersebut merupakan induk dari perjuangan Masyumi. Ketua Umum Masyumi, Prawoto Mangkusasmito sesaat sebelum Masyumi dibubarkan bahkan berpesan kepada para anggotanya untuk masuk kembali dalam perkumpulan-perkumpulan Islam yang sempat menjadi bagian dari Masyumi, seperti Muhammadiyah, Djamiatul Waslijah, Persatuan Islam, Persatuan Ummat, Al-Irsyad, Sarikat Dagang Islam Indonesia, Sarikat Tani Islam Indonesia, dan Sarikat Buruh Islam Indonesia. Muhammadiyah juga memiliki visi dan misi yang sama dengan Masyumi, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Singodimedjo, 1969: 11-12).

Antara Kasman Singodimedjo dan orang-orang di kalangan Muhammadiyah sendiri memiliki beberapa perbedaan pendapat. Ia menyuarakan agar Muhammadiyah dapat terlibat aktif dalam pemerintahan di segala bidang. Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Jenderal A.H.Nasution dalam pidatonya pada Mukhtar Muhammadiyah Setengah Abad di Jakarta. Sayangnya, wacana tersebut tidak disambut baik oleh Tanwir dan Mukhtar Muhammadiyah yang kemudian mematahkan semangat umat Islam di Muhammadiyah dalam memperjuangkan Islam (Singodimedjo, 1969: 12-13). Di sini, Kasman melihat secercah harapan saat pemerintahan Soekarno berakhir dan digantikan oleh pemerintahan Soeharto atau yang disebut dengan Orde Baru. Ia melihat Orde Baru sebagai pemerintahan yang lebih ramah terhadap Islam. Hal tersebut terbukti dengan putusan Jaksa Agung yang baru menjamin kebebasan politik para eks. Masyumi, PSI, dan PRRI melalui medio 1967. Ketua PRRI, Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo bahkan kemudian diangkat menjadi Menteri Perdagangan RI saat itu. Kemenangan Islam juga ia rasakan saat politik kekuatan Islam kembali bangkit dengan didirikannya Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) pada 20 Februari 1968 (Singodimedjo, 1969: 197-198).

ISLAM DALAM KERAGAMAN MASYARAKAT INDONESIA

Sebagai umat Islam, Kasman Singodimedjo menyadari betul bahwa manusia tercipta dengan keberagaman, termasuk rakyat Indonesia. Keberagaman tersebut telah dituliskan dalam QS Al Hujurat: 13 yang menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan makhluknya dari berbagai bangsa dan dalam perbedaan tersebut diperintahkan pula untuk saling kenal-mengenal dan menjalin persaudaraan. Dari ayat tersebut, ia menekankan pentingnya sebuah nilai untuk saling menghargai dan menghormati. Selain menjalin persaudaraan, ia juga menilai bahwa Islam mengajarkan rasa toleransi dan sikap saling gotong-royong atau bekerjasama. Sikap tersebut harus dimiliki, disadari dan dipraktikkan dengan tulus oleh kedua belah pihak, baik Islam maupun non-Islam (Singodimedjo, 1969:158 & 168).

Di Indonesia sendiri, Kasman Singodimedjo menilai adanya perpecahan umat Islam karena perbedaan ideologi. Menurutnya, kelompok Islam terbagi dua; mereka yang ikut revolusi dan mereka yang berada di luar perjuangan revolusi. Ia menilai bahwa umat Islam pada masa pemerintahan Soekarno kurang memiliki inisiatif dalam memberikan masukan mengenai konsepsi Islam yang logis untuk ditetapkan sebagai peraturan resmi negara. Umat Islam juga dianggap kurang mengadakan kegiatan yang mengamalkan semboyan Muhammadiyah, *amar ma'rufnahi munkar*. Umat Islam dinilai kurang berani menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga kurang memberikan ruang diskusi yang sehat dengan rakyatnya dan cenderung otoriter (Singodimedjo, 1969: 18-19). Sebagai golongan mayoritas, Kasman menekankan perlunya persatuan di antara umat Islam. Persatuan umat dilakukan untuk berjuang bersama dalam revolusi demi mencapai kemenangan Islam. Persatuan dalam revolusi tersebut dapat diciptakan hanya melalui satu partai Islam revolusioner yang berpedoman pada UUD, Pancasila dan Tuhan YME (Singodimedjo, 1969: 170-175).

PANDANGAN TENTANG NASIONALISME: SEBUAH CATATAN PENUTUP

Sebagai nasionalis Islam, segala tindakan dan pemikirannya selalu dikaitkan dengan ajaran Islam. Dalam bukunya, Kasman banyak merujuk ayat-ayat al-Qur'an sebagai landasannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun bernegara. Ia berusaha dengan sangat keras untuk memperjuangkan dan menegakkan syariat Islam di Indonesia. Ia menjelaskan pula bahwa sudah sepatutnya seorang Muslim memperjuangkan hak-haknya tersebut agar Indonesia mampu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hal ini juga berkaitan erat dengan apa yang telah dilakukan oleh umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga menurutnya Indonesia merupakan milik umat Islam yang arah masa depannya perlu dijaga agar mencapai tujuan yang sesuai dengan syariat Islam dan terhindar dari bahaya seorang diktator, kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme yang menindas. Menurutnya pula,

rasa nasionalisme dan mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman (Singodimedjo, 1969: 16).

Dalam bukunya, Kasman kemudian menambahkan bahwa pemimpin negara tidak boleh bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai pimpinan tertinggi dalam kehidupan (Singodimedjo, 1969: 22). Menurutnya,

“Perjuangan Islam itu harus masuk dan menjadi satu dengan perjuangan (pembangunan) R.I. di segala bidang. Hal itu berarti bahwa program perjuangan (pembangunan) Indonesia harus pula disesuaikan dengan dan menjadi program perjuangan Islam, untuk dengan begitu oleh Ummat Islam Indonesia diambil manfaat dan keuntungannya sebesar-besarnya yang diridhai oleh Allah. Perjuangan Islam yang sematjam ini boleh saja dinamakan “*perjuangan Islam gaya baru*” (Singodimedjo, 1969: 23).

Konsep “Perjuangan Islam Gaya Baru” merupakan bentuk perjuangan Kasman Singodimedjo dalam menerapkan syariat Islam di Indonesia. Menurutnya, perjuangan Islam harus masuk dan menjadi bagian penting dalam pembangunan di Indonesia pada segala bidang kehidupan. Dalam hal ini, agama kemudian menjadi unsur mutlak dalam sebuah pembangunan nasional. Pendidikan merupakan salah satu kunci untuk memupuk semangat beragama dan bernegara. Ia menggunakan keputusan dalam MPRS mengenai pemberian pelajaran agama di seluruh tingkatan pendidikan di Indonesia. Hal ini seharusnya dapat digunakan sebagai peluang bagi para ahli agama untuk membantu pemerintah dalam memberikan pendidikan agama ke sekolah-sekolah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kristen dan Katolik. Sayangnya, para ahli agama menurutnya masih sangat kurang responsif dan cenderung materialistis dalam melihat hal ini sebagai sebuah bagian perjuangan umat Islam dalam bernegara (Singodimedjo, 1969: 27-29).

Kasman Singodimedjo menilai bahwa sikap progresif-revolusioner seperti yang dianjurkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan Islam karena telah ada dalam perintah-perintah al-Qur’an. Salah satu bentuk sikap tersebut ialah dalam

memilih pemimpin. Ia menganjurkan untuk memilih pemimpin secara langsung. Orang yang dipilih sebagai pemimpin pun harus amanah dan tidak bertentangan dengan perintah Allah. Selain itu, revolusi yang belum selesai harus diartikan dengan pemahaman bahwa perjuangan Islam belum selesai, sehingga harus terus dilanjutkan dengan semangat dan ajaran agama Islam (Singodimedjo, 1969: 32-35). Dalam bukunya ditegaskan,

“Jang penting bagi perjuangannya Islam dari Dekrit Presiden itu antara lain ialah Piagam Djakarta (Djakarta Charter) jang oleh dekrit itu dinjatakan harus mendjiwai UUD 1945, dan bahwa Piagam Djakarta dengan UUD 45 itu tidak dapat dipisah-pisahkan” (Singodimedjo, 1969: 32,38)

Dalam hal ini, Kasman Singodimedjo dengan sangat jelas menekankan bahwa menjadi nasionalis Islam bukanlah sebuah hal yang bertentangan dengan Pancasila dan ideologi progresif-revolusioner. Ia pun menekankan upaya diterapkannya syariat Islam dalam jalannya pemerintahan Indonesia. Penerapan tersebut harus dilakukan dalam berbagai aspek untuk mencapai kemenangan Islam yang menurutnya belum selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bajasut, S.U. dan Lukman Hakiem. 2014. *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*. Jakarta: Kompas.
- Ending, M.S. 2005. *Muhammadiyah di Dua Matahari, Sinergitas Dakwah dan Politik*. Mataram: Jaring Pena Press.
- Hakim, Rakhmat Nur. “Kisah Kasman Singodimedjo, Sang Pemersatu Islam dan Nasionalis”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/21/03440091/Kisah.Kasman.Singodimedjo.Sang.Pemersatu.Islam.dan.Nasionalis>. diakses pada 30 Januari 2019, pukul 10.35 WIB.
- Hidayatullah, Syarif. 2010. *Muhammadiyah & Pluralitas Agama Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noer, Deliar. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.

- Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman. 1982. *Hidup Itu Berjuang Kasman Singdimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Singodimedjo, Kasman. 1969. *Renungan dari Tahanan*. Djakarta: Tintamas.
- Suwarno. 2010. *Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara: Kontribusi Muhammadiyah dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaifullah. 1997. *Gerakan Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 🌟

ISLAM DAN PANCASILA: PANDANGAN POLITIK KENEGARAAN KASMAN SINGODIMEDJO

Mu'arif & David Efendi

PENDAHULUAN

Sejarah Indonesia modern, sejak awal tumbuhnya kesadaran nasionalisme (era kebangkitan nasional) hingga memasuki masa kemerdekaan terutama pada fase pembentukan sistem konstitusi negara (pertengahan tahun 1945), memang tidak bisa dilepaskan dari peran mayoritas umat Islam. Adalah suatu fakta historis yang tidak dapat dipungkiri bahwa selain sebagai mayoritas, umat Islam di Indonesia memang memiliki kontribusi nyata dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan proses pembentukan negara, perumusan Dasar Negara, dan pembentukan Undang-Undang Dasar, terutama melalui peran para tokoh Muslim di tanah air, baik dari kalangan modernis maupun tradisional. Perdebatan seputar Islam dan Negara Modern telah dimulai sejak digelar sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Gagasan yang mengemuka adalah seputar pembentukan negara berdasarkan agama (Islam) yang juga dikenal dengan istilah *Darul Islam* (istilah sejenis *Darus-salam*) atau menjadi negara sekuler (Maarif, 2017).¹ Akan tetapi, otoritas pemerintah Jepang dalam keanggotaan BPUPKI

¹ Mohammad Natsir berpendapat bahwa ada dua bentuk negara: sekuler (*la-diniyyah*) dan agama (*diniy*). Menurutnya, Pancasila bercorak *la-diniyyah* (sekuler), karena tidak mengakui wahyu sebagai sumbernya. Pancasila, dalam pandangan Natsir, digali dari khazanah budaya masyarakat.

telah menolak konsep Negara Islam dari kalangan umat Islam (Madinier, 2013). Setidak-tidaknya, perdebatan-perdebatan di BPUPKI dan PPKI telah menciptakan kubu antara kelompok Muslim (tradisionalis dan modernis) dan Nasionalis (Muslim dan Non-muslim).

Tokoh-tokoh yang mewakili kelompok Muslim dalam sidang-sidang BPUPKI, adalah Sukiman Wiryosanjoyo, Ki Bagus Hadikusumo, Prof. KH. Abdul Kahar Muzakir, KH. Abdul Wahid Hasyim, Abikusno Cokrosuyoso, Mr. Achmad Soebardjo, Agus Salim, dan lain-lain (Hadikusuma, t.t). Mereka inilah yang memperjuangkan dengan gigih konsep Negara Islam, rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Piagam Jakarta), dan konsep kepemimpinan Islam. Sidang-sidang BPUPKI yang dilaksanakan antara tanggal 29 April - 07 Agustus telah menyepakati Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 (Raditya, 2019). Pembubaran BPUPKI yang diiringi dengan pembentukan PPKI langsung menggelar sidang-sidang maraton pada tanggal 7-19 Agustus. Keanggotaan PPKI ditambah 6 (enam) orang anggota baru tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang. Dari anggota tambahan tersebut, terdapat satu tokoh yang dipandang merepresentasikan kelompok Muslim modernis, yakni Kasman Singodimedjo (Hadikusuma, t.t).

Kasman Singodimedjo adalah tokoh yang menjadi juru kunci pemecah kebuntuan dialog antara kelompok Muslim dengan nasionalis pada detik-detik akhir sidang-sidang PPKI yang menghendaki penghapusan “7 (tujuh) kata” dalam Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*) (Hadikusuma, t.t). Kegigihan Kasman Singodimedjo meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo untuk menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta sebenarnya merupakan suatu bentuk afirmasi terhadap konsep Dasar Negara Indonesia tanpa harus memasukkan ajaran Islam secara formal-eksplisit. Inilah bentuk “kesepakatan bersama” (konsensus)— yang dalam bahasa Kasman Singodimedjo disebut sebagai *gentlemen’s agreement*— dari para pendiri bangsa, terutama dari

kelompok Muslim (Bajasut dan Hakiem, 2014).² Akhirnya, negara Indonesia mengambil bentuk sebagai bukan “negara agama” yang berdasarkan Pancasila, tetapi juga bukan “negara sekuler” yang memisahkan agama dalam kehidupan politik-kenegaraan. Akan tetapi, ajaran-ajaran Islam akan diakomodasi dalam sistem konstitusi negara dan umat Islam dijamin kebebasannya untuk menjalankan ajaran agama Islam. Sidang-sidang PPKI setidaknya telah menghasilkan; (1) pengesahan UUD 1945, (2) memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden, (3) membentuk 12 Kementerian dan 4 Menteri Negara, serta (4) membentuk pemerintahan daerah yang terdiri dari 8 propinsi (Raditya, 2019). Namun, catatan berdasarkan hasil sidang-sidang PPKI tidak terlalu signifikan berkaitan dengan usaha memasukkan unsur-unsur ajaran Islam ke dalam sistem konstitusi negara.

Sejak terbentuknya pemerintahan Indonesia baru (1945) hingga menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pertama (1955), dinamika politik umat Islam mewarnai hampir setiap perdebatan di sidang-sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (lihat Bajasut dan Hakiem, 2014).³ Kasman Singodimedjo yang dipercaya sebagai ketua KNIP pertama memainkan peran penting dalam proses masuknya unsur-unsur ajaran Islam ke dalam sistem konstitusi nasional. Pada saat yang bersamaan, umat Islam berhasil membangun kekuatan politik baru melalui partai yang dideklarasikan di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 7-8 November 1945 (1-2 Dzulhijjah 1364) (Bajasut dan Hakiem, 2014). Partai tersebut bernama Partai Masyumi. Kasman Singodimedjo adalah tokoh

2 *Gentlement's agreement* adalah istilah yang dikenalkan Kasman untuk menyebut suatu konsensus bersyarat ketika kelompok Muslim berpegang teguh pada prinsip Islam dalam sistem konstitusi negara, sementara pihak nasionalis menghendaki pencabutan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Tampaknya, inilah argumentasi Kasman yang kemudian meluluhkan pendirian Ki Bagus Hadikusumo.

3 Komite ini dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang Dasar 1945 Aturan Peralihan Pasal IV: “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.” Kasman Singodimedjo menjabat sebagai ketua pertama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan wakil-wakil: Mr. Latuharhary dan Prof. Soetadjo dan sekretaris S. Mangunsarkoro.

yang turut andil dalam proses pembentukan partai ini, bahkan ia termasuk jajaran aktor intelektual (ideolog) partai (Bajasut dan Hakiem, 2014). Terhitung sejak 1945-1955, kekuatan umat Islam yang direpresentasikan oleh para tokoh Muslim yang terlibat di sidang-sidang KNIP sangat solid mendukung Indonesia merdeka, berpegang teguh pada Pancasila, dan menjalankan amanat konstitusi nasional (UUD 1945). Kasman Singodimedjo sebagai ketua pertama KNIP mampu mengarahkan jalannya sidang-sidang yang berhasil didominasi oleh kelompok Muslim. Ia lebih banyak mengkritik atau dalam istilah lain “menagih janji *gentlemen’s agreement*” seperti yang dijanjikan Soekarno dan Mohammad Hatta pada detik-detik berakhirnya kepanitiaan PPKI.

Seiring perkembangan dan dinamika sosial politik pasca Kemerdekaan Republik Indonesia terutama setelah pelaksanaan Pemilu 1955, peta kekuatan politik umat Islam terbelah dengan keluarnya Nahdlatul Ulama (NU) dari Partai Masyumi (Bajasut dan Hakiem, 2014).⁴ Sejalan dengan perubahan konstelasi politik nasional terutama pasca Pemilu 1955, sebenarnya perdebatan-perdebatan dalam sidang-sidang Konstituante tetap didominasi oleh kelompok Muslim sampai memasuki tahun 1960. Akan tetapi, dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berakhir pulalah Konstituante (Bajasut dan Hakiem, 2014). Pemberlakuan sistem Demokrasi Terpimpin menggantikan Demokrasi Parlementer telah mengubah kekuasaan menjadi totaliter. Respons partai-partai berasas Islam seperti Partai Masyumi dan Partai Syarikat Islam Indonesia, sangat keras mengkritik kebijakan Bung Karno yang menghendaki bersatunya kekuatan Nasionalis, Agamis, dan Komunis (NASAKOM). Dalam pengamatan Kasman Singodimedjo, jalannya pemerintahan Demokrasi Parlementer hingga Demokrasi Terpimpin di Indonesia dinilai telah menjauh dari nilai-nilai moralitas Islam (Singodimedjo, 1968), apalagi

4 Lima besar partai dengan perolehan suara terbanyak hasil Pemilu pertama adalah Partai Nasional Indonesia (57 kursi), Partai Masyumi (57 kursi), Partai Nahdlatul Ulama (49 kursi), Partai Komunis Indonesia (39 kursi), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (8 kursi). Suara umat Islam paling tidak terbelah menjadi tiga, yaitu suara yang disalurkan lewat Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

dengan menguatnya kelompok nasionalis dan komunis semakin menyudutkan kelompok Islam.

Kebijakan politik Soekarno yang memadukan kelompok Nasionalis, Agama, dan Komunis (NASAKOM) semakin memperkeruh konstelasi perpolitikan di tanah air. Beberapa tokoh Muslim merespons kebijakan ini dengan menggerakkan perlawanan secara politik lewat Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera. Tokoh-tokoh nasionalis juga merespons dengan perlawanan pula lewat Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) di Sulawesi. Dalam kasus PRRI, tokoh-tokoh Partai Masyumi yang terlibat antara lain Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap. Konflik terus meruncing antara kelompok Muslim dengan Nasionalis dan Komunis sampai pada puncaknya keluar kebijakan penyederhanaan sistem kepartaian melalui Penetapan Presiden No. 7/1959. Salah satu partai umat Islam yang menjadi sasaran bidik kebijakan ini adalah Partai Masyumi. Kasus keterlibatan tokoh-tokoh partai ini dalam PRRI menjadi dalih pembenaran untuk membubarkan Partai Masyumi yang pada waktu itu dipimpin oleh Prawoto Mangkusasmito (Bajasut dan Hakiem, 2014).

Kasman Singodimedjo dan Partai Masyumi memang tidak dapat dipisahkan. Sejak Partai Masyumi pertama kali dibentuk hingga proses pembubaran, Kasman Singodimedjo memegang posisi penting di tubuh partai umat Islam terbesar pada waktu itu. Ia menjadi sosok ideolog dan penggerak partai yang semakin kritis dan reaktif pasca pembubaran Partai Masyumi. Pasca Penetapan Presiden No. 7/1959, ditambah dengan keterlibatan tokoh-tokoh Partai Masyumi dalam kasus PRRI, Kasman Singodimedjo melakukan pembelaan-pembelaan dengan argumentasi hukum yang jelas dan tegas. Apalagi, pasca meletusnya Gerakan 30 September 1965, sikap yang diambil Soekarno terhadap PKI jelas jauh berbeda dengan sikapnya ketika membubarkan Partai Masyumi. Bajasut dan Hakiem (2013) berhasil menemukan fakta baru ketika mengutip sumber Bernhard Dahm dalam buku *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan* (1987) bahwa sebenarnya Soekarno sejak awal telah menempatkan Partai Masyumi dan PSI

sebagai “musuh besar” yang menghambat gagasan revolusinya (Bajasut dan Hakiem, 2014).

Dengan membaca historisitas pemikiran Kasman Singodimedjo sejak terlibat dalam proses pembentukan sistem konstitusi nasional (dalam sidang-sidang PPKI, KNIP, Konstituante), memasuki masa Demokrasi Terpimpin, dan pasca pembubaran Partai Masyumi, dengan meletakkan paradigma politik Islam yang diusung Partai Masyumi, terdapat suatu proses historis yang amat keras dan dalam beberapa kasus sampai berdarah-darah. Suatu proses internalisasi ajaran Islam ke dalam sistem konstitusi nasional yang sering tidak linier, tetapi dalam beberapa topik perdebatan menunjukkan suatu alur logika yang konsisten. Jika pada fase awal pembentukan pemikiran politik kenegaraan Kasman Singodimedjo telah mengafirmasi konsep-konsep ketatanegaraan hasil kolaborasi antara teori-teori Barat yang liberal dengan ajaran-ajaran Islam (perdebatan dalam BPUPKI dan PPKI), maka dalam proses dinamika politik berikutnya justru pemikiran-pemikiran politiknya tampak berseberangan, khususnya pandangan politik kenegaraannya dalam sidang-sidang KNIP dan Konstituante.

Perubahan sistem kepemimpinan nasional dari Demokrasi Parlementer menjadi Demokrasi Terpimpin telah mengubah sikap Kasman Singodimedjo dalam merespons kebijakan-kebijakan pemerintah. Meskipun Partai Masyumi telah dibubarkan, namun semangat perjuangannya tidak luntur. Bahkan, akibat pidato kritisnya sang tokoh harus masuk penjara setelah melewati proses peradilan. Setelah Partai Masyumi dibubarkan, Kasman Singodimedjo terlibat aktif di Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Kebijakan Soekarno yang mengubah Demokrasi Parlementer menjadi Demokrasi Terpimpin dalam alur historis pembentukan konsep Demokrasi Pancasila menjadi titik balik perdebatan ini. Dari sinilah titik pijak tulisan ini berasal, yakni untuk mengetahui tentang bagaimana sebenarnya pandangan politik kenegaraan Kasman Singodimedjo. Tulisan ini akan menguak bagaimana pemikiran politik kenegaraan Kasman Singodimedjo dengan menggunakan perspektif epistemologi filsafat politik. Fokus kajian ini terletak pada “Teori Kedaulatan,”

konsep “Islam dan Negara Modern,” dan “Pancasila sebagai Dasar Negara” dalam pandangan Kasman Singodimedjo.

RIWAYAT SINGKAT KASMAN SINGODIMEDJO

Nama “Singodimedjo” di belakang nama “Kasman” adalah nama dari sang ayah yang berprofesi sebagai *Modin* (juru Adzan) di Desa Clapar. Dari pernikahan Singodimedjo dengan Kartini telah melahirkan tujuh anak, tetapi yang hidup sampai usia dewasa hanya 4 (empat) anak. Dari keempat anak tersebut, hanya satu yang berjenis kelamin laki-laki. Anak laki-laki tersebut sekaligus menjadi kakak tertua di antara adik-adik perempuannya. Bapak Singodimedjo memberi nama anak laki-lakinya; Kasman, sedangkan nama adik-adik perempuannya adalah Kasmah, Kasiyem, dan Surtiyati. Kasman putra Singodimedjo lahir pada 25 Februari 1904 di Desa Clapar (Kalirejo), Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982).

Pendidikan Kasman Singodimedjo sebelum masuk STOVIA (*School tot Opleiding van Indische Artsen*) di Batavia adalah Sekolah Desa (Kamanukan, Purworejo); *HIS Met de Bijbel* di Kwitang – pindah ke *HIS Kutoarjo*. Setamat dari *HIS Kutoarjo* melanjutkan ke MULO di Magelang. Ketika belajar di MULO Magelang, Kasman Singodimedjo mengaku mulai mengenal tokoh-tokoh Muhammadiyah dari Yogyakarta, seperti KH. Ahmad Dahlan dan KH. Abdul Aziz (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982). Setelah lulus dari MULO Magelang, ia melanjutkan studi masuk STOVIA di Batavia. Ia masuk STOVIA sejak 1923 atau setahun lebih dahulu dari Mohammad Roem, kawan satu almamater yang di kemudian hari menjadi kawan seperjuangannya di Partai Masyumi. Dari sinilah babak baru aktivitas pergerakan Kasman Singodimedjo mulai diperhitungkan oleh rezim kolonial Belanda. Ia telah menjadi sosok orator yang tangguh. Bakat kepemimpinannya mulai tampak ketika ia terpilih menjadi ketua *Jong Islamieten Bond* (JIB). Ketika menjabat ketua JIB, ia sebenarnya masih berstatus sebagai siswa yang sedang menempuh pendidikan di bangku STOVIA, Sekolah Dokter di Batavia. Karirnya di JIB terus meningkat sejak ia menjabat

sebagai Ketua Kepanduan organisasi ini hingga menduduki pucuk pimpinan. Sebelum masuk STOVIA, ia memang bercita-cita menjadi seorang dokter. Cita-cita ini disampaikannya semasa masih menempuh studi di MULO (setingkat SMP) Magelang.

Mohammad Roem mengenal Kasman Singodimedjo, kawan sekelas di STOVIA, pada tahun 1924. Pendidikan di STOVIA pada waktu itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian Persiapan ditempuh selama tiga tahun. Bagian *Geneeskundig* ditempuh selama tujuh tahun. Mohammad Roem dan Kasman Singodimedjo masih menempuh pendidikan tahap pertama menginap di asrama STOVIA di Kwitang – kini menjadi Gedung Kebangkitan Nasional. Kasman Singodimedjo yang masih berada pada jenjang persiapan dikenal sebagai sosok yang ulet, rajin, pekerja keras, dan memiliki semangat nasionalisme yang kuat. Seperti kesaksian Roem, selama menginap di asrama STOVIA, Kasman Singodimedjo bekerja sambil menyucikan baju para mahasiswa untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain dari beasiswa pemerintah. Penghasilan tambahan tersebut ditabung untuk menyekolahkan adik-adiknya yang berjumlah tiga orang (perempuan). Selain giat menempuh studi di STOVIA, ia termasuk tokoh JIB yang memiliki karir cemerlang (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982).

Pada saat bersamaan, pemerintah kolonial Belanda sedang melakukan reformasi birokrasi pendidikan sebagai tindak lanjut kebijakan politik etis (*etische politiek*). Abendanon mengubah STOVIA menjadi Perguruan Tinggi Kedokteran (*Geneeskundige Hoge School/GHS*). Para murid *Voorbereidende afdeling* STOVIA diberi pilihan untuk menempuh AMS *afdeling* B (Jurusan Ilmu Pasti) sebelum lanjut ke GHS. Kebijakan pemerintah kolonial yang merugikan Kasman Singodimedjo ketika AMS dibangun di atas asrama STOVIA. Para siswa yang menginap di asrama STOVIA dipaksa untuk menempuh ulang studi menengah tingkat atas di AMS. Bagi mereka yang tidak bersedia masuk AMS dipersilahkan melanjutkan studi di NIAS (*Nederlandsch Indische Artsen School*) di Surabaya. “*Alhamdulillah, ijazah AMS dapat saya peroleh dan saya pun melanjutkan sekolah ke GHS,*” kenangannya dalam buku *Hidup itu Berjuang: Kasman Singodimedjo*

75 Tahun (1982) (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982:11).

Namun, tantangan belum selesai bagi Kasman Singodimedjo. Sebab, aktivitasnya di JIB telah terendus oleh pemerintah kolonial dan dianggap membahayakan stabilitas nasional. Dengan dalih, selama dua tahun Kasman Singodimedjo tidak juga naik kelas ketika menempuh *Voorbereidende afdeling* STOVIA, ia kemudian dikeluarkan dari STOVIA. "Waktu itu saya merasa kegawatan yang serius. Cita-cita untuk melanjutkan sekolah dengan cara beasiswa menjadi kandas," ungkap Kasman Singodimedjo kepada Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman (1982). Namun demikian, ia tetap berusaha melanjutkan pendidikan tingginya sekalipun telah dikeluarkan dari GHS. Dengan memasuki Sekolah Tinggi Hukum (*Rechts Hoge School/RHS*), ia harus menanggung biaya sendiri. Akan tetapi, dengan ketekunan dan kesabaran, ia akhirnya meraih *Meester in de Rechten* (Mr) pada 26 Agustus 1939 (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982).

Karir Kasman Singodimedjo di JIB memang sangat moncer dan jaringannya cukup luas. Setali tiga uang, bakat kepemimpinan Kasman Singodimedjo ditempa dengan baik selama aktif di organisasi ini. JIB sebenarnya didirikan sebagai respons atas perpecahan gerakan-gerakan kepemudaan di tanah air waktu itu. Kongres Jong Java VII pada 27-31 Desember 1924 di Yogyakarta yang diketuai Sjamsuridjal menjadi refleksi bersama para pemuda Muslim di tanah air. Sebab, hanya seorang pemuka Muslim yang hadir dalam kongres ini, yaitu Haji Agus Salim, sedangkan peserta kongres mayoritas dari para Pastor Katolik, Pendeta Protestan, dan kaum theosofi. Kepentingan umat Islam justru menjadi suara minoritas dalam Jong Java. Artinya, telah terjadi peminggiran suara umat Islam dalam gerakan-gerakan kepemudaan berbasis daerah (Jong Java, Jong Sumatra, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes, dan lain-lain). Latar belakang inilah tampaknya yang menginisiasi Kasman Singodimedjo dan kawan-kawannya yang lain mendirikan JIB.

Merespons kondisi tersebut, Haji Agus Salim menyarankan agar dibentuk wadah perjuangan kaum muda Muslim di tanah air. Kasman Singodimedjo bersama Sjamsuridjal, Wiwoho Purbohadidjojo, dan lain-lain sepakat membentuk *Jong Islamieten*

Bond pada awal tahun 1925. Sjamsuridjal menjabat ketua umum pertama JIB periode 1925-1926, Wiwoho Purbohadidjojo menjabat sebagai ketua umum periode 1926-1930, dan Kasman Singodimedjo menjabat sebagai ketua umum periode 1930-1935. Pada perkembangan selanjutnya, Kasman Singodimedjo menyampaikan pidato di depan peserta rapat *Jong Islamieten Bond* pada medio 1925 di Batavia. Ia menyampaikan bahwa,

“Kecenderungan yang terdapat pada kita kaum intelektual dan yang terpancar pada semboyan “Kembali Kepada Rakyat” ternyata bukanlah semata-mata dorongan idealisme keperwiraan, tetapi juga oleh pengertian kepentingan diri dan paksaan keadaan. Jika kita tidak ingin kehilangan diri kepribadian kita, haruslah kita memasuki barisan penegak semboyan itu...” (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982:434-448).

Kasman Singodimedjo mengkritik kecenderungan intelektualisme bumiputra yang di satu sisi mengalami proses westernisasi, mengikuti standar Barat, tetapi di sisi lain tumbuh semangat nasionalisme yang berakar pada semboyan “Kembali Kepada Rakyat.” JIB bergerak atas dasar kepentingan rakyat sehingga proses intelektualisme di organisasi yang dipimpin Kasman Singodimedjo pada waktu itu tidak terjebak pada westernisasi. Perjuangan Kasman Singodimedjo di JIB terus berlanjut sampai ia dan Sjamsuridjal beserta Wiwoho Purbohadidjojo mewakili organisasi ini dalam Rapat Akbar Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang berhasil mencetuskan ide Sumpah Pemuda Indonesia.

Kisah Kasman Singodimedjo dalam percaturan politik nasional semakin diperhitungkan sejak ia bergabung dalam jajaran kepengurusan *Majelis Islam A'la Indonesia* (MIAI) pada tahun 1943. Ia menduduki posisi sebagai Wakil Ketua Baitul Mal, sub-struktur dalam MIAI. Majelis ini didirikan pada tahun 1937 dalam Kongres Umat Islam yang diselenggarakan di Surabaya (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982). MIAI sebagai organisasi sosial-kemasyarakatan Islam sejak pertama kali dibentuk yaitu 1937 hingga memasuki tahun 1943. Pada tahun 1945, MIAI berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan bertahan hingga tahun 1952 (Madinier,

2013). Selain aktif di Muhammadiyah dan Masyumi, Kasman Singodimedjo juga turut andil dalam perjuangan membela tanah air pada masa pendudukan Jepang, yaitu ketika ia bergabung dalam kesatuan prajurit Pembela Tanah Air (PETA) (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982).

Pada detik-detik akhir kekalahan Jepang (akhir Perang Dunia II), bangsa Indonesia—lewat peran para tokoh pendiri bangsa—sepakat untuk mewujudkan konsep Indonesia Merdeka sebagai negara modern. Kasman Singodimedjo sekalipun tidak ikut terlibat dalam sidang-sidang BPUPKI, tetapi ia mengikuti perdebatan yang mengemuka di kalangan tokoh-tokoh Muslim dan nasionalis. Keterlibatannya dalam proses penyusunan sistem konstitusi negara terjadi setelah pembubaran kepanitiaan BPUPKI yang dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam kepanitiaan ini, Kasman Singodimedjo adalah anggota tambahan yang mewakili kelompok Muslim modernis—Muhammadiyah dan Masyumi.

Pasca Indonesia merdeka, terutama dalam pemerintahan baru yang berusaha mengadopsi sistem Demokrasi Parlementer, peran Kasman Singodimedjo di Konstituante tetap jelas merepresentasikan kepentingan umat Islam. Pasca pembubaran Konstituante, ia masih tetap memegang peranan penting dalam sidang-sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Perubahan peta politik pada masa Demokrasi Terpimpin menyebabkan kelompok Muslim tersisih dari parlemen. Kelompok sosialis dan komunis sedang berjaya, melakukan manuver dan intrik untuk memutus urat nadi kekuatan politik Muslim di parlemen. Pidato-pidato Kasman Singodimedjo di KNIP dan Majelis Konstituante sangat jelas membela posisi umat Islam dari serangan para politisi komunis seperti Nyoto—aktor intelektual Partai Komunis Indonesia (PKI), maupun dari politisi nasionalis lainnya. Dengan keluarnya Penetapan Presiden No. 7/1959 yang pada mulanya bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian, tetapi pada akhirnya berujung pada pembubaran Partai Masyumi (17 Agustus 1960)—salah satu partai pemenang Pemilihan Umum pertama di Indonesia—

perubahan sikap dan pandangan politik Kasman Singodimedjo semakin jelas. Ia selalu tampil kritis dalam setiap forum, baik forum formal maupun non formal, lewat pidato-pidatonya yang banyak menyuarakan aspirasi umat Islam. Puncaknya, ia harus diseret ke pengadilan setelah oknum dari PKI dan kelompok sosialis menuduh isi pidatonya berseberangan dengan kepentingan politik nasional (makar). Di akhir hayat, Kasman Singodimedjo lebih banyak mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk berdakwah di Muhammadiyah. Kasman Singodimedjo wafat pada 25 Oktober 1982 (Basuni dalam Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982).

PANDANGAN POLITIK KENEGARAAN KASMAN SINGODIMEDJO

Untuk mengetahui bagaimana pandangan politik kenegaraan Kasman Singodimedjo, fokus tulisan ini terletak pada "Teori Kedaulatan," konsep "Islam dan Negara," dan "Pancasila sebagai Dasar Negara", seperti yang disinggung di atas. Meskipun perdebatan yang mengemuka dalam sidang-sidang di BPUPKI dan PPKI lebih luas seputar Negara Islam (*Dar-ul Islam*), sistem pemerintahan Islam (*syura'*), sistem konstitusi berdasarkan hukum Islam, dan kepemimpinan nasional berdasarkan ajaran Islam, dan lain-lain, namun tulisan ini lebih difokuskan pada pandangan atau konsep Kasman Singodimedjo tentang teori kedaulatan yang menjadi pondasi utama dalam memahami konsep Islam dan Negara, serta Pancasila sebagai Dasar Negara. Kasman Singodimedjo yang tumbuh dari tradisi organisasi pergerakan nasional berbasis Islam, seperti JIB, Muhammadiyah, MIAI, dan Masyumi, jelas tidak bisa lepas dari konsep-konsep dasar ajaran Islam dalam praktik kehidupan politik kenegaraan. Di sisi lain, konsep-konsep dasar ajaran Islam harus berhadapan atau bersinergi dengan konsep-konsep keilmuan Barat yang terus berkembang. Di sinilah proses adopsi gagasan atau pemikiran yang kemudian diadaptasi dalam konteks keindonesiaan sehingga menciptakan paradigma baru politik kenegaraan.

TEORI KEDAULATAN

Kasman Singodimedjo adalah produk intelektual dari lembaga pendidikan modern yang diselenggarakan oleh rezim Kolonial Belanda. Meskipun sempat mengenyam pendidikan di STOVIA—mula-mula bercita-cita menjadi dokter— namun akhirnya ia harus menyelesaikan pendidikan tingginya di Sekolah Tinggi Hukum (*Rechts Hoge School/RHS*). Dari perguruan tinggi inilah Kasman Singodimedjo meraih *Meester in de Rechten* (Mr)—selevel Sarjana Hukum—pada 26 Agustus 1939 (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982). Dengan demikian, *mindset* atau pola pikir Kasman Singodimedjo telah dipengaruhi oleh paradigma sains Barat yang bercorak *empiris-logis-antroposentris* (positivistik). Apalagi, Kasman Singodimedjo adalah Sarjana Hukum sehingga pola pikirnya tampak sangat strukturalis. Perbedaan paradigma epistemologi yang berkembang di Barat dengan paradigma epistemologi umat Islam yang menempatkan Tuhan sebagai sumber otoritas kebenaran tertinggi menjadikan proses dialog antar dua peradaban sering mengalami kegamangan.

Dalam konteks ini, kritik Wael B. Hallaq (1955) seputar pandangan dan sikap para sarjana Muslim yang cenderung mengadaptasi konsep negara modern (*modern-state*) memang patut dipertimbangkan secara saksama. Dalam pandangan Wael, khazanah ajaran Islam telah menyediakan konsep yang berbeda, khususnya seputar “teori kedaulatan.” Dalam pandangan mayoritas Muslim, kedaulatan sepenuhnya berada di “Tangan Tuhan” (teokrasi), sedangkan sistem demokrasi meniscayakan “kedaulatan manusia” (demokrasi). Problem epistemologi filsafat politik kenegaraan inilah yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana bentuk negara, bentuk pemerintahan, undang-undang dasar negara, mekanisme pembagian kekuasaan, dan seterusnya. Dengan demikian, konsep demokrasi yang bersumber dari peradaban Barat yang dibangun di atas epistemologi yang *empiris-logis-antroposentris* memang tampak sulit bersinergi dengan pandangan epistemologi umat Islam yang menempatkan sumber otoritas tertinggi dan kebenaran mutlak hanya di tangan Tuhan.

Pergumulan pemikiran Kasman Singodimedjo dalam sidang-sidang di KNIP dan Konstituante menunjukkan proses membentuk atau menempatkan posisi yang tepat di antara kedua sumber epistemologi. Dalam pidatonya di Konstituante yang membahas tentang "Dasar Negara," ia berdalih bahwa konsep apapun tentang dasar negara tidak bisa lepas dari "teori kedaulatan."

Di dalam mencari alasan-alasan yang universal kuat guna menetapkan dasar negara kita, mau tidak mau kita sampai kepada pengertian "kedaulatan." Apa yang harus kita perdaulatkan? Apa yang kita anggap sebagai berdaulat, sebagai yang berkuasa sendiri? Maka bertemulah kita kepada 4 pengertian, yakni a. kedaulatan rakyat, b. kedaulatan negara, c. kedaulatan hukum, d. kedaulatan Allah (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982)

Satu konsepsi pokok dalam pandangan Kasman Singodimedjo ketika merumuskan dasar negara adalah prinsip universal. Rumusan Dasar Negara pertama kali harus memuat ide-ide universal yang akan memayungi seluruh konsepsi turunan, baik dalam struktur Dasar Negara maupun pembentukan Undang-undang Dasar. Selanjutnya, ia menjelaskan bagaimana keempat konsep kedaulatan tersebut. *Pertama*, "Kedaulatan Rakyat." Pengertian rakyat adalah sekumpulan manusia yang dapat menyimpulkan dan menyatakan kehendak bersama. Akan tetapi, dalam pengalaman Kasman Singodimedjo yang telah kenyang mengikuti tradisi berorganisasi (JIB, MIAI, Masyumi, dan Muhammadiyah), kedaulatan rakyat terkadang hanya merupakan kedaulatan segolongan kecil yang menggunakan 'siasat teriak setuju' dengan mengabaikan golongan mayoritas yang diam. Sementara itu, kualitas intelektual manusia, dengan mengutip pernyataan filosof Socrates yang dianggap sebagai 'manusia paling cerdas' pada zamannya, sebenarnya hakekat pengetahuan manusia adalah ketidaktahuannya akan sesuatu "*apa yang kuketahui ialah: aku tidak tahu.*" (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982:450). Dengan dalih ini, Kasman Singodimedjo menilai bahwa kedaulatan rakyat pada dasarnya sangat lemah. Apalagi, pada hakekatnya manusia adalah makhluk yang

tidak dapat berdiri sendiri. Dalam artikel, "Hal Kedaulatan," (Singodimedjo, 1978) Kasman Singodimedjo menegaskan bahwa pada dasarnya manusia tidak memiliki kedaulatan penuh.

Kedua, "Kedaulatan Negara." Kedaulatan negara dibangun di atas konsensus, ketika rakyat menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada negara untuk mencapai tujuan bersama. Negara dengan segenap instrumen kekuasaan yang dimilikinya menyelenggarakan pemerintahan yang sah. Terdapat satu adagium yang menurut Kasman Singodimedjo sangat lemah berkaitan dengan kedaulatan Negara, yaitu, bahwa "*pengertian kedaulatan negara tidak hanya memberi kebanggaan kepada negara dan rakyat yang bersangkutan, tetapi di dalam pengertiannya kedaulatan negara itu tidak mengenal negara lain berkuasa di atasnya*" (Pidato Singodimedjo di Konstituante Republik Indonesia tentang Dasar Negara: 450-451). Dari adagium inilah, dalam pandangan Kasman, tidak jarang muncul slogan "*Right or wrong is my country!*" atau "*Deutschland uber alles!*" yang telah menggiring bangsa-bangsa di dunia menuju Perang Dunia (PD). Simpulan Kasman Singodimedjo, konsep kedaulatan negara tetap dalam posisi lemah. (Singodimedjo, 1978).

Ketiga, "Kedaulatan Hukum." Sebagai pakar hukum, Kasman Singodimedjo menempatkan teori kedaulatan hukum pada posisi setelah kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara. Menurutnya, teori ini justru lahir setelah jelas bahwa kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara terbukti sangat lemah. Namun dalam pandangan Kasman Singodimedjo, hukum positif yang tidak lain adalah hasil kreasi manusia sering diabaikan, bahkan diinjak-injak. Hukum internasional justru paling sering diabaikan oleh bangsa-bangsa di dunia. Pertanyaannya kemudian, mengapa kedaulatan hukum tidak pernah terwujud? Ia menjawab, "*... karena kedaulatan hukum itu in feite berasal dari kedaulatan rakyat, sedang kedaulatan rakyat itu adalah tidak lain dan tidak bukan melainkan kumpulan dari manusia-manusia yang dla'if itu*" (Pidato Mr. Kasman Singodimedjo di Konstituante Republik Indonesia tentang Dasar Negara, 1982: 451-452).

Keempat, "Kedaulatan Allah." Kasman Singodimedjo menempatkan teori Kedaulatan Tuhan (Allah SWT) di atas

Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Negara, dan Kedaulatan Hukum. Dalam pandangannya, Allah SWT adalah sumber kedaulatan yang universal. Ketika menjelaskan teori kedaulatan yang bersumber dari Allah SWT, ia tidak kurang menyebut sekitar 27 ayat dalam Al-Qur'an.⁵ Dengan demikian, jelas bahwa sumber otoritas tertinggi dalam konsep filsafat kenegaraan Kasman Singodimedjo adalah Tuhan yang bersifat universal. Secara tegas, ia mengungkapkan gagasannya dalam sidang Konstituante, bahwa:

“dengan mendudukan dasar universeel “KEDAULATAN HUKUM ALLAH” sebagai dasar negara Indonesia, maka puaslah kiranya warga dunia ini, maupun warga dunia yang bertanah air di Indonesia, ataupun warga dunia yang dinamakan orang asing bagi Indonesia” (Pidato Mr. Kasman Singodimedjo di Konstituante Republik Indonesia tentang Dasar Negara”, dalam Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982:454).

ISLAM DAN NEGARA MODERN

Jika sumber kedaulatan tertinggi dalam pandangan Kasman Singodimedjo adalah Tuhan, maka bagaimanakah konsep negara dalam Islam? Dalam konteks ini, perdebatan yang mengemuka dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI memang relevan dan sejalan dengan dinamika pemikiran politik kenegaraan Kasman Singodimedjo. Sebagai representasi tokoh Muslim modernis, pemikiran politiknya tentu menghendaki berdirinya “Negara Islam Indonesia”, sebagaimana pendapat para tokoh Muslim dari kalangan modernis maupun tradisional. Namun, gagasan Negara Islam (*Darul Islam*) yang telah diveto oleh utusan pemerintah Jepang telah mengaburkan cita-cita para tokoh Muslim di forum BPUPKI (Madinier, 2013). Sementara itu, perdebatan dalam sidang-sidang PPKI yang berakhir dengan konsep “kompromi” – dalam istilah Remy Madinier (2013)

5 Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi rujukan Kasman dapat dilacak dalam artikel bersambung tentang Teori Kedaulatan.” Secara berturut-surut lihat Singodimedjo, “Hal Kedaulatan (I),” *Suara Muhammadiyah*, No. 1 Th. Ke-58/1978, h. 10-11. “Hal Kedaulatan (II),” *Suara Muhammadiyah*, No. 2 Th. Ke-58/1978, h. 10-11. “Hal Kedaulatan (III),” *Suara Muhammadiyah*, No. 3 Th. Ke-58/1978, h. 10-11. “Hal Kedaulatan (IV),” *Suara Muhammadiyah*, No. 4 Th. Ke-58/1978, h. 10-11.

disebut *apologetic consiliation* – tidak bisa lepas dari peran Kasman Singodimedjo. Bahkan, ia sendiri memberi istilah khusus dalam hal ini dengan konsep *gentlement's agreement*.

Secara afirmatif, sebenarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah disepakati bersama dengan dicabutnya “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta, termasuk sikap Kasman Singodimedjo terhadap konsep negara yang di luar kerangka *Darul Islam* ini. Dengan demikian, sikap afirmatif Kasman Singodimedjo seiring dengan hadirnya konsep NKRI – bukan Negara Islam (*Darul Islam*) dan Pancasila sebagai Dasar Negara – bukan atas asas Islam. Namun demikian, sikap dan pandangan Kasman Singodimedjo pada tahap berikutnya, terutama lewat sidang-sidang KNIP dan Konstituante menunjukkan semacam anomali. Sebab, spirit konsolidasi kebangsaan pada fase pembentukan sistem konstitusi negara seakan-akan merupakan suatu konsensus tanpa syarat. Akan tetapi, dengan melihat perubahan spirit kebangsaan pasca Indonesia merdeka yang direpresentasikan oleh para tokoh Muslim di KNIP dan Konstituante, maka istilah yang digunakan Remy Madinier sepertinya tepat untuk menyebut bahwa konsensus pada akhir sidang-sidang PPKI sebagai *apologetic consiliation*. Namun, dalam hal ini penulis berusaha membaca perubahan sikap tersebut pasca Indonesia merdeka justru masih dalam satu alur logika politik yang belum selesai. Setidaknya, dengan memahami latar belakang epistemologi politik kenegaraan Kasman Singodimedjo yang memang berdasarkan konsep “teori kedaulatan Tuhan”, maka tahap konsensus nasional pada akhir sidang-sidang PPKI adalah suatu bentuk *gentlement's agreement* atau sebuah konsensus bersyarat yang belum ditunaikan.

Dalam hal ini, selain istilah *Darul Islam*, Kasman Singodimedjo juga menggunakan istilah-istilah yang bersumber dari al-Qur’an untuk menyebut Negara Indonesia, seperti “*Darul salam*” dan “*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*.” Istilah “*Darul salam*” digunakan oleh Kasman Singodimedjo ketika menjelaskan strategi mewujudkan keadilan sosial (sila ke-5 Pancasila) lewat institusi sosial terkecil dalam masyarakat yang bernama keluarga. *Darul salam* adalah konsepsi “keluarga bahagia” yang dibangun

di atas prinsip-prinsip harmoni berdasarkan ajaran Islam dalam dimensi sosial (Singodimedjo, 1968). Ia bahkan memadukan dua kata dalam satu frase yang unik ketika menjelaskan fungsi ajaran Islam yang mengharmonisasikan hubungan antara satu keluarga dengan keluarga lain dengan istilah "*Darul sosialis*" (Singodimedjo, 1968). Jika institusi keluarga dalam masyarakat merupakan cermin atau wujud implementasi *darul salam* dalam skala mikro, maka negara adalah implementasi *darul salam* dalam skala makro.

Selain istilah *darul salam*, Kasman Singodimedjo yang merupakan aktor intelektual (ideolog) Partai Masyumi, tentu tidak asing dengan konsep "*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*" (Singodimedjo, 1968). Inilah rumusan tujuan partai Islam modernis terbesar pada waktu itu yang diadopsi dari ayat al-Qur'an (Q.S. Yunus: 10, 25 dan al-Baqarah: 112). Setelah menjadi ideologi partai dirumuskan sebagai berikut: "*Tujuan partai ialah terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat, dan Negara Republik Indonesia, menuju keridhaan Ilahi*" (lihat Bajasut dan Hakiem, 2014:427).

Setelah gagal memperjuangkan terbentuknya Negara Islam Indonesia (*Darul Islam*), para tokoh Muslim dalam keanggotaan BPUPKI dan PPKI mulai berbeda pendapat seputar bentuk negara yang dipandang sejalan dengan ajaran Islam. Konsep "Negara Kesatuan" tidak terlalu banyak diperdebatkan, begitu juga bentuk pemerintahan republik – yang sebenarnya mengacu pada teori-teori Barat. Namun, sebagian besar tokoh Muslim masih berharap agar ajaran Islam mampu mewarnai sistem konstitusi nasional, terutama melalui perjuangan Partai Masyumi (pada periode pasca Pemilu 1955). Sosok Kasman Singodimedjo, dalam konteks perjuangan pada periode ini, lebih sering tampil kritis dengan mengungkit kembali *gentlement's agreement*. Dalam pandangannya, negara boleh tidak menggunakan konsep *Darul Islam*, tetapi penerapan sistem pemerintahan atau praktik kehidupan politik nasional harus bersumber dari ajaran Islam. Sebab, legalitas praktik kehidupan politik nasional bersumber dari kedaulatan yang universal – "Kedaulatan Allah." Dari sinilah pemikiran Kasman Singodimedjo lebih banyak mengadaptasi

konsep-konsep Islam untuk diimplementasikan dalam praktik kehidupan politik modern.

Sebuah analogi kritis dari Kasman Singodimedjo muncul ketika menjelaskan konsep Islam dan Negara dalam konteks terbentuknya Negara Indonesia seperti sebuah “Kapal”; bagaimana bentuk kapal, hukum apa yang berlaku di dalam kapal, dan siapa sang nahkoda kapal.

Kaum Muslimin sebagai bagian dari Rakyat Indonesia – bagian yang terbesar – saya umpamakan kini bersama-sama dengan bagian-bagian Rakyat Indonesia yang lain berada di kapal. Kapal itu namanya R.I. dan kini dengan penuh semangat sedang berevolusi berlayar (dengan semangat teori “*Fasensprung*”) di samudera luas menuju ke pulau tujuan yang namanya “Keadilan Sosial”, di mana akan terdapat kemakmuran/kebahagiaan bersama yang merata adil, tanpa penindasan berupa apapun. Nahkoda kapal tersebut kini namanya Bung Karno. Landasan kapal itu terbikin dari baja buatan Indonesia yang namanya Ketuhanan J.M.E. sumber Pancasila. Kompas dan haluan dari kapal tersebut kini adalah Manipol Usdek. Bendera yang berkibar dari kapal itu ialah Merah Putih (bukan Putih Merah). Nah kita kaum Muslimin berada di kapal itu. Itulah keadaan dan faktanya yang nyata-nyatanya, terlepas dari persoalan pro dan kontra mengenai keadaan/fakta itu (Singodimedjo, 1968:34).

Proses adaptasi ajaran Islam ke dalam praktik kehidupan politik kebangsaan di tanah air, seperti perumpamaan di atas, sebenarnya belum cukup representatif mempertemukan dua sumber epistemologi filsafat politik kenegaraan antara Islam dan Barat. Perumpamaan Kapal NKRI dengan sang nahkoda Bung Karno – sang Kapten Kapal – dan landasan kapal “Pancasila” – yang digali dari khazanah budaya Indonesia, jelas masih dalam kerangka pemikiran yang *logis-empiris-antroposentris*, sedangkan corak epistemologi Islam masih belum terakomodasi dalam perumpamaan tersebut. Dalam alam pikiran kalangan Muslim, sumber otoritas tertinggi berasal dari Allah yang tentunya tidak dapat disejajarkan dengan manusia – sang kapten kapal. Sementara, landasan hukum bagi umat Islam adalah al-Qur’an

dan Sunnah Nabi yang berbeda tingkat otoritasnya dibanding Pancasila (Singodimedjo, 1968).

Untuk menjembatani kegamangan ini, Kasman Singodimedjo kemudian membuat analogi bahwa otoritas Allah sebagai "Al-Kapten" yang posisinya di atas kapten kapal NKRI (Bung Karno), sedangkan landasan hukum Islam (al-Qur'an) sekalipun tidak tergantung oleh produk hukum buatan manusia, tetapi Pancasila adalah hasil produk ijtihad politik para ulama dan tokoh Muslim yang terlibat dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI sehingga dapat dikatakan sudah termasuk bagian dari hukum Islam (Singodimedjo, 1968). Namun, sebuah pertanyaan dalam renungan Kasman Singodimedjo sempat mengemuka, "bagaimana jika keputusan kapten kapal berseberangan dengan otoritas Al-Kapten (Allah)?" Dalam konteks inilah, ia mengadaptasi konsep "*amar ma'ruf nahi munkar*" sebagai bentuk perjuangan politik umat Islam untuk mengawal pemerintahan. Konsep ini lahir ketika Bung Karno membubarkan Konstituante dan menerapkan konsep Demokrasi Terpimpin (Singodimedjo, 1968).

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Perdebatan seputar Negara Islam secara otomatis menghendaki masuknya sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan Sunnah) ke dalam sistem konstitusi negara. Setelah penolakan terhadap konsep Negara Islam, maka strategi perjuangan para tokoh Muslim di forum BPUPKI dan PPKI mulai diarahkan untuk memasukkan unsur-unsur ajaran Islam ke dalam sistem konstitusi nasional. Perdebatan keras dan alot, seperti yang dilukiskan Remy Madinier bahwa, "*Di balik jalan-jalan pintas yang memudahkan, upaya pemahaman historis hubungan Islam dengan politik merupakan suatu pekerjaan panjang yang melelahkan*" (Madinier, 2013: xiv). Perdebatan yang alot terjadi menyangkut dinamika politik kenegaraan pada fase pembentukan dasar negara Republik Indonesia dalam sidang-sidang maraton yang diselenggarakan oleh BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Perdebatan tentang konsep negara Islam dan sistem konstitusi negara yang berdasarkan Islam melibatkan tokoh-tokoh Muslim,

baik dari kalangan modernis maupun tradisional (Raditya, 2019).

Mengenai konsep-konsep awal yang ditawarkan para tokoh nasional dalam rumusan Pancasila tidak akan dibahas di sini. Akan tetapi, rumusan awal yang diajukan Soekarno pada 01 Juni 1945, dengan susunan dan sistematika yang berbeda, pada akhirnya menjadi kesepakatan bersama yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Maarif, 2017; Raditya, 2019). Perdebatan alot antara kelompok Islam dan nasionalis hampir menemui jalan buntu. Pasalnya, kelompok Islam menghendaki masuknya doktrin pokok Islam yaitu tauhid (monoteisme), harus masuk ke dalam sila yang mampu mengilhami seluruh sila dalam Pancasila. Dalam hal ini, sila pertama dengan redaksi, "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" – kemudian dikenal dalam kajian historis dengan istilah "tujuh kata." Adapun rumusan Pancasila yang menjadi perdebatan pada waktu itu adalah

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Raditya, 2019)

Kasman Singodimedjo memiliki peran strategis dalam proses moderasi antara kelompok Muslim yang teguh menghendaki masuknya Islam dalam sistem konsitusi negara dengan kelompok nasionalis yang berusaha mengakomodir kepentingan Non-muslim. Setelah konsep Negara Islam Indonesia ditolak (Madinier, 2013), baik oleh otoritas pemerintah Jepang maupun kelompok nasionalis, maka rumusan "*ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*" dalam sila pertama Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 menjadi kekuatan konseptual yang akan mewarnai sistem konsitusi

nasional. Adalah Ki Bagus Hadikusumo, anggota PPKI dan sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah, yang teguh menghendaki masuknya ajaran Islam dalam sistem konstitusi negara. Ki Bagus Hadikusumo menjabat sebagai Ketua Umum PB Muhammadiyah hasil Kongres Darurat (Perundingan Silaturahmi Cabang/Ranting seluruh Jawa dan Madura) 1946 dan Mukhtar Muhammadiyah tahun 1950 (ke-31) di Yogyakarta (lihat Masruri, 2005; Suara Muhammadiyah, 1968). Ki Bagus Hadikusumo sangat kharismatik dan disegani, tidak hanya oleh kalangan Muslim tetapi juga di kalangan nasionalis. Bahkan, Soekarno dan Mohammad Hatta cukup segan untuk meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo supaya menghapus “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta. Panitia Sembilan akhirnya mengirim utusan khusus, Mr. Teuku Muhammad Hasan, yang bertanggung jawab meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo (Hadikusuma, t.t). Akan tetapi, proses lobi tidak berhasil karena Ki Bagus Hadikusumo tetap kokoh mempertahankan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Ketika debat mengalami jalan buntu, dalam jeda waktu yang tersisa, Kasman Singodimedjo berhasil melobi Ki Bagus Hadikusumo.

Rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara yang berhasil disepakati bersama adalah sebagaimana berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Hadikusuma, t.t ; Raditya, 2019).

Dalam amatan Djarnawi Hadikusuma (t.t.), sosok Kasman Singodimedjo dipandang memiliki kedekatan ideologis dengan Ki Bagus Hadikusumo karena memang ia tercatat sebagai anggota sekaligus kader Muhammadiyah. Kegigihan dan argumentasi logis Kasman Singodimedjo berhasil meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo agar menerima usulan penghapusan “tujuh

kata” dalam Piagam Jakarta. Selain faktor kapasitas individunya, sebenarnya faktor ideologis yaitu hubungan kedekatan antara keduanya sebagai kader Muhammadiyah, turut menyukseskan proses lobi yang cukup alot. Tercapainya kesepakatan bersama dalam rumusan Pancasila sebagai hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa Indonesia (Hadikususma, t.t).

“Kompromi politik” – meminjam istilah Kasman Singodimedjo – untuk menyebut tercapainya konsensus dalam penyusunan Pancasila sebenarnya merupakan suatu tahapan awal dari proses perjuangan merebut tafsir atas pemahaman dan implementasi setiap sila dalam Pancasila berdasarkan ajaran Islam. Partai Masyumi merupakan elemen Muslim yang paling getol mengisi tafsir Pancasila berdasarkan ajaran Islam. Proses politik di parlemen yang diperankan Partai Masyumi terus mengalami pasang surut – sebab partai-partai lain dalam posisi yang berhadapan dengan partai ini, khususnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Dalam konteks hubungan antara Pancasila dengan hukum Islam, melalui perumpamaan “Kapal NKRI,” Kasman Singodimedjo meletakkan Pancasila sebagai “landasan kapal” – yang bahannya digali dari khazanah budaya Indonesia. Hadirnya sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, dimaknai sebagai inti ajaran Islam, yakni tauhid. Sila inilah yang dalam pandangan Kasman Singodimedjo sebagai inspirasi dari seluruh sila dalam Pancasila (Singodimedjo, 1968). Dalih penerimaannya atas Pancasila karena selaras dengan ajaran Islam.

Oleh sebab itu tetap saja umat Islam akan menganggap *Islam itu adalah Serba-Sila* yang berisikan sila-sila yang jumlahnya tidak terhitung, alhasil lebih banyak daripada lima atau panca. Ummat Islam mengerti bahwa kelima-lima Sila dari Pancasila itu sungguh-sungguh termasuk dalam Serba-Sila Islam, dan itu pulalah anggapan yang kuat untuk menerima Pancasila; tidak ada yang lebih kuat daripada itu untuk menerimanya (Singodimedjo, 1968).

Istilah “Islam Serba-Sila” dihadapkan pada konsep Pancasila yang telah disepakati, sebenarnya lebih mudah dipahami dalam konteks logika struktural antara universalitas dan kondisionalitas

(partikularitas). Dalam Pancasila, ajaran Islam sebenarnya telah cukup terakomodasi, apalagi sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) menjadi inspirasi bagi sila-sila yang lainnya. Jika hukum Islam ditempatkan pada konteks universalitas, maka Pancasila adalah bagian dari implementasi hukum Islam (partikularitas). Konsepsi semacam ini sebenarnya sejalan dengan pemikiran Kasman Singodimedjo ketika menyampaikan pidato di depan sidang Konstituante tentang “Dasar Negara”, bahwa rumusan filosofis dasar negara harus memenuhi dua kriteria, yaitu universal dan dialektis Indonesia (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982). Pancasila mengandung nilai-nilai Islami yang universal dan sekaligus memberi corak serta warna yang khas Indonesia (dialektis). Dengan demikian, tidak terdapat alasan lagi bagi umat Islam menolak konsep Pancasila sebagai dasar negara.

Sebagai ideologi negara, Pancasila yang mengandung nilai-nilai universal dan sekaligus khas keindonesiaan (dialektis), tafsir atas ideologi ini memang sangat beragam. Dalam pendekatan filsafat ilmu, setiap teori atau konstruksi pengetahuan akan berkembang dinamis – berdialektika dalam ruang dan waktu – sehingga mengalami apa yang disebut sebagai ‘ortodoksi ilmiah’ (Rorsch, 2014). Pergeseran makna – tafsir Pancasila – yang dibarengi dengan praktik kebijakan politik tertentu, tidak dapat dihindari. Ketika tafsir ideologis Pancasila dimonopoli oleh kepentingan politik tertentu, maka gejala ‘ortodoksi ilmiah’ dalam bentuk distorsi pemaknaan dan tercerabutnya akar filosofi ideologi menjadikan problem tersendiri bagi bangsa ini. Oleh karena itu, dinamika politik “berebut tafsir ideologi Pancasila” tidak dapat dihindari dalam sidang-sidang Konstituante. Pemikiran Kasman Singodimedjo sebenarnya dapat diletakkan dalam konteks “berebut tafsir ideologi Pancasila” berdasarkan latar belakang epistemologi politiknya. Berikut ini penjelasan Kasman Singodimedjo ketika menafsirkan Pancasila.

Sila Pertama: “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sila yang menginspirasi seluruh sila dalam Pancasila. Ia laksana ‘sokoguru’ yang menopang pilar-pilar lain dalam Pancasila. Substansi makna sila pertama, dalam pandangan Kasman

Singodimedjo adalah ajaran pokok Islam sebagai representasi dari ajaran tauhid (Singodimedjo, 1968; Maarif, 2017). Posisi sila pertama terhadap sila-sila yang lain seperti diungkapkan oleh Kasman Singodimedjo berikut:

Ummat Islam menganggap Ketuhanan Yang Maha Esa dari dan di dalam Pancasila itu minimumnya sebagai “sokoguru” (tiang/pilar pokok) yang setidak-tidaknya berdiri tegak di tengah-tengah soko-soko (pilar-pilar) yang lain yang berjumlah empat itu. Apabila sokoguru itu tidak tegak lagi, maka pasti akan *rubuhlah/jatuhlah* perumahan yang harus dibangun dengan sebaik-baiknya itu sesuai dengan maksud dan tujuannya adil, makmur, gemah-ripah, loh jinawi, tata, tenteram, karta raharja. Sebaliknya, berdiri tegaknya sokoguru itu pasti akan menguatkan empat pilar atau tiang yang mengelilinginya (Singodimedjo, 1968:63).

Sila Kedua: “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) harus mengilhami sila kedua ini. Prinsip kemanusiaan yang universal—tidak hanya berlaku bagi rakyat Indonesia, tetapi juga untuk rakyat dunia—menjadi pilar kedua dalam Pancasila. Ajaran humanisme bertujuan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan universal. Kasman Singodimedjo meletakkan ajaran kemanusiaan dalam Islam yang digali dari sumber-sumber al-Qur’an setara dengan ajaran kemanusiaan universal. Terkait dengan hal ini, Kasman Singodimedjo menegaskan bahwa,

Menurut pelajaran agama Islam, yang dinamakan perikemanusiaan itu ialah suatu suasana yang berhubungan antara manusia sebagai oknum yang bukan binatang, dengan manusia lain sebagai anggota *di dalam masyarakat*, baik di masyarakat kecil di rumah tangganya sendiri ataupun di masyarakat yang lebih luas dari rumah tangga, dan suasana yang berhubungan dengan pertalian-pertalian manusia-manusia yang hidup di dunia ini di manapun mereka itu berada, *dengan maksud* kesemuanya itu untuk menjadi manusia-manusia yang baik dan bertanggung jawab (baca Qur’an: Bani Israil 15, An-Najm 38, dan Ali Imran 110), sehingga dengan begitu dapat mewujudkan masyarakat dan dunia manusia yang baik, guna kebahagiaan manusia, masing-masing dan bersama-

sama, satu dan lain seperti yang telah digariskan oleh Allah, sehingga suasana termaksud berpancarkan kepada semua makhluk Allah yang bukan manusia sekalipun (Singodimedjo, 1968:122).

Sila Ketiga: "Persatuan Indonesia." Prinsip persatuan Indonesia adalah konsep kebangsaan yang harus diilhami oleh sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa). Nasionalisme dan bahkan internasionalisme – sebagaimana konsep awal dari Bung Karno – telah tersirat dalam ajaran Islam sebagaimana Surat Ar-Rum ayat 22 dan Al-Hujurat ayat 13. Dengan merujuk pada penafsiran dua ayat tersebut, Kasman Singodimedjo menegaskan bahwa khazanah ajaran Islam tidak hanya mengenal konsep kebangsaan tetapi juga hubungan antar bangsa yang dikenal dengan internasionalisme (Singodimedjo, 1968). Dengan berbagai dalih dan argumentasi, Kasman Singodimedjo menegaskan bahwa konsepsi kebangsaan yang berdaulat di atas bangsa-bangsa lain adalah pilihan yang tepat bagi Indonesia. Dengan konsepsi ini, maka segala bentuk penjajahan atau penguasaan suatu bangsa atas bangsa lain tidak dibenarkan. Tafsiran Kasman Singodimedjo ini sejalan dengan amant dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa segala macam bentuk penjajahan di muka bumi atas nama kemanusiaan dan keadilan tidak dapat dibenarkan. Kasman mengatakan,

Teranglah bahwa menurut pelajaran Agama Islam, maka masing-masing bangsa atau negara itu berdaulat penuh untuk mengurus dan mengorganisir rumahtangganya sendiri. Kedaulatan itu mutlak, dan Islam tidak suka, bahkan menentang sekali adanya imperialisme dan kolonialisme didalam bentuk apapun, sebab imperialisme dan kolonialisme itu mengganggu, setidaknya-tidaknya mengurangi kedaulatan mutlak pemberian dan penentuan Allah (Singodimedjo, 1968:104).

Sila Keempat: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan." Kasman Singodimedjo meletakkan sila keempat dalam kerangka pemahaman tentang "kedaulatan rakyat." Sebagaimana tata urutan pemahaman sebelumnya, sila pertama tetap harus

mengilhami sila keempat yang mengandung konsep “kedaulatan rakyat.” Dengan demikian, diperoleh pemahaman utuh bahwa “kedaulatan rakyat” atas prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

“Kedaulatan rakyat” diperoleh melalui jalan permusyawaratan yang mengakomodasi ragam aspirasi dan kepentingan sehingga tercapai kata mufakat. Inilah konsepsi yang sering diusung oleh Kasman Singodimedjo dan Partai Masyumi dalam berbagai sidang Konstituante. Prinsip ini terilhami dari Q.S Asy-Syura ayat 22 bahwa segala macam urusan manusia di dunia dipecahkan bersama melalui jalur permusyawaratan (*syura*). Prinsip *syura* menjadi mode penyelesaian konflik yang bersumber dari khazanah ajaran Islam. Pertanyaannya kemudian, bagaimana jika permusyawaratan mengalami jalan buntu? Kasman Singodimedjo menegaskan, jika tidak tercapai kesepakatan bersama (mufakat), maka jalan keluarnya adalah dengan mengembalikan urusan tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya seraya menyebut Q.S An-Nisa ayat 59. Dengan mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti status hukum dari persoalan yang diperdebatkan akan dicarikan jawabannya berdasarkan al-Qur’an dan Hadis Nabi atau lewat *ijma’* serta *qiyas* dari para ulama terdahulu (Singodimedjo, 1968)

Dalam konteks perubahan peta politik nasional pasca pembubaran Konstituante, Kasman Singodimedjo mengkritik secara halus kebijakan politik Soekarno. Ia mengkritik tentang konsepsi Demokrasi Terpimpin yang menurutnya telah keluar dari konteks “kedaulatan rakyat” yang diilhami oleh sila pertama. Selanjutnya, ia menawarkan suatu penafsiran baru tentang apa yang seharusnya dalam Demokrasi Terpimpin.

Tetapi ada lagi pelajaran lain yang dapat ditarik dari musyawarah itu, yaitu bahwa sesungguhnya yang berlaku di kalangan Islam itu adalah *demokrasi terpimpin*, ya, demokrasi terpimpin dengan *pemimpin Allah*. Apa sebab? Sebabnya ialah karena sama-sama yang bermusyawarah itu menyerahkan diri kepada Allah secara tulus ikhlas untuk mendapatkan hidayah, taufik, dan ridha Allah. Sebab sama-sama mereka itu yakin semakin-yakinnya bahwa betapapun pintarnya manusia itu – ambillah manusia yang terpintar di dunia ini – selalu manusia itu dhaif sifatnya,

yaitu lemah, apalagi jika dibandingkan dengan Allah Yang Maha Tahu (Singodimedjo, 1968:139).

Sila Kelima: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sila pungkasan dalam Pancasila adalah tentang “keadilan sosial” yang oleh Kasman Singodimedjo didefinisikan secara aktual. Baginya, “*Keadilan sosial adalah suatu suasana di dalam suatu masyarakat dimana para anggota-anggotanya berkemakmuran yang adil dan membahagiakan*” (Singodimedjo, 1968:145). Sebagaimana kerangka pemikiran sebelumnya, dalam pemahaman struktur Pancasila, sila pertama harus mengilhami sila-sila berikutnya, termasuk sila terakhir ini. Dengan demikian, konsep “keadilan sosial” harus juga berada dalam kerangka “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Prinsip keadilan sosial berkaitan dengan konsep kebenaran, kebahagiaan, dan ketentraman sesuai ajaran Islam. Dalam pandangan Kasman Singodimedjo, unsur keadilan bertalian erat dengan konsep menegakkan kebenaran dan sekaligus meninggalkan kebatilan. Dengan mengutip Q.S An-Nisa ayat 58, 105, dan 135, ia menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan atas perintah Tuhan (Singodimedjo, 1968). Keadilan yang ditegakkan akan menciptakan ketentraman dan kebahagiaan. Mengingat pemikiran Kasman Singodimedjo tergolong strukturalis, maka dalam mewujudkan keadilan sosial dapat ditempuh menggunakan “jalur dari atas” (pemerintah) melalui program-program ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyat dan sekaligus menggunakan “jalur dari bawah” dengan melakukan pemberdayaan dan penyadaran yang dimulai dari orang perorang, institusi keluarga, dan, masyarakat, dan seterusnya (Singodimedjo, 1968).

PENUTUP

Dari hasil pengkajian terhadap pemikiran filosofis Kasman Singodimedjo tentang konsep Islam dan kenegaraan di atas dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, dalam pemikiran Kasman Singodimedjo, sumber kedaulatan tertinggi dalam ajaran Islam adalah Allah SWT (teokrasi). Teori kedaulatan

rakyat, kedaulatan pemerintah, dan kedaulatan hukum, di mata Kasman Singodimedjo, masing-masing memiliki kelemahan karena memang bersumber dari epistemologi Barat yang antroposentris. Adapun dalam alam pikiran kalangan Muslim, otoritas dan sumber kedaulatan tertinggi adalah di Tangan Tuhan (teosentris). Dengan mengadopsi teori kedaulatan berdasarkan epistemologi Barat, ia kemudian mengadaptasinya ke dalam alam pikiran Muslim dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia sehingga terbentuklah kolaborasi teoretis “Kedaulatan Allah” yang diselenggarakan oleh manusia dengan tujuan menunaikan kewajiban-kewajiban asasi sebagai hamba Allah. Dalam hal ini, Kasman Singodimedjo meletakkan sistem konstitusi dengan mendudukkan dasar universal “Kedaulatan Hukum Allah” sebagai Dasar Negara Indonesia.

Kedua, konsepsi Kasman Singodimedjo tentang Islam dan negara modern memang sudah final, bahwa *darul Islam* adalah konsepsi yang diusung oleh kekuatan politik Islam mayoritas pada waktu itu. Akan tetapi, setelah melewati proses politik di BPUPKI, konsep *darul Islam* ditolak oleh otoritas Jepang, sehingga perjuangan umat Islam harus menggunakan strategi lain, yaitu dengan cara memasukkan unsur-unsur ajaran Islam ke dalam sistem konstitusi nasional. Perdebatan seputar Piagam Jakarta yang berakhir dengan kompromi-kompromi di kalangan para tokoh Muslim telah melahirkan apa yang diinisiasi oleh Kasman Singodimedjo dengan *gentlement's agreement*. Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan Negara Islam (*darul Islam*), adalah bentuk yang sudah final sebagaimana kesepakatan hasil kompromi politik, namun perjuangan umat Islam dituntut untuk mengisi sistem konstitusi nasional dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian, mode perjuangan umat Islam dalam pandangan Kasman Singodimedjo sudah tidak lagi mementingkan simbolisme atau literalisme yang mengatasmakan ajaran Islam, tetapi lebih pada mode *high politics* dengan cara mewarnai pembentukan sistem perundang-undangan nasional.

Ketiga, hasil dari proses lobi-lobi politik tingkat tinggi yang diperankan Kasman Singodimedjo melahirkan kesepakatan bersama bahwa Dasar Negara Indonesia adalah Pancasila.

Namun demikian, dalam pandangan Kasman Singodimedjo, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah inti dari filsafat Pancasila, yang berarti menginspirasi seluruh sila. Ia memahami sila pertama Pancasila sebagai perwujudan dari ajaran pokok dalam Islam, yakni doktrin tauhid. Dengan meletakkan sila pertama sebagai inspirasi dari seluruh sila dalam Pancasila, Kasman Singodimedjo mendudukan ajaran Islam dalam posisi sebagai ajaran universal – *Islam serba-sila* dalam istilah Kasman Singodimedjo – yang menjiwai segenap penafsiran tiap-tiap silanya. Dengan demikian, NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara di mata Kasman Singodimedjo adalah perwujudan dari *darul Islam* dengan pendekatan *high politics* – yaitu pendekatan Islam yang tidak mementingkan simbolisme atau literalisme, tetapi lebih kepada pemahaman substansif atas ajaran Islam yang universal.

Demikian hasil kajian atas pemikiran Kasman Singodimedjo seputar teori kedaulatan, Islam dan negara modern, serta konsepsi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Sekalipun hasil kajian ini belum secara komprehensif menjelaskan dan mendeskripsikan serpihan-serpihan pemikiran kenegaraan Kasman Singodimedjo, namun paling tidak sudah menjadi bahan pemantik untuk kajian-kajian berikutnya. Tulisan ini, sekali lagi dapat menjadi pondasi awal bagi tulisan-tulisan mendatang. Oleh karena itu, ke depan diharapkan akan muncul kajian-kajian tidak hanya mengenai Kasman Singodimedjo yang selama ini masih jarang dikaji secara akademis, tetapi juga kajian terhadap tokoh-tokoh bangsa lain yang selama ini masih belum mendapat perhatian yang luas dari para akademisi dan praktisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Basuni, Ahmad. 1982. “Pengenalan Saya Terhadap dan dengan Pak Kasman,” dalam Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Bajasut, S.U. & Lukman Hakiem. 2014. *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito: Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hadikusuma, Djarnawi. t.t. *Aliran Pembaharuan Islam: Dari Jamaluddin Al-Afghani Sampai K.H.A. Dahlan*. Yogyakarta: Persatuan.
- Hallaq, Wael B. 1955. *The Possible State: Islam, Politics, and Moral Predicament*. New York: Columbia University Press.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2017. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Perdebatan dalam Konstituante*. Bandung: Mizan.
- Madinier, Remy. 2013. *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral*. terj. Tonny Pasuhuk. Bandung: Mizan.
- Masruri, Siswanto. 2005. *Ki Bagus Hadikusuma: Etika dan Regenerasi Kepemimpinan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman. 1982. *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Singodimedjo, Kasman. 1968. *Renungan dari Tahanan*. Jakarta: Penerbit Permata.

Sumber-sumber Lain

- "Anggaran Dasar Partai Politik Islam Masyumi," (Lampiran dalam S.U. Bajasut & Lukman Hakiem, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito: Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014).
- Mangoensarkoro, Sri. 1940. "Doea Faham dalam Gerakan Perempuan," *Soera Aisjijah*, No. 9-10/Oct.
- "Pidato Mr. Kasman Singodimedjo di Konstituante Republik Indonesia tentang Dasar Negara" (Lampiran dalam Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982).
- "Pidato Kasman Singodimedjo di Konstituante R.I. Hal Dasar Negara Hari Rabu Tanggal 13 Nopember 1957 Pagi" (Lampiran dalam Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman,

- Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982).
- Raditya, Iswara N. "Sejarah Hari Lahir Pancasila: Peran BPUPKI dan PPKI," <https://tirto.id/sejarah-hari-lahir-pancasila-peran-bpupki-dan-ppki-cpMp> (Diakses 26 Juli 2019).
- Rorsch, Arthur. "The Progress of Science: Past, Present and Future," www.mdpi.com/journal/humanities. Dipublikasi: 2 October 2014. (Diakses 26 Februari 2018).
- Singodimedjo, Kasman. 1978. "Hal Kedaulatan (I)" *Suara Muhammadiyah*, No. 1 Th. Ke-58.
- Singodimedjo, Kasman. 1978. "Hal Kedaulatan (II), *Suara Muhammadiyah*, No. 2 Th. Ke-58.
- Singodimedjo, Kasman. 1978. "Hal Kedaulatan (III), *Suara Muhammadiyah*, No. 3 Th. Ke-58.
- Singodimedjo, Kasman. 1978. "Hal Kedaulatan (IV), *Suara Muhammadiyah*, No. 4 Th. Ke-58.
- Suara Muhammadiyah* No. 17-18/Th ke-48/September 1968, h. 25-26. 🗨️

DEMOKRASI TAQIYAH DALAM DINAMIKA NEGARA-BANGSA

Abdul Munir Mul Khan

PENDAHULUAN

Beberapa kali bertemu muka dengan Prof. Dr. Kasman Singodimedjo, banyak kenangan yang terus tertanam di benak. Bukan hanya *bleger* (sosok) fisiknya yang tinggi besar, berkumis lebat melintang (kadang dibiarkan tumbuh), mata bulat tajam, tetapi juga karena gaya bicaranya yang lugas, terkesan garang, meski jika kita bercakap langsung, ia adalah orang yang ramah dan santun. Jika berbicara seringkali beliau menggunakan narasi dengan bahasa Belanda yang fasih. Pertama kali bertemu muka sekitar tahun 1968 di kota Metro Lampung Tengah (saat itu ibukota Kabupaten Lampung Tengah, kini Kota Metro Raya), saat itu penulis menjabat Ketua Pemuda Muhammadiyah Daerah Lampung Tengah, juga Sekretaris Umum MUI Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya, beberapa kali bertemu muka di kota Yogyakarta, saat penulis menetap di kota ini sejak 1978, menjabat Sekretaris Biro Organisasi dan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, merangkap Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tabligh. Di saat yang sama, penulis dipercaya sebagai anggota Majelis Pendidikan Tinggi dan Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah hingga 2000.

Tatap muka pertama berlangsung di rumah Bapak Raden Sukijo, sesepuh Muhammadiyah Lampung Tengah, anggota DPRD Lampung Tengah dari Golkar. Saat itu, jika tidak salah, pertemuan terkait sosialisasi keberadaan Parmusi. Tatap

muka berikut berlangsung di Yogyakarta, saat posisi beliau sebagai aktivis Muhammadiyah (Kumparan, 2019) dalam berbagai kegiatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beberapa kegiatan yang melibatkan Kasman Singodimedjo, biasanya terkait tema-tema politik dan tentunya hukum di sekitar posisi Muhammadiyah dalam dinamika negara-bangsa.

Kasman Singodimedjo terlibat dalam penyusunan Piagam Jakarta, juga “pencoretan” tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Ia juga terlibat dalam pembentukan NKRI dan pernah dipenjara akibat dituduh merongrong saat menjabat sebagai Jaksa Agung pertama negeri ini (Kumparan, 2019 dan Nasional.Tempo, 2019). Kasman juga terlibat aktif dalam pembentukan partai-partai Islam seperti Masyumi, yang “terpaksa” bubar, kemudian dinyatakan dilarang. Meskipun demikian, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Posisi Kasman Singodimedjo dalam dinamika kebangsaan seolah menjadi suatu cermin dilema partai-partai Islam. Kondisi politik Islam dalam dinamika negara-bangsa antara lain bisa dilihat dari paradigma Yusuf Qardhawy. Paradigma ini menegaskan bahwa suatu ide yang bisa mengurai realitas politik di kulit luar, di wajah depan, guna mengungkap panggung belakang praktik politik, populer dengan diksi “politik dua kaki”. Paradigma Qardhawy, bagi sentuhan teologis praktik politik yang di luar tampak inkonsisten, disebut *taqiyah* dalam berdemokrasi. Jalan keluar “kebuntuan” politik Islam berbasis syari’ah berhadapan fakta kegagalan partai-partai Islam memperoleh dukungan dari konstituen yang mayoritas memeluk Islam.

FIKIH DEMOKRASI *TAQIAH*

Di satu sisi, partai-partai Islam meyakini bahwa mereka memiliki konstituen pemeluk Islam sebagai mayoritas pemilih yang secara doktrinal akan menjatuhkan pilihan politiknya pada partai-partai Islam. Namun pil pahit harus dihadapi ketika partai-partai Islam yang tidak pernah memperoleh suara terbanyak di sepanjang sejarah Pemilu di negeri ini (Mul Khan, 1992; Mul Khan dan Singh, 2010). Di sisi lain, partai-partai Islam secara sadar

menerima sistem demokrasi yang meletakkan prinsip *one man one vote* (tiap penduduk tanpa melihat latar belakang pendidikan dan status sosial memiliki satu suara).

Namun bersamaan dengan itu, partai-partai Islam cenderung menempatkan komposisi warga Muslim yang lebih 80% pemilih otomatis sebagai representasi perolehan suara partai-partai Islam. Dari sini, kegagalan partai-partai Islam memperoleh suara mayoritas cenderung dilihat sebagai akibat konspirasi kekuatan anti Islam (Mul Khan dan Singh, 2010). Partai-partai Islam secara terbuka dan sadar menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Piagam Jakarta terus muncul berulang sebagai diskursus politik “bangsawan” politik Islam di momen-momen kritis dinamika kebangsaan. Di satu sisi, Pancasila ditempatkan sebagai konsensus nasional, di sisi lain pemberlakuan syariah Islam secara formal di negeri ini tidak pernah dikubur

Dari gagasan Yusuf Qardhawi tentang Fikih Muwazanat dan Fikih Aulawiyah, tampaknya muncul Demokrasi Taqiyah. Suatu sikap politik mendua atau “politik dua kaki,” menjadi diksi yang populer jelang dan saat Pilpres 2019. Di satu sisi, suatu partai mendukung dan terlibat dalam sistem demokrasi. Namun di saat yang sama bisa disebut partai tersebut juga mempecundangi demokrasi dengan beragenda untuk menumbangkan demokrasi dan menggantinya dengan sistem lain sesuai gagasan dasar yang mereka yakini. Sebab, perbedaan mendasar antara sistem sosial-politik berdasar demokrasi dan syariah adalah terkait dengan hak pengambilan keputusan. Jika dalam sistem demokrasi setiap orang mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bagian dari masyarakat atau jama’ah, dalam sistem syariah pengambilan keputusan menjadi hak sekelompok orang yang disebut *ahlu al-halli wa al-aqdi*. Kelompok ini merupakan kumpulan orang-orang yang ditunjuk oleh Imam atau kepala negara, kemudian tergabung di dalam wadah yang disebut majelis atau dewan syura.

Selanjutnya, jika di dalam sistem demokrasi kedaulatan berada di tangan rakyat (*vox populi vox dei*); dalam sistem syari’ah kedaulatan berada di tangan Tuhan yang dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis atau dewan syura yang dimaknai

sebagai wakil atau tangan Tuhan. Jika di dalam sistem demokrasi pengambilan keputusan yang benar didasarkan pada suara mayoritas atau terbanyak sebagai cermin kehendak publik; dalam sistem syari'ah pengambilan keputusan didasarkan oleh suara sekelompok orang yang dipercaya memahami maksud Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang tergabung di dalam dewan syura tersebut di atas. Hubungan pemimpin dan rakyat dibangun melalui dan dari *bai'at*, dalam demokrasi dibangun melalui perumusan kepentingan bersama sebagai implementasi bahwa suara Tuhan itu tercermin dari kehendak publik (suara rakyat/suara terbanyak).

Pertanyaan tentang bagaimana para aktivis gerakan Islam pada umumnya meletakkan demokrasi di satu sisi dan syariah di sisi yang lain dapat dijawab dengan mengkaji antara lain pandangan Yusuf Qardhawy. Tokoh ini kemudian menjadi inspirator utama gerakan fundamentalis untuk cenderung bersikap mendua di dalam memposisikan demokrasi. Beberapa aktivis cenderung menjadikan gagasan Yusuf Qardhawy sebagai paradigma gerakan. Kekaguman pada gagasan dari tokoh tersebut terutama pada Fikih Prioritas yang kemudian diberi label sebagai Madzhab Qardhawiyah. Karya Yusuf Qardhawy yang sering menjadi rujukan kaum konservatif aslinya bahasa Arab berjudul "*Awlawiyyah al-Harakat al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah*". Terjemahan buku ini terbit tahun 1993 dengan judul "*Prioritas Gerakan Islam: Antisipasi Masa Depan Gerakan Islam*". Di dalam buku ini Qardhawy menulis:

"...Gerakan Islam ialah segala aktivitas rakyat yang bersifat bersama (jama'ah) dan terorganisasi, yang berupaya mengembalikan Islam agar kembali memimpin masyarakat dan mengarahkan mereka dalam segala aspeknya. ... menyatukan umat atas dasar kalimat Allah; membebaskan bumi Islam dari segala aggressor atau dominasi non muslim, mengembalikan Khilafah Islamiya agar berperan kembali sebagai komando; memperbaharui kewajiban da'wah kembali; amar ma'ruf dan nahi munkar; jihad di jalan Allah dengan tangan atau lisan atau kalbu, walaupun yang dengan kalbu itu adalah selemah-lemahnya iman, sampai kalimat Allah tegak di muka bumi" (Qardhawy, 1993: 5-6).

Di dalam buku ini, Qardhawiy juga menyatakan:

“Gerakan Islam, juga harus selalu berada dalam barisan kebebasan politik yang tercermin dalam demokrasi yang benar, bukan demokrasi yang palsu. Di samping itu, Gerakan Islam sama sekali tidak akan berjalan seiring dengan sang diktator yang kejam – meskipun dia menunjukkan sikap simpatiknya terhadap gerakan – untuk meraih kepentingan sesaat.... Gerakan Islam, dan Kebangkitan Islam, bunganya tidak mekar, bibitnya tidak tumbuh, akarnya tidak menghunjam, dan cabangnya tidak menjulang, kecuali apabila berada dalam suasana yang bebas dan iklim yang demokratis. ... Ingin ditegaskan di sini, bahwa Islam bukanlah demokrasi itu sendiri, dan demokrasi bukanlah Islam, dan apa yang hendak dikaitkan antara Islam dengan prinsip atau sistem apa pun, Islam adalah lain sendiri dalam tujuan, minhaj dan cara-caranya. Tidaklah baik mentransfer demokrasi barat dengan segala kekurangannya dan kelebihanannya tanpa diisi dengan nilai dan pemikiran Islam dan menjadikannya sebagai bagian daripada sistem Islam yang integral. Akan tetapi, mekanisme dan jaminan yang dicapai oleh demokrasi itu adalah sesuatu yang lebih dekat untuk mewujudkan prinsip dan pokok-pokok fundamental yang dibawa Islam, untuk menjinakkan kebusuan penguasa, yaitu prinsip musyawarah, nasihat, amar ma’ruf nahi munkar, tidak mau taat apabila diperintah untuk berbuat maksiyat, melawan kekafiran yang terang-terangan, dan mengubah kemungkaran dengan kekerasan ketika mampu. Di sinilah tampilnya kekuatan kekuasaan legislatif yang mampu mencabut kepercayaan dari pemerintahan yang bertentangan dengan undang-undang” (Qardhawiy, 1993:187-190).

Pandangan demikian searah dengan gagasan holistik aktivis gerakan Islam yang pro fundamentalis bahwa Islam sebagai akidah dan syariah (Sjaltout, 1972) yang mengatur semua aspek kehidupan kata-perkata (literal) yang disusun ulama salaf dalam syariah. Pandangan demikian berkaitan erat dengan doktrin bahwa Islam sebagai agama dan kekuasaan (*din wa al-daulat*). Keyakinan kelengkapan dan kesempurnaan syariah (*kaffah* dan *sumul*) bersifat eksklusif tidak memerlukan lagi pemikiran baru atau tidak perlu harus meminjam sistem lain dalam penerapan dan penegakkannya. Sikap tertutup demikian itu menurut Abdullahi Ahmed An-Na’im dalam buku *Islam dan Negara Sekular; Menegosiasikan Masa Depan Syariah* adalah:

“ ... membatasi perdebatan bebas dengan mempercayai otoritas institusi-institusi atau manusia untuk memutuskan pandangan mana yang harus diikuti atau diberangus, berarti tidak konsisten dengan sifat religius syariah itu sendiri. Pemikiran ini merupakan salah satu fondasi utama Islam yang saya maksudkan untuk menjamin pluralisme, hak-hak asasi manusia, dan kewarganegaraan bagi semua...generasi-generasi Muslim awal tidak mengenal dan tidak menerapkan syariah sebagaimana yang kemudian diterima oleh mayoritas Muslim hingga saat ini” (An-Na’im, 2007, hlm 32-33).

Senada dengan An-Na’im, Jasser Auda (2015) menyatakan bahwa salah satu tujuan hakiki dari pewahyuan syariah ialah jaminan bagi kebebasan berkeyakinan. Pemikiran baru yang berkembang seiring dengan pertumbuhan negara-bangsa dan hubungan antar bangsa yang lebih terbuka, mengarahkan pada usaha transformatif kepada gagasan baru tentang pemutusan hubungan antara negara (kekuasaan) dan Islam (An-Na’im, 2007). Sementara itu, rekonstruksi ulama salaf di masa lalu dipengaruhi banyak faktor seperti situasi sosiologis, kultural, dan intelektual (Rahman, 1984). Di sini lahirlah apa yang kemudian populer dengan sebutan Islam politik yang antara lain menempatkan kekuasaan negara sebagai pasangan penegakan atau pemberlakuan syariah. Karena itu, ada pandangan bahwa tanpa kekuasaan, maka Islam atau syariah tidak lengkap, sehingga tanpa usaha membangun atau merebut kekuasaan secara konstitusional atau lainnya bisa berarti tidak setia pada doktrin syariah.

Keyakinan terhadap doktrin syariah seperti di atas yang tanpa diiringi sikap kritis akan mudah menciptakan suatu hubungan patron-klien seperti laporan Karl D. Jackson (1990). Suatu model klientalisme yang tidak memberi ruang gerak yang sama bagi setiap orang, sekaligus memberi posisi lebih pada seseorang dalam mengambil keputusan. Kecenderungan demikian bisa dilihat dalam undang-undang dasar yang di Negara Islam Indonesia (NII) dikenal sebagai Qanun Asasi atau Nidlam Asasi dalam Jamaah Islamiah (JI). Dalam undang-undang demikian, seorang Imam memiliki kedudukan istimewa yaitu sebagai kepala negara sekaligus sebagai pemimpin agama.

Demikian pula halnya dalam struktur istimewa majelis syura atau dewan syura dalam posisi sebagai mewakili rakyat atau umat karena keistimewaan mereka sebagai sekelompok orang yang dipercayai memiliki kelebihan atau keutamaan yang datang dari Tuhan, bukan karena dipilih oleh rakyat (Mul Khan & Singh, 2010).

Di sisi lain, dari keyakinan atas doktrin tersebut di atas, kekuasaan negara merupakan salah satu tujuan utama penegakan dan penerapan syariah atau sebaliknya seperti terlihat di dalam perdebatan dalam Sidang BPUPKI, Qanun Asasi NII, Nidhom Jama'ah Islamiyah, dan dari laporan penelitian. Salah satu akibat dari keyakinan doktrinal ini mendorong pendirian Negara Islam ketika penerapan syariah dipandang gagal setelah 7 kata ("dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya") dari Piagam Jakarta dicoret dalam penyusunan UUD 1945.

Berbagai peristiwa politik muncul berkaitan dengan NII dan 7 kata dalam Piagam Jakarta seperti Geger Talangsari tahun 1989. Demikian pula sikap Amrozi, Imam Samudra, dan Muchlas berkaitan dengan peristiwa Bom Bali tahun 2002. Beberapa penelitian melaporkan tentang sikap mendua aktivis gerakan Islam; menerima Pancasila tapi tetap memperjuangkan Islam sebagai Dasar Negara, menerima demokrasi tetapi berjuang bagi tegaknya NII, dan penempatan Pancasila bukan sebagai ideologi negara tetapi sebagai jembatan emas berdirinya NII.

Penelitian Riaz Hassan (1985) melaporkan korelasi yang cukup signifikan antara peningkatan pendidikan dan fundamentalisme konservatif. Gejala demikian itu berkorelasi pada peningkatan kesadaran seseorang sebagai Muslim dan dorongannya memenuhi identitas sebagai seorang Muslim saleh. Sementara itu, tidak tersedia pilihan bagi upaya demikian kecuali panduan teknis sebagaimana tersedia dalam buku dan kitab teks syariah maka muncul gejala konservatisme dan fundamentalisme. Sebagian di antaranya bersifat radikal anti segala sistem lain apalagi yang dipahami sebagai datang dari negeri-negeri Barat; Eropa dan Amerika. Hanya ada sedikit generasi yang percaya pada akal-pikiran dengan mengingat bahwa banyak problem aktual yang saat syariah disusun belum muncul dan mereka

mencoba mencari jawaban baru. Namun kelompok ini mudah diberi label sebagai agen Yahudi atau Barat dengan cap identitas liberal yang sering diartikan sebagai liar dan serba bebas.

Gejala serupa bisa dibaca dari laporan beberapa penelitian tersebut di atas yang menempatkan aktivis gerakan Islam sebagai guru agama Islam, mubaligh, juru dakwah, khatib, pengelola (takmir) Masjid dan pemimpin organisasi Islam sebagai sasaran. Penelitian yang dilakukan di dalam rentang waktu antara 2006-2009 ini memberikan informasi yang menarik. Dari laporan itu, muncul gejala keraguan yang meluas di antara responden sebagai seorang Muslim dalam kehidupan terbuka dan modern. Secara sadar responden memilih terlibat dalam kehidupan modern melalui model pendidikan, sistem ekonomi, dan sosial-politik serta memanfaatkan teknologi modern, bahkan menerima beasiswa dari negeri-negeri Barat sekuler. Namun mereka cenderung menolak segala bentuk dan model peradaban selain Islam seperti peradaban bangsa-bangsa Barat tersebut.

Sikap yang mungkin bisa disebut sebagai standar ganda ini dapat dijelaskan dalam pandangan Yusuf Qardhawy (1993) tentang prinsip maslahat yang hikmah siyasah syar'iyah. "Masih ada pemikiran zhahiri" (tekstual) yang terpaku pada nash-nash secara harfiah,...Tetapi di bidang "siyasah syar'iyah" (policy hukum) hal tersebut tidak dapat diterima sama sekali. Sebab dalam bidang ini diperlukan adanya keluwesan atau fleksibilitas tertentu, dengan memperhatikan perkembangan zaman, yaitu yang menyangkut tempat, waktu dan juga manusianya." (Qardhawy, 1993:148)

Selanjutnya Qardhawy menyatakan:

"Betapa kami terperanjat, ketika menjumpai di kalangan para ulama Afghanistan para pendekar yang memimpin jihad dengan penuh ikhlas, tegar dan heroik itu ada yang berpandangan, bahwa belajar bagi wanita adalah haram, ikut PEMILU untuk memilih anggota parlemen atau Presiden adalah haram, membatasi masa jabatan kepala negara adalah haram....Kami katakan kepadanya, "Apa yang membuat pembatasan kepala negara itu haram, jika umat Islam melihat kemaslahatan mereka dalam masalah tersebut?" (Qardhawy, 1993:151).

“Apabila Fiqih Muwazanat itu tidak kita miliki, maka berarti kita menutup pintu keluwesan dan pintu kasih sayang terhadap diri kita sendiri dan menggunakan prinsip “penolakan” sebagai dasar dari segala urusan apa pun, serta mengurung diri karena lari dari segala kesulitan yang seharusnya dihadapi, atau bahkan memukul lawan di kandangnya sendiri. Yang paling mudah bagi kita adalah mengucapkan kata-kata “tidak” atau “haram” dalam segala masalah yang seharusnya memerlukan pemikiran dan ijtihad. Adapun dalam Fiqih Muwazanat, kita akan menemukan jalan jika mengadakan perbandingan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Selanjutnya kita bisa memberikan prioritas (baca: fikih aulawiyat/ pen) serta mempertimbangkan untung rugi dari keduanya, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang, dalam skala pribadi maupun skala jamaah.” (Qardhawy,1993: 36).

Mempertegas pentingnya Fikih Muwazanat, Yusuf Qardhawy selanjutnya menulis:

...Rasulullah sendiri pernah berkoalisi dengan “Banu Khuza’ah” yang masih, dan beliau meminta bantuan beberapa orang yang masih musyrik untuk melawan orang-orang musyrik lainnya. ...Seperti diperbolehkannya ikut serta dalam sebuah pemerintahan yang tidak Islami, dan berkoalisi dengan kekuatan-kekuatan di luar Islam. (Qardhawy,1993:32).

Adapun pasangan fikih muwazanat ialah apa yang disebut Yusuf Qardhawy dengan fikih aulawiyat atau fikih prioritas. “... sering proses “muwazanat” (pertimbangan itu berakhir pada sebuah “Aulawiyah” (prioritas) tertentu.” (Qardhawy,1993:40) Fikih *aulawiyat* ialah “...menempatkan sesuatu pada proporsi yang sebenarnya; sehingga yang seharusnya didahulukan tidak dibelakangkan, atau sebaliknya; dan tidak boleh menganggap sepele terhadap persoalan yang besar atau sebaliknya tidak membesar-besarkan persoalan yang kecil.” (Qardhawy,1993:38)

Lebih lanjut Qardhawy menulis:

“...Gerakan Islam ialah segala aktivitas rakyat yang bersifat bersama (jama’ah) dan terorganisasi, yang berupaya mengembalikan Islam agar kembali memimpin masyarakat dan mengarahkan kehidupan mereka dalam segala

aspeknya. ... semangatnya terpacu untuk menunaikan kewajiban, menyempurnakan kekurangan, turut andil dalam menghidupkan segala kewajiban agama yang sudah nyaris lumpuh, seperti menegakkan hukum (syari'at) Allah; menyatukan umat atas dasar kalimat Allah; membesarkan bumi Islam dari segala agresor atau dominasi non muslim, mengembalikan Khilafah Islamiyah agar berperan kembali sebagai komando; memperbaharui kewajiban da'wah kembali; amar ma'ruf nahi munkar; jihad di jalan Allah dengan tangan atau lisan atau kalbu, walaupun yang dengan kalbu itu adalah selemah-lemahnya iman, sampai kalimat Allah tegak di muka bumi." (Qardhawy,1993:5-6).

"Syari'at Islam itu datang hanya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat." (Qardhawy,1993:28). Perlu disadari bahwa:

"...kemaslahatan yang telah ditetapkan menurut hukum syara' adalah bertingkat-tingkat antara satu dengan lainnya. ...kemaslahatan "*dharuriyah*" (primer) harus diutamakan daripada kemaslahatan "*hajiyah*" (sekunder) dan "*tahsiniyah*" (tersier). Kemaslahatan "*hajiyah*" harus didahulukan daripada kemaslahatan "*tahsiniyah*". Kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan umat dengan segala kebutuhannya, harus diprioritaskan daripada kemaslahatan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi (jika keduanya terjadi kontradiksi). Di sinilah senyawa "*Fiqih Muwazanat*" jika dipertemukan dengan "*Fiqih Aulawiyat*." (Qardhawy,1993: 43.)

Seluruhnya berkaitan dengan pemahaman umat Islam terhadap doktrin syariah yang dikonstruksi ulama-ulama salaf sekitar 12 abad lalu. Keyakinan doktrin syariah demikian itu merupakan hasil dari berbagai model pendidikan yang terus menerus menanamkan nilai-nilai yang dipercaya bersifat abadi dan benar mutlak. Keyakinan ini seringkali juga disertai penolakan segala pemahaman selain yang bersumber dari ulama salaf tersebut. Di sini penting dilihat kembali catatan Abdullahi Ahmed An-Na'im yang menyatakan bahwa "...generasi-generasi Muslim awal tidak mengenal dan tidak menerapkan syariah sebagaimana yang kemudian diterima oleh mayoritas Muslim hingga saat ini..." (An-Na'im, 2007:33).

Keyakinan terhadap doktrin syariah yang dipegang teguh sementara mereka hidup di dalam alam kehidupan yang terbuka dan global, seringkali memunculkan sikap ambivalen, mendua, dan ragu. Sikap mendua terlihat dari kesadaran hidup dalam sistem kehidupan modern, dari sekolah hingga transportasi dan komunikasi dengan beragam manusia, beragam agama dan keyakinan. Sementara di saat yang sama, mereka menolak bersikap toleran dan kerjasama saling menguntungkan dengan banyak pihak yang berbeda keyakinan.

Sadar bahwa dalam kehidupan demokrasi dituntut berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum, tapi menolak sistem demokrasi sebagai pilihan ideal penyelesaian persoalan sosial yang dihadapi. Secara sadar hidup di dalam komunitas yang plural secara budaya dan keagamaan, tapi cenderung menolak pluralisme dan cenderung bersikap eksklusif dengan memisahkan diri di tengah hiruk-pikuk sosial. Aktif di dalam kegiatan lembaga modern seperti pendidikan tinggi berbagai penelitian tentang Islam dengan metodologi dan pemikiran rasional, menolak pengembangan pemikiran kritis dan ijtihadi.

Berbagai gejala di atas, bisa menjadi petunjuk bahwa nasib demokrasi di negeri berpenduduk Muslim terbesar di dunia ini sedang mengalami pertarungan. Selalu muncul persoalan mengenai di mana tempat dan posisi demokrasi dan berbagai gagasan modern dalam peta Islam negeri berpenduduk lebih 80% memeluk Islam yang sering merasa diperlakukan tidak adil?

Mereka yang berpikiran moderat atau yang kadang diberi label liberal, ajaran Islam pada dasarnya kompatibel dengan ide demokrasi, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Sikap demikian dilandasi argumen bahwa menjunjung tinggi kemuliaan kemanusiaan dan kesejahteraan hidup bagi semua adalah nilai yang paralel dengan prinsip ajaran Islam *rahmatan lil alamin* (kesejahteraan bagi semua orang) (lihat Jaseer Auda, 2015; Hamim Ilyas, 2018).

Bagi konservatif, sistem demokrasi, HAM, kesetaraan gender, segala gagasan yang datang dari bangsa-bangsa Barat bukanlah gagasan Islam. Demokrasi bisa diterima sepanjang

memberi peluang tegaknya ajaran Islam. Namun, demokrasi harus ditolak jika tidak bisa memberi manfaat bagi Islam. Kedua model pandangan Islam tersebut terus berebut pengaruh dan semakin terbuka dan luas searah perkembangan teknologi komunikasi di dalam peradaban global. Secara garis besar, Islam dikenal dan dipahami dari dan dalam dua model dan dua wajah, yang bisa melahirkan dua cabang jalan yang saling bertentangan. Di satu sisi, Islam tampil dengan wajah santun penuh kedamaian, di sisi lain, tampil dengan perilaku yang didasari pandangan bahwa dunia penuh permusuhan konspirasi jahat bagai persekutuan para iblis dan setan.

Islam yang satu dengan Nabi dan Kitab suci yang tunggal bisa dipahami secara berbeda dan saling bertentangan. Sebagian memahami Islam sebagai nilai substantif dinamis mengatasi segala fakta faktual melintasi sejarah dan tempat, kompatibel dengan pengalaman seluruh peradaban terbaik bangsa-bangsa di dunia. Sebagian lain memandang Islam sebagai ajaran yang sudah tersusun di dalam bentuk tunggal baku dan standar sebagai acuan dan pola perubahan sosial perkembangan sejarah.

Karena itu *ittiba'* (mengikuti) Rasul berarti mengikuti tradisi secara harfiah seperti dipraktekkan generasi awal Islam (kaum salaf) 14 abad yang lalu. Kehidupan terbaik adalah kehidupan berdasar tradisi masa lalu, meletakkan masa-masa berikut mengalami penurunan derajat hingga saat Tuhan menutup semua jalan kehidupan (*qiyamat*) setelah sebelumnya dikuasai tradisi *dajjal*. Jalan simpang dua wajah Islam terus hidup sejak era Nabi Muhammad SAW hingga lebih 14 abad menempuh perjalanan sejarahnya.

Dalam suasana kebatinan seperti itulah ajaran Islam didakwahkan, diajarkan, dan disebarluaskan serta ditanamkan dari generasi ke generasi berikutnya di dalam hampir semua waktu kehidupan melalui pengajian, khutbah dan pendidikan agama di sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi. Sosialisasi ajaran Islam seperti itu bisa melalui sistem pendidikan modern (sekolah, madrasah hingga perguruan tinggi) atau pesantren, model komunikasi konvensional melalui sistem pengajian harian

atau khutbah mingguan dan ceramah keagamaan, mendorong pemeluk Islam yang semakin sadar atas identitas Islamnya. Peningkatan sosialisasi atau dakwah Islam menjadikan mereka yang memiliki kesadaran atas identitas Islam tersebut semakin meluas dan massif. Pada tahap berikut, muncul kesadaran berbagai lapisan penganut ajaran Islam itu untuk menjadi seorang Muslim yang baik menurut standar Islam.

Selama kemerdekaan sejak 1945 telah berkembang sosialisasi ajaran Islam yang massif merasuk ke semua wilayah dan tingkat kehidupan yang menumbuhkan kesadaran keislaman seseorang selain peningkatan pemahaman tentang ajaran Islam hampir di semua kawasan (desa dan kota) dan semua lapisan pemeluk Islam. Selalu muncul pertanyaan dari komunitas pemeluk Islam dengan tingkat kesadaran keislaman dan pengetahuan ajaran Islam itu tentang bagaimana seorang Muslim yang baik harus hidup dalam suasana modern dalam lalu-lintas peradaban dan ilmu pengetahuan yang berkembang berlipat?

Pertanyaan demikian terus mengusik generasi baru penganut Islam di dalam menghadapi setiap perubahan yang seringkali tidak cocok dengan doktrin ajaran Islam yang mereka terima melalui berbagai model pewarisan (dakwah, pengajian, dan pendidikan) tersebut. Dari sini, jalan simpang terbuka, dua wajah Islam tampil lebih aktual, saling berebut pengaruh, terutama ketika lalu-lintas kehidupan antar benua dan antar bangsa semakin terbuka dan mengglobal. Gejala demikian lebih-lebih lagi muncul meluas setelah perang dingin usai pada tahun 1980-an, saat virus demokrasi dan hak asasi manusia menyebar luas ke seluruh sudut-sudut dunia, termasuk ke rumah-rumah Muslim.

Demokrasi memberi peluang semua orang memasuki lapangan pendidikan pada semua jenjang, sehingga melahirkan generasi baru terdidik di semua sistem dan model masyarakat. Sistem sosial dan politik demokrasi itu juga menciptakan ruang bagi semua orang berekspresi dan memperjuangkan hak dan kepentingan masing-masing sesuai pandangan dan keyakinan hidupnya. Pada gilirannya, sistem demokrasi membuka peluang bagi tumbuhnya generasi baru yang justru menolak demokrasi

seperti kecenderungan generasi muda Muslim terdidik, terutama yang terlibat di dalam sistem pendidikan yang sebenarnya sekuler yang menurut mereka tidak cocok dengan ajaran Islam. Sayangnya, mereka menyatakan demikian sesudah menikmati beasiswa dan fasilitas belajar dari orang-orang atau lembaga atau negara yang mereka *benci*.

Dari sinilah persoalan mulai muncul yaitu ketika tidak tersedia pilihan lain selain doktrin ajaran Islam sebagaimana yang mereka terima dari masjid, sekolah, pesantren yang standar dan baku sekaligus rigid (kaku). Pada saat yang sama, penafsiran ajaran Islam dari sumbernya (Al-Quran dan Sunnah) dipandang sudah selesai tuntas bersama keyakinan akan kesempurnaan ajaran Islam, sehingga setiap upaya penafsiran kembali (reinterpretasi; seperti yang dilakukan Yusuf Qardlawi) harus ditolak dan dilarang. Muncul kemudian fenomena ke-“kaku”-an yang meluas seiring peningkatan partisipasi generasi muda Muslim terhadap pendidikan modern.

Saat mereka memahami bahwa tidak ada sistem yang benar dan sah kecuali sistem Islam yang ada di dalam ajaran syari’ah. Bagi mereka, segala model sistem sosial-politik dan ekonomi selain itu (Islam; syari’ah) bukanlah merupakan sistem yang sah yang bisa diikuti oleh seorang Muslim yang baik, melainkan harus ditolak, termasuk sistem demokrasi. Pandangan dan sikap demikian seringkali muncul lebih agresif dan aktif dengan menolak segala sistem lain yang tidak terdapat di dalam ajaran Islam yang telah dirumuskan ulama salaf sebagaimana terdapat dalam kitab dan buku-buku klasik. Sikap menolak demikian itu, jika perlu dilakukan melalui aksi kekerasan yang radikal dari mereka yang lebih dikenal sebagai radikalisme.

Sesungguhnya semua kelompok pandangan tentang bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan nyata, hendak memuliakan manusia menjadi lebih baik dan menyejahterakan. Semuanya meyakini bahwa jalan yang ditempuh adalah jalan yang menghantarkan mereka kepada Tuhan dan surga seperti dijanjikan Allah. Bagi kelompok moderat dan yang sering diberi label liberal, untuk mengelola kehidupan umat manusia di dunia saat ini, memerlukan

pemikiran ulang dan kajian kritis. Bagi kaum konservatif yang cenderung fundamentalis dan radikal, berpendapat bahwa tidak diperlukan lagi pemikiran kecuali bagaimana penerapan ajaran Islam, dengan alasan bahwa rekonstruksi ajaran Islam telah selesai dilakukan oleh generasi salaf, yaitu mereka yang hidup semasa Nabi Muhammad SAW atau generasi sesudahnya.

Berbeda dari kelompok konservatif, kelompok moderat atau liberal beragumen bahwa kajian kritis dan pemikiran ulang terhadap ajaran Islam perlu dilakukan atas dasar berbagai alasan. Salah satu alasan utamanya ialah akibat problem kehidupan umat manusia terus berubah dinamis searah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga akibat pertambahan jumlah penduduk yang *murokab* atau berderet ukur. Satu pasang suami-istri melahirkan tiga atau lima anak yang pada tahun ke 20-30 berpasangan dengan tiga atau lima orang. Pada tahun pertama atau kedua, ketiga, kelima pasang suami-istri ini memiliki anak tiga orang, hingga dari sepasang suami-istri bisa tumbuh menjadi tiga atau lima pasang suami-istri dengan 9 atau 15 orang anak, jika masing-masing mempunyai 3 anak, atau 15 atau 25 anak jika anak sepasang suami-istri itu masing-masing memiliki 5 orang anak. Pada gilirannya ke-9 atau ke-25 anak tersebut akan berpasangan dengan 9 atau 25 orang lain yang pada tahun pertama atau kedua bertambah 9 hingga 25 anak dan seterusnya.

Jika kelompok moderat atau liberal lebih terbuka dengan terus membangun dialog dan komunikasi publik, kelompok konservatif cenderung tertutup sebagai implikasi dari pandangan bahwa ajaran Islam bersifat baku dan standar. Kaum moderat dan liberal meletakkan masa depan terbuka, sejarah ialah proses dinamik, kaum konservatif memandang sejarah harus mengikuti pola yang telah ditetapkan oleh syariah.

Kaum moderat dan liberal memandang yang berbeda pandangan bahkan yang tidak memeluk Islam sebagai teman dialog mencari kebenaran guna membangun kehidupan duniawi yang lebih baik. Bagi kaum konservatif, mereka yang berbeda pandangan, apalagi tidak memeluk Islam, harus tunduk pada ajaran syariah sesuai pemahaman mereka. Dalam

keadaan tertentu, mereka yang berbeda pandangan, lebih-lebih yang tidak memeluk Islam, ditempatkan sebagai musuh, sekurangnya orang-orang yang patut dicurigai mempunyai agenda menghancurkan Islam. Pemahaman konservatif, terutama yang ekstrim tersebut, sebenarnya tidak banyak, namun yang tidak banyak itu seringkali mengatasnamakan pemeluk Islam mayoritas yang cenderung diam (Esposito dan Mogahed, 2008). Mereka seolah berposisi sebagai juru bicara pemeluk Islam yang paling sah, sementara mayoritas yang lain dianggap tidak berwewenang.

Pada umumnya mereka bersikap militan bersuara lantang dengan meletakkan dunia kehidupan meliputi dua belahan ekstrim yang saling berlawanan. Makna atau tindakan tergolong halal vs haram, negeri yang tergolong *darus salam* vs *darul harb*, mereka yang tergolong orang atau masyarakat mukmin vs kafir, malaikat vs setan. Militansi dibangun di atas dasar atau landasan perasaan terancam yang seringkali membuat penganut Islam konservatif lebih lantang menyuarakan perjuangannya menuntut perlakuan adil bagi penerapan ajaran syariah. Dalam situasi krisis dan kekacauan sosial-politik dan ekonomi, kelompok konservatif menjadi lebih militan dan kadang radikal disertai tindakan kekerasan fisik.

Militansi kaum konservatif didasari pandangan dan keyakinan bahwa mereka melakukan *jihād fi sabilillah*. Atas nama Allah, penganut keyakinan demikian tidak mengenal rasa takut, bahkan bersedia mati dengan kepercayaan sebagai mati syahid yang dijamin surga. Sikap dan pandangan demikian terlihat dari sikap mereka yang pernah terlibat tindak kekerasan di berbagai tempat di sepanjang sejarah negeri ini sejak kemerdekaan 1945. Berbagai gerakan kekerasan atas nama komando jihad atau gerakan radikal dan tindak kekerasan dilakukan pengikut Warsidi dalam peristiwa Geger Talangsari 1989. Sikap serupa diperlihatkan Imam Samudra dalam memoar yang juga dituturkan mantan pengikut (salah seorang pemimpin) gerakan Jama'ah Islamiyah. Sikap kurang bersahabat dengan orang lain yang berbeda kepelemukan agama atau yang memeluk agama yang sama tetapi berbeda pemahaman juga muncul dari kelompok ini.

Dalam situasi tertentu, terutama dalam keadaan tidak memiliki kekuatan atau lemah, kelompok konservatif bisa menerima dan bersedia hidup bersama kelompok lain yang berbeda. Mereka bisa/bersedia mengakui pemerintahan negara sekuler atau negara yang tidak didasari Islam, dengan satu alasan yaitu menunggu situasi atau momentum dan saat yang tepat menempatkan Islam sebagai dasar negara atau membentuk Negara Islam. Sikap demikian itu memperoleh legalitas teologis dalam bungkus fikih *muwazanat* dan fikih *aulawiyat* gagasan Yusuf Qardhawiy seperti diuraikan sebelumnya.

Sistem demokrasi atau Pancasila dengan UUD-1945 bisa ditempatkan sebagai proses dan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang lebih besar di tahap akhir nanti yaitu tegaknya ajaran Islam yang terangkum dalam syariah dalam sebuah sistem Khilafah atau dalam suatu bentuk Negara Islam. Sejak beberapa dekade lalu berkembang paradigma baru yang disebut *Madzhab Qardhawiy* berbasis fikih prioritas atau fikih realitas. Bentuk riilnya seperti kesediaan sikap hidup dalam sistem yang tidak berlabel Islam bahkan yang sekuler. Qardhawiy menulis:

"Apabila kita mampu meyakinkan para pemimpin barat dan orang-orang yang berpengaruh dalam menentukan politik barat, bahwa kita berhak untuk hidup secara Islami, yang diarahkan oleh aqidah Islam, didominasi oleh syariatnya, dibimbing oleh nilai-nilai dan akhlaknya, tidak menyimpan permusuhan terhadap mereka, dan tanpa berburuk sangka kepada mereka. ...berarti kita telah melampaui sejumlah jarak untuk sampai pada tujuan kita, yaitu menegakkan masyarakat Islam yang dicita-citakan di negeri kita." (Qardhawiy, 1993:222-223)

Paradigma atau Madzhab Qardhawiy tersebut mirip model teologi *taqiyah*¹ yang lebih populer di kalangan penganut Syi'ah. Doktrin teologi *taqiyah* ini mengajarkan kebolehan seorang Muslim untuk tunduk, patuh, dan mengikuti sistem sosial-

1 Dalam *Ensiklopedi Islam* Jilid 5 terbitan Ichtiar Baru Van Hoeve tahun 1994, dijelaskan bahwa *taqiyah* adalah sikap hati-hati demi menjaga keselamatan jiwa karena khawatir akan bahaya yang dapat menimpa diri seseorang. Dalam sikap kehati-hatian ini terkandung sikap menyembunyian identitas dan ketidakterusterangan (hlm 12-13).

politik dan ekonomi sekuler dan non-Islam yang sebenarnya ditentang jika memang tidak terdapat atau tidak memiliki suatu kekuatan untuk memperjuangkan berlakunya syariah Islam. Di saat yang sama, terus mencari peluang dan berjuang bagi berlaku dan tegaknya syariah. Menerima Pancasila sebagai dasar negara tetapi menolak sebagai ideologi negara; menerima sistem demokrasi, tapi memperjuangkan sistem khilafah; menolak presiden perempuan tetapi yang dikemukakan berkaitan dengan kemampuan bukan karena perempuan.

Karena itu pada kesempatan berbeda, seringkali kelompok konservatif tersebut tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan bersenjata atau pemberontakan seperti dilakukan DI/TII dengan NII-nya di tahun 1949. Suatu sikap dan tindakan yang terus timbul dan tenggelam sepanjang sejarah masa kemerdekaan, Orde Baru, bahkan sesudah masa itu. Tak jarang mereka bisa melakukan tindakan perampasan harta-benda milik orang atau lembaga negara yang dicap kafir dengan alasan harta-benda milik orang kafir itu halal dijarah. Apalagi jika dinyatakan dalam keadaan perang, maka hukum perang yang berlaku dan diberlakukan adalah hukum perang menurut syariah (lihat Mul Khan dan Singh, 2010).

JALAN MILENIAL DEMOKRASI

Dalam penelitiannya tentang penyebaran dan aktor demokrasi di Indonesia, Andres Uhlin (1995) menyatakan bahwa sepanjang tidak ada dan tidak bisa dilakukan kritik atas doktrin syariah dan praktik ijtihad, maka partisipasi publik terhadap gerakan Islam sulit dikembangkan. Kesulitan serupa juga akan dialami dalam membangun hubungan sosial-politik yang lebih demokratis. Sebaliknya justru bisa mendorong fundamentalisme di saat situasi sosial-politik dipandang sebagai konspirasi jahat yang mengancam gerakan Islam.

Berdasar peta pemahaman Islam konservatif tersebut, Andres Uhlin dalam bukunya *Democracy and Diffusion* yang terbit tahun 1995, menilai bahwa tanpa sikap kritis dan kesediaan merumuskan ulang ajaran Islam yang terangkum dalam syariah,

pemeluk Islam akan selalu gamang menghadapi perubahan sosial. Dari sini muncul sikap romantisme penempatan pemikiran masa lalu dari kaum salaf dengan segala keterbatasan dan kelebihanannya sebagai jalan terbaik meniti dan mengelola kehidupan duniawi.

Bagi kaum Salafi, sejarah adalah merupakan roda-paksa perubahan untuk hanya berkiblat ke masa lalu. Mengapa demikian? Karena masa depan dianggap sebagai otoritas dajjal dan iblis atau setan. Dalam hubungan demikian, Roger Garaudi (1993) menyimpulkan bahwa fundamentalisme bisa muncul sebagai akibat penerapan syari'ah. Fundamentalis berakar pada pandangan dan kehendak untuk menerapkan ajaran Islam (syari'ah) tanpa melihat konteks masa lalu saat ajaran itu disusun dan masa aktual sekarang saat ajaran itu hendak diterapkan.

Abdullahi Ahmed An-Na'im (1994 dan 2007) menyatakan bahwa hanya apabila bisa memenuhi beberapa prasyarat, ajaran Islam bisa menjadi kompatibel dengan kehidupan modern. Namun penerapannya harus dilakukan dengan membuka peluang kembali bagi pengembangan ijtihad. Fazlur Rahman (1984 dan 1984) lebih menegaskan lagi bahwa setiap Muslim memiliki peluang untuk melakukan ijtihad sesuai kapasitas dan kedalaman ilmu yang dikuasainya.

Selanjutnya, An-Na'im membedakan syari'ah yang historis sebagai hasil pemikiran ulama yang ditulis dengan huruf "s" kecil dengan syariah yang menjadi bagian dari wahyu yang ditulis dengan huruf "S" kapital. Berbeda dari Syariah sebagai bagian dari wahyu, syariah historis tersebut terus berkembang dan berubah sesuai tuntutan zaman dan problem aktual yang dihadapi umat pemeluk Islam. Karena itu yang diperlukan ialah sikap terbuka dan ijtihad pemikiran baru berdasar nilai substantif dari Syariah sebagai bagian dari wahyu suci tersebut.

Analisa serupa kurang lebih bisa dilihat dari buku Jasser Auda (2015) dan Hamim Ilyas (2018) tentang etika kemanusiaan universal yang tenggelam di bawah arus syari'ahisme yang "beku". Sebenarnya, orang atau sekelompok orang yang dikenal konservatif atau salafi dan yang radikal dengan keyakinan teguh tersebut berjuang menegakkan ajaran Islam tidak ada maksud lain kecuali bagi kebaikan umum di ruang publik dan masyarakat

yang lebih luas. Sayangnya perjuangan demikian dilakukan tanpa bertanya dan berunding terlebih dahulu dengan mereka yang disebut umum atau publik itu sendiri kecuali terus menerus melancarkan propaganda tentang kebaikan dan jalan keluar dari permasalahan yang telah dan sedang dihadapi dunia. Demikian pula halnya dengan apa yang mereka sebut dengan kebaikan umum, seringkali merupakan suatu tafsir sepihak atas dasar keyakinan akan kebenaran mutlak ajaran Islam yang terangkum dalam syariah sebagai hasil pemikiran ulama salaf tersebut.

Tanpa kaji ulang terhadap bangunan ajaran Islam yang terangkum dalam syariah Islam partisipasi komunitas Muslim dalam praktik demokrasi lebih merupakan sasaran antara untuk mencapai apa yang dicita-citakan dalam pemikiran dan pengikut kaum salafi yaitu tegaknya sistem khilafah atau model Negara Islam seperti pernah diproklamasikan Kartosoewiryo tahun 1949. Dalam kaitan sikap dan pandangan demikian, seorang aktivis gerakan Islam yang pernah terlibat Gerakan Warsidi di Lampung menyatakan bahwa Pancasila adalah jembatan emas untuk sampai ke Negara Islam tersebut. Demikian pula sikap dan pandangan aktivis partai yang dikenal militan yang enggan menempatkan Pancasila sebagai ideologi Negara walaupun menerima Pancasila sebagai Dasar Negara dengan Undang-Undang Dasar 1945-nya (Mul Khan dan Singh, 2010).

Tanpa penafsiran ulang, sumber ajaran Islam Al-Qur'an dan Sunnah yang selama ini diklaim menjadi referensi ajaran Islam, generasi muslim akan terus menghadapi dilema antara memenuhi ajaran Islam atau kodrat manusia modern. Dari sini sering muncul pilihan sikap yang sering diberi label radikal atau fundamentalis. Ajaran Islam yang selama ini dipahami dan dikhutbahkan adalah hasil penafsiran ulama dan pemikir Islam yang lahir dan hidup pada zaman lebih 10 abad lalu, saat jumlah seluruh manusia di dunia ini mungkin belum mencapai 1 milyar.

Kini di tengah penduduk Indonesia yang lebih dari 230 juta jiwa, seseorang hampir tidak bisa hidup kecuali harus berkomunikasi dengan orang lain dengan agama atau paham keagamaan yang mungkin berbeda dan bertentangan. Karena itu deradikalisasi tidak akan efektif jika tanpa diikuti atau

disertai gerakan penafsiran ulang (reinterpretasi) ajaran Islam dari sumber utamanya (Al-Quran dan Sunnah). Deradikalisasi kadang sebaliknya justru menumbuhkan sikap antipati yang bisa memicu peningkatan aksi jihad dan mati syahid saat ia diletakkan sebagai bagian dari konspirasi jahat dari kekuatan anti Islam.

Dalam situasi demikian itu, praktik demokrasi bagai berada di bawah bayang-bayang gagasan dan ide tentang khilafah dan Negara Islam Indonesia yang tidak pernah pudar setelah di masa lalu diproklamasikan Kartosoewiryo tahun 1949 walaupun tidak pernah memperoleh dukungan berarti. Suatu sistem sosial-politik yang berbeda bahkan bertentangan dengan sistem demokrasi seperti bisa dilihat dalam Qonun Asasi NII atau Nidlom Asasi dari Jama'ah Islamiyah. Lebih-lebih lagi dengan sistem kekuasaan model khilafah yang pernah dipraktekkan dalam sejarah Islam sejak wafat Nabi Muhammad SAW hingga runtuhnya Khalifah Turki Utsmani. Sebagaimana fungsi hakiki demokrasi, aktivis gerakan Islam menjadikan sistem itu sebagai jembatan emas atau alat politik konstitusional bagi perjuangan cita-cita luhur yang diyakininya, yaitu tegak dan berlakunya syariah Islam dalam semua aspek kehidupan. Untuk itulah perlunya negara yang berdasar Islam atau suatu tata sosial dan politik yang berada di dalam sistem khilafah.

Sesuai keadaan di suatu daerah, mereka mulai memanfaatkan demokrasi bagi formalisasi berbagai ketentuan syariah melalui mekanisme pengambilan keputusan di DPRD guna menetapkan dan atau mengesahkan peraturan daerah (Perda) sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat setiap warga di daerah yang bersangkutan. Pada gilirannya berbagai ketentuan syariah tersebut secara *de facto* dan *de jure* akan berlaku di semua atau banyak daerah yang mempunyai nilai politik di tingkat nasional. Hanya jika ada ruang bagi kritik dan ijtihad baru (penafsiran ulang) atas apa yang telah disusun umat terdahulu, Islam bisa menawarkan banyak jalan dalam memecahkan problem peradaban modern. Kehidupan umat manusia terus berubah dan berkembang seiring pertambahan penduduk dan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Perjalanan naik haji, misalnya, tidak lagi memerlukan waktu tiga hingga 12 bulan, melainkan cukup naik pesawat selama sekitar 8 jam sehingga hanya memerlukan waktu sekitar 1 bulan. Dulu ada doktrin Raja Jawa tidak boleh naik haji karena harus meninggalkan rakyatnya untuk waktu lama sehingga bisa dianggap melalaikan amanah rakyat yang diembannya. Kini, bukanlah pamali atau tabu seorang raja naik haji. Di masa lalu, jenis kelamin anak dan kapan lahir adalah takdir yang baru diketahui saat sudah dilahirkan, kini beberapa bulan dalam kandungan sudah bisa diduga jenis kelamin dan kapan perkiraan akan lahir. Pengetahuan tentang takdir pun berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Demikian pula persoalan bagaimana mengatur tata kehidupan manusia di dunia dan berbagai ketentuan syari'ah, seharusnya berkembang dan bisa dikembangkan searah perubahan pola kehidupan pengampu syariah dan dunia kehidupan di mana ajaran itu akan diterapkan. Sistem khilafah atau negara Islam vs negara sekuler atau republik, demokrasi vs model *imamah*, keputusan di tangan rakyat vs perwakilan di tangan dewan atau majelis syuro, nampaknya perlu dikaji ulang berdasar nilai-nilai moral dan etik dari tradisi kenabian dan Al-Quran. Dalam situasi kritis itulah, fikih prioritas Qardhawiyah seolah memberi jalan dengan menyelengkuhi demokrasi melalui argumen karena sistem demokrasi adalah jalan mencapai tujuan syari'ah. Menerima sistem demokrasi sembari mengatur langkah menumbangkannya menjadi pilihan teologis, seperti doktrin *taqiah* dalam sistem kepercayaan kaum Syi'ah.

Pengalaman sejarah bangsa-bangsa yang tidak berlabel Islam atau sekuler dan yang sebaliknya secara ketat menerapkan syariah secara literal, merupakan pelajaran berharga yang bisa diambil hikmahnya. Demikian pula sejarah dinasti khalifah masa Abu Bakar hingga Turki Utsmani beserta nasib umat dan rakyat serta kemakmuran atau kemajuan serta kegagalan dan penderitaan mereka. Manusia di suatu zamanlah yang harus bertanggungjawab atas nasib umat dan generasi sesudahnya, demikian pula seterusnya. Persoalannya ialah seberapa besar suatu generasi (utamanya generasi Muslim) bersedia

menyelesaikan tanggung jawab sejarah tersebut? Suatu tanggung jawab yang hanya mungkin dipenuhi ketika generasi milenial itu bersedia melakukan langkah disruptif (Kasali, 2017). Suatu langkah yang dinilai publik sebagai tindakan tidak lazim yang keluar dari sistem yang sudah baku. Namun hanya jalan itu yang tersedia saat generasi baru milenial membayangkan masa depan yang lebih makmur, damai, sekaligus dalam naungan rumah besar Islam.

Kitab Al-Quran sendiri adalah jaminan bagi umat manusia memilih jalannya sendiri beriman atau ingkar. Bahwa menjadi Muslim haruslah diiringi kesediaan untuk bisa hidup bersama dengan pemeluk lain, bahkan mereka yang ingkar. Firman dalam kitab suci itu berlaku abadi. Saat kitab itu berbicara tentang kekafiran dan pemeluk selain Islam, maka itu berarti jaminan bahwa kekafiran atau kepelemukan selain Islam juga bersifat abadi. Dari sini bisa dipahami tujuan utama kegiatan amal-usaha yang dilakukan Muhammadiyah yang bukan bermaksud mengislamkan semua orang atau menjadikan pengguna jasa amal-usahanya sebagai pengikut. Semua dilakukan semata-mata bagi pemuliaan martabat semua manusia dengan menyerahkan masalah seseorang bisa menjadi mukmin atau ingkar sebagai kehendak Allah yang tak bisa diganggu-gugat. Maksud utamanya ialah nilai-nilai kemanusiaan universal yakni: laku jujur, bersih, tertib, tidak korup, berlaku adil, distribusi kekayaan yang relatif merata, jaminan kebebasan berkeyakinan, tidak menjadikan Tuhan sebagai jalan "memaksa" orang lain tunduk pada kebenaran mutlak yang diyakininya, etika islami seperti laporan penelitian dosen Universitas George Washington terhadap bangsa-bangsa di dunia. (nationalgeographic.co.id, 2014) Cara pandang, sikap, doktrin demikian bisa dibaca dari Azaz PKOe (Abdoellah, 1929) dan kesaksian dokter Soetomo (Suara Muhammadiyah, 1924) saat meresmikan lembaga kesehatan di Surabaya tahun 1924.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, M. "Moehammadijah Bg. P.K.O. Hindia Timoer." *Almanak Moehammadijah*, 1348/1929 pp. 120-121. HB. Moehammadijah bg Taman Poestaka, Yogyakarta.

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 2007. *Islam dan Negara Sekuler: Mengosiasikan Masa Depan Syariah*. Bandung: Mizan.
- . 1994. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS.
- Auda, Jaseer. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan.
- Esposito, J.L. dan Mogahed, Dahlia. 2008. *Saatnya Muslim Bicara! Opini Umat Muslim tentang Islam, Barat, Kekerasan, HAM, dan Isu-Isu Kontemporer lainnya*. Bandung: Mizan.
- Ensiklopedi Islam, Jilid 5. 1994. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Garaudy, Roger. 1993. *Islam Fundamentalis dan Fundamentalis Lainnya*. Bandung: Pustaka.
- Hassan, Riaz. 1985. *Islam dari Konservatisme sampai Fundamentalisme*. Jakarta: Rajawali.
- <https://kumparan.com/@kumparannews/kasman-singodi-medjo-pahlawan-yang-turut-merumuskan-konstitusi-negara-1541662999925717057> (Diunduh 9 Agustus 2019 Pkl 20.00).
- <https://kumparan.com/@kumparannews/kasman-singodi-medjo-pahlawan-yang-turut-merumuskan-konstitusi-negara-1541662999925717057> (Diunduh 9 Agustus 2019 Pkl 20.00).
- <https://nasional.tempo.co/read/1144305/pahlawan-nasional-kasman-singodimedjo-ikut-rumuskan-pembukaan-undang-undang-1541662999925717057> (Diunduh 9 Agustus 2019 Pkl 19.25).
- <http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/06/ingin-tahu-negara-mana-yang-paling-islami-di-dunia> (Diunduh 14 Agustus 2017 Jam 12.00).
- Ilyas, Hamim. 2018. *Fikih Akbar: Prinsip-prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil'Alamin*. Jakarta: Alvabet.
- Jackson, Karl D. 1990. *Kewibawaan Tradisional, Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

- Kasali, Rhenald. 2017. *Disruption; Tak Ada Yang Tak Bisa Diubah Sebelum Dihadapi Motivasi Saja Tidak Cukup*. Jakarta: Gramedia.
- Mul Khan, Abdul Munir. 1992. *Runtuhnya Mitos Politik Santri*. Yogyakarta: SiPress.
- Mul Khan, Abdul Munir dan Bilveer Singh. 2010. *Demokrasi di Bawah Bayangan Mimpi N-11: Dilema Politik Islam Dalam Peradaban Modern*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Qardhawiy, Yusuf. 1993. *Prioritas Gerakan Islam, Antisipasi Masa Depan Gerakan Islam*. Jakarta: Al-Ishlahiy Press.
- Rahman, Fazlur. 1984. *Islam*. Bandung: Pustaka.
- _____. 1984. *Membuka Pintu Ijtihad*. Bandung: Pustaka.
- Sjaltout, S.M. 1972. *Islam Sebagai Aqidah dan Sjari'ah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sjaltout, S.M. & Syaikh M. Ali As-Sayis. 1978. *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Soetomo. 1924. "Etika Welas Asih", dalam *Suara Muhammadiyah*. Tahun ke-5 Tanggal 5 Oktober 1924, pp. 170-171.
- Uhlen, Andres. 1995. *Democracy and Diffusion: Transnational Lesson-Drawing among Indonesian Pro-Democracy Actors*. Sweden: Lund Political Studies 67. 

NASIONALISME KASMAN SINGODIMEDJO DALAM PERSPEKTIF MODAL SOSIAL DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Siti Irene Astuti Dwiningrum

PENDAHULUAN

Nasionalisme tidak pernah usang dalam proses kehidupan bangsa Indonesia. Nasionalisme tetap menjadi identitas setiap anak bangsa, anggota negara bangsa. Nasionalisme yang luntur akan melemahkan identitas dan kebanggaan nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Ian Lustic (2002), nasionalisme merupakan suatu kekuatan pembangunan yang tak adaandingannya di dunia masa kini. Nasionalisme perlu dikuatkan agar eksistensi bangsa Indonesia lebih siap dalam menghadapi tantangan globalisasi. Nasionalisme akan memperkuat resiliensi negara dalam menghadapi berbagai reduksi nilai yang akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Spirit nasionalisme terus dipertahankan sebagai apresiasi kepada para pahlawan nasional yang telah berjuang dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Para tokoh pahlawan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam membangun bangsa Indonesia. Semua gerakan sosialnya adalah eskpresi dari cinta tanah air yang pengabdianya tidak pernah usang dalam perjalanan bangsa. Kasman Singodimedjo merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional yang memiliki jiwa nasionalisme yang sangat kuat. Namun demikian, analisis terhadap tokoh Kasman Singodimedjo tidak mudah dilakukan, karena itu membutuhkan telaah yang bersifat historis dan sosiologis.

Sebagai tokoh nasional, Kasman Singodimedjo adalah individu yang mempunyai potensi sebagai tokoh pelaku sejarah. Ia lahir pada tanggal 25 Februari 1908 di Purworejo, Jawa Tengah. Pendidikan Kasman Singodimedjo yang pertama di sekolah desa di Purworejo, kemudian ia melanjutkan ke *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) di Kwitang Jakarta. Ia pindah ke HIS Kutoarjo, yang kemudian dilanjutkan ke *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) di Magelang. Selain menuntut ilmu, ia juga belajar pengetahuan agama kepada KH. Ahmad Dahlan dan KH. Abdul Aziz. Setelah menyelesaikan pendidikan di MULO, ia melanjutkan studi ke *School Tot Opleiding Van Indische Artsen* (STOVIA) di Jakarta (Wasirah, 2009).

Kasman Singodimedjo merupakan salah satu tokoh ulama modernis yang aktif dalam pergerakan keagamaan dan memiliki peranan penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh seperti Kasman Singodimedjo dalam perjuangan kebangsaan Indonesia dapat disejajarkan dengan tokoh nasionalisme yang lain seperti, Soekarno, M. Hatta, dan Ki Hajar Dewantara (Wasirah, 2009). Sebagai tokoh pahlawan nasional, adalah penting untuk mencermati setiap langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam perjalanan bangsa Indonesia, dalam masa perang hingga masa kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai fondasi bagi perkembangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, telaah tentang Nasionalisme Kasman Singodimedjo ini akan mengacu pada berbagai peran-peran sosial yang dilakukannya, yang mengantarkannya sebagai pahlawan nasional yang diakui keberadaan dan eksistensinya.

Peran-peran sosial yang diakui dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara membuktikan Kasman Singodimedjo sebagai sosok pemimpin yang berkarakter. Peran sosial yang diberikan kepada seseorang tidak mudah dipertahankan jika seseorang tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang kuat. Sejarah telah mencatat bahwa peran Kasman Singodimedjo terbukti sebagai tokoh nasional yang mampu menjalankan peran sosial, peran politik, dan peran agama yang memiliki religiusitas yang kuat dalam membentuk pribadi yang berkarakter. Sebagai

catatan tentang peran-peran yang sudah dipercayakan kepada Kasman Singodimedjo antara lain adalah:

1. Sebagai tokoh yang aktif dalam organisasi Jong Java saat belajar di STOVIA. Dalam organisasi ini ia berjuang untuk menjadikan Islam sebagai landasan perjuangan dengan alasan sebagian besar anggotanya beragama Islam. Namun, usul tersebut ditolak oleh pimpinan Jong Java kemudian dengan Samsuridjal, Ki Musa al-Mahfudz dan Suhodo, Kasman Singodimedjo mendirikan Jong Islamiyeten Bond (JIB) dengan ketua pertamanya Samsuridjal (1925-1926).
2. Sebagai Ketua Umum JIB dan Ketua Pengurus Besar National Indonesische Padvinderij (Natipij) dari tahun 1929-1935. Pada tahun 1937 Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) berdiri sebagai wadah baru bagi perjuangan umat Islam.
3. Sebagai Komandan Tentara Pembela Tanah Air (PETA), pada masa pendudukan Jepang dan pasukan pengaman saat upacara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.
4. Sebagai salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang berperan dalam menggantikan tujuh kata dalam naskah pembukaan UUD 1945, yaitu "Dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya", menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemampuan sebagai mediator antara golongan Islam dengan perwakilan kawasan Indonesia Timur yang merasa berkeberatan memasukan tujuh kata ini karena mayoritas mereka non Muslim. Kasman Singodimedjo menjadi pembujuk golongan Islam agar tujuh kata ini dihilangkan untuk menghormati perwakilan Indonesia Timur tersebut.
5. Sebagai tokoh dan aktivis Muhammadiyah yang turut membentuk Partai Islam Indonesia di Surakarta dan pada saat masih muda terpilih menjadi Ketua Muda Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).
6. Sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945 dalam parlemen pertama Indonesia yang merupakan cikal bakal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

7. Sebagai Jaksa Agung pada 6 November 1945 yang mengeluarkan maklumat agar penegakan hukum dilakukan secara cepat.
8. Sebagai Menteri Kabinet Muda Kehakiman dalam Kabinet Amir Sjafruddin II dari November 1947 hingga Januari 1948.
9. Sebagai aktivis di dunia politik Indonesia bersama Partai Masyumi dan menjadi anggota Dewan Konstituante dari partai ini pada 1955.
10. Sebagai Pahlawan Nasional atas usulan Muhammadiyah pada tahun 2012 yang menunjuk AM Fatwa menjadi Ketua Panitia Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional untuk Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, dan KH. Abdul Kahar Muzakkir, yang disahkan pada tanggal 10 Nopember 2018 oleh Pemerintah Indonesia.

Berdasarkan beberapa peran strategis tersebut, ada dua hal penting yang akan dipaparkan pada tulisan ini, yakni tentang kekuatan membentuk jaringan sosial dengan berbagai elemen masyarakat dalam menjalankan peran politiknya dan kekuatan membuat keputusan strategis di masyarakat multikultur dalam menjalankan peran sosialnya. Dua aspek tersebut merupakan salah satu yang mendasari pemikiran Kasman Singodimedjo dalam membangun proses pendidikan bangsa Indonesia.

PERAN SOSIAL KASMAN SINGODIMEDJO DALAM PERSPEKTIF MODAL SOSIAL

Modal sosial yang dimiliki oleh Kasman Singodimedjo sangat kuat, karena peran-peran yang dipercayakan cukup strategis secara politik, sosial, dan budaya. Dalam melawan kolonial Belanda, ia sangat memperhatikan kemaslahatan rakyat dan menghindari sekecil mungkin korbannya. Ia juga merupakan sosok yang berani dan berfikir tajam serta memiliki strategi dalam menghadapi Belanda, sehingga Belanda seringkali terperdaya olehnya. Selain itu, ia merupakan pemimpin yang kharismatik, dia sangat dicintai dan dihormati rakyatnya berkat keberaniannya menentang segala bentuk penindasan dan

ketidakadilan (Wasirah, 2009). Kepercayaan yang dimiliki oleh Kasman Singodimedjo dalam menghadapi Belanda maupun eksistensinya dalam melindungi rakyat pada masa penjajahan Belanda membuktikan kekuatan modal sosial dalam gerakan politiknya. Demikian halnya, sebagai Komandan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) pada masa pendudukan Jepang merupakan peran yang sangat strategis yang membutuhkan modal sosial.

Modal sosial yang dimiliki oleh Kasman Singodimedjo tidak terbatas dalam membangun relasi sosial antarwarga Indonesia. Akan tetapi, peran yang paling sulit adalah membangun kepercayaan dengan pihak militer Jepang. Kasman diangkat oleh Jepang untuk dijadikan *Daidancho* yang diharapkan pada waktunya menjadi kawan seperjuangan Jepang (Singodimedjo, 1978). Hikmah yang diperoleh oleh *Daidancho* bagi Kasman Singodimedjo untuk *Daidan* (kesatuan), sejak tanggal 13 Oktober 1943 sampai dengan revolusi tanggal 17 Agustus 1945) yakni dengan memberikan latihan-latihan militer bagi para Hakim, Jaksa, Guru-guru SMA/STM, dan lain sebagainya. Latihan-latihan ini dilakukan *Daidan* (kesatuan) atau di tempat lain di bawah pengawasan *Daidancho*. Bahkan Bung Karno dan Bung Hatta tidak luput dari latihan di bawah komando Kasman (Singodimedjo, 1978). Kasman mampu mempertahankan perannya sebagai *Daidancho* dalam berbagai konflik dan polemik antara kepentingan Jepang dan Indonesia yang terus berjuang dalam mempersiapkan kemerdekaannya. Ketegaran dan kesabaran dalam menjalankan peran sosialnya membuktikan sumber daya pribadi yang kuat sebagai modal utama dalam membentuk modal sosial.

Kemampuan Kasman Singodimedjo meyakinkan rezim militer Jepang untuk memberikan kebebasan kepada para ulama dan kiai mengadakan kegiatan-kegiatan rutin agama Islam atau melakukan pertemuan agama yang dibuat untuk menyebarluaskan kebijaksanaan pemerintah oleh guru agama Islam, sebagai salah satu bukti sejarah dalam menanamkan kepercayaan dalam membangun relasi sosial. Pada konteks inilah, dalam perspektif modal sosial sebagaimana dijelaskan oleh Dwiningrum (2017), Kasman memiliki sumber daya pribadi

yakni sebagai Komandan PETA yang mampu menggunakan energi sosialnya dalam menjalankan otoritas dan tanggung jawab dengan optimal. Gerakan sosial yang dibangun tersebut bukan hal yang mudah dilakukan jika aktor sosial tidak memiliki modal sosial yang kuat.

Modal sosial yang kuat dibangun oleh nilai-nilai karakter yang kuat. Demikian halnya, dengan pelatihan PETA yang dilakukan oleh Jepang telah membentuk pribadi yang berkarakter kuat. Sebagaimana dijelaskan oleh Singodimedjo (1978), latihan-latihan yang pernah diberikan Jepang kepada prajurit PETA berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian para prajurit PETA, antara lain disiplin (*gunki*), hidup sederhana (*sisso*), ketabahan dan keteguhan hati, kegiatan (*genki*), kerajinan, ketangkasan, kecerdasan, kebaktian dan pengabdian, ketulusan, keikhlasan, sabar dan tawakkal, tertib dan gembira, awas dan hati-hati, cinta nusa dan bangsa. Kekuatan PETA membentuk karakter prajurit merupakan modal personal yang sangat penting dalam membentuk modal sosial dalam PETA yang sangat dibutuhkan dalam perjuangan bangsa Indonesia. Kasman secara tidak langsung telah membentuk norma sosial yang kuat di kalangan prajurit PETA yang punya tugas utama untuk dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Norma sosial sebagai satu unsur penting dalam membentuk modal sosial yang dimiliki oleh Kasman Singodimedjo sangat kuat. Fondasi agama Islam yang melekat dalam kepribadiannya telah mempengaruhi seluruh aktivitas sosialnya merupakan dasar yang sangat kuat dalam menjalankan seluruh peran sosialnya. Sebagaimana dalam kepengurusannya di JIB dan *Natipij* sebagai wadah perjuangannya, ia berusaha untuk memperjuangkan cita-cita yang luhur yang dilatarbelakangi oleh kondisi moral para pemuda Islam khususnya yang sudah banyak terpengaruh oleh budaya yang tidak sesuai dengan agama dan budaya Timur. Tujuan utama organisasi JIB yakni tercapainya sebuah cita-cita organisasi khususnya dalam mendidik para pemuda Islam untuk memperdalam ilmu agama Islam secara menyeluruh. Di samping itu, Kasman Singodimedjo berusaha untuk membentuk warga yang memiliki toleransi dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Modal sosial berkembang secara dinamis. Modal sosial sebagai sumber daya dapat diakses melalui koneksi. Demikian halnya, pengembangan modal sosial dari aspek sumber daya adalah kekayaan, kekuasaan, reputasi dan jaringan sosial. Sumber daya yang dimiliki oleh Kasman Singodimedjo cukup kuat. Dari aspek kekayaan yang dimiliki relatif cukup untuk memberikan dasar bagi seluruh perjuangan hidupnya. Aspek kekuasaan Kasman Singodimedjo sebagai sumber daya pribadi dengan terpilih sebagai Komandan PETA yang secara tidak langsung memberikan “*power*” dalam setiap langkahnya. Dari aspek reputasinya, terbukti bahwa ia termasuk dipercaya oleh kiai untuk melatih pasukan-pasukan baru. Demikian halnya, dengan adanya Hizbullah secara eksplisit menjadi tentara Masyumi (perwira kiai) untuk mengikuti latihan PETA, di antaranya, KH. Wahib Wahab (NU), KH. Junus Anis (Muhammadiyah), Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah), dan Arudji Kartawinata (PSII), membuktikan kemampuannya dalam membangun jaringan sosial. Kegiatan Kasman Singodimedjo dalam latihan di Cibarusa, Jawa Barat bersama dengan 500 pejuang muslim dimulai dengan disaksikan oleh Gunseikan dan Wakil Ketua Masyumi KH. Abdul Wahid Hasyim membuktikan kemampuan kerjasama dan partisipasinya dalam berbagai gerakan sosial. Gerakan Hizbullah merupakan langkah strategis bahwa karena memiliki modal sosial yang terbangun dengan kuat pada masa pemerintah Jepang, para ulama menjadi dasar perjuangan melawan penjajah.

Modal sosial sebagai Komandan PETA digunakan Kasman Singodimedjo untuk menjalankan peran sosialnya. Sebagaimana dijelaskan oleh James Coleman bahwa modal sosial sebagai ‘aset modal individu’ yang terbangun dari ‘sumber-sumber daya struktural sosial,’ yang terkait dengan dua elemen pokok yakni ‘batas-batas aktual kewajiban yang harus dijalankan’ dan ‘level kejujuran lingkungan sosial.’ Dalam konteks inilah, kepercayaan sebagai Komandan PETA menunjukkan kemampuannya dalam membangun struktur sosial yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan dan memperjuangkan negara dalam masa penjajahan Jepang (Coleman, 1990: 302 dikutip Dwiningrum,

2014). Modal sosial yang dimiliki oleh Kasman Singodimedjo mengantarkannya sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kepercayaan adalah modal kuat bagi setiap orang untuk dipilih menduduki jabatan strategis. Modal sosial merupakan bagian dari kehidupan sosial berupa jaringan, norma, dan kepercayaan (Field, 2010).

Lebih lanjut, dengan modal sosial Kasman Singodimedjo membuat keputusan yang strategis dengan memberikan usulan untuk mengubah isi Piagam Jakarta dengan menghilangkan tujuh kata dalam naskah pembukaan UUD 1945. Tujuh kata yang dihilangkan yakni “Dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya”, sehingga sila pertama menjadi berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kemampuan sebagai mediator antara golongan Islam dengan perwakilan kawasan Indonesia Timur yang merasa berkeberatan akan tujuh kata ini karena mayoritas mereka non Muslim membuktikan bahwa ia memiliki *soft skills* yang kuat. Kekuatan sebagai “orang yang dipercaya” dalam misi negara bukan pekerjaan mudah untuk mengajak dua pihak yang memiliki dasar ideologi agama yang berbeda untuk membuat keputusan yang strategis demi mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia. Ia telah membuat fondasi filosofis bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, mandiri, dan berkarakter. Dalam konteks masyarakat sekarang, karakter Kasman Singodimedjo dapat menjadi contoh dalam mengatasi berbagai konflik kepentingan yang terus terjadi dalam kehidupan masyarakat multikultur.

Dalam perspektif modal sosial, kemampuan Kasman Singodimedjo sebagai tokoh dan aktivis Muhammadiyah yang membentuk Partai Islam Indonesia di Surakarta merupakan fakta sosial yang menguatkan eksistensinya sebagai tokoh yang mampu membangun jaringan dan kerjasama yang kuat. Secara historis, sejarah Indonesia tak lepas dari perseteruan politik. Dalam situasi tersebut, ia selalu hadir sebagai sang pemersatu. Kiprahnya di dunia pergerakan dimulai sejak dirinya aktif di Muhammadiyah. Pada 1925, dia pun menjadi salah satu tokoh sentral di *Jong Islamieten Bond* (JIB). Sebuah perkumpulan pemuda Islam yang menjadi cikal bakal organisasi pergerakan lainnya.

Pada saat masih muda, ia terpilih menjadi Ketua Muda Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Kasman Singodimedjo sebetulnya merupakan tokoh politik yang ingin menjadikan Islam sebagai landasan perjuangannya khususnya dalam organisasi JIB. Ia adalah orang pertama yang bersedia menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang menghebohkan demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia ini. Sikapnya itu kemudian diikuti yang lain, sehingga diputuskan bahwa Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 berisi teks yang masih berlaku hingga sekarang (Sriwahyuntari, 2005). Keberanian dalam bersikap tersebut karena adanya dukungan modal sosial yang kuat, baik dari kelompok Islam maupun kelompok lainnya. Hasil keputusan yang dinilai mampu merajut harmoni sosial menjadi catatan sejarah bagi bangsa Indonesia.

Gerakan-gerakan sosial Kasman Singodimedjo jika dikaitkan dengan pendapat Putnam yang membedakan jenis modal sosial dari aspek *social bridging* dan *social bonding*, maka ia termasuk orang yang mampu menyatukan orang dari kelas sosial yang berbeda, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengikat orang dalam kelompok yang sama untuk memperkuat homogenitas (Dwiningrum, 2017). Modal sosial merupakan aspek dari struktur sosial yang memfasilitasi tindakan individu dan menjembatani perilaku individu dan kolektif untuk menghasilkan produktivitas. Di samping itu, modal sosial juga memfasilitasi pencapaian tujuan tertentu dengan saling dipertukarkan (*fungible*) dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Hal ini berarti bahwa bentuk modal sosial tertentu sangat berguna dalam memfasilitasi tindakan tertentu, tetapi dapat juga membahayakan orang lain/pihak lawan. Hal ini bisa terjadi karena modal sosial inheren di dalam struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang dan di antara individu-individu yang mempunyai karakteristik tertentu (Dwiningrum, 2014).

Putnam mengembangkan konsep modal sosial dari Coleman dengan mengembangkan ide pokoknya tentang jaringan sosial yang memiliki nilai penting bagi individu. Eksistensi Kasman Singodimedjo didukung oleh kemampuannya dalam membangun jaringan sosial. Bagi Putnam modal sosial

merupakan bagian dari kehidupan sosial jaringan, norma, dan kepercayaan (Field, 2010)

“by ‘Social capital’ I mean features of social life – networks, norms, and trust – that enable participants to act together more effectively to pursue shared objectives” (Putnam, 1996: 56 dalam Baron, Field, & Schuller, 2000 dalam Suharjo, 2014: 74).

Ketiga elemen tersebut – jaringan (*networks*), norma (*norms*), dan kepercayaan (*trust*) – adalah tritunggal yang mendominasi diskusi konseptual Putnam yang menekankan perbedaan modal sosial dengan modal-modal lainnya. Dalam hal ini, modal fisik tetap ada dalam objek fisik, sedangkan modal manusia adalah milik individu dan melekat pada hubungan antarindividu yang membentuk jaringan sosial, norma timbal-balik, dan kepercayaan.

Modal sosial diperlukan untuk bertindak bersama-sama sehingga lebih efektif dalam mencapai tujuan kolektif. Kasman Singodimedjo yang banyak bergerak di bidang politik membutuhkan kebaikan umum dan kedekatan hubungan dengan partisipasi politik yang tidak dapat dipisahkan dengan berbagai lembaga politik. Oleh karena itu, di dalam setiap aktivitas sosial membutuhkan interaksi sosial yang memungkinkan orang-orang membangun komunitas, mempunyai komitmen kepada mereka satu dengan lainnya, dan merajut struktur sosial. Rasa memiliki dan pengalaman nyata dalam jaringan sosial dapat memberikan keuntungan besar bagi masyarakat. Kasman secara langsung atau tidak langsung memiliki peran politik yang kuat dalam menjaga eksistensi negara. Sepakat dengan yang dijelaskan oleh Putnam bahwa modal sosial dinilai penting bagi stabilitas, efektivitas pemerintahan, dan pembangunan ekonomi daripada modal fisik dan manusia (Hauberer, 2011). Di samping itu, peran Kasman Singodimedjo yang dipilih sebagai Jaksa Agung pada tanggal 6 November 1945 adalah mengeluarkan maklumat agar penegakan hukum dilakukan secara cepat. Hak ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan yang kuat pada perannya di bidang hukum. Kepercayaan adalah pelumas kehidupan. Semakin tinggi tingkat saling percaya dalam suatu komunitas, semakin tinggi kemungkinan terjalannya kerja sama.

Kepercayaan sosial dalam lingkungan modern dapat tumbuh dari dua sumber yang saling mengikat erat yaitu norma timbal-balik dan jaringan yang mengikat secara umum.

Peran-peran sosial yang dilakukan oleh Kasman Singodimedjo membuktikan kekuatan karakter sebagai pemimpin yang memiliki modal sosial yang sangat kuat. Modal sosial yang dimiliki oleh Kasman membuktikan bahwa struktur masyarakat menjadi kuat jika dipimpin oleh individu yang mampu menggerakkan modal individu untuk menggerakkan modal sosial yang ada dalam relasi sosial. Demikian halnya, sebagai seorang politikus, Kasman Singodimedjo adalah tokoh masyarakat yang mampu untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam membentuk dan mempertahankan bangsa Indonesia. Sebagai pemikir dan tokoh Islam yang berjuang dalam agama dan mensukseskan pemerintahan bangsa Indonesia, ia aktif dalam dunia sosial, keagamaan dan politik, dan sebagai pembaharu yang memiliki peranan yang sangat berarti dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kasman Singodimedjo telah banyak sekali bekerja dan berjuang untuk agama, bangsa, negara, dan masyarakat serta untuk Muhammadiyah membuktikan modal sosial yang dimilikinya cukup kuat.

Modal sosial memperkuat karakter bangsa dan nasionalisme bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan di era global (Dwiningrum, 2013). Peran-peran sosial yang dilakukan oleh Kasman Singodimedjo membutuhkan energi sosial yang bergerak dengan sinergitas yang mampu menjalankan fungsi-fungsi sosial dengan optimal. Dalam konteks inilah, ia berhasil menggerakkan keterkaitan antardimensi modal sosial sebagaimana yang dijelaskan Tom Sculler (Dwiningrum, 2014) yakni menggerakkan modal manusia, modal sosial, dan modal identitas dengan seimbang, khusus dalam memperjuangkan nasionalisme bangsa Indonesia. Pada dimensi modal manusia yang mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu yang dimiliki, ia dinilai memiliki pengetahuan yang luas dan komprehensif sebagai seorang negarawan.

Dengan pendidikan formal yang berkualitas dan pengalaman organisasi menjadi modal pokok dalam mengembangkan

wawasan kebangsaan yang kuat. Demikian halnya, pada dimensi modal sosial, Kasman Singodimedjo mempunyai unsur-unsur dalam struktur sosial yang mendukung tindakan aktor dalam menjalankan peran sosialnya. Kasman Singodimedjo adalah sosok intelektual yang karismatik yang membangun kepercayaan yang kuat dalam semua relasi sosialnya. Kekuatan untuk membangun kerjasama dan mengembangkan jaringan sosial merupakan unsur penting yang menggerakkan semua aktivitas sosial Kasman Singodimedjo. Pada dimensi modal identitas yang dimiliki oleh Kasman adalah adanya hubungan psikologis yang kuat dalam menjalankan peran sosialnya. Aktivitas Kasman Singodimedjo senantiasa memberikan “warna” untuk membangun nasionalisme yang kuat. Sebagaimana dijelaskan oleh James Cate yang menyatakan bahwa modal identitas terkait dengan pengalaman dalam bermasyarakat yang dialami oleh individu akan memberikan nilai penting dalam kehidupannya (Cote, 1977; Cote dan Levene, 2002 dikutip Dwiningrum, 2014). Dalam konteks inilah Kasman Singodimedjo memiliki modal yakni kekuatan ego seperti *internal locus of control*, harga diri, rasa tujuan dalam hidup, kemampuan untuk mengaktualisasi diri, dan kemampuan berpikir kritis.

Kekuatan ego memberi orang kemampuan untuk memahami (kemampuan ‘ego sintesis’) dan bernegosiasi (kemampuan ‘ego eksekutif’) hambatan-hambatan sosial, pekerjaan, dan pribadi berbagai peluang bahwa mereka mungkin untuk menghadapi seluruh kehidupan modern. Lebih khusus lagi, modal identitas cenderung menjadi komponen subjektif baik dari segi pengalaman maupun perilaku. Modal identitas terkait dengan proses pencitraan diri, dinamika karakter pribadi, kekuatan ego, harga diri, dan *internal locus of control*. Dengan demikian, jika ditinjau dari analisis hubungan antar dimensi tiga modal tersebut, maka Kasman Singodimedjo adalah sosok pemimpin intelektual-kharismatik yang memiliki dan mampu menggerakkan modal manusia, modal sosial dan modal identitas untuk tujuan membangun nasionalisme bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan, baik dalam konteks untuk menjadi bangsa yang merdeka maupun membangun kemandirian bangsa.

NASIONALISME KASMAN SINGODIMEDJO DALAM PERSPEKTIF MULTIKULTURAL

Kasman Singodimedjo adalah tokoh masyarakat yang memiliki perspektif multikultural yang sangat kuat. Peran penting Kasman selama menjabat sebagai ketua JIB dan *Natipij* memperkuat sikap dan perilakunya yang menghargai keberagaman bangsa Indonesia. Kasman dengan organisasi JIB ingin mencapai cita-cita organisasi khususnya dalam mendidik para pemuda Islam untuk memperdalam ilmu agama Islam secara menyeluruh. Demikian halnya, jika dianalisis dari asas dan tujuan (JIB) sebagaimana yang tercantum dalam anggaran dasarnya memiliki prinsip pendidikan multikultural, karena di dalamnya ada nilai apresiasi terhadap perbedaan. Hal penting yang melandasi JIB yakni mempelajari agama Islam dan menganjurkan agar ajaran-ajarannya diamalkan dan menumbuhkan rasa simpati umat Islam dan para penganutnya, selain menunjukkan sikap toleransi positif terhadap pemeluk agama lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, JIB membentuk organisasi Pandu Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Natipij* yaitu kepanduan dari JIB yang mengurus perkumpulan pemuda-pemudi Islam di Jakarta, yang berdiri pada tahun 1929. Sebagai tokoh keluaran *Natipij*, Kasman Singodimedjo dan Mohammad Roem mempunyai pribadi yang memiliki pengetahuan yang cukup kuat tentang kehidupan dalam masyarakat multikultur berkat pendidikan di dalam *Natipij*, pada masa pendudukan Jepang di saat Kasman Singodimedjo diangkat sebagai *Daidancho* (Komandan Batalyon) dalam Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Fakta ini membuktikan bahwa sosialisasi yang dialami oleh Kasman dalam proses pendidikan formal dan pengalaman dalam berorganisasi telah membentuk pribadi yang memiliki perspektif multikultural.

Di samping itu, aktivitas Kasman Singodimedjo sebagai salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) berperan dalam menghilangkan tujuh kata dalam naskah pembukaan UUD 1945. Saat itu, Ki Bagus Hadikusumo bersama Kasman Singodimedjo, KH. Wahid Hasyim dan Mr. Teuku Muhammad Hasan adalah para pemimpin umat Islam

yang telah diundang oleh Bung Hatta untuk merumuskan kembali sila pertama Pancasila hasil rumusan Panitia Sembilan. Akhirnya, keempat pemimpin umat Islam tersebut setuju jika rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Proses lahirnya falsafah Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan peranan Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo, sebagai pemimpin Islam yang berkeinginan umat Islam untuk membentuk persatuan dalam kemerdekaan. Hal ini merupakan pengorbanan umat Islam dalam menyusun Pancasila (Harun, 1986). Keputusan strategis tersebut sesungguhnya dilandasi oleh kesadaran dalam membangun kompetensi budaya untuk pendidikan multikultural yakni *Cultural Awareness, Understanding of own and Others' Cultures, Cultural Competence, Cultural Encounter* (Zamroni, 2016).

Penguatan nasionalisme dalam masyarakat Indonesia membutuhkan kompetensi budaya. Kompetensi budaya meliputi pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan kemampuan untuk mengaktualisasikan pengetahuan dan keterampilan itu saat seseorang berinteraksi lintas budaya. Dengan kompetensi budaya, maka hasil pembelajaran membentuk beberapa kemampuan warga masyarakat. *Pertama*, pengembangan identitas kultural yakni kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan suatu etnis tertentu. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan kelompok etnis dan menimbulkan kebanggaan serta percaya diri sebagai warga kelompok etnis tertentu; kemampuan individu untuk menerima, menghormati dan membangun kerjasama dengan siapapun juga yang memiliki perbedaan-perbedaan dari dirinya. *Kedua*, hubungan interpersonal, yakni kompetensi untuk melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain, dengan senantiasa mendasarkan pada persamaan dan kesetaraan serta menjauhi sifat syak wasangka dan *stereotype*. Kompetensi kultural ini merupakan hasil dari kesadaran atas pengetahuan dan “bias kultural” yang dimilikinya sebagai faktor yang mempengaruhi perbedaan kultur. *Ketiga*, pemberdayaan diri sendiri yakni suatu

kemampuan untuk mengembangkan secara terus menerus apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural. Proses pengembangan kompetensi kultural ini memerlukan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang memungkinkan seseorang memahami dan berinteraksi secara efisien dengan orang yang memiliki perbedaan kultural (Zamroni, 2011).

Kemampuan Kasman Singodimedjo sebagai mediator antara golongan Islam dengan perwakilan kawasan Indonesia Timur yang merasa berkeberatan pemasukan tujuh kata ini karena mayoritas mereka non-Muslim terbangun karena Kasman memiliki kompetensi budaya dalam perspektif pendidikan multikultural. Analisis terhadap peran Kasman dengan keputusan tersebut membuktikan bahwa Kasman Singodimedjo sedang menerapkan pendidikan multikultural yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai konflik sosial dan perbedaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Nieto (1996), pendidikan multikultur bertujuan untuk sebuah pendidikan yang bersifat antirasis; yang memperhatikan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan dasar bagi warga dunia yang penting bagi semua murid; yang menembus seluruh aspek sistem pendidikan; mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memungkinkan murid bekerja bagi keadilan sosial; yang merupakan proses di mana pengajar dan murid bersama-sama mempelajari pentingnya variabel budaya bagi keberhasilan akademik; dan yang menerapkan ilmu pendidikan kritis dalam memberi perhatian pada bangun pengetahuan sosial; dan yang membantu murid untuk mengembangkan keterampilan dalam membuat keputusan dan tindakan sosial.

Peran sosial yang dilakukan oleh Kasman Singodimedjo dalam membangun "*national building*" yakni dengan menerapkan beberapa prinsip dalam pendidikan multikultural sebagai komitmen global dibutuhkan oleh negara untuk memperkuat identitas bangsa. Sebagaimana isi rekomendasi UNESCO yang sangat mendukung kemampuan negara untuk tetap dapat menjaga eksistensinya dalam proses perubahan sosial-budaya. Empat rekomendasi tersebut meliputi, *pertama*, pendidikan

hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat, dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerjasama dengan yang lain. *Kedua*, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. *Ketiga*, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. *Keempat*, karena itu, pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri dan pikiran peserta didik sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, dan kemauan. Dalam konteks inilah, Kasman Singodimedjo sudah menerapkan prinsip-prinsip multikultural dalam setiap pembuatan keputusan strateginya yang mampu meredam konflik sosial dan sangat futuristik dalam membangun nasionalisme bangsa Indonesia.

Gerakan politik yang dilakukan oleh Kasman Singodimedjo berusaha untuk membangun perdamaian dan keadilan bersifat futuristik, karena efek sosialnya cukup luas dan sesuai dengan dinamika sosial perkembangan masyarakat dunia. Kasman Singodimedjo memiliki kemampuan untuk menjadi mediator politik yang bijak untuk mengatasi adanya konflik sosial. Dalam konteks inilah, Kasman Singodimedjo mengatasi konflik sosial dengan cara membangun kesadaran bernegara yang relevan dengan tujuan pendidikan multikultural yakni dalam upaya meminimalkan konflik ditujukan untuk membantu warga: (1) memahami latar belakang diri dan kelompok dalam masyarakat; (2) menghormati dan mengapresiasi kebhinekaan budaya dan sosio-historis etnik; (3) menyelesaikan sikap-sikap yang terlalu etnosentris dan penuh prasangka, (4) memahami faktor-faktor sosial, ekonomis, psikologis, dan historis yang menyebabkan terjadinya polarisasi etnik ketimpangan dan keterasingan etnik; (5) meningkatkan kemampuan menganalisis secara kritis terhadap masalah-masalah rutin dan isu melalui proses demokratis dengan sebuah visi tentang masyarakat yang lebih baik, adil dan bebas;

dan (6) mengembangkan jati diri yang bermakna bagi semua orang (Zamroni, 2011). Pencapaian tujuan tersebut merupakan proses sosial yang secara historis dan sosiologis tidak mudah diwujudkan, karena dalam perjalanan suatu bangsa banyak kepentingan sosial-politik yang terus berkembang dan berubah. Namun demikian, Kasman Singodimedjo sudah memberikan contoh empirik bahwa menghargai keberagaman dalam berbangsa sebagai modal dalam membentuk bangsa yang kuat dan berkarakter.

Pendidikan multikultural sebagai komitmen global dan sebagai penguatan karakter bangsa. Hal ini dibuktikan oleh Kasman Singodimedjo sebagai tokoh dan aktivis Muhammadiyah yang berperan dalam membentuk Partai Islam Indonesia yang mengutamakan nilai perdamaian dalam membangun organisasi sosial berafiliasi dengan agama dan tidak harus dipertentangkan, tetapi disatukan untuk membangun tujuan utama yakni membangun bangsa Indonesia yang mandiri. Warna politik internal benar-benar dijaga oleh Kasman Singodimedjo agar tidak terjebak dengan kepentingan pragmatis pada masing-masing organisasi sosial. Kasman Singodimedjo mampu menyatukan persepsi seluruh elemen politik berbasis agama agar bisa bekerjasama untuk kepentingan bernegara. Sebagai warga masyarakat yang pernah aktif sebagai Ketua Muda Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan aktivitas Muhammadiyah, ia terbukti mampu menjalankan peran sosialnya dengan bijak dalam konteks keberagaman masyarakat Indonesia. Sikap dan perilakunya dalam peran sosial menggambarkan kemampuannya dalam menerapkan prinsip pendidikan multikultural. Kasman Singodimedjo disosialisasikan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pendidikan multikultural direspons oleh semua unsur masyarakat agar hasilnya dapat dirasakan dan dimaknai oleh masyarakat. Namun demikian, praktik pendidikan multikultural masih mengalami banyak kendala sosial-budaya-politik, salah satunya adalah belum digunakan modal sosial dalam mengembangkan pendidikan multikultural di sekolah.

Oleh karena itu, diperlukan modal sosial untuk mendukung keberhasilan dalam penerapan pendidikan multikultural di lembaga pendidikan. Kasman Singodimedjo tidak secara langsung bicara tentang pentingnya pendidikan multikultural. Akan tetapi, Kasman Singodimedjo sudah mencoba menerapkan prinsip pendidikan multikultural yang dibutuhkan untuk membangun kompetensi global. Sebagaimana semangat Jenewa yang menjadikan pendidikan multikultural sebagai komitmen global. Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat, dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi, dan bekerja sama dengan yang lain. Pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. Pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan. Pendidikan multikultural hendaknya mampu untuk meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri dan pikiran peserta didik. Dengan demikian, mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, dan kemauan untuk berbagi dan memelihara dalam masyarakat global.

Kasman Singodimedjo sudah memiliki kompetensi global yang diharapkan memperkuat karakter bangsa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa dengan kompetensi global setiap bangsa lebih adaptif dan resilien dalam menghadapi tantangan dan permasalahan. Kompetensi global membutuhkan penguatan modal sosial. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa peran modal sosial mulai melemah. Oleh karena itu, modal sosial sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dikaji kembali eksistensinya. Modal adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya (*resources*) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan, dan diinvestasikan. Sumber daya yang

digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal sosial berbeda dengan istilah populer lainnya, yaitu modal manusia (*human capital*). Pada modal manusia, segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individual, yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan pola-pola hubungan antarindividu dalam suatu kelompok dan antarkelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antarsesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok (Dwiningrum, 2013 dan 2014). Dengan modal sosial, pemikiran Kasman dapat dijadikan sebagai model spirit bagi bangsa Indonesia yang tidak pernah lepas dari berbagai konflik kepentingan.

PENUTUP

Kasman Singodimedjo sebagai Pahlawan Nasional telah berjuang melalui peran-peran sosial untuk membentuk bangsa yang berkarakter dan memiliki eksistensi bangsa Indonesia. Keberhasilan Kasman Singodimedjo dalam menjalankan peran sosial karena kepemilikan modal sosial yang mampu mendukungnya menjadi pemimpin yang bijak dan berkarakter. Peran-peran sosial yang dijalani oleh Kasman Singodimedjo sangat strategis karena memiliki makna dalam membangun eksistensi bangsa Indonesia dan membuktikan kekuatan karakter kepemimpinan yang mampu membentuk perdamaian dan keadilan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralistik. Kasman Singodimedjo adalah sosok intelektual yang memiliki perspektif multikultural yang membentuk jaringan sosial dalam keberagaman dan memiliki asset individu yang mampu membuat keputusan strategis yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia menuju bangsa yang mandiri dan bermartabat.

Perjuangan Kasman Singodimedjo yang mengantarkan pada pemberian gelar sebagai Pahlawan Nasional sangat tepat. Dengan keberhasilannya dalam menjalankan peran sosialnya membuktikan komitmennya sebagai Warga Negara Indonesia yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang

sekarang menjadi wilayah Indonesia yang membela bangsa dan negara. Prestasi yang dilakukan masih dirasakan dalam era kemerdekaan, karena memberikan menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Kasman Singodimedjo sebagai tokoh nasional telah memberikan dasar dalam membentuk karakter bangsa yang efek sosialnya memberikan warna bagi perjuangan nasionalisme bangsa Indonesia di masa mendatang.

REFERENSI

- Dwiningrum, S. I. A. 2018. "The Role of Social Capital in Developing Effective and Creative Schools in Primary Schools." *Makalah*. Dipresentasikan pada ISCEI 2018. Singapura: Nanyang Universitas Singapura, Januari 8-12.
- _____. 2014. *Modal Sosial Dalam Pengembangan Pendidikan: Perspektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UNY Press.
- _____. 2013. "Ide Pengembangan Modal Sosial dalam Perbaikan Mutu Sekolah Dasar di Daerah Rawan Bencana Merapi." *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: LPPM UNY.
- _____. 2013. "Nation's Character Education Based on the Social Capital Theory" *Asian Social Science, Special Issue*, 9 (12).
- Hauberer, J. 2011. *Social Capital Theory*. Germany: VS Research.
- Harun, L. 1986. *Muhammadiyah dan Asas Pancasila*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Field, J. 2010. *Modal Sosial*. Medan: Bina Medai Perintis
- Nieto, S. 1996. *Affirming Diversity: The Sociopolitic Context of Multicultural Education*. New York: Longman.
- Singodimedjo, K. 1978. *Masalah Kedaulatan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sriwahyuntari, F. A. 2005. *100 Tokoh yang Mengubah Indonesia*. Yogyakarta: NARASI.
- Suharjo. 2014. "Peranan Modal Sosial dalam Perbaikan Mutu Sekolah Dasar di Kota Malang". *Disertasi*. Yogyakarta: Progam Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

- Wasirah. 2009. "Kasman Singodimedjo dan Aktivitasnya (1930-1982)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Zamroni. 2017. *Pendidikan Multikultural sebagai Upaya untuk Mengurangi Ketimpangan Prestasi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Zamroni. 2016. "Development of Cultural Comptence in Multicultural Education in Indonesia and New Zealand in SMA". *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: LPPM Universitas Negeri Yogyakarta. 🇮🇩

DARI DAR-AL SALAM HINGGA DAR-AL SOSIALIS: PEMIKIRAN KASMAN SINGODIMEDJO TENTANG PEREMPUAN DAN RUMAH TANGGA

Siti Aisyah

PENDAHULUAN

Kasman Singodimedjo yang dikenal sebagai sang orator ulung memang telah ditempa dalam organisasi-organisasi pergerakan nasional, seperti *Jong Islamieten Bond* (IJB), Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982), Muhammadiyah, dan Partai Masyumi (Bajasut dan Hakiem, 2014). Peran fundamentalnya dalam perdebatan seputar Dasar Negara lewat sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), (Hadikusuma, t.t), Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982), dan Konstituante (Bajasut dan Hakiem, 2014) tidak dapat diabaikan. Namun, di balik kisah heroik sang orator, sesungguhnya ia adalah seorang kader Muhammadiyah yang mengawali karir organisasi pada tahun 1921 sebagai anggota Cabang Muhammadiyah Batavia (Jakarta) yang pada waktu itu dipimpin oleh Kartosoedarmo (Almanak, t.t).

Dalam struktur organisasi Muhammadiyah terdapat organisasi sayap yang menaungi pemikiran dan gerakan bagi kaum perempuan, yaitu 'Aisyiyah. Demikian pula dalam struktur Masyumi, ketika telah berubah menjadi partai politik

juga terdapat organisasi sayap perempuan bernama Muslimat Masyumi. Di Partai Masyumi, posisi Kasman Singodimedjo sangat penting karena ia termasuk salah satu ideolog partai (Bajasut dan Hakiem, 2014). Kasman Singodimedjo yang sejak tercatat sebagai mubaligh Muhammadiyah di Cabang Muhammadiyah Batavia hingga masa berkecimpung di Partai Masyumi, tentu memiliki pandangan atau pemikiran tentang bagaimana posisi perempuan dalam Islam. Namun demikian, karya-karya yang merekam pemikirannya tidak banyak ditemukan terkait topik perempuan. Ia lebih banyak menulis – dalam bentuk artikel, buku, naskah pidato – tentang hukum dan politik ketatanegaraan dalam pandangan Islam. Sementara itu, di Partai Masyumi, Kasman Singodimedjo adalah salah satu ideolog partai yang banyak merumuskan pemikiran-pemikiran ideologis partai yang sempat memenangi Pemilihan Umum pada tahun 1955 (pemilu pertama) (Bajasut dan Hakiem, 2014). Bahkan, ia sudah terlibat dalam kepengurusan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) – organisasi embrio Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) sebelum menjadi partai politik. Dengan demikian, sebagian pemikiran Kasman Singodimedjo telah merepresentasikan pemikiran ideologis Partai Masyumi.

Meskipun Kasman Singodimedjo tidak banyak menyinggung topik tentang kedudukan perempuan dalam Islam – terutama peran perempuan dalam dinamika perpolitikan di tanah air – namun dengan latar belakang kehidupannya yang pernah berinteraksi dengan organisasi-organisasi yang memiliki relasi dengan organisasi perempuan. Hal ini memungkinkannya untuk membuka keran-keran pemikiran yang terhubung dengan topik perempuan yang dapat dilihat pada dua hal. *Pertama*, posisi Kasman Singodimedjo di Muhammadiyah yang dimulai sebagai kader mubaligh sejak 1921 hingga pasca berakhirnya karir di pemerintahan (jabatan terakhir sebagai Jaksa Agung Pertama RI) (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982). Setelah tidak aktif di pentas perpolitikan di tanah air – seiring pembubaran Partai Masyumi –, ia memilih kembali aktif di Muhammadiyah pada masa kepemimpinan KH. AR Fachruddin. Posisinya sebagai Wakil Ketua III Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Basuni dalam

Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982) sangat strategis dan sudah pasti berinteraksi dengan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah yang bernama 'Aisyiyah. *Kedua*, posisi Kasman Singodimedjo di Partai Masyumi sebagai ideolog partai. Dalam struktur Partai Masyumi terdapat organisasi sayap perempuan bernama Muslimat. Tentunya, Kasman Singodimedjo berinteraksi dengan organisasi Muslimat dan sebagai ideolog partai, ia tentu memiliki konsep pemikiran tentang kedudukan perempuan dalam Islam.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut di atas, tulisan ini bermaksud untuk merekonstruksi pemikiran Kasman Singodimedjo berkaitan dengan topik perempuan. Fokus tulisan ini pada pemikiran Kasman Singodimedjo tentang kedudukan perempuan dalam Islam, berkaitan dengan hak-hak dan pola relasi, konsep kehidupan rumah tangga, dan pandangannya tentang peran keluarga dalam membentuk komunitas besar bernama negara-bangsa.

SEKILAS TENTANG KASMAN SINGODIMEDJO

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123/TK/Tahun 2018 tanggal 6 November 2018 telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Kasman Singodimedjo. Sosok orator yang amat berpengaruh di organisasi *Jong Islamieten Bond* (IJB) ini lahir pada tanggal 25 Februari 1904 dari keluarga sederhana di Desa Kalirejo, Bagelen, Purworejo (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982). Ayahnya bernama Singodimedjo, berprofesi sebagai modin (juru adzan) di dusun Clapar (Kalirejo). Isteri Singodimedjo bernama Kartini dan berprofesi sebagai pedagang di pasar. Adik-adik Kasman adalah Kasmah (Ny. Sumoyo Joyokusumo), Kasiyem (Ny. A.S. Sarkiman), dan Surtiati (Ny. Purnomo Hadywijoyo) (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982).

Kasman Singodimedjo menikah dengan R. Soepinah Isti Kastiati (lahir tanggal 16 September 1909) dan dikaruniai enam anak, yakni Rr. Sekarningsih Endahing Warni, R. Moehammad Soelaiman Wibisono, R. Kodrat Iradat, R. Djoko Bangoen Mertani,

Rr. Taroeningroem Setiadi, dan Ny. Dewi Nurul Mustaqimah. Lama setelah isteri pertama wafat, Kasman Singodimedjo menikah dengan Ibu Salamah pada tanggal 13 September 1981. Ibu Salamah adalah janda Bapak Herman, berasal dari Banjarnegara Jawa Tengah yang tinggal di Sorosutan, Jalan Taman Siswa Yogyakarta. Pada saat itu, ia lebih dikenal dengan panggilan Ibu Herman, seorang perempuan aktivis Wanita Syarikat Islam Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah menikah dengan Kasman Singodimedjo, Salamah pindah ke Jakarta mendampingi suaminya. Sepeninggal Kasman Singodimedjo, Salamah kembali ke Yogyakarta.

Peran fundamental Kasman Singodimedjo dalam perdebatan seputar Dasar Negara Republik Indonesia lewat sidang-sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Konstituante tidak dapat diabaikan. Bahkan, Kasman Singodimedjo sudah tercatat sebagai propagandis (mubaligh) Muhammadiyah sebelum terlibat dalam kepengurusan JIB pada tahun 1925. Setelah tidak aktif di pemerintahan (jabatan terakhir sebagai Jaksa Agung Pertama RI), ia kembali aktif di organisasi Muhammadiyah, di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng Raya Nomor 62.

Karir Kasman Singodimedjo di pemerintahan tercatat ketika menjabat sebagai Menteri Muda Kehakiman RI pada tahun 1947. Setelah Sutan Syahrir memegang pimpinan KNIP, peta politik di pemerintahan pusat mengalami pergeseran ketika kelompok sosialis menguasai parlemen. Kasman Singodimedjo lebih banyak bergerak lewat Partai Masyumi yang terus mengalami tekanan. Sampai tahun 1959, lewat Penetapan Presiden No. 7/1959, Partai Masyumi dibubarkan oleh Soekarno. Sejak saat itulah, Kasman Singodimedjo memilih aktif di Muhammadiyah. Ketika dibentuk JIB, posisi Kasman Singodimedjo masih sebagai anggota dan sekaligus seorang mubaligh Muhammadiyah. Hanya saja, intensitas kegiatannya di Muhammadiyah mulai berkurang ketika ia terjun di gelanggang politik nasional. Pasca pensiun dari karir politik di pemerintahan, sikap Kasman Singodimedjo tetap kritis. Ia bahkan harus ditangkap oleh rezim yang pada mulanya adalah kawan seperjuangannya sendiri.

Kasman Singodimedjo yang mulai aktif di jajaran PP Muhammadiyah pada periode 1968-1971 sering berkelakar bahwa ia hanyalah 'penunggu warung' di Muhammadiyah. Pengakuannya sebagai 'penunggu warung' disaksikan oleh Haji Ahmad Basuni, pemimpin redaksi *Suara Muhammadiyah* pada waktu itu. Ahmad Basuni dalam kesaksiannya, (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982) yang dimaksud 'warung' di sini adalah kantor PP Muhammadiyah di Jl. Menteng Raya nomor 62. Ketika memasuki periode 1974-1977 pada masa kepemimpinan KH. AR Fachruddin, Kasman Singodimedjo menjabat sebagai Ketua III PP Muhammadiyah. Jika tidak sedang bepergian, Kasman Singodimedjo selalu datang dan siap di kantor PP Muhammadiyah. Ia selalu siap melayani tamu atau langganan yang datang, layaknya seorang 'penunggu warung.' Dalam ingatan Ahmad Basuni, sosok Kasman Singodimedjo memiliki sikap yang tegas, kritis, agitatif, dan tidak kenal takut kepada siapa pun kecuali Allah SWT. Di akhir kesaksiannya, Ahmad Basuni menulis: "Itulah pengenalan saya sekedar terhadap dan dengan Pak Kasman Singodimedjo yang biasa dinamakan juga: *Singa di atas Meja!*" (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982).

PEMIKIRAN KASMAN SINGODIMEDJO TENTANG PEREMPUAN DAN RUMAH TANGGA

Walaupun sebenarnya Kasman Singodimedjo tidak pernah secara spesifik menulis atau menuangkan pemikirannya tentang perempuan ke dalam artikel, buku, ataupun naskah pidato, namun terdapat suatu peristiwa menarik dalam beberapa perdebatan di majelis Konstituante. Sosok Kasman Singodimedjo yang terlibat perdebatan-perdebatan sengit di majelis tersebut merepresentasikan ideologi Partai Masyumi. Partai Masyumi adalah partai berbasis Islam dengan tujuan "*terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat, dan negara Republik Indonesia, menuju keridaan Ilahi*" (Bajasut dan Hakiem, 2014). Kasman Singodimedjo menafsirkan rumusan tujuan partai sebagai implementasi dari pesan-pesan dalam al-Qur'an (Q.S. Yunus [10]: 25, al-Baqarah [2]: 112) yang dikenal dengan diktum "*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*" (Singodimedjo, 1968).

Pandangan-pandangannya tentang perempuan berpijak pada ajaran Islam dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia. Diktum partai ini kemudian ia rumuskan sebagai perwujudan masyarakat sosialis Indonesia yang dibangun di atas tatanan baru berdasarkan prinsip kebahagiaan, adil, dan makmur di bawah keridhaan Allah SWT.

Dalam konteks memahami terbentuknya masyarakat Indonesia, Kasman Singodimedjo memiliki pendekatan strukturalis, yaitu “jalur atas” dan “jalur bawah.” Jalur atas adalah upaya yang dilakukan oleh struktur kekuasaan (pusat) dan jalur bawah adalah andil dari setiap oknum individu untuk terlibat dalam proses pembentukan masyarakat. Ketika merumuskan dua pendekatan ini, Kasman Singodimedjo merujuk pada filosofi dan konsepsi hukum Islam yang diadaptasi ke dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu konsep *fardlu ‘ain* dan *fardlu kifayah*. Dengan merumuskan filosofi dan konsepsi hukum Islam antara *fardlu ‘ain* dan *fardlu kifayah*, Kasman Singodimedjo menawarkan paradigma baru ketika membandingkan antara teori kebebasan *private*/individu – yang menuntut pada hak-hak kemanusiaan – dengan teori kewajiban individual (*fardlu ‘ain*) dalam Islam yang menuntut pada kewajiban-kewajiban sebagai makhluk (Singodimedjo, 1968).

Dengan corak pemikiran strukturalis, Kasman Singodimedjo meletakkan otoritas sumber kedaulatan bukan di “tangan rakyat”, tetapi di “Tangan Tuhan” (Singodimedjo, 1978). Dalam praktik kehidupan Muslim, pola hubungan antara makhluk dan sang pencipta (Tuhan) bersifat struktural; *atas* dan *bawah*. Maka prinsip kebebasan individu – yang akan mengantarkan kepada pengakuan hak-hak individual/*private* – sebagaimana teori kedaulatan yang berkembang di Barat (antroposentris) – oleh Kasman Singodimedjo digeser dengan konsepsi “kewajiban individual” atau *fardlu ‘ain*. Sementara itu, konsepsi *fardlu kifayah* – dalam pandangannya – adalah urusan berkaitan dengan kewajiban yang dijalankan dalam masyarakat dan negara. Atas dasar inilah, dalam salah satu pidatonya di Majelis Konstituante ditegaskan bahwa, “Islam menjamin hak-hak manusia (*human rights*), dengan menitikberatkan penunaian

kewajiban-kewajiban asasi" (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982:458).

Ketika menyampaikan pandangan politik kenegaraan berdasarkan ajaran Islam dalam sidang-sidang Konstituante, Kasman Singodimedjo memang berkali-kali mendapat kritik dari kelompok (partai) berhaluan komunis, seperti Asmara Hadi dan Nyoto (PKI), sedangkan ketika memperjuangkan konsepsi Islam berkaitan dengan kedudukan perempuan, ia juga tidak luput dari kritikan yang dilayangkan oleh para aktivis perempuan sosialis (feminis sosialis), seperti Ny. Tresna Soengkawati Garnida dari Partai Rakyat Indonesia Merdeka. Para feminis sosialis mempermasalahkan pandangan politik Partai Masyumi tentang kedudukan perempuan dalam Islam sebagaimana yang direpresentasikan oleh pemikiran-pemikiran Kasman Singodimedjo.

PEREMPUAN DALAM ISLAM

Dalam Sidang Konstituante tanggal 13 November 1957, Kasman Singodimedjo menempatkan perempuan pada kedudukan yang sangat mulia. Ia berdalih bahwa ajaran Islam dipahami secara keliru oleh para orientalis seraya mengutip Hadis Nabi Muhammad SAW, "*Sorga itu adalah pada kaki kaum ibu*" (Pidato tahun 1957 dalam Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982:478). Pandangan para orientalis yang keliru dalam memahami kedudukan perempuan dalam agama Islam, sejalan dengan pandangan para aktivis feminisme radikal yang direpresentasikan oleh beberapa anggota Konstituante dari beberapa partai berhaluan nasionalis. Mereka khawatir jika ajaran Islam masuk ke dalam sistem konstitusi nasional akan menciptakan ketidakadilan sosial di Indonesia. Ketidakadilan sosial yang dimulai dari pemahaman bias dalam hal peran antara laki-laki dan perempuan seperti yang dituduhkan oleh kelompok feminis radikal. Dengan berbagai macam dalih, menggunakan argumentasi logis maupun dalil-dalil yang dinukil dalam al-Qur'an, Kasman Singodimedjo menegaskan dalam pidatonya pada tahun 1957, "*Saudara ketua, Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut: "tidak menghinakan wanita kecuali orang yang hina.*

Dan tidak memulyakan wanita melainkan orang yang mulia” (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982:478).

Kasman Singodimedjo juga membedakan konsep kedudukan perempuan dalam Islam tidak sama seperti dalam tradisi Jawa atau tradisi yang berlaku di beberapa negara Eropa. Latar belakang lahirnya gerakan feminisme di Eropa memang sangat kontekstual dengan budaya masyarakat Indonesia, khususnya dalam tradisi Jawa yang memandang kaum perempuan berada dalam posisi subordinat.

...Di dalam agama Islam, saudara ketua, tidak berlaku pepatah Jawa yang mengatakan: *“Wong wadon kuwi suargo nurut, neroko katut!”* yang artinya *“Orang perempuan itu mengikuti ke mana pun suaminya, ke surga ataupun ke neraka.”* Pula bagi wanita Islam tidak berlaku pepatah, *“Dat de vrouwe zwijge in haar gemeente,”* yang berarti: *“Orang perempuan itu sepatutnya bungkem tutup mulut di dalam masyarakat”* (Pidato tahun 1957 dalam Panitia, 1982:478).

Meskipun kedudukan perempuan sangat terhormat dalam pandangan Kasman Singodimedjo, begitu juga hakekat kedudukan perempuan dalam ajaran Islam, namun fakta bahwa laki-laki dan perempuan secara kodrati memang berbeda. Kasman Singodimedjo memang tidak menyebut istilah faktor gender (jenis kelamin) untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, tetapi ia menyebut faktor-faktor sebagai seperti (1) *bakat* – yaitu potensi dalam diri manusia, (2) *sifat* – yaitu karakter, dan (3) *pembawaan* – yaitu karakter bawaan sejak lahir (Pidato tahun 1957 dalam Panitia, 1982:479) dalam hubungannya dengan “perbedaan” yang melingkupi perempuan dan laki-laki.

Konsekuensi atas perbedaan bakat, sifat, dan pembawaan antara laki-laki dan perempuan terletak pada fungsi dan tugasnya masing-masing yang berbeda. Dengan logika strukturalis, Kasman Singodimedjo menempatkan pemahaman kedudukan perempuan dalam masyarakat atas dasar perbedaan bakat, sifat, dan pembawaan memang berbeda dengan laki-laki. Namun, secara teologis, kedudukan manusia, laki-laki maupun perempuan, adalah sama di hadapan Allah SWT. Dengan merujuk pada penafsiran surat Al-Hujurat (49) ayat 13, kedudukan antara

laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah SWT, sedangkan yang membedakan keduanya hanyalah derajat ketaqwaan masing-masing.

Tafsir Kasman Singodimedjo atas doktrin Islam yang berkaitan dengan kedudukan perempuan tampaknya hendak mencari posisi yang tepat di antara paham dan aliran feminisme yang sedang berkembang di tanah air. Dinamika gerakan feminisme pada paruh abad XX di negara-negara Eropa terus menggeliat di antara dua kutub gerakan; *radikal* dan *moderat*. Feminis radikal menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sepenuhnya di ruang publik. Gerakan ini tergolong radikal karena mereka menuntut kesetaraan secara mutlak antara laki-laki dan perempuan. Paham ini pun dinilai mengabaikan latar belakang gender dan mengeritik “institusi keluarga” yang dianggap sebagai representasi dari struktur dan kultur yang justru meminggirkan peran kaum perempuan. Sementara kelompok feminis moderat (neo-feminisme), selain menuntut kesetaraan dalam partisipasi di ruang publik, paham gerakan ini masih mempertahankan “institusi keluarga” dengan cara meningkatkan kualitas hidup perempuan (Mangoensarkoro, 1940).

Kasman Singodimedjo meletakkan penafsirannya terhadap kedudukan perempuan di luar konteks dua gerakan feminisme pada waktu itu. Ia tetap memahami kedudukan perempuan berdasarkan prinsip-prinsip fundamental dalam ajaran Islam bahwa faktor bawaan seperti sifat dan bakat (fitrah perempuan yang tidak bisa diubah: mengandung, melahirkan, menyusui, dan haid/nifas, dan menopause) sehingga berakibat pada konsekuensi-konsekuensi yang berbeda di antara laki-laki dan perempuan dalam praktik kehidupan yang luas. Dalam forum lain di Majelis Konstituante, Kasman Singodimedjo menegaskan kembali pandangannya bahwa:

“Islam menjamin hak-hak asasi manusia (*human right*), dengan menitikberatkan penunaian kewajiban-kewajiban asasi. Islam memberi penilaian yang sama antara kaum wanita dan kaum priya, dengan tidak mengurangi kenyataan, bahwa perbedaan sifat dan bakat antara kaum wanita dan kaum priya membawa pula pembahagian

tugas dan lapangan pekerjaan bagi masing-masing kaum” (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982:485).

Dengan meletakkan kedudukan perempuan dalam masyarakat atas dasar perbedaan watak, sifat, dan pembawaan, maka hak-hak perempuan akan simetris dengan kewajiban-kewajiban yang ditunaikan.

Dalam buku *Renungan dari Tahanan*, Kasman Singodimedjo meletakkan konteks hak-hak perempuan sama dengan hak-hak rakyat atau warga negara pada umumnya, dalam kerangka mewujudkan prinsip keadilan sosial. Definisi keadilan sosial dalam pandangannya adalah, “... suatu suasana di dalam suatu masyarakat di mana para anggota-anggotanya berkemakmuran yang adil dan membahagiakan” (Singodimedjo, 1968:145). Dalam memahami filosofi Pancasila, ia meletakkan sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” sebagai sumber yang menginspirasi seluruh sila. Ia menyebut sila pertama sebagai representasi ajaran pokok dalam Islam, yaitu *tauhid* (Singodimedjo, 1968). Dengan demikian, ketika memahami konsep keadilan sosial, maka filosofinya adalah “keadilan sosial yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hak-hak perempuan sebanding dengan hak-hak laki-laki atas dasar penunaian kewajiban masing-masing. Sebab, di hadapan Allah SWT, laki-laki dan perempuan menanggung kewajiban yang setara. Cukup menarik dalam hal ini bahwa Kasman Singodimedjo memahami dalil-dalil perintah dalam al-Qur’anselalu ditujukan kepada laki-laki dan sekaligus perempuan. Hal ini, dalam tafsirannya, sesungguhnya menunjukkan suatu pemahaman bahwa posisi laki-laki dan perempuan itu setara dalam hal menanggung beban kewajiban agama (Singodimedjo, 1968). Secara jernih, Kasman Singodimedjo merenungkan makna keberagaman manusia dengan latar belakangnya sebagai suatu ketetapan Allah agar masing-masing saling memahami dan hidup harmonis. Ia mengatakan;

“Allah sendiripun tidak membeda-bedakan antara manusia yang satu terhadap manusia yang lain atas dasar keyakinan atau kepangkatan, atas dasar tugas atau kedudukan, atas dasar keberuntungan atau pemilihan, atas dasar gelar atau

lencana, atas dasar keturunan atau asal-usul, atas dasar penunjukan atau pemilihan atas dasar kesukaan atau kegemaran, atas dasar kemampuan atau kekuasaan, atas dasar sikap atau pintarnya omong, atas dasar kecakapan atau lagak-lagu, tidak, bukan itu ukuran penilaian Allah” (Singodimedjo, 1968:188-189).

Pola relasi antara laki-laki dan perempuan, dalam kacamata strukturalisme Kasman Singodimedjo, dalam bentuk relasi *partnership*, yaitu kemitraan yang harmonis. Dengan kosmologi umat Islam, kehadiran umat manusia di muka bumi sebenarnya berasal dari sepasang manusia dengan jenis kelamin laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa). Inilah yang menjadi cikal-bakal komunitas manusia, yang dimulai dari relasi kemitraan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan sampai melahirkan anak keturunan. Hadirnya keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat menjadi pilar dalam pembentukan komunitas besar yang bernama bangsa.

Lahirnya konsep *nation* (bangsa) dalam Islam, sebagaimana Kasman Singodimedjo menafsirkan Q.S. Al-Baqarah [2] : 213 dan Q.S Yunus [10] : 19 dalam konteks politik kenegaraan, tidak bisa lepas dari konsep “umat yang tunggal” (*ummatan wāhidatan*). Umat yang tunggal terbentuk dari unit-unit kecil dalam masyarakat, sedangkan masyarakat terbentuk dari individu-individu, dalam hal ini ia menggunakan istilah “oknum individual”, yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan merujuk pada penafsiran Q.S Al-Hujurat ayat 13, ia menegaskan bahwa konsep keumatan dalam ajaran Islam tidak hanya mencakup konsepsi “kebangsaan”, tetapi sekaligus internasionalisme (Singodimedjo, 1968).

Setiap menyampaikan pandangan resmi ideologi Partai Masyumi, Kasman Singodimedjo selalu mendapat kritik dan sanggahan sehingga tercipta perdebatan sengit dalam forum-forum Konstituante. Gagasan-gagasan resmi tentang konsepsi Islam dalam praktik kehidupan bernegara, terutama menyangkut dasar negara dan hukum Islam, perwakilan PKI (Asmara Hadi, Nyoto) selalu membantah dan menuding argumentasi Kasman Singodimedjo yang dianggap terlalu lemah. Sementara itu, kritik

dari para feminis radikal terhadap ideologi Partai Masyumi terkait pandangan yang bersumber dari para orientalis yang menilai agama Islam telah mengeksploitasi kaum perempuan. Merespons kritik para feminis, Kasman Singodimedjo menegaskan:

“Ukuran penilaian Allah untuk membeda-bedakan manusia itu hanya satu, yaitu takwa/baktinya kepada Allah seperti termaktub dalam Qur’an Al-Hujurat ayat 13: “Hai manusia! Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan; dan Kami telah jadikan kamu beberapa bangsa dan puak, supaya berkenal-kenalan; sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah itu ialah yang sebakti-baktinya dari antaramu; sesungguhnya Allah itu Yang Mengetahui, Yang Sadar” (Singodimedjo, 1968:188-189).

DARI *DAR-AL-SALAM* HINGGA *DARUS-SOSIALIS*

Oknum individual dalam masyarakat terdiri atas laki-laki dan perempuan. Pola relasi antara keduanya dalam bentuk kemitraan yang harmonis, karena sekalipun berbeda jenis kelamin namun masing-masing berperan saling melengkapi. Kebutuhan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dalam naungan ikatan pernikahan adalah *sunnatullah*. Dari pernikahan yang sah, lahir institusi atau pranata sosial terkecil dalam masyarakat. Dari sana kemudian terjadi pembagian tugas dan peran—struktural—dalam keluarga. Kasman Singodimedjo memang menghendaki pembagian tugas dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, tetapi pola relasi antara keduanya tidak dalam kerangka eksploitatif. Keluarga sebagai pranata sosial adalah suatu keharusan, diibaratkan sebuah “kapal” yang akan berlayar menuju ke suatu tujuan (Singodimedjo, 1968). Oleh karena itu, pembagian tugas dan peran meniscayakan struktur untuk mengisi posisi peran: siapa sang kapten, siapa awak kapal, dan siapa penumpang. Perumpamaan kapal sebagaimana yang diungkapkannya, arti penting kehadiran keluarga adalah sebuah analogi dari sebuah struktur sosial terkecil dalam masyarakat. Dari institusi keluarga inilah sebuah bangsa yang besar terbentuk.

Pandangan Kasman Singodimedjo yang mendudukan posisi keluarga sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial

secara tidak langsung telah mengafirmasi pandangan para aktivis neo-feminisme yang memang mempertahankan institusi keluarga (Mangoensarkoro, 1940: 107-111). Menurut pandangan Ny. Sri Mangoensarkoro, paham dan gerakan neo-Feminisme, sekalipun dianggap kurang progresif dalam merespon isu-isu persamaan hak, tetapi mereka masih menganggap institusi keluarga sebagai pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Kualitas masyarakat ditentukan oleh kualitas anggota keluarga, terutama generasi penerus masa depan (anak-anak). Paham ini sebagai anti-tesis terhadap gerakan feminisme (radikal) yang berkembang di Eropa pada pertengahan abad XX (Mangoensarkoro, 1940). Kutipan berikut ini menunjukkan bagaimana pandangan Kasman Singodimedjo tentang keluarga:

Rumah tangga *tokh* merupakan *bouwsteen* atau batu pondamen dari masyarakat dan negara. Jika perihidup dalam rumah tangga itu bobrok atau kalut, maka janganlah diharapkan tercapainya keadilan sosial di masyarakat dan negara itu, betapapun telah terdapat di situ kesibukan proyek usaha-usaha dan istana-istana internasional, meskipun telah banyak berdiri universitas-universitas dan pabrik-pabrik besar, meskipun telah ada kecukupan sandang dan pangan, betapapun telah tercapai *voordelige handelsbalans*, telah tercapai *batigslot* bagi anggaran belanja negara, ya, meskipun telah berdiri mesjid-mesjid yang monumental dan pesantren-pesantren yang modern *up to date!* Oleh sebab itu, harus ada pembangunan dan jaminan keamanan mengenai kebahagiaan berumah tangga (Singodimedjo, 1968:173-174).

Praktik kehidupan berumah tangga dalam pandangan Kasman Singodimedjo adalah *sunnatullah*. Hubungan timbal-balik antara laki-laki dan perempuan atas dasar kebutuhan hidup (kebutuhan biologis) telah tersirat dalam ajaran Islam. Allah SWT mengatur bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan kokoh berdasarkan ajaran Islam. Dari ikatan antar oknum individual, yakni laki-laki dan perempuan, lahirlah institusi keluarga yang mendapat kedudukan mulia di dalam ajaran Islam (Singodimedjo, 1968).

Secara lugas, Kasman Singodimedjo menyebut *Dar-ul Salam* untuk menyebut "Rumah Tangga." Namun frase rumah

tangga dalam pengamatannya dinilai terlalu statis, sehingga ia menggunakan istilah “Rumah Tangga Bahagia” untuk memaknai *Dar-ul Salam*. Sebagai kewajiban individual, setiap Muslim diwajibkan untuk menjadikan rumah tangga dalam kondisi yang harmonis.

...Masing-masing manusia sebagai oknum individual diwajibkan berusaha sekuat tenaganya sehingga rumah tangganya itu merupakan “*dar-ul salam*”. “*Dar*” artinya rumah, “*salam*” artinya “bahagia,” jadi *dar-ul salam* berarti “rumah bahagia”. Istilah “rumah bahagia” menunjukkan dari *dar-ul salam* itu kepada fungsi yang statis, tetapi apabila yang kita maksudkan itu fungsi dinamisnya, maka kita harus pakai istilah: “rumah tangga bahagia” (Singodimedjo, 1968:176).

Dari pranata sosial terkecil dalam masyarakat inilah, Kasman Singodimedjo menggagas keselarasan antara “keluarga bahagia” dengan konsep *nasionalisme*—baik yang digerakkan “dari atas” (pemerintah) maupun yang digerakkan “dari bawah” (oknum individual). Dalam konteks keadilan sosial, maka upaya yang ditempuh lewat jalur institusi keluarga masuk kategori *fardlu ‘ain*—kewajiban oknum individual—sedangkan program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah masuk kategori *fardlu kifayah*—kewajiban kolektif. Kasman Singodimedjo menggunakan dua aras pendekatan sekaligus dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, yakni “dari atas” (pemerintah/*fardlu kifayah*/kolektif) dan “dari bawah” (keluarga/*fardlu ‘ain*/individu). Sebab, dalam alur logika berpikirnya, baik *fardlu ‘ain* maupun *fardlu kifayah*, keduanya tetap dalam kerangka “*fardlu*” (kewajiban). Terkait dengan rumah tangga ini, Kasman Singodimedjo menegaskan:

“Menurut ajaran Islam, alhasil segala apa yang hendak dicapai dengan nama umum “keadilan sosial” itu upaya diusahakan tercapainya hal itu terlebih dahulu, atau setidaknya-tidaknya bersama-sama *in the same time* dengan usaha pemerintah di tiap-tiap rumah tangga tersebut. Apabila kita bicara mengenai keadilan sosial, maka unit yang terkecil sebagai anggota *sociologis-psychologis* dari masyarakat itu bukanlah perseorangan atau oknum

manusia masing-masing, tetapi justru “keluarga di rumah tangga” itulah ...” (Singodimedjo, 1968:174).

Kasman Singodimedjo kembali menegaskan:

Belumlah cukup apabila usaha dan jaminan termaksud diatur “dari atas,” yaitu oleh negara dengan cara perundang-undangan (mengenai perkawinan, keluarga, kewarisan), tetapi terutama sekali hal itu harus dilakukan oleh tuan dan nyonya rumah sendiri, tidak saja terhadap kawan-kawan serumah, tapi juga dan yang terutama sekali terhadap pada diri pribadi sendiri. Sehingga dengan begitu tiap-tiap rumah tangga itu hendaklah merupakan masyarakat yang adil, makmur, dan berbahagia yang menyinari pula kepada tetangga, tetangga terdekat dan tetangga yang jauh (baca al-Qur’an Surah an-Nisa [4]: 36) (Singodimedjo, 1968:173-174).

Cukup menarik frase akhir dari kutipan di atas bahwa tiap-tiap rumah tangga, dalam pandangan Kasman Singodimedjo, hendaklah menjadi pusat dan sekaligus contoh dari pengejawantahan “rumah tangga bahagia” – adil dan makmur – yang dapat menyinari tetangga-tetangga yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh. Dari konsep “rumah tangga bahagia” sebagai penjelmaan arti *dar-ul salam*, ketika berhasil menyinari – berinteraksi dan membangun kesadaran kolektif – akan tercapai bentuk “*dar-ul sosialis*” (Singodimedjo, 1968:175).

Terminologi *dar-ul sosialis* secara tersurat diungkapkan Kasman Singodimedjo dalam buku *Renungan dari Tahanan*. Ia menyimpulkan bahwa terbentuknya institusi keluarga lewat peran oknum individual antara laki-laki dan perempuan yang dilegalkan lewat syariat pernikahan akan membentuk rumah tangga bahagia. Dari rumah tangga bahagia inilah, terjalin komunikasi dan interaksi yang dipandu ajaran agama Islam sampai terbangun kesadaran bersama (kolektif) tentang arti penting kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun terminologi *dar-ul sosialis* terkesan agak sekuler (secara bahasa berarti: rumah tangga sosialis), namun di akhir kesimpulan, ia menguncinya dengan frase: “sesuai dengan ajaran-ajaran Islam: kebahagiaan di dunia dan di akhirat” (Singodimedjo, 1968:175). Dengan demikian, terminologi *dar-ul salam* hingga *dar-ul sosialis*

adalah cara Kasman Singodimedjo memahami bagaimana proses nasionalisme di Indonesia terbentuk. Jika rumah tangga ibarat kapal, maka negara Indonesia adalah kapal besar yang sedang berlayar menuju ke suatu tujuan. Jika salah satu rumusan tujuan nasional adalah terwujudnya “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dalam konteks ideologi Partai Masyumi, tujuan kapal berlayar adalah menuju “*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*” (Singodimedjo, 1968:55). Diktum inilah yang kemudian diadaptasi ke dalam struktur ideologi Partai Masyumi ketika merumuskan tujuan partai. Konsep “*Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*” yang digali dari Q.S Yunus ayat 10 dan 25 dan QS. al-Baqarah ayat 112 kemudian dirumuskan menjadi tujuan Partai Masyumi: “...terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat, dan Negara Republik Indonesia, menuju keridaan Ilahi” (Bajasut dan Hakiem, 2014:427).

SIMPULAN

Secara garis besarnya, terdapat dua hal penting yang dapat digarisbawahi dari uraian di atas. *Pertama*, pandangan Kasman Singodimedjo yang menempatkan perempuan dalam kedudukan mulia, sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini berbanding terbalik dengan persepsi dan konstruksi sosial masyarakat Jawa pada khususnya dan persepsi serta konstruksi sosial masyarakat Eropa yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Sekalipun dalam posisi mulia, pemahaman Kasman Singodimedjo terhadap kedudukan perempuan tetap dalam kerangka ajaran Islam yang mengakui adanya perbedaan secara alamiah, seperti sifat, bakat, dan bawaan (faktor gender). Dalam konteks pemenuhan terhadap hak-hak kemanusiaan (*human rights*), Kasman Singodimedjo yang merujuk pada penafsiran strukturalis menempatkan “kewajiban” di atas hak-hak. Dengan demikian, hak-hak kemanusiaan—termasuk hak-hak perempuan—adalah dalam konteks penunaian atas kewajiban makhluk kepada Sang Khalik (Allah SWT) yang ditanggung bersama, antara laki-laki dan perempuan. Pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam konstruksi pemikiran Kasman

Singodimedjo sejajar dalam kerangka kemitraan-harmonis. Karena pada dasarnya, setiap oknum individu – baik laki-laki maupun perempuan – memiliki hajat untuk hidup bersama yang lain. Secara tegas, Kasman Singodimedjo mengungkapkan ajaran Islam yang menolak eksploitasi terhadap siapapun, baik laki-laki maupun perempuan.

Kedua, pemikiran Kasman Singodimedjo dalam kacamata strukturalis menempatkan keluarga sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Membentuk keluarga atau “rumah tangga bahagia” (*dar-ul salam*) adalah kewajiban individual setiap Muslim. Sementara, keluarga bahagia yang mampu menerangi keluarga lain – proses interaksi harmonis – membentuk “struktur sosial” (*dar-ul sosialis*) yang lebih besar dalam naungan ajaran Islam. Dengan metafora sebuah “kapal yang berlayar ke suatu tujuan,” maka setiap keluarga bahagia yang diungkapkan dengan terminologi *dar-ul salam* akan membentuk kesadaran kolektif ketika berinteraksi dengan keluarga lain, sehingga membentuk suatu komunitas besar yang bernama bangsa atau negara. Pembagian peran dan posisi dalam struktur keluarga maupun masyarakat adalah suatu keniscayaan dalam kacamata pemikiran Kasman Singodimedjo. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, ia menggunakan perumpamaan “Kapal Besar” yang dinahkodai sang kapten (kepala negara) dengan awak kapal (aparatur negara) dan penumpang (rakyat Indonesia) yang berlayar menuju ke suatu tujuan (tujuan nasional). Keluarga bahagia – dalam kacamata pemikiran Kasman Singodimedjo – adalah “Kapal Kecil” sebagai struktur sosial terkecil yang berinteraksi dengan keluarga bahagia yang lain sehingga membentuk komunitas besar bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- “Anggaran Dasar Partai Politik Islam Masyumi,” Lampiran dalam S.U. Bajasut & Lukman Hakiem, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito: Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014.
- “Pidato Kasman Singodimedjo di Konstituante R.I. Hal Dasar Negara Hari Rabu Tanggal 13 Nopember 1957 Pagi”, dalam

- Lampiran dalam Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- “Pidato Mr. Kasman Singodimedjo di Konstituante Republik Indonesia tentang Dasar Negara”, dalam Lampiran dalam Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Bajasut, S.U. & Lukman Hakiem. 2014. *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito: Ketua Umum (Terakhir) Partai Masyumi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Basuni, Ahmad. 1982. “Pengenalan Saya Terhadap dan dengan Pak Kasman,” dalam Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hadikusuma, Djarnawi. t.t. *Aliran Pembaharuan Islam: dari Jamaluddin Al-Afghani Sampai K.H.A. Dahlan*. Yogyakarta: Persatuan.
- Kasman Singodimedjo, “Hal Keadaulatan (II), *Suara Muhammadiyah*, No. 2 Th. Ke-58/1978.
- Kasman Singodimedjo, “Hal Keadaulatan (I)” *Suara Muhammadiyah*, No. 1 Th. Ke-58/1978.
- Mangoensarkoro, Ny. Sri. 1940. “Doea Faham dalam Gerakan Perempuan,” *Soeara Aisjijah* No. 9-10/Oct.
- Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman. 1982. *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Taman Pustaka. t.t. *Almanak Muhammadiyah 1956-1960*. Menteng Raja: Pusat Pimpinan Muhammadiyah Madjlis Taman Pustaka.
- Singodimedjo, Kasman. 1968. *Renungan dari Tahanan*. Jakarta: Penerbit Permata. 🌟

KASMAN SINGODIMEDJO SEBAGAI PEJUANG TIDAK MENGENAL LELAH DEMI PERSATUAN INDONESIA

Martinus Sardi

PENDAHULUAN

Di Purworejo Jawa Tengah, pada 25 Februari 1904 lahirlah Kasman Singodimedjo. Orangtuanya bernama H Singodimedjo, yang pernah memegang jabatan Penghulu dan Sekretaris Desa. Di Purworejo, ia mendapat pendidikan dasar, di Sekolah Rakyat. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yakni ke Hollandsch Inlandsche School (HIS) di Batavia. Dari situ ia kemudian melanjutkan ke HIS Kutoarjo. Selain mengenyam pendidikan pada sekolah umum, ia juga belajar ilmu keagamaan di bawah bimbingan KH. Ahmad Dahlan dan KH. Abdul Aziz. Pendidikan selanjutnya yakni ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di kota Magelang, Jawa Tengah. Setelah menyelesaikan MULO, Kasman Singodimedjo kembali ke Batavia dan melanjutkan pendidikan ke School Tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA). Pendidikan dokter ini tidak diselesaikannya. Ia kemudian berpindah ke pendidikan dalam bidang hukum. Ia studi di Sekolah Tinggi Hukum, Rechts Hoge School, dan mendapatkan gelar Meester in Richter (Mr.) di Batavia juga.

Berbekal dari Sekolahnya tersebut, Kasman Singodimedjo belajar beraktivitas dan berorganisasi. Pada tahun 1925, bersama Suhodo, Sjamsuridjal, dan Ki Musa al-Mahfudz,

didirikanlah Jong Islamieten Bond (JIB) pada 1925, yang sangat aktif dan menjadi penyemangat dalam menyuarakan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Selain menjadi guru dan pengurus Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo memimpin JIB pada tahun 1930-1935. Ia sangat kritis terhadap situasi waktu itu. Tiga tahun kemudian, yakni pada tahun 1938, di Surakarta, Jawa Tengah, Kasman Singodimedjo bersama KH. Mas Mansur, Farid Ma'ruf, Soekiman, dan Wiwoho Purbohadidjojo, mendirikan sebuah partai yang sangat islami, yakni Partai Islam Indonesia yang aktif dan berjuang menentang penjajahan Belanda. Akibat aktivitas tersebut, Kasman Singodimedjo ditangkap dan ditahan Belanda pada tahun 1940. Belanda berpikir bahwa Kasman Singodimedjo akan berhenti berjuang dan tidak akan aktif lagi. Justru karena ditahan itulah, maka semangatnya malah bernyalanya. Baginya hidup adalah perjuangan yang tidak mengenal lelah, apapun yang dihadapinya. Berjuang terus tiada henti adalah kewajiban seorang muslim, tegasnya. Ini merupakan kaidah yang harus dilaksanakan sebagai perjuangan imannya

Pada zaman pendudukan Jepang, Kasman Singodimedjo menjadi Daidhancho senior, PETA, Pembela tanah air. Setelah kemerdekaan, Kasman Singodimedjo ditunjuk sebagai anggota tambahan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah itu dia menjadi ketua BKR, Badan Keamanan Rakyat. Dan ketika Indonesia dijajah kembali oleh Belanda, dan ibu kota pindah ke Yogyakarta, Kasman Singodimedjo didapuk menjadi Juru Bicara Pemerintah Pusat, yang menyatakan bahwa pemerintahan masih berfungsi sebagaimana mestinya, sekalipun Presiden dan Wakilnya ditawan oleh Belanda. Setelah kemerdekaan, pada Muktamar 7 November 1945 Kasman Singodimedjo, dipilih untuk menjadi Ketua Muda III Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Aktivitas di Muhammadiyah ini menghantarkannya ke tugas kenegaraan yakni untuk menjabat Jaksa Agung. Justru dalam masa jabatannya yang tidak lama ini, Kasman Singodimedjo menerbitkan secara resmi Maklumat Jaksa Agung No 3 tanggal 15 Januari 1946, yang dialamatkan kepada para Gubernur, Jaksa, dan Kepala Polisi. Maklumat ini mengejutkan,

karena mengajak Pejabat Kejaksaan bahwa Negara Republik kita ini tak lain daripada negara hukum. Itu berarti bahwa Pengadilan dilaksanakan berdasarkan hukum, secara adil, cepat dan tepat. Selesai menjabat sebagai Jaksa Agung, Kasman Singodimedjo dinominasi sebagai Kepala Urusan Kehakiman dan Mahkamah Tinggi pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, lalu menjadi Kepala Kehakiman dan Pengadilan Militer pada Kementerian Pertahanan. Dan jabatan selanjutnya tidak lain daripada Menteri Muda Kehakiman dalam Kabinet Amir Sjafruddin II, dari November 1947 sampai dengan Januari 1948.

Pada Pemilihan Umum tahun 1955 Kasman Singodimedjo terpilih menjadi anggota Majelis Konstituante dan diberi amanah menjadi Ketua Fraksi Islam, yang dikenal sebagai pejuang tanpa memperhatikan diri sendiri dan pejuang tanpa pamrih. Sekalipun menduduki jabatan di pemerintah, Kasman Singodimedjo sebagai muslim sangat kritis. Di jaman Soekarno sebagai Presiden pada tanggal 31 Agustus 1958, akibat kritiknya yang tajam kepada pemerintah, Kasman Singodimedjo masuk penjara. Tahun 1963 Kasman Singodimedjo ditahan Korps Inteligen di Kantor Polisi Komisariat Jakarta Pusat, juga pernah ditahan selama dua tahun enam bulan atas tuduhan menyelewengkan Pancasila dan membahayakan Presiden Indonesia. Pada 25 Oktober 1982, Kasman Singodimedjo wafat di Jakarta. Di era Orde Baru, pada 12 Agustus 1992, Presiden Soeharto tidak mau memberikan Bintang Mahaputera kepadanya, sekalipun semua anggota BPUPKI dan PPKI lainnya mendapatkannya. Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Kasman Singodimedjo dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 10 November 2018 oleh pemerintah Republik Indonesia.

PRINSIP KASMAN SINGODIMEDJO: HIDUP ADALAH PERJUANGAN

Kasman Singodimedjo berjuang tanpa mengenal lelah. Perjuangan yang dilakukan dengan tujuan tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Perjuangannya itu bersumber dari iman yang kuat atas keberadaan Allah. Perjuangan yang dilakukan juga berasal dari pengalaman dan pengetahuannya selama beberapa waktu. Perjuangan yang

dikembangkan ialah melawan penjajahan, yang dinilainya tidak adil dan tidak manusiawi. Oleh karena itu, penjajahan dalam bentuk apapun harus dilawan. Perlawanan juga berlaku terhadap segala bentuk ketidakadilan, kecongkakan, dan kesombongan yang membuat rakyat tidak sejahtera. Selain itu, Kasman Singodimedjo juga memperjuangkan persatuan Indonesia dengan segala diplomasi dan kekuatannya, meskipun tidak berhasil untuk meletakkan agama Islam, sebagai dasar negara.

Dalam hidupnya, Kasman Singodimedjo sungguh berjuang tanpa akhir. Ia sangat kritis terhadap segala situasi yang ada di sekitarnya dan yang sedang dihadapinya. Ia tidak puas akan apa yang telah dilaksanakannya, sebelum seluruh rakyat hidup sejahtera. Perjuangan yang tidak mudah untuk diterimanya ialah ketika Kasman Singodimedjo harus melobi Ki Bagus Hadikusumo. Orang boleh bertanya, mengapa mesti Ki Bagus Hadikusumo yang dilobi? Mengapa justru bukan 9 anggota Perumus Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tercantum Jakarta Charter itu? Mengapa mesti Ki Bagus Hadikusumo, jawabannya sangat sederhana, sebab justru Ki Bagus Hadikusumo-lah yang mengemukakan pandangannya secara jelas dan tajam dalam Sidang BPUPKI. Ki Bagus Hadikusumo antara lain menyatakan, "Islam mengajarkan persatuan atas dasar persaudaraan yang kokoh; maka bangunlah negara di atas Dasar Islam. Tuan-tuan yang terhormat tentu saja tuan-tuan menghendaki Negara kita ini mempunyai rakyat yang kuat bersatu padu, erat persaudaraannya lahir dan batin. Kalau memang demikian, maka marilah kita bangun negara kita ini di atas dasar ajaran agama Islam untuk mencapai persatuan yang kokoh sebagaimana yang difirmankan oleh Allah: *"hendaklah kamu sekalian berpegang teguh dengan tali Allah (agama Islam) dan jangan kami bercerai-berai. Ingatlah akan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, yaitu dahulu kami bermusuhan-musuhan satu dengan yang lain tetapi sekarang Allah telah berkenan mempersatukan hati kamu sekalian. Sehingga dengan nikmat-Nya tadi kami dapat menjadi bersaudara seerat-eratnya"* (Ali Imran: 103). *"Dan hendaklah kamu sekalian bertolong-tolongan atas kebaikan dan taqwa kepada Allah"* (Q.S al Maidah: 3). Akhir pidatonya ditutup dengan" Maka

akan saya tutup pidato saya ini dengan mendoa kepada Allah, “Mudah-mudahan Negara Indonesia baru yang akan datang itu berdasarkan agama Islam dan akan menjadi negara yang tegak dan teguh serta kuat dan kokoh” (Hadikusumo, 2018).

Kasman Singodimedjo mengetahui dengan baik lubuk hati Ki Bagus Hadikusumo. Dengan tepat Mohammad Hatta memilihnya untuk melunakkan hati Ki Bagus Hadikusumo yang tetap mau agar Islam tetap menjadi dasar Negara Indonesia dan Jakarta Charter sebagai rumusan Pancasila. Tujuh kata yang ada dalam sila pertama itu menurut Mohammad Hatta harus diubah dengan rumusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Mohammad Hatta mengemukakan adanya utusan dari Indonesia Timur yang tidak mau bergabung dengan Indonesia, kalau tujuh kata dalam sila pertama itu tetap dipertahankan dalam Pancasila. Sila pertama yang berbunyi, “Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” saja. Alasan yang dipakai tidaklah lain daripada persatuan Indonesia. Justru alasan persatuan inilah yang diperjuangkan oleh Kasman Singodimedjo. Beberapa delegasi yang telah diutus oleh Soekarno dan Mohammad Hatta untuk menundukkan Ki Bagus Hadikusumo tidak berhasil. Inilah yang menjadi dasar pertimbangan sehingga pilihan terakhir jatuh pada Kasman Singodimedjo. Ia ditugaskan untuk melobi agar mau mengubah apa yang telah dihasilkan oleh Panitia Sembilan, yakni Jakarta Charter itu dengan rumusan yang lebih dianggap sempurna demi nusa dan bangsa Indonesia.

Kasman Singodimedjo menceritakan perjuangannya melobi Ki Bagus Hadikusumo pada 18 Agustus 1945, berkenaan dengan perubahan Sila Pertama dalam Jakarta Charter, “Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai berikut:

“Kiai, kemarin proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terjadi. Hari ini harus cepat-cepat ditetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar kita bernegara, dan masih harus ditetapkan siapa presiden dan lain sebagainya untuk melancarkan perputaran roda pemerintahan. Kalau

bangsa Indonesia, terutama pemimpin-pemimpinnya cekcok, lantas bagaimana?! Kiai, sekarang ini bangsa Indonesia kejeprit di antara yang tongol-tongol dan yang tingil-tingil. Yang tongol-tongol ialah balatentara Dai Nippon yang masih berada di bumi Indonesia dengan persenjataan modern. Adapun yang tingil-tingil (yang mau masuk kembali ke Indonesia) adalah sekutu termasuk di dalamnya Belanda, yaitu dengan persenjataan yang modern juga. Jika kita cekcok, kita pasti akan konyol. Kiai, di dalam rancangan Undang-undang Dasar yang sedang kita musyawarahkan hari ini tercantum satu pasal yang menyatakan bahwa 6 bulan lagi nanti kita dapat adakan Majelis Permusyawaratan Rakyat, justru untuk membuat Undang-Undang Dasar yang sempurna. Rancangan yang sekarang ini adalah rancangan Undang-Undang Dasar Darurat. Belum ada waktu untuk membikin yang sempurna atau memuaskan semua pihak, apalagi di dalam kondisi kejeprit! Kiai, tidakkah bijaksana jikalau kita sekarang sebagai umat Islam yang mayoritas ini sementara mengalah, yakni menghapus tujuh kata termaksud demi kemenangan cita-cita kita bersama, yakni tercapainya Indonesia Merdeka sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur, tenang tenteram, diridhai Allah SWT" (Panitia Peringatan 75 tahun, 1982).

Kasman Singodimedjo maju dengan yakin seyakinyakinnya berbicara dengan Ki Bagus Hadikusumo. Akhirnya, Bagus Hadikusumo menyetujui gagasan yang disampaikan oleh rekan sesamanya di Muhammadiyah itu. Sebagaimana dicanangkan oleh Soekarno sendiri bahwa Undang-Undang Dasar yang bakal disahkan itu sifatnya sementara dan setelah enam bulan akan disempurnakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Kasman Singodimedjo menerangkan perubahan yang diusulkan oleh Mohammad Hatta, tidak lain adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa" di hadapan KH. Abdul Wahid Hasyim dan Teuku Muhammad Hasan yang ikut dalam lobi itu yang dengan jelas artinya sebagai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Allah SWT. Kasman Singodimedjo menjelaskan, "Ketuhanan Yang Maha Esa" menentukan arti Ketuhanan dalam Pancasila. "Sekali lagi bukan Ketuhanan sembarang Ketuhanan, tetapi yang dikenal Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,"

kata Kasman Singodimedjo meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo. Dalam sebuah sidang resmi, Soekarno menyatakan secara tegas, "Nanti kalau kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat undang-undang yang lebih lengkap dan sempurna".

Dari pihak Ki Bagus Hadikusumo tidaklah mudah untuk menerima itu, tetapi karena yang melobi adalah sesamanya di Muhammadiyah, hatinya mengendor demi persatuan nasional dan persatuan dalam gerakan. Ki Bagus Hadikusumo sebagai Pemimpin Umum Pusat Muhammadiyah tidak mau melawan anak buahnya. Ia menerimanya, sekalipun yakin bahwa pendapatnya yang bakal menang. Ki Bagus Hadikusumo tidaklah otoriter dan mau menang sendiri. Ia tidak mau melukai Kasman Singodimedjo yang berjuang demi persatuan nasional, namun ia yakin bahwa pendapatnya tetap sulit dari kesalahan, karena jalan Allah. Jalan Allah tidak akan salah. Berbeda dengan pihak Kasman Singodimedjo yang yakin akan pandangan Soekarno, yang menyatakan bahwa dalam waktu enam bulan akan dibuat undang-undang yang lebih sempurna. Kasman Singodimedjo mengengangkannya bahwa:

"Hanya dengan kepastian dan jaminan 6 bulan lagi sesudah Agustus 1945 itu akan dibentuk sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis pembuat Undang-Undang Dasar Negara guna memasukkan materi Islam itu ke dalam undang-undang dasar yang tetap, maka bersabarlah Ki Bagus Hadikusumo itu untuk menanti".

Apa yang dinantikannya ternyata tidak terjadi, sampai dengan wafatnya Ki Bagus Hadikusumo. Perubahan Undang-Undang Dasar baru dilaksanakan di era Reformasi, tetapi kembali ke Jakarta Charter tidaklah mungkin terjadi. Kondisi ini membuat Kasman Singodimedjo menyesal, bahkan ia sampai meneteskan air mata. Ia menyesal dalam seluruh hidupnya karena telah membujuk pemimpinnya sendiri, yakni Ki Bagus Hadikusumo. Harapannya tidak terlaksana dan kehendaknya pun tidak kunjung terealisasikan dalam kehidupan politik Indonesia. Akan tetapi, Kasman Singodimedjo tetap yakin bahwa hidupnya

tetap berarti dan aktivitas politiknya memberikan makna yang kritis kepada generasi selanjutnya, sekalipun dasar negara yang “islami” tidak terlaksana.

Ki Bagus Hadikusumo diyakinkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Kasman Singodimedjo benar dan akan dilaksanakan. Akan tetapi, ketika Kasman Singodimedjo sendiri ikut menjadi anggota Konstituante, yang harus mengubah Konstitusi, ternyata harapan tersebut tidak terlaksana. Kasman Singodimedjo pada tanggal 2 Desember 1957 pada Sidang Konstituante antara lain menyampaikan dalam pidatonya bersemangat sekali bagaikan mengemukakan pengalaman rohani politisnya.

“Saudara Ketua, saya masih ingat, bagaimana ngototnya almarhum Ki Bagus Hadikusumo Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah yang pada waktu itu sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempertahankan agama Islam untuk dimasukkan ke dalam muqaddimah dan Undang-Undang Dasar 1945. Begitu ngotot Saudara Ketua, sehingga Bung Karno dan Bung Hatta tidak dapat mengatasinya sampai-sampai Bung Karno dan Bung Hatta menyuruh Mr. TM Hassan sebagai putera Aceh menyantuni Ki Bagus Hadikusumo guna menentramkannya. Hanya dengan kepastian dan jaminan bahwa 6 bulan lagi sesudah Agustus 1945 itu akan dibentuk sebuah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Majelis Pembuat Undang-undang Dasar Negara guna memasukkan materi Islam itu ke dalam Undang-undang Dasar, yang tetap, maka bersabarlah Ki Bagus Hadikusumo untuk menanti”.

“Saudara Ketua, kini Juru Bicara Islam Ki Bagus Hadikusumo itu telah meninggalkan kita untuk selamanya, karena telah berpulang ke Rahmatullah. Beliau telah menanti dengan sabarnya, bukan menanti 6 bulan seperti yang telah dijanjikan kepadanya. Beliau menanti, ya menanti sampai wafatnya. Beliau kini tidak dapat lagi ikut serta dalam Dewan Konstituante ini untuk memasukkan materi Islam ke dalam UUD yang kita hadapi sekarang ini”

.....“Gentlemen’s agreement itu sama sekali tidak bisa dipisahkan dari “janji” yang telah diikrarkan oleh Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu kepada kami golongan Islam yang berada dalam panitia tersebut. Di dalam hal ini, Dewan Konstituante yang terhormat dapat memanggil Mr. TM Hassan, Bung Karno, dan Bung Hatta sebagai saksi mutlak yang masih hidup guna mempersaksikan kebenaran uraian saya ini”.

.... “Saudara Ketua, jikalau dulu pada tanggal 18 Agustus 1945 kami golongan Islam telah di-*fait-a-compli* dengan suatu janji dan/atau harapan dengan menantikan waktu 6 bulan, menantikan suatu Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk membuat Undang-Undang Dasar yang baru dan permanen. Saudara Ketua, janganlah kami golongan Islam di Dewan Konstituante sekarang ini di-*fait-a-compli* lagi dengan anggapan-anggapan semacam: Undang-undang Dasar Sementara dan Dasar Negara tidak boleh diganggu-gugat, sebab *fait-a-compli* semacam itu sekali ini, Saudara Ketua, hanya akan memaksa dada meledak!”

Perjuangan Kasman Singodimedjo ini tidak terhenti di situ. Sekalipun sebagai anggota komite tidak berhasil menghasilkan apa yang dicita-citakan, namun perjuangannya tiada henti sampai menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kasman Singodimedjo berkeinginan besar, sebagaimana Ki Bagus Hadikusumo canangkan bahwa Negara Indonesia ini berdasarkan agama Islam, namun Konstituante yang diberi wewenang ternyata tidak mampu untuk mewujudkannya. Perjuangannya bersama dengan Ki Bagus Hadikusumo dapat dikatakan belum berhasil atau gagal di tengah jalan. Ia pun merasa dikhianati oleh Soekarno, yang semula menjanjikan dalam enam bulan setelah kemerdekaan, Undang-Undang Dasar itu akan disempurnakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dalam kenyataannya, setelah *deadlock* di Konstituante, justru Presiden Soekarno sendiri yang mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juni 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan rumusan Pancasila sebagaimana aslinya yang disahkan tahun 1945 berlaku lagi. Hal ini, di era Orde Baru akan diperkuat dengan tekad perjuangan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila secara murni dan konsekuen. Hal ini semakin kuat dengan lahirnya P4 (Pedoman Penghayatan

dan Pengamalan Pancasila), yang dalam percaturan politik Indonesia sangat berpengaruh dengan adanya penataran di seluruh levelnya. Undang-Undang Dasar 1945 baru mendapat amandemennya di era Reformasi, yang memang dari dalamnya sendiri menghendaki adanya perubahan dan penyempurnaan demi kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri republik ini.

PERJUANGAN KASMAN SINGODIMEDJO SELANJUTNYA

Pemilihan yang tidak gampang diikuti oleh Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo. Sebab, dalam rangka mendirikan negara, demi persatuan dan kesatuan, pendapat diri mereka yang sebenarnya sangat penting namun dinomorduakan. Ini pun kemudian, yang nomor dua itu ditutup oleh penguasa sendiri sehingga apa yang pernah dicanangkan dan dicita-citakan hilang tanpa realisasi khususnya dalam kehidupan politik secara nyata. Bukan hanya itu, yang menjadi persoalan di sini ialah apa yang dicita-citakan oleh Ki Bagus Hadikusumo justru telah dirumuskan oleh para tokoh anggota BPUPKI dan Soekarno menjanjikan bahwa dalam waktu enam bulan akan diadakan perubahan untuk menyusun dan menyempurnakan Undang-Undang Dasar. Ternyata, janji tersebut hanya janji dan tidak direalisasikan. Bahkan, ketika akan diadakan perubahan dan sedang proses di Konstituante, justru Soekarno menghentikannya hingga terbit Dekrit Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, rumusan Jakarta Charter yang mau dikembalikan atau hukum Islam yang diperjuangkan oleh Ki Bagus Hadikusumo hanya menjadi kenangan sejarah.

Memang tidak mudah memahami sejarah yang demikian itu. Perjuangan untuk meletakkan dasar Islam menjadi tidak terlaksana dan yang telah dirumuskan dianggap sudah islami, apalagi bila keputusan itu berdampingan dengan segi perpecahan, khususnya menyangkut persatuan dan kesatuan. Sekalipun Kasman Singodimedjo menyesal seumur hidup, namun ada faedah bagi negara ini. Tidaklah mudah mengambil suatu keputusan di saat yang sangat kritis ketika itu. Pemikiran dan kesiapsediaan Ki Bagus Hadikusumo sangat besar.

Kesiapsediaan Kasman Singodimedjo pun demikian, yang dilakukannya juga demi kepentingan nusa dan bangsa. Hanya saja, pemikiran tersebut dapat disalah-artikan dan sengaja disalah-gunakan oleh mereka yang menentangnya. Akibatnya, Kasman Singodimedjo dapat menjadi “korban” atau bahkan dilupakan. Kasman Singodimedjo, sebagai anggota PPKI tidak mendapat penghargaan dari Presiden Soeharto. Ia tidak dilihat sebagai orang yang berjasa, meskipun Kasman Singodimedjo merupakan salah satu peletak dasar lahirnya Tentara Nasional Indonesia, dan Soeharto justru menjadi jendral Tentara Nasional Indonesia.

Segala yang menjadi pemikiran pribadi Kasman Singodimedjo disingkirkan demi kesejahteraan nusa dan bangsa. Rakyat dipikirkan dan diutamakan, sekalipun dirinya dilupakan, kurang dan bahkan tidak dihargai. Pejuang Kasman Singodimedjo tetap kritis, teguh dan kokoh kuat, tidak luntur oleh arus jaman yang hedonis ini. Basis perjuangan Kasman Singodimedjo adalah kepentingan rakyat yang harus hidup sejahtera yang berdasarkan pada ajaran Islam. Perjuangan Kasman Singodimedjo agar Islam menjadi dasar negara Indonesia, adalah (1) Islam mendasarkan musyawarah untuk demokrasi; (2) dalam Islam, bertanggungjawab kepada Allah menjadi hal yang prinsipil; (3) kemerdekaan lahir batin ditegakkan, dan konsekuensinya penjajahan tidak boleh ada di bumi ini; (4) kemiskinan harus diberantas; (5) kesejahteraan harus terjadi; (6) dan kesetaraan di hadapan hukum merupakan hak mendasar bagi seluruh warga. Keenam hal ini diperjuangkannya sampai menghembuskan nafas terakhir.

Tentu saja, pilihan sikap ini sangat dipengaruhi oleh pemikirannya sebagai anggota resmi Muhammadiyah. Kasman Singodimedjo sendiri pernah menulis bahwa: “Sejak saat itu saya tidak pernah absen di dalam Muhammadiyah, bahkan dari anggota biasa dan meningkat menjadi guru, sampai propaganda Muhammadiyah, kemudian meningkat lagi menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Betawi sampai menjadi anggota Pusat Pimpinan Muhammadiyah sampai bertahun-tahun, saya juga pernah masuk dalam tahanan penjara Hindia Belanda sampai

berbulan-bulan di Bogor, karena saya ingin berjuang membela cita-cita Muhammadiyah” (Kasman Singodimedjo, 1978).

SIMPULAN

Kasman Singodimedjo adalah pejuang yang benar-benar tidak memperhatikan dirinya. Ia berjuang tanpa mengenal lelah demi kesejahteraan dan persatuan serta kesatuan Indonesia, sekalipun harus mengorbankan diri atau dikorbankan oleh pihak lain. Sikapnya yang tetap kritis dapat menjadi teladan bagi generasi bangsa untuk melihat kecerahan hidupnya yang luar biasa. Kasman Singodimedjo tetaplah hidup di hati bangsa Indonesia. Sekalipun dirinya tidak jarang dibenci oleh para pemimpin atau rekannya sendiri yang tidak sejalan dengannya, namun semangat Kasman Singodimedjo tidak pernah lekang oleh waktu. Ia adalah pejuang yang tidak mengenal lelah, siap menjadi pendamai, dan mau supaya agama Islam menjadi dasar Negara Indonesia. Meskipun Kasman Singodimedjo mendapat perlakuan yang kurang baik di era kolonial Belanda, era kepemimpinan Presiden Soekarno, dan tidak dihargai oleh Presiden Suharto, namun ia dianugerahi Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo. Anugerah ini merupakan bentuk penghargaan negara terhadap seorang tokoh yang gigih berjuang untuk bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar, Saafroedin et al (ed). 1992. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 - 19 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Benda, H.J. 1983. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*. Leiden: Foris Publication.
- Boland, B.J. 1971. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.

- Budiyanto, Gunawan, Hasse J, Mega Hidayati dan Achmad Nurmandi (eds.). 2018. *Konstruksi Pemikiran Politik Ki Bagus Hadikusumo: Islam, Pancasila, dan Negara*. Yogyakarta: Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik UMY - The Phinisi Press.
- Hadikusumo, Djarnawi. 1979. *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup Perjuangan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*. Yogyakarta: Persatuan.
- Hadikusumo, Ki Bagus. t.t. *Islam sebagai Dasar Negara dan Akhlak Pemimpin*. Yogyakarta: Pustaka Rahayu.
- Hatta, Mohammad. 1982. *Sekitar Proklamasi*. Jakarta: Tintamas.
- Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, 1982, *Hidup itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Singodimedjo, Kasman. 1978. *Masalah Kedaulatan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Syafii Maarif, Ahmad. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES. 🌟

“NASIONALISME CEMPLANG”
MEMBACA KEMBALI PESAN-PESAN
KASMAN SINGODIMEDJO DI DEPAN
JONG ISLAMIETEN BOND

Siswanto Masruri

PENDAHULUAN

Di Indonesia, sejak awal kemerdekaan hingga sekarang ini, telah muncul dua kelompok besar: Islam dan nasionalis, yang masing-masing mengklaim sebagai kelompok paling religius tetapi nasionalis atau paling nasionalis tetapi religius. Klaim-klaim seperti itu sah-sah saja tergantung kenyataannya. Jika realitanya berbeda, sebagaimana paradigma Kasman Singodimedjo, tentu dapat disebut sebagai “nasionalis cemplang”. Nasionalis cemplang, menurutnya, adalah sekelompok masyarakat, khususnya kaum intelektual atau lainnya, yang jelas-jelas telah jauh dari rakyat. Pendapatnya ini disampaikan di depan kaum intelektual yang tergabung dalam *Jong Islamieten Bond*. Organisasi ini sering menggunakan dua bahasa: ke dalam, mengadakan pembaharuan dengan pikiran-pikiran Barat, dan ke luar, membawa bendera Islam untuk menahan gelombang yang datang dari Barat. Jadi, nasionalisme cemplang itu bukan karena sangat religius kemudian dituduh tidak nasionalis atau karena sangat nasionalis kemudian dianggap kurang religius. Itulah sebabnya, sejalan dengan Kasman Singodimedjo, Sutan Syahrir pada tahun 1937 menolak memilih antara Barat yang kapitalistis atau Timur yang menghamba-hamba dan tidak membagi dunia ke dalam dua blok tradisional, Barat dan Timur, tetapi

antara kekuatan demokratis melawan kekuatan fasis dengan mengatakan “Kita adalah kaum internasionalis dengan suatu pengertian yang tepat mengenai nasionalisme”.

Setelah 74 tahun merdeka, berkat nasionalisme, Indonesia masih tegak berdiri dan berperan aktif dalam percaturan global. Jika Sutan Syahrir (1952) lebih *outward looking*, Kasman Singodimedjo (1925) lebih *inward looking* dalam melihat nasionalisme. Label cemplang dalam konteks nasionalisme mengemuka darinya karena meskipun bersemboyan dengan identitas nasional dan cinta tanah air, namun kaum intelektual ketika itu memiliki jarak yang lebar dengan rakyat. Jarak yang lebar itu disebabkan oleh beberapa hal seperti bahasa, gaya hidup, dan buta terhadap hati nurani rakyat. Oleh karena itu, agar jarak tersebut tidak semakin lebar, Kasman Singodimedjo mengajak kaum intelektual untuk “kembali kepada rakyat” melalui pengembangan nasionalisme, keteladanan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kependuan, dan kewanitaan.

Ajakan Kasman tersebut disampaikan di depan kaum intelektual Islam yang tergabung dalam *Jong Islamieten Bond*, sebuah organisasi kader, yang ikut melahirkan tokoh-tokoh modernis Islam Indonesia. Kaum modernis berusaha mengakomodir nilai-nilai Barat dalam ajaran Islam, seperti demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan *rule of law*. Semangat mendalami Islam secara kritis yang dilakukan oleh mereka yang berpendidikan Barat tetapi berorientasi Islam (anggota *Jong Islamieten Bond* konon tidak ada yang berasal dari pesantren. Sebagaimana diketahui, organisasi ini lahir pada zaman “melawan” (*fight against*), bukan pada zaman “membangun” (*fight for*). Itulah sebabnya, ketika memimpin Masyumi, mereka justru lebih dekat dengan kaum intelektual lain yang tergabung dalam grup sosialis, Kristen, dan Katolik daripada dengan golongan Islam “tradisional” dikarenakan mereka lebih mudah mengadakan kontak intelektual dengan kelompok-kelompok tersebut.

BIOGRAFI SINGKAT KASMAN SINGODIMEDJO

Kasman Singodimedjo lahir di Purworedjo Jawa Tengah pada tanggal 25 Februari 1904 dan meninggal dunia di Jakarta

pada tanggal 25 Oktober 1982 dalam usia 78 tahun. Pada masa pendudukan Jepang, Kasman Singodimedjo merupakan komandan tentara Pembela Tanah Air (PETA) Jakarta. Salah satu peran penting Kasman Singodimedjo dalam kemerdekaan Indonesia adalah ketika ia bertanggungjawab terhadap pengamanan pembacaan naskah Proklamasi Kemerdekaan RI. Menjelang kemerdekaan, ia didapuk sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ia termasuk dalam 6 (enam) anggota PPKI tambahan saat Presiden Soekarno menambah jumlah anggota PPKI dari 21 menjadi 27 orang. Semasa menjadi anggota PPKI, ia berperan dalam penghapusan tujuh kata dalam naskah pembukaan UUD 1945. Tujuh kata-kata tersebut yakni, “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Ketika ada usulan dari perwakilan Indonesia Timur agar tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapus dari Pembukaan UUD 1945, salah seorang dari golongan Islam yang diwakili Ki Bagus Hadikusumo menolak usulan tersebut. Sebab, tujuh kata tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama yang telah dicapai pada rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam momen kebuntuan itulah, Kasman Singodimedjo hadir sebagai pemersatu antara golongan Islam dan nasionalis. Ia yang berasal dari Muhammadiyah dipercaya oleh Soekarno dan Hatta untuk meluluhkan hati Ki Bagus Hadikusumo untuk menerima usulan penghapusan tujuh kata terkait syari’at Islam. Kasman Singodimedjo memang diakui sebagai pembujuk tokoh Islam lain agar tujuh kata dihilangkan untuk menghormati perwakilan Indonesia timur tersebut.

Dalam konteks perpolitikan di Indonesia, pada masa awal-awal kemerdekaan, Prawoto Mangkusasmito juga pernah menulis bahwa semua tekanan psikologis tentang hasil atau tidak berhasilnya penentuan Undang-Undang Dasar berada di atas pundak Ki Bagus Hadikusumo sebagai satu-satunya eksponen perjuangan Islam saat itu. Pernyataan demikian memang benar, tetapi jika diamati secara kronologis sejak beberapa kali sidang BPUPKI sampai sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945,

maka sebenarnya, usaha dan peran Ki Bagus Hadikusumo itu sudah sangat maksimal karena persoalan “proses” itulah yang di kemudian hari justru lebih utama dan lebih banyak menjadi perhatian para pengamat daripada “hasilnya” yang dianggap final. Hanya, kalau Prawoto menganggap “proses” tersebut sebagai suatu hal yang menimbulkan “pertanyaan sejarah” memang sangat wajar. Itulah sebabnya, berdasarkan kajian sejarah yang ditulis beberapa waktu kemudian, ternyata “proses” dan “hasil” akhirnya tidak harus berada di tangan Ki Bagus Hadikusumo, tetapi karena adanya unsur lain yang ikut berperan pada saat-saat persiapan Proklamasi.

Persoalan yang mendasar sebenarnya adalah apakah alasan dan jawaban Hatta yang dikemukakan beberapa waktu kemudian cukup memiliki data akurat dan historis? Masalah ini perlu dimunculkan karena yang dikemukakan Hatta ternyata sangat berbeda dari yang disampaikan Kasman Singodimedjo dan Djarnawi Hadikusuma. Sekalipun demikian, keterangan Hatta telah didukung oleh Teuku Muhammad Hasan beberapa waktu yang lalu ketika memberikan keterangan di Masjid Istiqlal Jakarta. Atas dasar ini, Prawoto berulang kali mempertanyakan bahwa apa pun alasan yang membawa kepada keputusan final PPKI, yang jelas, hasilnya sangat mengecewakan umat Islam. Prawoto berpendapat bahwa prosedur yang ditempuh PPKI-lah, yang di kemudian hari menumbuhkan benih-benih pertentangan sikap dan pemikiran yang tidak kunjung berhenti. Apalagi, janji-janji Soekarno dan Kasman Singodimedjo tidak kunjung terpenuhi. Itulah sebabnya, berbagai fitnah yang sangat merugikan bangsa dan negara menjadi subur. Demikian pula, persoalan yang terus-menerus dihadapi adalah “apakah dapat dipertanggungjawabkan untuk menganggap hasil PPKI itu sebagai sesuatu yang *ma'shum* dan harus dipertahankan sepanjang masa?”

Selain itu, adanya perubahan orientasi umat Islam dari hal-hal yang bersifat politis ke masalah-masalah intelektual, maka sekalipun peristiwa 18 Agustus 1945 dipandang oleh sebagian orang sebagai “kekalahan politik” wakil-wakil umat Islam, tetapi “proses” di atas lah kiranya yang mendorong Menko Kesra

Alamsyah Ratuperwiranegara (almarhum) untuk menyebutnya sebagai “pengorbanan umat Islam” dalam menyusun Pancasila. Tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, dengan demikian, harus dipandang sebagai salah seorang arsitek Pancasila. Sebagai bentuk konvergensi nasional dalam peringkat formal-konstitusional, rumusan ideologi negara Pancasila ternyata telah menunjukkan efektivitasnya sebagai penopang Republik ini. Pancasila memang telah mampu mempertahankan, baik kesatuan maupun kemajemukan Indonesia secara dinamis. Sekalipun ia tidak mampu menciptakan integrasi sosial yang sepenuhnya, namun paling tidak, ia telah mampu mencegah disintegrasi sosial yang total. Pernyataan Alamsyah tersebut, bila ditinjau dalam konteks politik kontemporer Indonesia, barangkali dapat diartikan sebagai usaha untuk meyakinkan pihak-pihak tertentu bahwa loyalitas umat Islam kepada Pancasila tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan demikian, tuduhan-tuduhan yang biasa dialamatkan kepada umat Islam sebagai anti Pancasila tampaknya tidak perlu muncul kembali (Masruri 2005).

Kasman Singodimedjo, tokoh yang dikenal dari organisasi Muhammadiyah (Noer 1987, 265), juga ikut membentuk Partai Islam Indonesia di Surakarta pada saat masih muda bersama KH. Mas Mansur, Farid Ma’ruf, Sukiman, dan Wiwoho Purbohadidjojo. Momen itu sekaligus membuktikan dirinya sebagai eksponen golongan Islam. Selanjutnya, ia juga terpilih menjadi Ketua Muda Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Setelah kemerdekaan Indonesia, ia diangkat menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada tanggal 29 Agustus 1945 dalam parlemen pertama Indonesia. KNIP merupakan cikal-bakal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang. Iajuga pernah menjadi Jaksa Agung pada periode 1945-1946. Saat itu, ia menggantikan Gatot Taroenamihardja. Sepak terjangnya sebagai Jaksa Agung dikenal saat mengeluarkan Maklumat Jaksa Agung Nomor 3 Tanggal 15 Januari 1946 yang ditujukan kepada para Gubernur, Jaksa, dan Kepala Polisi untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang selalu menyelenggarakan pengadilan yang cepat dan tepat (Hakim 2016; Rahayu 2018).

Dalam dunia politik, menurut Kasman Singodimedjo, perseteruan adalah hal yang lumrah. Bahkan, seringkali terjadi dalam momen-momen yang genting. Sejarah Indonesia pun tidak lepas dari perseteruan politik. Dalam situasi demikian, selalu hadir sang pemersatu. Kasman Singodimedjo adalah salah satunya. Kiprahnya di dunia pergerakan dimulai sejak dirinya aktif di Muhammadiyah. Pada tahun 1925, ia juga menjadi salah satu tokoh sentral di *Jong Islamieten Bond*, sebuah perkumpulan pemuda Islam yang menjadi cikal bakal organisasi pergerakan lainnya. Sejalan dengan namanya, Kasman Singodimedjo dikenal sebagai “Singa”, “Pelobi Ulung”, “Penyelamat Republik” yang nyaris tidak akan lahir karena perpecahan di BPUPKI. Kasman Singodimedjo berhasil melobi dan menengahi tarik-menarik simbolik yang sesungguhnya tidak meniadakan substansi yang dikandungnya. Penggantian tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan Ketuhanan yang Maha Esa merupakan langkah cerdas Kasman Singodimedjo yang di kemudian hari terbukti mampu menghindarkan Islam dari kepentingan-kepentingan politik partisan. Hal demikian juga menguatkan kematangan umat Islam untuk memiliki *self control* dalam melaksanakan Syariat secara mandiri tanpa perlu kontrol negara. Kematangan inilah yang mampu mewujudkan negosiasi harmonis Islam dan demokrasi pada masyarakat Muslim terbesar di dunia tanpa terjebak dengan politik identitas keagamaan.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Kasman Singodimedjo¹ oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 semakin mengokohkan pengakuan Negara Republik Indonesia atas peran dan sumbangsih Muhammadiyah melalui Pahlawan Nasional dari Muhammadiyah seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman, KH. Ahmad Dahlan, Nyai Walidah Dahlan, dan Ki Bagus Hadikusumo, serta Kahar Muzakkir dalam

1 Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 Nopember 2018 tahun lalu, Presiden Joko Widodo memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada 8 (enam) tokoh. Pemberian gelar Pahlawan Nasional tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 123/TK/TAHUN 2018 Tanggal 6 Nopember 2018 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Di antara keenam tokoh yang diberikan gelar Pahlawan Nasional tersebut adalah Kasman Singodimedjo.

memperjuangkan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.

PERGERAKAN KASMAN SINGODIMEDJO

Politik Etis (edukasi, irigasi, dan transmigrasi) pemerintah Kolonial Belanda telah memberi peluang kepada anak-anak Bumi Putera untuk memasuki lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kesempatan yang diberikan tidak terbuka lebar untuk seluruh anak bangsa Indonesia karena hanya diberikan kepada *the selected few*, yakni mereka yang berasal dari keluarga *pangreh praja* atau mereka yang berdarah biru (kaum bangsawan). Namun demikian, Politik Etis tersebut pada akhirnya menguak dimensi baru Pergerakan Nasional bangsa Indonesia, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada pergerakan pemudanya yakni “Ikatan Pemuda Islam” atau “*Jong Islamieten Bond*” (Saidi, 1984: 26–27). Sebenarnya, pergerakan pemuda pertama yang didirikan adalah “Budi Utomo” (20 Mei 1908). Sungguhpun perkumpulan ini akan segera menjadi perkumpulan kaum tua, sebagian dari promotornya ketika itu adalah para pemuda, murid beberapa sekolah menengah (misalnya, R. Sutomo dan R. Gunawan Mangunkusumo). Sementara itu, cita-cita melangsungkan Pergerakan Nasional untuk tanah Jawa muncul dari M. Wahidin Sudiro Husodo, seorang dokter pensiunan yang merasa tidak puas dengan keadaan bangsa dan tanah airnya sendiri. Maka dari itu, kongres pertama “Budi Utomo” (5 Oktober 1908) menunjukkan bahwa perkumpulan tersebut tampaknya bukan perkumpulan kaum muda, tetapi perkumpulan kaum tua (Basri, 1977: 194).

Dalam perkembangannya, kaum muda merasa tidak puas dengan “Budi Utomo” yang cenderung menjadi perkumpulan kaum tua. Para pemuda semakin sadar bahwa mereka harus memiliki perkumpulan sendiri demi masa depan mereka. Itulah sebabnya, pada tanggal 7 Maret 1915, dr. R. Satiman Wiryosanjoyo, Kadarman, Sunardi serta beberapa pemuda lainnya di Jakarta bermufakat mendirikan perkumpulan pemuda dengan anggota yang terdiri dari anak-anak sekolah menengah di Pulau Jawa dan Madura. Perkumpulan ini diberi nama “Tri Koro Darmo” dan

merupakan perkumpulan pemuda pertama yang sesungguhnya. Tujuan perkumpulan ini adalah untuk mencapai Jawa Raya dengan jalan memperkokoh rasa persatuan antarpemuda Jawa, Madura, Sunda, Bali, dan Lombok. Perkumpulan Jawa ini memiliki semboyan: “sakti”, “budi”, dan “bakti” dengan asas sebagai berikut:

1. Menimbulkan pertalian antara murid-murid Bumi Putera pada sekolah menengah dan kursus perguruan kejuruan/sekolah vak;
2. Menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya;
3. Membangkitkan dan mempertajam perasaan buat segala bahasa dan budaya Indonesia (Basri 1977, 195).

Mengingat perkumpulan ini bersifat Jawa-Sentris, maka para pemuda yang bukan Jawa (Madura, Sunda, Bali, dan Lombok) merasa kurang senang dan untuk menghindari perpecahan, kongres yang diselenggarakan di Solo (12 Juni 1918) menetapkan dan mengubah namanya menjadi “Jong Java”. Para pemuda Muslim ketika itu banyak yang menjadi anggota dan bahkan pada kongres Jong Java yang keenam, R. Sjamsuridjal terpilih sebagai ketuanya.

Di samping perkumpulan pemuda tersebut, perlu dikemukakan bahwa pada tahun 1920-an, pandangan “kaum muda terpelajar” bangsa Indonesia tentang agama Islam dapat dikatakan tidak diwarnai oleh suatu pengertian dan penghargaan yang wajar. Mereka mendapatkan pendidikan dan pelajaran melalui lembaga-lembaga pendidikan Belanda. Selain lembaga pendidikan model Barat, sejak zaman dahulu, di Indonesia sebenarnya sudah ada lembaga-lembaga pendidikan tradisional. Karena terbawa oleh keadaan pada saat itu, maka tidak saja ada pandangan, tetapi juga paksaan keadaan bahwa seseorang yang ingin maju harus mengikuti pendidikan dan pelajaran yang diselenggarakan oleh pihak penjajah atau yang setara dengan model itu (Roem, 1982: 20). Sekolah atau lembaga pendidikan yang harus ditempuh ketika itu adalah HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) yang merupakan pendidikan terendah dan yang memakan waktu 7 tahun. Tamatan sekolah ini sudah bisa menjadi jalan guna mencari penghidupan yang layak. Sekolah terendah

semacam itu kemudian dapat dilanjutkan dengan sekolah MULO (*Meer Utigrebreid Lager Onderwis*) yang setingkat dengan SMP dan memakan waktu 3 tahun. Adapun tingkat pendidikan yang di atasnya adalah AMS (*Algemene Middelbare School*) yang setingkat dengan SMA dan memakan waktu pendidikan 3 tahun pula (Roem, 1982) .

Di setiap kabupaten ketika itu, terdapat HIS yang mempunyai murid kurang lebih 250 orang. Sementara itu, sekolah-sekolah MULO dan AMS memang sangat sedikit jumlahnya. Bahkan, untuk jenis perguruan tinggi pada tahun dua puluhan itu hanya ada satu yakni THS (*Technische Hoge School*), yang kemudian, pada tahun 1924 disusul dengan berdirinya RHS (*Rechts Hoge School*). Sedangkan sekolah dokter yang sudah ada terlebih dahulu, meskipun lebih tinggi dari AMS, secara teknis belum merupakan fakultas dalam pengertian sekarang dan *Medische Hoge School* baru didirikan pada tahun 1927. Angka-angka tersebut, menurut Mohammad Roem, bukan merupakan angka-angka (yang eksak) melainkan hanya sebagai taksiran pribadi. Taksiran demikian menggambarkan betapa kecilnya jumlah bangsa Indonesia yang mendapat pendidikan rendah, menengah, dan tinggi dalam perspektif Barat. Jumlah tersebut memang bertambah sedikit pada tahun tiga puluhan dengan usaha bangsa sendiri yang mendirikan sekolah-sekolah swasta ala Barat.

Sejak di sekolah rendah sampai sekolah yang lebih tinggi, bahasa Belanda selalu menjadi bahasa pengantar. Bahasa Belanda juga merupakan pelajaran pokok untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan, kemampuan seseorang dalam bahasa tersebut dipergunakan sebagai ukuran untuk diberi pekerjaan dan kedudukan dalam masyarakat. Bahasa Belanda dan beberapa cabang ilmu pengetahuan umum menjadi perhatian pemerintah. Sementara itu, masalah pendidikan agama Islam tidak mendapat perhatian sama sekali. Oleh karena itu, bagi murid-murid MULO dan AMS yang beragama Islam sudah barang tentu menghadapi persoalan yang cukup serius mengenai pendidikan agama mereka. Sebagai murid MULO dan AMS, mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk belajar di madrasah dan mereka juga tidak diberi pelajaran agama Islam. Bahkan, para guru kolonial

kadang-kadang suka melontarkan kata-kata sinis terhadap Islam dan ajarannya.

Sjamsuridjal yang telah terpilih sebagai ketua *Jong Java* rupanya menghayati benar persoalan tersebut. Itulah sebabnya, pada kongres *Jong Java* ketujuh di penghujung tahun 1924, ia mencoba melontarkan gagasannya agar *Jong Java* melaksanakan kegiatan membuka kursus agama Islam bagi para anggota yang Muslim dan tidak keberatan untuk membuka kursus agama lain bagi anggota yang memeluk agama lain. Ia mengusulkan agama Islam karena merupakan agama mayoritas rakyat, yang di kemudian hari, mereka itu dipimpin oleh bekas-bekas anggota *Jong Java*. Demikian pula karena Sjamsuridjal mengakui bahwa mempelajari agama Islam bagi kaum muda terpelajar adalah sesuatu yang sangat penting. Namun, usul tersebut ditolak dan bahkan ia dituduh menyelewengkan *Jong Java* dan bermain politik di dalamnya (Roem 1982, 21). Menurut Mohammad Roem, penolakan atas usul Sjamsuridjal itu dapat dianggap sebagai “*blessing in disguise*” karena, kalau usul tersebut diterima, *Jong Islamieten Bond* itu tidak akan lahir.

Kongres-kongres para pemuda ketika itu mendapat perhatian kaum tua. Sjamsuridjal sendiri mencoba meminta nasihat kepada mereka (kaum tua) tentang masalah perlunya pembentukan organisasi pemuda yang beragama Islam. Ada tiga orang yang dihubungkannya, yaitu KH. Ahmad Dahlan, HOS Tjokroaminoto, dan H. Agus Salim. Mereka semua merestui dan memang tidak sulit untuk menyebut ayat al-Qur’an serta Hadis Nabi bahwa mempelajari agama Islam itu adalah suatu kewajiban (Roem 1982). Akhirnya, sejumlah pemuda Islam (200 orang), baik murid MULO, AMS maupun tamatan sekolah-sekolah tersebut yang sudah bekerja (Saidi 1984, 26-27), atau yang berumur antara 14 sampai 35 tahun (Roem 1982, 22) sepakat mendirikan “Ikatan Pemuda Islam” yang lebih dikenal dengan nama *Jong Islamieten Bond* (selanjutnya disingkat JIB). Meskipun tanggal berdiri JIB 1 Januari 1925 (Saidi 1984, 28), namun secara resmi diproklamkan pada tanggal 1 Maret 1925 di Jakarta (Roem, 1982: 23) dengan R. Sjamsuridjal sebagai ketua pertamanya.

Latar belakang berdirinya JIB seperti diuraikan di atas ternyata sangat berbeda dengan apa yang dituturkan dalam dua buah buku sejarah yang masing-masing berjudul, *Sejarah Perjuangan Pemuda Indonesia*, yang disusun oleh sebuah tim bernama “Panitia Penyusunan Biro Pemuda Departemen P & K” yang dibentuk oleh Menteri P & K Prof. Priyono, dan buku *Sejarah Nasional Indonesia*, yang disusun oleh Sartono Kartodirjo, Marwati D. Pusponegoro, dan Nugroho Notosusanto, dengan Yusmar Basri sebagai editornya. Dalam buku pertama halaman 47 (yang dikutip oleh Ridwan Saidi) disebutkan bahwa:

“Dalam perkembangan organisasi pemuda pada tingkat pertama ini juga berlangsung proses penggolongan berdasarkan aliran agama. Pemuda yang beragama Islam, yang semula bergabung dalam *Jong Java* merasa dirinya lebih tepat kalau mendirikan organisasinya sendiri. Pemisahan ini antara lain disebabkan karena usul Raden Syam, ketua *Jong Java* pada waktu itu, untuk membagi anggota menjadi dua golongan (anggota muda dan anggota biasa) tidak dapat diterima. Sementara, dari pemuda-pemuda itu berusaha mendirikan organisasi yang berdasarkan kepercayaan Islam” (Saidi, 1984: 27).

Selanjutnya, dalam buku kedua disebutkan bahwa:

“Perkembangan gerakan politik ternyata juga menyeret *Jong Java* sehingga masalah ini menjadi hangat dalam kongres ketujuh tahun 1924. Ada usul supaya *Jong Java* tetap tidak dijadikan perkumpulan politik, tetapi, kepada para anggota yang sudah cukup dewasa diberi kebebasan berpolitik. Sikap ini disokong oleh H. Agus Salim yang mencoba memasukkan soal agama dalam *Jong Java* dengan pendapat bahwa soal agama ini adalah sangat besar pengaruhnya dalam mencapai cita-cita. Usul ini ditolak, dan yang setuju berpolitik kemudian mendirikan JIB dengan agama Islam sebagai dasar perjuangan mereka” (Basri, 1977: 194).

Menurut Ridwan Saidi, yang menggunakan sumber kepustakaan berupa majalah sekitar tahun 30-an dan wawancara dengan tokoh-tokoh JIB yang masih hidup, kutipan dari kedua buah buku di atas mengandung kepalsuan dan pertentangan. Di satu pihak, dikatakan bahwa berdirinya JIB oleh karena usul

Sjamsuridjal mengenai klasifikasi keanggotaan yaitu anggota muda dan anggota biasa (di mana hanya anggota biasa yang dibenarkan secara pribadi terlibat dalam aktivitas politik) telah ditolak. Di lain pihak, mereka yang ditolak mendirikan organisasi berdasarkan Islam. Bahwa Sjamsuridjal kemudian mendirikan organisasi yang bermaksud memajukan Islam adalah benar. Akan tetapi, hal itu tidak disebabkan karena penolakan usulnya mengenai klasifikasi keanggotaan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan persoalan keislaman. Dalam hal ini, perlu ditambahkan pula bahwa kendatipun JIB berdiri, namun para pemuda Jawa yang muslim itu tidak meninggalkan keanggotaannya dalam *Jong Java*. Demikian juga, yang diusulkan oleh Sjamsuridjal adalah soal kursus agama dan bukan soal klasifikasi keanggotaan.

Mengenai kehadiran H. Agus Salim pada kongres *Jong Java* ketujuh juga tidak benar. Sebab, ia adalah orang Minang. Jika JIB dikatakan sebagai organisasi politik, maka pernyataan demikian juga tidak benar karena dalam kenyataannya, JIB tidak pernah melakukan kegiatan politik. Bahkan, dalam persoalan yang terakhir ini, pada kongres JIB yang pertama, Sjamsuridjal dengan tegas menyatakan:

“Allah SWT mewajibkan kami tidak hanya berjuang untuk bangsa dan negara kita, tetapi juga untuk umat Islam di seluruh dunia. Hanya, hendaknya, di samping aliran-aliran Islam kita selalu memberi tempat kepada aliran-aliran nasionalistis. Selain kewajiban yang utama ini, kami wajib berjuang untuk umat Islam seluruhnya, sebab, kami, orang Islam adalah hamba Allah SWT dan kami mengabdikan hanya kepadaNya, Yang Maha Kuasa, Maha Arif, Maha Tahu, Raja Alam Semesta. Inilah prinsip Islam yang menjiwai JTB”. “Dan terakhir, pertanyaan: Bagaimana sikap JTB terhadap politik? Saya akui bahwa ini adalah pertanyaan yang pelik, seperti halnya dengan banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang sulit pula bagi penduduk suatu koloni yang belum dapat menamakan dirinya sebagai satu bangsa”. “Pada kursus-kursus, ceramah-ceramah dan debat-debat yang diselenggarakan, akan diusahakan sejauh mungkin meningkatkan pengertian tentang politik, terutama dari sudut Islam. Tetapi JIB tidak akan ikut aksi politik. Pun

anggota-anggota kami tidak akan terjun dalam politik atas nama organisasi. Tetapi, tidak melarang anggotanya yang secara sah dapat ikut dalam gelanggang politik, dengan harapan mereka ini tidak berniat berlebih-lebihan atau menonjol sebelum waktunya" (Basri, 1977: 32).

Informasi-informasi mengenai **latar belakang** berdirinya JIB yang saling berbeda ini, perlu dikemukakan dengan harapan agar kesalahan-kesalahan dalam penulisan sejarah Islam pada umumnya dan sejarah pemuda Islam Indonesia pada khususnya semakin bisa dikurangi, bahkan dihilangkan sama sekali. Setelah membahas latar belakang berdirinya JIB, uraian berikut akan mengemukakan asas, tujuan serta kegiatan organisasi JIB. Menurut Anggaran Dasar JIB yang dikutip kembali oleh Ridwan Saidi atau Mohammad Roem, **asas** dan **tujuan** JIB adalah sebagai berikut: (1) mempelajari agama Islam dan menganjurkan agar ajaran-ajarannya diamalkan. (2) menumbuhkan simpati terhadap Islam dan pengikutnya, di samping "toleransi" yang positif terhadap orang-orang berlainan agama (Basri, 1977: 31; Roem, 1982: 32).

Sehubungan dengan **kegiatan** penerbitan, JIB telah mengeluarkan majalah yang diedarkan kepada masyarakat umum. Majalah yang sudah terbit sejak bulan Maret 1925 itu diberi nama "*Al-Nur*" atau "*Het Licht*". Pada halaman sampul luar majalah tersebut terdapat sebuah motto dari al-Quran (al-Taubah: 32)² yang terjemahnya berbunyi:

"Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai" (Soenarjo, 1998).

Meskipun majalah itu tidak terbit secara teratur, namun ia berumur cukup lama dan bertahan sampai tahun 1940/1941 (tahun ke-16). Ia memuat artikel-artikel yang hampir semuanya berbahasa Belanda dan sebagian besar berkenaan dengan masalah-masalah keagamaan, perjuangan, dan organisasi.

² Sebagai contoh, lihat: halaman sampul luar majalah "*Al-Nur*" Nomor 11/12, Januari/Pebruari 1937.

Dengan demikian, ia memang merupakan media untuk *intellectual exercising* terutama bagi para anggotanya. Meskipun sebagian majalah tersebut masih disimpan di beberapa perpustakaan (dulu: Perpustakaan Islam Yogyakarta), karena bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Belanda, maka dalam tulisan ini akan disinggung beberapa nomor saja sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Yusuf Abdullah Puar, seorang bekas Ketua JIB cabang Medan. Ia pernah menulis bahwa majalah bulanan nomor pertama yang terbit di Jakarta dengan pimpinan redaksi Wiwoho Purbohadidjojo telah memuat kata pengantar dan karangan utama H. Agus Salim tentang “*Islam, Het Licht van Allah*”. Nomor itu juga memuat penjelasan tentang tujuan perjuangan JIB yang mencoba mengambil tempat di samping organisasi-organisasi lain, dan berusaha mencapai sentuhan persaudaraan serta sebanyak mungkin untuk mengadakan kerjasama. Demikian pula, JIB akan menempatkan politik di luar organisasi. Akan tetapi, dalam kursus-kursus dan sidang-sidang *mudzakarahnya* akan sebanyak mungkin melaksanakan pertumbuhan pandangan politik dari kaca mata Islam.

Nomor kedua majalah tersebut berisi penjelasan tentang berdirinya cabang-cabang JIB yang banyak mendapatkan uluran tangan dari beberapa tokoh Muhammadiyah. Hal ini dapat terjadi mungkin karena organisasi ini saling bersentuhan dalam hal dasar reformasi dan modernisasi Islam. Bahkan, dengan tegas pula dinyatakan bahwa JIB tidak lahir “dari” Muhammadiyah, tetapi “di samping” Muhammadiyah (Puar, 1980). Majalah bulanan JIB “*Het Licht*” atau “*An-Nur*” Nomor 7, Agustus 1925, masih tahun pertama), yang disalin dari bahasa Belanda oleh HSM. Sja’af menyajikan pidato Kasman Singodimedjo di depan kaum intelektual yang tergabung dalam JIB. Mengawali uraiannya, Kasman Singodimedjo menyatakan adanya kenyataan yang tidak bisa dibantah bahwa terdapat keterasingan dan jurang yang lebar antara kaum intelektual dengan rakyat (Alatas, 1977: 8; Coser, 1965; Eyerman, Svennson, dan Söderqvist, 1987: 2; Majdid, 1999: 22; Michels, 1977: 118).

Kaum intelektual Indonesia ketika itu memang telah merasakan kecemplangan nasionalisme karena telah terpisah

dari rakyatnya sendiri. Mereka menjadi asing karena terdorong untuk menyamakan diri mereka dengan orang Barat. Sementara itu, orang Barat sendiri sebenarnya tidak menyukai rakyat Indonesia. Semakin banyak golongan priyayi dan golongan menengah yang mempertahankan kedudukan mereka, namun dengan menyingkirkan golongan pribumi. Dengan begitu, mereka sanggup menjual bangsanya, bahkan ada yang bersedia meninggalkan agamanya meskipun dalam jumlah yang terbatas. Ini dapat dilihat pada IEV (*Indo Europeech Verbon*) dan persatuan-persatuan gereja seperti Persatuan Sosial Katholik, Koor Pria, dan lain-lain. Golongan intelektual yang berusaha meningkatkan diri untuk disamakan tingkat sosialnya dengan orang-orang Eropa meskipun menghadapi kenyataan terpisah dari rakyat. Orang-orang Eropa secara nyata tidak mau menerima mereka-mereka itu. Kecuali beberapa orang yang benar-benar mempunyai perhatian yang simpatik terhadap bangsa Indonesia, bahkan sampai menempatkan diri dalam barisan kaum intelektual.

Orang-orang Eropa secara keseluruhan merupakan golongan pengambil sikap yang menolak bangsa Indonesia. Bagi Kasman Singodimedjo, kaum intelektual tidak hanya pemimpin-pemimpin politik, tetapi juga dalam arti yang lebih luas sebagai pemimpin dalam semua lapangan kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, pertanian, perdagangan, perusahaan, dan mengurangi kemiskinan. Sebagian besar kaum beragama sepakat mengambil suatu pendirian moral melawan kemiskinan. Sebagian masyarakat yakin bahwa sistem kapitalis menimbulkan kemiskinan. Bagi orang semacam itu, melawan kemiskinan berarti melawan kapitalisme. Melawan kemiskinan merupakan suatu keputusan moral dan melawan kapitalisme adalah keputusan politik yang muncul dari keputusan moral. Dari keputusan moral yang sama, orang lain dapat berakhir pada keputusan politik yang berlawanan (berbeda). Pada tataran politik, kedua orang itu dapat saling bertentangan. Akan tetapi, kelirulah jika mereka saling memberi cap pihak lain sebagai tidak bermoral dan, dengan demikian, menghancurkan kemungkinan bagi dialog dan kerja sama di antara mereka. Kecenderungan yang ada pada kaum intelektual dan yang terpancar pada semboyan

“Kembali Kepada Rakyat” ternyata bukanlah semata-mata dorongan idealisme keperwiraan, tetapi juga oleh pengertian kepentingan sendiri dan dalam keterpaksaan. Jika tidak ingin kehilangan kepribadian diri mereka, maka harus masuk pada barisan penegak semboyan tersebut sehingga timbul pertanyaan: “Bagaimana caranya kembali kepada rakyat?”

Salah satu cara untuk kembali kepada rakyat adalah dengan menghidupkan kembali semangat Jawa di masa silam. Perlu digali sejarah lama, Hayam Wuruk dari masa jayanya. Kerajaan Majapahit harus dimunculkan kembali. Adalah baik untuk memiliki waktu, kesempatan, dan kehidupan santai guna mempelajari legenda dan cerita-cerita indah kala itu serta menikmati pertunjukan-pertunjukan wayang dan gamelan yang dapat diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan musik dan sandiwara. Sangat berguna juga untuk mengingatkan bahwa orang Jawa akan merasa harga dirinya tidak rendah karena dengan adanya perasaan demikian, maka mereka dapat melepaskan diri dari “perasaan bangsa Jawa yang direndahkan,” dan akan menyatukan diri hanya dengan apa yang disebutkan dalam sejarah, terutama dalam legenda Kejayaan Hindu Majapahit. Akan tetapi, dengan ini semua, belumlah tercapai tujuan “Kembali Kepada Rakyat.”

Setelah mengenangkan diri dengan kenangan-kenangan lama yang indah tentang arti orang Jawa (begitu juga orang Minangkabau dengan kenangan keagungan zaman Cindur Mato dari kerajaan Pagaruyung yang hebat; orang Sunda mengenangkan Pajajaran dan Siliwangi sebagai pertanda dan pengakuan kehormatan bangsa), maka tetap tidak berkurang kewajiban mereka untuk kembali kepada rakyat, yaitu rakyat yang tidak hidup dalam alam sejarah gemilang saat itu. Akan tetapi, kini dengan nasib pahitnya menjadi suatu bangsa yang ditaklukkan, tanpa nama kebanggaan bangsa, tanpa kehormatan dan hak-haknya. Selanjutnya, Kasman Singodimedjo mengajukan pertanyaan “Bagaimana kita bisa menembus ke hati nurani rakyat sekarang ini?” Pertanyaan ini memang sukar dijawab karena mereka sendiri merasakan keterasingan dari jiwa rakyatnya sendiri (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982: 435).

Menurut Kasman Singodimedjo, **pertama-tama** mereka harus mempelajarinya sendiri. Mereka harus **datang kepada rakyat**. Dengan mengakui bahwa soal “Kembali Kepada Rakyat” adalah suatu keharusan untuk kepentingan diri mereka sendiri yang cukup dipahami. Oleh karena itu, adalah pahit dan pasti tidak dapat dilakukan apabila mereka harus senasib dengan rakyat dalam kepahitan dan kehinaan. Maka, tidaklah mengherankan bahwa semboyan “Kembali Kepada Rakyat” telah melahirkan berbagai macam aliran seperti nasionalisme, nasionalisme Indonesia, dan komunisme yang kadang-kadang menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dan ekses-ekses. Akan tetapi, suatu dasar kerjasama yang benar-benar produktif ke arah persaudaraan dan persatuan dengan rakyat masih belum kunjung tercapai. Itulah sebabnya, Kasman Singodimedjo masih terus bertanya, apa yang menyebabkan demikian itu?

Menurut Kasman Singodimedjo, kesalahan tersebut disebabkan oleh sikap mereka (kaum intelektual) yang terlalu mengandalkan pengetahuan sekolah dan meninggalkan rakyat jauh di belakang. Kejiwaan seperti yang telah disebutkan menyebabkan mereka, selaku murid orang Barat, tidak sedikitpun dapat mengakui atau menghargai sesuatu dari kepribadian bangsa sendiri. Mereka pun merasa seolah-olah rakyat harus belajar darinya. Mereka sampai menyangka-nyangka, seolah-olah, rakyat tidak mempunyai keinginan untuk berkembang. Bahkan, mereka berpendapat bahwa harus dilakukan perubahan terhadap rakyat. Oleh karena itu, mereka harus mengubahnya sebelum mencapai kemajuan yang tinggi dan kesadaran hidup sendiri, bahkan kesadaran akan kemerdekaan diri yang sempurna. Betapa salahnya persangkaan mereka tersebut dan betapa terjadi lebih dulu dari lingkungan kaum intelektual, di kalangan rakyat telah tercetus keinginan untuk merdeka dan hasrat kepada kemajuan, yang disusul dengan tindakan dan perbuatan. Kasman Singodimedjo pun mengajak melihat tindakan dan perbuatan yang telah diperlihatkan oleh rakyat untuk belajar bagaimana mereka dapat kembali kepada rakyat dengan cara yang setepat-tepatnya (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982: 436).

Kasman Singodimedjo meminta perhatian terhadap apa yang telah mendorong rakyat untuk berusaha dan berbuat. Jika mereka teliti lebih jauh, maka akan terlihat bahwa tampak adanya inisiatif yang murni dan daya cipta yang energik. Ini menunjukkan keinginan terhadap kemajuan dan perasaan persaudaraan, terutama sekali harus dicari pada rakyat yang beragama Islam dan telah menyatukan diri dalam berorganisasi dengan memakai Islam sebagai dasarnya. Telah banyak jumlah sekolah-sekolah yang didirikan oleh Sarekat Islam, Muhammadiyah, Perserikatan Ulama, dan lain-lainnya, yang semacam itu (di Sumatera misalnya Sarikat Usaha dan Sumatra Thawalib), sementara perkumpulan-perkumpulan lain bertujuan mencontoh pendidikan sekolah-sekolah pemerintah, yang pada umumnya dipandang dari segi kebangsaan tidak tepat. Sementara itu, di antara orang-orang Indonesia yang kompeten dan orang-orang Eropa yang sibuk membuat teori dan percobaan-percobaan, organisasi-organisasi Islam sudah lebih dahulu menyusun dan mempraktikkan pendidikan nasional untuk bangsanya. Dasar persamaan dan sistem persamaan yang ditemukan hanya dalam Islam dengan sendirinya mengarahkan mereka kepada usaha menuju kesatuan dalam pendidikan yaitu usaha yang membayangkan keberhasilan.

Dalam usaha membangun pendidikan, mereka tidak mengambang di awang-awang. Sebab, mereka dapat melanjutkan usaha atas dasar yang telah ada dalam sejarah kebangsaan sebelumnya, dan dengan memperhitungkan pula perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan zaman modern. Dalam kaitan ini, mereka tidak perlu meraba-raba lagi karena negara-negara Islam telah mendahului dalam perkembangan kemajuan seperti yang telah dicapai Mesir, Persia, dan India. Negara-negara tersebut telah memberikan contoh yang bermanfaat. Organisasi-organisasi Islam di negeri ini, dalam usaha membangun pendidikan telah sampai pada tingkat mendirikan beberapa "*Normal School*" dan "*Kweek School*" yaitu sekolah-sekolah untuk mendapatkan guru-guru yang sangat dibutuhkan bagi pembangunan di masa mendatang. Kongres-kongres Islam yang berturut-turut diadakan menunjukkan adanya perkembangan ke arah persatuan, "*Central*

Commitee" dari Kongres Al-Islam telah menganggap tiba waktunya untuk menjadikan soal kesatuan sistem pendidikan sebagai program kongres dan "Sarekat Islam" telah pula mendirikan sekolah pendidikan guru yang langsung dipimpinya.

Bukan saja di bidang pendidikan, Kasman Singodimedjo juga melihat berkembangnya inisiatif dan semangat kerja pada organisasi-organisasi Islam. Dengan pesat mereka mengembangkan perusahaan dan koperasi. Demikian pula bidang sosial, sepenuhnya mendapat perhatian. Kasman Singodimedjo juga menyebutkan berdirinya klinik-klinik di Yogyakarta dan Surabaya yang didirikan oleh Muhammadiyah, serta panti asuhan orang-orang miskin sebagai inisiatif pertama dan murni dari kalangan Bumiputera sendiri yang dilahirkan oleh Majelis PKU Muhammadiyah di Yogyakarta. Jika demikian berita-berita pers bangsa Indonesia sendiri, maka akan tercengang melihat betapa luasnya sudah aktivitas yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, di Tapanuli, di Bali, di Minahasa, dan lain-lain. Dengan tidak mengemukakan daerah-daerah yang sepenuhnya beragama Islam, dalam mencapai kemajuan melalui dakwah Islam dan usaha-usaha untuk mendorong umat Islam, maka, nyatalah bahwa umat Islam telah merebut tempat yang bebas berdiri sendiri di lapangan ekonomi (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982: 438). Ini semua seharusnya menjadi petunjuk bagi mereka untuk tidak tertipu oleh propaganda yang semakin meningkat, seolah-olah Islam sedikit sekali mendapat tempat dalam hati nurani rakyat. Bahkan, ada fakta bahwa golongan-golongan rakyat yang bukan Muslim, tidak boleh mendorong mereka untuk meremehkan golongan mayoritas mutlak yang beragama Islam, yang justru memiliki energi dan potensi untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Untuk lebih mendekat pada rakyat dan untuk lebih menjalin kerjasama dengan mereka, para pemuda Islam harus tidak lagi menjadi orang asing (terhadap Islam) bagi rakyatnya. Mereka diharapkan bisa mendapat tempat di hati dan jiwa rakyat. Demikian pula, mereka dapat membawakan kesatuan jiwa yang dibutuhkan sehingga kelebihan pendidikan yang dimiliki dapat bermanfaat bagi rakyat untuk membawa mereka pada kesadaran

persatuan nasional. Inilah yang dirasakan Kasman Singodimedjo sebagai alasan kuat mengapa *Jong Islamieten Bond* harus ada dan bergerak saat itu. Mengenai tujuan dan usaha perserikatan, perlu sekali dipertimbangkan sebaik-baiknya karena justru hal itu bisa menimbulkan kesalahan-pahaman. Oleh karena itu, hendaklah jelas bagi mereka (kaum intelektual) bahwa keinginan mereka untuk mempelajari agama Islam sedalam-dalamnya sama sekali bukan untuk memisahkan diri dari golongan-golongan rakyat yang tidak percaya atau yang memiliki kepercayaan lain. Mereka sama sekali tidak berpropaganda menentang kelompok yang berkeyakinan lain, namun justru mereka ingin memperkenalkan identitas sendiri dan memperlihatkan ke dunia luar keyakinan Islam yang dianut serta kebajikan-kebajikannya.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pernyataan pertama dari JIB, agama Islam telah dijadikan objek cercaan orang. Sedikit sekali yang jujur dan objektif dapat diharapkan dari pihak lain, bahkan banyak sekali gambaran yang salah dan pemutarbalikan yang diutarakan terhadap agama Islam. Jika umat Islam perlu mengikuti penulisan sejarah yang jujur, maka nyatalah bahwa tidak pernah terjadi, terutama sekali di negeri ini, agama Islam disebarkan secara paksa oleh sesuatu kekuasaan penakluk. Demikian juga, Islam tidak dibawa oleh suatu bangsa yang bermigrasi ke negeri ini. Selanjutnya, tidak lebih dari 9 (sembilan) orang yang membawa Islam ke negeri ini. Hanya dengan menunjukkan keteladanan dalam kehidupan, mereka mampu menarik rakyat untuk berkeyakinan Islam. Islam yang telah membebaskan mereka dari ketakutan dan penyembahan segala macam dewa. Dan, membebaskan mereka dari kehinaan hidup dalam sistem kasta di mana mereka telah ditempatkan pada kasta yang terendah, sedangkan dua kasta tertinggi telah menjadi tempat bagi bangsa asing yang dulu datang dari luar, dan kini memegang kekuasaan.

Adalah tentara-tentara Jawa, yang telah mendirikan Kerajaan Islam di Jawa sehingga negeri ini bangkit dan hidup kembali dari keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu sebelum datangnya serangan dunia Barat yang memaksakan hegemoninya. Dengan demikian, tidak ada sedikitpun alasan bagi kaum intelektual

untuk menganggap bahwa Islam adalah agama dari orang Arab dan hanya untuk orang Arab. Penghargaan khusus terhadap orang-orang Arab, terutama golongan Sayyid yang dianggap sebagai keturunan nabi muncul di masa-masa belakangan ini. Hal ini muncul pada saat rakyat Indonesia mengalami penindasan politik dan ekonomi sehingga menganggap setiap orang asing lebih tinggi derajatnya. Tantu saja, hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Bagi Kasman Singodimedjo, untuk membebaskan diri dari anggapan yang salah tentu tidak dapat dilaksanakan dengan meremehkan Islam. Hal tersebut justru dapat dicapai dengan mempelajari Islam yang murni, yaitu agama yang telah bisa membawa rakyat padang pasir yang terbelakang menjadi bangsa yang menguasai separuh dari bumi ini, yang memiliki dan menyebarkan kebudayaan yang tinggi.

Merupakan suatu fitnah lagi yang ditujukan kepada Islam jika menganggap bahwa agama ini menempatkan kaum wanita pada posisi yang rendah. Kasman Singodimedjo melihatnya sebagai sesuatu yang keliru jika beranggapan demikian. Dengan mempelajari Islam, sebagaimana yang diinginkan oleh JIB, akan terbukti secara pasti bahwa kedudukan wanita dalam Islam berlawanan dengan yang difitnahkan itu. Perlu diingat bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan beberapa waktu sesudahnya, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang sangat buruk di Arab. Peristiwa-peristiwa kejam sering terjadi di sana. Menjadi kebiasaan pada waktu itu membunuh anak perempuan dengan menguburkan hidup-hidup. Jika dibiarkan hidup, mereka (kaum wanita) diperlakukan lebih rendah dari binatang. Kebiasaan yang biadab semacam itu berdampak pada komposisi laki-laki dan perempuan yang timpang. Akibatnya, satu wanita harus melayani lebih dari lima belas pria. Tiap hari terjadi perkelahian, perampokan, dan pembunuhan. Orang sama sekali tidak lagi memperdulikan nyawa sesama manusia. Memang Arab masa itu sangat buruk namanya. Kondisi berubah drastis setelah Islam datang.

Terdapat satu hal lagi yang dituduhkan kepada Islam menurut Kasman Singodimedjo, yaitu soal perbudakan. Dalam soal ini, baik agama Yahudi maupun Kristen tidak pernah

melarang perbudakan. Jika dibandingkan dengan agama-agama lain, Kasman Singodimedjo dalam konteks ini, memastikan bahwa dasar-dasar Islam mengenai perikemanusiaan dan jaminan emansipasi jauh lebih baik. Timbul dan banyaknya kesalahpahaman dan pandangan yang timpang di atas, menurutnya, hanya dapat diperbaiki dengan melaksanakan tujuan JIB yakni mendalami studi tentang Islam. Selain itu, usaha untuk menumbuhkan simpati terhadap penganut-penganut Islam juga termasuk dalam tujuan tersebut. Dengan pengertian bahwa pada umumnya mereka membaca tentang Islam melalui buku-buku roman dan *feuilleton*, bahkan juga dari buku-buku sejarah yang dipakai di sekolah-sekolah, yang pada umumnya dibuat oleh beberapa sumber bukan Islam, memberikan gambaran yang tendensius dan menjelek-jelekkan Islam.

Terkait Eropa yang pada umumnya memusuhi Islam, Kasman Singodimedjo sebelum mengakhiri uraiannya ingin menyampaikan sesuatu mengenai perserikatan (JIB) dalam hubungannya dengan cita-cita nasional. Kaum nasionalis idealistis dari suku Jawa, Sunda, Minangkabau, Batak, dan lain-lain, yang bercita-cita ingin menghidupkan kembali kejayaan masa silam telah menyalahkan JIB. Sebab, seolah-olah Islam yang dijadikan dasar JIB menuju kepada orientasi internasional sebelum mempunyai kesadaran nasional (Juergensmeyer, 2006: 357-68). Tuduhan seperti ini menurutnya jelas tidak pada tempatnya. Di sini muncul pertanyaan: "Apakah anjuran umum mengenai cinta kemanusiaan merupakan sesuatu yang buruk bagi hubungan antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik dalam sesuatu keluarga?" Kasman Singodimedjo menegaskan, "tidak". Sebaliknya, anjuran itu tidak lain justru akan menimbulkan cinta kasih dalam keluarga. Demikian pula dengan sifat internasional dari dalam Islam terhadap nasionalisme. Ia tidak menolak, apalagi membuang nasionalisme. Untuk menjelaskan kesimpulan ini, seseorang tidak perlu mempunyai alat dan keterampilan menafsir. Adanya bermacam-macam bangsa, warna kulit, dan bahasa jelas disebutkan sebagai tanda kebijaksanaan Allah. Adanya perbedaan-perbedaan ini membawa kemanusiaan kepada kemajuan. Dengan saling menerima dan saling mengisi,

maka kemanusiaan akan tambah berkembang maju, ilmu pengetahuan dan peradaban akan bertambah luas.³

Sebelum mencapai hal di atas, pada setiap diri manusia harus ditimbulkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Dengan meyakini dasar-dasar Islam ini, JIB ingin mempersatukan putera-putera dari segala suku bangsa Indonesia. Dalam kesatuan JIB, setiap suku di antara bangsa Indonesia dapat mengembangkan kebudayaan dan peradaban yang telah dan sedang berkembang. Dengan saling menerima dan saling mengisi, mereka bersatu dalam JIB untuk lebih mengembangkan suatu kemajuan yang mutlak dengan tuntutan nurani rakyat dan dengan memisahkan antara yang sesuai dengan yang tidak sesuai yang diukur dari nurani rakyat yang baik. Inilah yang dimaksud JIB ketika membicarakan nasionalisme Indonesia bukan suatu bayangan dan fantasi, dan bukan utopia, tetapi suatu usaha nyata dan positif yang akan membawa kaum intelektual lebih dekat dengan rasa persaudaraan. Bukan mengembangkan organisasi-organisasi kesukuan yang terpisah-pisah dan bisa mengakibatkan rasa persaingan yang fatal. Bahwa soal agama memisahkan dari mereka yang beragama lain, haruslah diterima sebagai kenyataan, tetapi tidak ada sama sekali rasa permusuhan terhadap golongan-golongan lain tersebut. Bahwa perasaan sebangsa dan setanah air akan mengatasi perbedaan keyakinan tersebut dan akan terjalin persahabatan dan kerja sama yang baik sebaiknya yang ditumbuh-kembangkan. Oleh karena itu, jika kaum intelektual benar-benar setia berpegang pada dasar-dasar Islam, maka tentu saja bukan JIB yang menjadi penyebab tidak terjalinnya rasa persahabatan dan kerjasama. Kasman Singodimedjo berharap agar persatuan dan persaudaraan di kalangan umat Islam dan kerjasama yang mesra dengan seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.

3 Lihat sekali lagi, pada tahun 1937, Sutan Syahrir, menolak memilih antara Barat yang kapitalistis dan Timur yang menghamba-hamba. Paradigma baru nasionalisme: tidak membagi dunia ke dalam dua blok tradisional: Barat dan Timur, tetapi antara kekuatan demokratis melawan kekuatan fasis. Nasionalisme yang tumbuh dari perjuangan untuk demokrasi, yang kemudian oleh Syahrir dianggap sebagai pengertian yang tepat tentang nasionalisme ketika di tahun 1952 ia menyatakan, "Kita adalah kaum internasionalis dengan suatu pengertian yang tepat mengenai nasionalisme".

Berbeda dengan *Het Licht* nomor pertama dan ketujuh, *Het Licht* tahun ke-16 (Maret 1940) yang diterbitkan di Semarang dan memuat soal-soal kepanduan serta kewanitaan (sebagian besar sudah ditulis dalam bahasa Indonesia), majalah *Het Licht* (Mei 1941) yang juga terbit di Semarang telah memuat pidato ketua PB JIB Sunaryo Mangunpuspito mengatakan bahwa “JIB waktu dipegang Wiwoho (ketua JIB kedua) selaras dengan namanya; JIB mendapat dan menemukan kewibawaan-nya; dan JIB sewaktu dipimpin Kasman Singodimedjo, ketua JIB ketiga, tampak sebagai *singo*”. Kutipan dari sebagian isi pidato itu barangkali dimaksudkan untuk menunjukkan betapa potensialnya JIB ketika dipimpin oleh kedua tokoh tersebut.

Sebagaimana dikemukakan di atas, di samping menerbitkan majalah, JIB juga mengadakan kursus-kursus dan ceramah-ceramah tentang agama Islam. Tokoh sentral dalam hal ini adalah H. Agus Salim yang oleh Mohammad Roem dijuluki sebagai “Bapak Spiritualisme JIB”. Jika bahasa yang dipergunakan dalam majalah bulanannya adalah bahasa Belanda, maka bahasa yang dipergunakan dalam berbagai kesempatan kursus dan ceramah, juga bahasa Belanda. Metode-metode yang dipergunakan tokoh ini cukup menarik dan ilmiah. Ia mencoba memperkenalkan rasionalitas dalam Islam setelah mengalami sentuhan dengan pikiran-pikiran Barat. Itulah sebabnya, tokoh ini memiliki daya tarik yang luar biasa (Madjid, 1976: 4) dan sebagai akibatnya, kesalahan-kesalahan para anggota tentang Islam dan perasaan rendah diri mereka secara bertahap menjadi hilang karenanya (Roem, 1982: 24).

Kegiatan JIB yang lain adalah dalam bidang kepanduan dan kewanitaan. Informasi mengenai kedua kegiatan ini sangat minim kecuali bahwa dalam soal kepanduan, JIB telah mendirikan “NATIPJ” (*National Indonesich Panvinderij*). Satu hal yang menarik dari pembentukan organisasi kepanduan ini adalah bahwa ia telah menggunakan identitas kebangsaan Indonesia pertama (Nasionalisme Murni), yang mendahului organisasi-organisasi lain. Sementara itu, dalam hal kewanitaan, JIB juga telah membentuk *Jong Islamieten Bond Dames Afdeling* (JIBDA). JIBDA melakukan kegiatan-kegiatan dalam bidang

kewanitaan dan ikut aktif memperjuangkan masalah-masalah kewanitaan dalam forum nasional. Tokoh-tokoh JIBDA antara lain adalah Ny. Kasman Singodimedjo, Ny. Sukaptinah Sunaryo Mangunpuspito, dan Nn. Supinah (Saidi, 1984: 33).

Sebagai tambahan kegiatan JIB, di sini perlu dikemukakan pula bahwa dalam beberapa kali kongres, JIB senantiasa memunculkan dan membahas tema-tema besar. Misalnya, kongres JIB tahun 1926 dan 1927 telah membahas hal-hal yang bertalian dengan Islam: "Islam dan Pandangan Dunia", "Perkembangan Islam di Luar Negeri", "Islam dan Pikiran Merdeka", "Etik Perang dalam Islam", "Islam dan Cita-cita Persatuan", "Kebangasaan", "Sosialisme", dan "Wanita dalam Islam". Tema-tema tersebut dibahas oleh para pemuda yang baru berumur sekitar dua puluh lima tahun. Di samping itu, sebagai perkembangan dari kegiatan JIB, maka atas prakarsa Jusuf Wibisono dan Mohammad Roem untuk level Perguruan Tinggi dibentuklah SISC (*Student Islam Study Club*) pada tahun 1933. Sebagian besar anggotanya adalah para mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Dibandingkan dengan JIB, kegiatan SISC lebih beraktuasi kepada pendalaman Islam secara kritis dan tidak menggarap bidang-bidang kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi, studi ilmiah tentang Islam memang menjadi bidang garapannya. Itulah sebabnya, ceramah-ceramah yang diselenggarakan senantiasa mengundang perdebatan ilmiah tentang Islam dan untuk berpikir secara kritis. Para anggota kelompok ini juga diperkenalkan dengan rasionalitas dalam Islam setelah mengalami sentuhan dengan pikiran-pikiran Barat.

Sebagian dari anggota SISC (yang berpendidikan Barat) menjadi kelompok modernis Islam Indonesia. Mereka berusaha mengkomodir nilai-nilai Barat dalam ajaran Islam seperti demokrasi, hak-hak asasi manusia, *rule of law*, dan sebagainya. Karena itulah, ketika memimpin partai Masyumi, mereka justru lebih dekat dengan kelompok intelektual lain yang tergabung dalam grup sosialis, Kristen, dan Katolik daripada golongan Islam tradisional. Sebab melalui grup tersebut, mereka lebih mudah mengadakan kontak-kontak intelektual. Jarak dengan kaum tradisional lebih kelihatan lagi ketika Nahdlatul Ulama memisahkan diri dari Masyumi (Madjid, 1976: 5). Dengan asas

dan tujuan serta kegiatan JIB tersebut, sejak semula orang sudah meramalkan bahwa JIB kelak akan melahirkan tokoh-tokoh nasional dan Islam di Indonesia. Mukhtar Muhammadiyah tahun 1931 (enam tahun sesudah berdirinya JIB) dalam *Khutbatul 'Arsy*, mukhtar itu mengatakan, "Mudah-mudahan hiduplah JIB dengan teguh, dan tentunya, di kemudian hari akan mengeluarkan beberapa orang pemimpin yang akan menjunjung tinggi bangsa dan agamanya" (Puar, 1980: 12).

Selama periode terakhir dari kekuasaan kolonial, di tingkat intelektual, JIB ternyata telah muncul sebagai "pabrik" yang memproduksi hampir semua tokoh-tokoh modernis Islam di Indonesia sekalipun hanya beberapa orang di antara mereka yang menguasai bahasa Arab. Ini rupanya menjadi salah satu sebab mengapa pemikiran mereka tentang Islam belum tuntas. Mereka belum lagi terlibat dalam usaha *ijtihad* secara serius dan komprehensif bagi kebangkitan Islam yang sebenarnya di bidang inovasi dan pemikiran kreatif. Namun demikian, betapa pun kekurangannya, JIB dengan segala kegiatan dan pola pengkaderannya telah berjasa dalam melahirkan tokoh-tokoh nasional. Tokoh-tokoh Islam dan nasional Indonesia yang pernah menjadi anggota JIB antara lain Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Jusuf Wibisono, Wiwoho Purbohadijoyo, Samsuridjal, Syahbuddin Latif, Sudewo, T.M. Usman El-Muhammady, Ir. Indra Jaya, Syamsuddin Sutan Makmur, Rustam Sutan Palindih, Zainul Baharuddin, Dasuki, Ny. Emma Puradirejo, Ny. Datuk Tumenggung, dan Ny. S.Z. Gunawan (Puar, 1980: 13).

JIB yang didirikan oleh Syamsuririjal adalah organisasi generasi muda Islam yang sekaligus dapat juga dikatakan sebagai organisasi dari kelompok intelektual muda Islam di Indonesia sampai tahun 1942. JIB yang berdiri pada tanggal 1 Januari 1925 menempati kedudukan yang berarti, baik dalam sejarah modern Islam di Indonesia maupun dalam sejarah Indonesia sendiri. Meskipun perkembangan JIB cukup pesat, namun ia sebenarnya bukan merupakan organisasi massa. JIB lebih merupakan organisasi kader. Sebagai organisasi kader, tentu saja berorientasi pada upaya peningkatan diri anggota-

anggotanya dengan menambah ilmu pengetahuan (Noer, 1981) melalui beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan ketika itu.

Pola pengkaderan yang ditempuh JIB, menurut Mohammad Roem, adalah pola kursus dan ceramah. Pola demikian ternyata memang sesuai dengan usul pendirinya pada kongres *Jong Java* ke-7 tahun 1924. Materi utama dalam kursus dan ceramah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Tokoh penting dalam kegiatan tersebut adalah H. Agus Salim, Bapak Spritualisme JIB. Karena para anggotanya sebagian besar pernah mengikuti pendidikan model Barat, maka pola pengkaderannya juga bersifat terbuka (Roem, 1982: 23). Sebagai organisasi kader, terutama (setelah dibentuk SISC) yang kegiatan utamanya adalah studi ilmiah tentang Islam dan yang pada akhirnya ikut melahirkan tokoh-tokoh modernis Islam di Indonesia, maka organisasi tersebut sering mempergunakan dua Bahasa, seperti yang disinggung di awal tulisan ini, ke dalam, mereka mencoba mengadakan pembaharuan dengan pikiran-pikiran Barat, sedangkan ke luar, mereka membawa bendera Islam untuk menahan gelombang dari Barat (Madjid, 1976: 6).

PENUTUP

Menurut Kasman Singodimedjo, **pertama-tama** yang menjadikan nasionalisme terasa “cemplang” adalah **bahasa**. Mereka tidak sungguh-sungguh mempelajari bahasa. Betapa banyak dari suku Sunda yang tidak mau memakai bahasa Sunda, orang Melayu dan suku Jawa yang tidak mengenal bahasanya sendiri. Pendeknya, betapa banyak kaum intelektual yang tidak paham dan tidak pandai berbicara dalam bahasa sendiri. Bahasa yang digunakan *Jong-Java* bukanlah bahasa Jawa, Sunda atau Melayu, karena, tidak semua anggotanya bisa berbahasa Jawa, Sunda atau Melayu. Itulah sebabnya, *Jong Islamieten Bond* terpaksa menerima bahasa Belanda sebagai bahasa persatuan dalam lingkungan organisasinya.

Soal **kedua** adalah adanya **perbedaan** besar dalam kehidupan bersama. Mereka hidup secara Eropa dan tidak mengenal kerja keras dan berat seperti yang dialami oleh para

petani di sawah dan ladang. Mereka tidak mengenal bagaimana membanting tulang, mengangkat, dan memikul. Mereka memandang rendah pekerjaan rakyat yang serba kekurangan. Betapa jauh berbedanya kehidupan mereka dengan rakyat dalam hal pakaian, perumahan, dan kesenangan-kesenangan lainnya. Dalam berpesta misalnya, bahkan pesta-pesta di rumah terkait kelahiran, perkawinan, dan kesempatan-kesempatan lainnya, mereka benar-benar telah menjauhkan diri dari rakyat. Tingkah laku dan cara-cara Eropa telah mereka biasakan. Lebih dari itu, apa saja di-**"Eropa"**-kan seperti pakaian pengantin, kamar pengantin, dan lain sebagainya. Hal yang lebih parah lagi, pada pesta-pesta itu, adalah mereka justru melayani orang-orang Eropa secara istimewa. Mereka sudah terbiasa mengadakan acara pada malam hari untuk melayani teman-teman yang berdarah Eropa. Mereka merasa terhormat atas perhatian yang diberikan sehingga menganggap remeh tamu-tamu mereka yang sebangsa dan setanah air. Acara selamatan-selamatan yang diadakan untuk menjamu para kiai dan santri sebagai tamu terhormat tidak lagi menjadi kebiasaan bagi orang-orang Indonesia yang berada ketika itu (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982: 434).

Hal yang **ketiga** adalah **buta** sama sekali terhadap **hati nurani rakyat**. Mereka tidak mengenal perasaan yang dimiliki rakyat karena pergaulan bersama, pendidikan, dan pergaulan dengan orang Barat umumnya, khususnya dengan orang-orang Belanda. Bersama orang Barat, mereka menganggap segala sesuatu yang tidak diterima dari orang-orang Eropa adalah rendah, terkebelakang, dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Menurut Kasman Singodimedjo, semua yang tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh dunia Barat yang telah menguasai negeri ini, dianggap rendah, dan dirasakan sebagai sesuatu yang salah karena tidak sesuai dengan contoh yang ditiru dari manusia-manusia Barat. Itulah beberapa hal yang menimbulkan "nasionalisme cemplang" sehingga terjadi jurang yang lebar antara kaum intelektual dan rakyatnya (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982).

Semangat mendalami Islam secara kritis yang justru dilakukan mereka yang berpendidikan Barat tetapi berorientasi Islam (karena menurut sebuah sumber, anggota JIB itu tidak ada

yang berasal dari dunia pesantren) barangkali karena organisasi tersebut lahir pada zaman “melawan” (*fight against*) dan bukan pada zaman “membangun” (*fight for*). Itulah sebabnya, jika dilihat dari keadaan organisasi pemuda Islam sekarang, JIB memang lebih banyak memberikan arti kepada para anggota dan sekaligus kepada umat Islam. Sebab, organisasi-organisasi Islam sekarang pada umumnya lebih banyak dipergunakan sebagai alat eksploitasi bagi kepentingan pribadi (Madjid, 1976: 7). Dalam setiap kongres, organisasi-organisasi Islam sekarang lebih menonjolkan persoalan calon Ketua Umum dan kurang menghadirkan tema-tema besar sebagaimana yang pernah ditempuh JIB hampir 1 (satu) abad yang lalu. Analisis demikian memang tidak selamanya menunjukkan hasil yang final, karena betapa pun JIB memiliki berbagai kelebihan, namun juga memiliki kelemahan-kelemahan mendasar. Misalnya, dalam hal menyiapkan diri menghadapi masa-masa selanjutnya, organisasi ini tidak mendirikan lembaga pendidikan Islam (menekankan kemampuan berbahasa Arab) dan lembaga riset bagi kepentingan kehidupan Islam dan umatnya. Sementara itu, di pihak kelompok nasionalis sudah jauh lebih banyak didirikan. Dualisme ini terus berjalan hingga kini dan ini merupakan tantangan bagi kaum intelektual (muda) Islam masa kini dan mendatang. *Wallahu a'lam bi al-shawab*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein. 1977. *Intellectuals in Developing Societies*. London: Frank Cass.
- Basri, Yusmar, ed. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Coser, Lewis A. 1965. *Men of Ideas*. New York: The Free Press.
- Eyerman, Ron, Lennart G Svennson, dan Thomas Söderqvist. 1987. *Intellectuals, Universities, and The State in Western Modern Societies*. Los Angeles: University of California Press.
- Hakim, Rakhmat Nur. 2016. “Kisah Kasman Singo-dimedjo, Sang Pemersatu Islam dan Nasionalis.” *kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/21/03440091/>

- Kisah.Kasman.Singodimedjo.Sang.Pemersatu.Islam.dan.Nasionalis?page=all.
- Juergensmeyer, Mark. 2006. "Nationalism and Religion." In *The Blackwell Companion to the Study of Religion*, ed. Robert A. Segal. Oxford: UK Oxford Blackwell Publishing, 357–68.
- Madjid, Nurcholish. 1976. "Serba Pandangan tentang Peranan Cendekiawan." *Prisma*.
- Majalah *Het Licht* atau "An-Nur" Nomor 16, Mei 1941.
- Majalah *Het Licht*" atau "An-Nur" Nomor 7, Agustus 1925.
- Majdid, Nurcholish. 1999. *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat*. Jakarta: Paramadina.
- Masruri, Siswanto. 2005. *Ki Bagus Hadikusuma: Etika dan Regenerasi Kepemimpinan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Michels, Roberto. 1977. "Intellectuals." In *Encyclopaedia of the Social Sciences*, ed. Edwin Seligman dan Alvin Johnson. New York: The Macmillan Company, 118.
- Noer, Deliar. 1981. "Kecenderungan Eksploitasi Organisasi Mahasiswa." *Panji Masyarakat*.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Grafitipers.
- Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman. 1982. *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Puar, Yusuf Abdullah. 1980. "Warisan Nasional Jong Islamieten Bond." *Panji Masyarakat*.
- Rahayu, Suci. 2018. "Inilah Sosok Kasman Singodimedjo Pemersatu Islam & Nasionalis." jateng.tribunnews.com.
- Roem, Mohammad. 1982. *Jong Islamieten Bond Yang Saya Alami*. Panji Masyarakat.
- Saidi, Ridwan. 1984. *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa, 1925-1984*. Jakarta: Rajawali.
- Soenarjo, RHA. 1998. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI. ❏

**GERILYA MILITER - SIPIL MENCIPTAKAN
RUANG BERSAMA DI MASA KRISIS
PENGAL SEJARAH PERJUANGAN
MR. KASMAN SINGODIMEDJO**

G. Budi Subanar

PENDAHULUAN

Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin karya Mitsuo Nakamura merupakan karya disertasi yang menggambarkan perkembangan Muhammadiyah dengan KH. Ahmad Dahlan sebagai perintis dan pendirinya yang mulai bergerak dari Yogyakarta. Kemudian, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, karya Takashi Shiraishi yang mengisahkan pembentukan Sarikat Islam (SI) dan HOS Tjokroaminoto dengan poros gerakannya dari Surabaya. Dr (HC) Kasman Singodimedjo yang dibahas dalam tulisan ini menjalani masa kelahiran dan perkembangannya tidak dari kedua tempat tersebut. Kendati kemudian, Kasman Singodimedjo masuk dalam jajaran tokoh yang aktif dalam gerakan Muhammadiyah.

Pembahasan mengenai Kasman Singodimedjo dapat ditempatkan dalam 3 (tiga) periode, yaitu Masa Kolonial, Masa Kemerdekaan, dan Masa Perkembangan-Pembangunan (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman 1982). Kasman Singodimedjo merupakan seorang tokoh nasional yang bergerak melintasi tiga zaman. Sudah sejak masa kecilnya, ia menjalani masa pendidikan yang berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Terlahir pada 1904 di Purworejo Jawa Tengah dari keluarga Singodimedjo,

ayah sebagai pengurus agama, pernah menjadi pegawai, dan seorang yang memiliki sawah, serta ibu sebagai pedagang. Ia terlahir sebagai anak dari tujuh bersaudara. Untuk bisa memperoleh pendidikan, tahun kelahirannya diubah menjadi 1908 (Noer 1987, 132; Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman 1982). Pendidikan dasar dan menengah dilalui di beberapa kota Purworejo, Kutoarjo, Magelang, sampai menyelesaikan pendidikan tingginya di bidang Hukum di *Rechts Hoge School* (RHS) dengan gelar *Meester in de rechten* (Mr.) di Jakarta. Sebelum menyelesaikan pendidikan bidang hukum, ia juga pernah menjalani pendidikan bidang kedokteran di STOVIA. Periode pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dijalani pada masa kolonial Belanda, berlangsung sampai dengan 1939 saat menyelesaikan pendidikan hukum dengan spesialisasi bidang sosiologi ekonomi.

Periodisasi di atas bisa terkesan menyederhanakan, terlebih bagian ketiga, menempatkan perkembangan dan pembangunan setelah periode kemerdekaan RI dengan mencakup dua rezim penguasa Orde Lama dan Orde Baru. Pembahasan ini lebih difokuskan pada periode gerilya militer-sipil untuk beberapa alasan. *Pertama*, untuk memperkaya wawasan supaya gerilya tidak melulu dipahami sebagai upaya gerakan militer. Kasman Singodimedjo memiliki pengalaman dari periode tersebut sebagaimana dicatat oleh sejumlah pihak. *Kedua*, pembahasan ini terkait periode masa balita Republik Indonesia di Yogyakarta yang belum banyak dibahas secara khusus di luar kajian militer. *Ketiga*, pada masa tersebut, Kasman Singodimedjo memiliki pengalaman memangku beragam jabatan yang diembannya. Dengan demikian, diharapkan bahwa tulisan singkat ini dapat memberi sumbangan khusus. Barang tentu bahwa pada periode ketiga akan banyak ulasan berbagai pihak lain sehingga pilihan ini menjadi alternatif.

PERISTIWA AWAL YANG MENENTUKAN

Proklamasi 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta dilakukan dalam suasana sederhana. Soekarno membacakan teks didampingi oleh Hatta.

Sesudahnya dilakukan pengibaran bendera oleh Kapten A. Latief Hendraningrat dan beberapa orang lain. Kendati pun, sebelumnya telah berlangsung proses perumusan dan peristiwa yang mendahuluinya yang melibatkan sejumlah pihak. Baik yang berlangsung di kediaman Laksamana Maeda, mau pun peristiwa penculikan ke Rengasdengklok oleh segenap tokoh pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta ke tempat tersebut sampai berpuncak pada pembacaan teks Proklamasi. Berita tentang proklamasi kemerdekaan ditanggapi dengan sejumlah aksi. Ada seniman yang malam menjelang proklamasi melakukan aksi pengecatan tram yang ada di Jakarta sehingga ketika tram berjalan keliling kota, tulisan yang memberitakan proklamasi dibaca oleh warga yang menyaksikannya. Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta menanggapi berita yang didengarnya dengan melakukan konvoi naik sepeda keliling kota sehingga menarik perhatian berbagai pihak.

Saat berlangsung Proklamasi, Kasman Singodimedjo berada di Bandung bersama dengan sejumlah komandan *daidancho*. Mereka berkoordinasi terkait penyerahan senjata sekiranya berlangsung penyerahan kekuasaan dari pemerintahan Jepang. Berita proklamasi didengarkan melalui radio yang menyiarkan peristiwa proklamasi, sehari sesudahnya. Memang, penyebaran berita proklamasi melalui berbagai media terus berlangsung dalam jangka panjang. Di Sumatera Barat, ada yang baru menerima berita proklamasi beberapa bulan sesudahnya (Toer 1999, 38–52). Setelah Proklamasi, Kasman Singodimedjo diangkat menjadi anggota tambahan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) bersama sejumlah tokoh yang lain. Dalam keanggotaan PPKI, Kasman Singodimedjo mampu meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo yang semula bersikukuh dengan tujuh kata yang ada di dalam Preamble UUD 1945. Sebelumnya, beberapa anggota lain, tidak mampu meyakinkan dan mempengaruhi pemikiran Ki Bagus Hadikusumo terhadap hal itu.

BEBERAPA JABATAN YANG DIEMBAN KASMAN SINGODIMEDJO

Memasuki tahap baru masa awal kemerdekaan RI, Kasman Singodimedjo beberapa kali mengemban tugas khusus.

Selepas menjadi anggota PPKI, ia menjabat sebagai anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), bahkan dipilih menjadi ketua. Tugasnya adalah menjalankan peran parlemen untuk menjadi kelengkapan organ pemerintahan, termasuk mengesahkan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) di bawah Kementerian Keamanan Rakyat yang ditandatangani oleh Kasman Singodimedjo sebagai Ketua KNIP dan mengubah sistem presidensiil menjadi sistem parlementer. Setelah jabatan sebagai Ketua KNIP digantikan oleh Sutan Syahrir, ia kemudian menjabat sebagai Jaksa Agung.

Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai salah satu syarat dalam bernegara dan sebagai upaya menghidupkan iklim berpolitik bagi warga negara, melalui Maklumat Wakil Presiden Drs. Mohamad Hatta, 03 November 1945 dinyatakan kesempatan pembentukan partai-partai politik. Dari maklumat tersebut, hadirilah 10 (sepuluh) partai politik. Di antara partai politik tersebut adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) gabungan beberapa partai-partai Islam sejak pendudukan Jepang dipimpin Dr. Sukiman Wirjosandjojo, di mana Kasman Singodimedjo digabungkan ke dalamnya meskipun ia tidak hadir dalam muktamar karena sibuk menjabat sebagai Jaksa Agung. Partai lain adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin Mr. Moh. Yusuf, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang dipimpin Mr. A.M. Tambunan, Partai Sosialis peleburan dari PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan PRS (Partai Rakyat Sosialis) yang dipimpin Sutan Syahrir, Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin S. Mangoensarkoro, dan Partai Katolik (PK) yang dipimpin I.J. Kasimo.

Kasman Singodimedjo ikut pindah ke Yogyakarta bersamaan dengan kepindahan ibukota negara dengan segenap jajaran dan anggota keluarganya. Kasman Singodimedjo juga mengajak Mohammad Roem bersama keluarganya untuk berpindah ke Yogyakarta. Bahkan, Kasman Singodimedjo berusaha melengkapi tempat tinggal mereka dengan meja kursi (Panitia 70 Tahun Mohammad Roem 1978, 56–57). Mohammad Roem adalah teman masa muda sejak berkuliah di RHS dan dalam organisasi di Jong Islamieten Bond (JIB). Mereka bersama-

sama memperoleh jodoh yang dinikahinya dari organisasi JIB. Kasman Singodimedjo kemudian bergabung dan banyak berkiprah di dalam Muhammadiyah. Sesudahnya, Kasman Singodimedjo ditunjuk sebagai Wakil Menteri Kehakiman pada Kabinet Amir Sjafruddin Nopember 1947. Peralihan jabatan yang diemban tersebut berlangsung dalam suasana perubahan dunia politik yang menguasai pemerintahan Indonesia sebagaimana tercermin dalam pengelompokan partai-partai dalam kelompok nasionalis, kelompok agama, dan kelompok sosialis. Masa yang serba perintisan, masa perundingan internasional yang juga diwarnai dengan serangan militer dan usaha perang gerilya.

Kasman Singodimedjo juga menjadi anggota Delegasi KMB (Konferensi Meja Bundar) yang ditambahkan. Sesuai dengan keahliannya di bidang hukum, ia secara khusus ditugaskan untuk mempelajari hukum militer yang ada di sejumlah negara. Setelah selesai konferensi di Belanda, ia kemudian mempelajari hukum militer di London - Inggris, Jerman, Swiss, dan di New Delhi - India.

PERIODE BERGERILYA

Masa pemerintahan RI di Yogyakarta sangat dinamis. Pemerintahan pusat di Jakarta mengalami tekanan militer sekutu yang diboncengi pasukan Belanda sehingga perlu menyelamatkan diri ke Yogyakarta. Yogyakarta yang semula merupakan kerajaan bergabung dengan pemerintahan baru RI melalui "Maklumat September 1945" menjadi padat. Deliar Noer menyebut pelipatan jumlah penduduk Yogyakarta angkanya dari 150 ribu jiwa menjadi 600 ribu jiwa. Selo Sumarjan menyebut penduduk Yogyakarta hasil sensus zaman Jepang jumlahnya mencapai 1,8 juta jiwa. Tambahan penduduk baru yang masuk sebanyak 50.000 orang. Bahkan, banyak penduduk mengalami kemiskinan (Joesoef, 2004). Untuk penggajian para pejabat pemerintah RI, Sultan Hamengku Buwono IX memberikan kekayaannya (Yusa 1995, 143-92). Jumlah yang dikeluarkan mencapai angka 6 (enam) juta gulden (Atmakusumah, 1982). Sampai beberapa tahun terakhir, kekayaan Sultan Hamengku Buwono IX yang dalam

akuntansi disebut sebagai “*initial balance*” untuk pemerintah RI tersebut masih menjadi isu yang dibicarakan (Gatra, 2008).

Dalam pemerintahan RI terdapat beberapa kali pergantian kabinet. Berhubung dengan kedatangan kembali pasukan militer Belanda yang mau menguasai RI yang telah merdeka, berbagai perjanjian dilakukan sebagai upaya diplomasi. Di antara masa-masa tersebut, satu hal penting adalah terjadinya dua kali aksi militer yang dilancarkan Belanda. Situasi inilah yang membuat berlangsungnya usaha gerilya yang dilakukan oleh aparat pemerintahan RI. Agresi militer I terjadi pada tanggal 21 Juli 1947. Dunia Internasional mereaksi tindakan Belanda ini dengan pembentukan Komisi Tiga Negara dengan berbagai proses perundingan. Adapun agresi militer II berlangsung pada tanggal 19 Desember 1949. Presiden dan wakilnya menyerahkan diri dan diasingkan. Sementara itu, pemerintahan RI dialihkan pada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, sedangkan pihak militer tidak mau menyerah dan melakukan aksi gerilya.

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan RI, perjuangan gerilya dilakukan oleh pihak militer. Inilah yang umum dikenal selama ini (Nasution, 1982; Simatupang, 1960; Sutanto, 2006), sedangkan aksi gerilya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sipil sering luput dari pengamatan (Pour, 2009). Pada masa itu, setidaknya ada 5 (lima) menteri yang menyingkir dari Yogyakarta dan melakukan aksi gerilya. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman Wiryoanjoyo, Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprojo, Menteri Bahan Makanan I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan dan Pemuda Supeno, dan Menteri Agama KH. Masykur. Kelima menteri tersebut membentuk Komisariat Pusat Pemerintahan di Jawa (KPPD). Ini merupakan perwakilan dari Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang dibentuk di Bukittinggi. PDRI melanjutkan pemerintahan RI sementara Presiden Soekarno dan Moh. Hatta ditahan. KPPD memberikan dukungan kepada Markas Besar Komando Jawa yang menjalankan pemerintahan militer di wilayah Jawa melalui persetujuan yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri (Nasution, 1982; Simatupang, 1960). Pemimpin daerah di Sumatera meliputi Aceh, Tapanuli

- Sumatera Timur, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan tetap berada di tangan pemimpin-pemimpin sipil (Simatupang, 1960). Di wilayah Jawa dan luar Jawa, pengisian jabatan militer dilakukan oleh perwira-perwira muda dan kadet-kadet yang dididik dalam Akademi Militer angkatan-angkatan awal di Yogyakarta (Sinjal, 1996, 91-192). Periode gerilya yang dilakukan berlangsung selama setengah tahun.

Kasman Singodimedjo sebagai anggota KNIP turut menjalankan tugas selama gerilya dengan berbekal surat yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman. Ia memerincikan tugas yang dilakukannya meliputi; (1) memberi penerangan di seluruh daerah Republik Indonesia yang masih dikuasainya mengenai masih berlangsungnya Pemerintahan Pusat, dan (2) membangkitkan semangat perlawanan rakyat menghadapi Belanda (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982; Soedarmanto, 2011, 143). Dengan menggunakan berbagai alat transportasi Kasman Singodimedjo melaksanakan hal tersebut, ia pun naik kereta, naik kuda milik penduduk atau berjalan kaki. Dari catatan seorang kader Masyumi yang mengikutinya, Kasman Singodimedjo memberikan pengarahan dan dengan cepat berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Dalam, sebuah kesaksian saat memperingati HUT 75 Tahun Dr (HC) Kasman Singodimedjo, A.H. Nasution menuliskan pengalamannya bertemu dengan Kasman Singodimedjo dalam situasi gerilya. A.H. Nasution yang menjabat Panglima Komando Jawa dari Markas Besar Komando Jawa (MBKD) saat dikunjungi oleh Kasman Singodimedjo tengah berada di wilayah Boro, Kulon Progo. Sebelumnya, A.H. Nasution juga pernah dikunjungi saat berada di Klaten. Dalam kunjungan ke Boro, Kasman Singodimedjo disertai oleh Burhanuddin Harahap. Pertemuan tersebut bersifat saling memberikan *briefing* terkait situasi internasional, nasional, dan situasi lokal di pedesaan Jawa Tengah. Terhadap kehadiran dan peran Kasman Singodimedjo tersebut, A.H. Nasution memberikan catatan, "Beliau telah jauh berkeliling usaha ikut memobilisasi dan menggerakkan perlawanan rakyat" (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982; Soedarmanto, 2011).

Dalam *Laporan Dari Banaran*, Jenderal T.B. Simatupang memberikan catatan tersendiri terkait dengan Kasman Singodimedjo. Catatan tersebut antara lain diungkapkan bahwa “Mr Kasman adalah tipe yang lain sama sekali daripada teman-teman lain sepertainya Prawoto Mangkusasmito... Mr. Kasman tidak dapat tinggal tenang dan tenteram, dia harus bergerak” (Simatupang, 1960). Sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, T.B. Simatupang menuliskan beberapa situasi daerah yang disusun berdasarkan laporan Kasman Singodimedjo. Wilayah yang dijelajahi Kasman Singodimedjo meliputi Bojonegoro, Madiun, Ponorogo, Semarang, dan terakhir saat berjumpa dengan T.B. Simatupang di Banaran. “Banyak juga yang saya dengar dari Mr. Kasman mengenai timbangannya mengenai keadaan dan pejabat-pejabat di daerah-daerah yang telah dikunjunginya ...” Laporan daerah selain yang disebut di atas dicatat T.B. Simatupang secara lebih detail meliputi Pati, Gunung Muria, Jepara, Sragen, Sawangan, dan Kediri. Di tempat-tempat tersebut dilaporkan mengenai pejabat yang dijumpai dan relasi antar mereka. Juga disebut fasilitas pemancar radio sebagai alat komunikasi yang ditemui di Bojonegoro dan Sawangan, Jawa Timur (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982; Simatupang, 1960).

Menteri Dalam Negeri Sukiman mengakhiri masa gerilyanya dan kembali masuk ke Yogyakarta. Agaknya perhitungannya tidak tepat sehingga, dia ditangkap oleh Belanda saat telah berada di Yogyakarta. Pengalaman gerilya Menteri Pembangunan dan Pemuda Supeno tidak banyak tercatat. Laporan Kasman Singodimedjo sebagaimana ditulis oleh T.B. Simatupang menyebutkan upaya yang dilakukannya yakni penyusunan pedoman untuk KODM (Komandan Onder Distrik Militer) dan kader-kader desa. Dalam laporan A.H. Nasution dan biografi I.J. Kasimo disebutkan mengenai akhir dari sejarah perjuangan Menteri Supeno yang meninggal ditembak mati oleh Belanda di Desa Sawahan, Nganjuk (Nasution, 1982; Soedarmanto, 2011). Ia dieksekusi bersama 6 orang lainnya. Setelah masa gerilya berakhir, Mr. Susanto Tirtoprojo melaporkan meninggalnya Menteri Supeno dalam sidang kabinet di Istana

Negara di Yogyakarta (Simatupang, 1960). Menteri Supeno pun dikukuhkan sebagai pahlawan nasional pada pertengahan 1970.

Pejabat yang lain adalah Susanto Tirtoprojo. Atas pengalamannya melakukan gerilya, Susanto Tirtoprojo sebagai Menteri Kehakiman menuliskan dengan bentuk tembang macapat dalam naskah *Nayaka Lelana* (Tirtoprojo, 1985). Pengalaman gerilya dimulai dengan peristiwa 19 Desember 1948, menggambarkan rute perjalanannya, perjumpaan dan koordinasinya dengan berbagai pejabat, pemberitaan wafatnya Menteri Supeno yang tertembak di Nganjuk 24 Februari 1949 lewat radio, sambutan penduduk yang menampungnya dalam kesederhanaan dan kekurangan mereka.

Dalam situasi gerilya, yang merasakan akibatnya bukan hanya yang terlibat dalam pengalaman bergerilya, tidak hanya tokoh-tokoh besar tersebut. Sebab, keluarga mereka juga terkena dampaknya. Ibu Kasman Singodimedjo yang pernah mengalami menjadi istri pejabat bermacam posisi dari Jaksa Agung, Kepala Kehakiman Militer Kementerian Pertahanan, Menteri Muda Kehakiman, harus menghidupi anak-anak yang ditinggal gerilya dengan macam-macam usaha; menukarkan bahan pakaian untuk mendapatkan beras atau berjualan bahan makan dan sayuran (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982). Seperti halnya yang dialami oleh Ibu Sudirman yang harus menyerahkan perhiasannya untuk biaya gerilya (Pour, 2009; Simatupang, 1960).

Catatan-catatan pokok di atas, memperlihatkan gerilya sipil - militer yang dialami bersama telah menciptakan ruang dan meninggalkan ingatan sejarah karena mampu keluar dari situasi krisis terhadap bahaya yang mengancam. Ini menjadi penting bagaimana birokrasi sipil dan komando militer yang terbentuk dalam situasi darurat dijalankan sebagai upaya mempertahankan Republik Indonesia yang telah merdeka. Pengalaman Kasman Singodimedjo menjadi penting untuk menempatkan dalam melihat kembali bagaimana yang telah dimulai *founding fathers* terus diperjuangkan dengan berbagai upaya dan risiko yang harus dibayar.

MELINTAS DAN BERTEMPAT TINGGAL SEBAGAI PROSES PEMBENTUKAN IDENTITAS


Ketika pengalaman masa gerilya pada situasi krisis dan masa sesudahnya ditempatkan dalam sebuah proses panjang, ada istilah khusus yang dapat diketengahkan di sini. Terma *Crossing and Dwelling* atau melintas dan bertempat tinggal adalah proses penting. Proses tersebut menjadi masa membentuk identitas bersama. Ada beberapa orientasi bersama yang dialami oleh mereka yang terlibat di dalamnya melintasi perbatasan situasi masa penjajahan dan mulai menjadi bangsa merdeka berdaulat di sebuah negara merdeka dengan harapan jangka panjang yang dicita-citakan sebagai bangsa. Ada peta jalur yang digambarkan pada rumusan jembatan emas mewujudkan kemerdekaan bangsa. Periode gerilya menjadi periode bersama, bukan melulu kelompok militer yang dikenali sampai saat ini. Ada pejabat sipil dan rakyat, dalam kesaksian pejabat militer yang ditemui pada masa gerilya. Ada pengalaman orang-orang bahkan keluarga yang terlibat di dalamnya. Sampai pada akhir dari masa gerilya tersebut, ada harga yang harus dibayar. Di sinilah salah satu penggalan sejarah bangsa ditempatkan. Sebagai kesempatan membuka ruang bersama dengan semangat, pengalaman dan solidaritas dalam perjuangan dan penderitaan yang dijalani bersama. Akhirnya, periode perang gerilya merupakan pengalaman *crossing and dwelling*. Inilah penggal khusus yang dikenangkan untuk melawan lupa. Atau, untuk tidak terkecoh dengan pihak-pihak yang secara sengaja atau tidak sengaja meniadakan dan menghapus sejarah yang telah terukir.

Dalam *Historiografi Sejarah Kontemporer Islam* diperlihatkan faktor sejarah sebagai modal integrasi bangsa yang sudah dikemukakan oleh Soekarno. Bagaimana hal tersebut dikelola untuk memungkinkan berlangsungnya proses integrasi bangsa dengan kekayaan kepribadian nasional yang dimilikinya. Hal inilah yang menjadi tantangan dan perlu dikerjakan dalam forum akademik sekaligus menempatkan sejarah sebagai faktor yang dibebaskan dari sebuah tafsir yang sempit dan sepihak, ditempatkan untuk membangun harapan yang lebih baik untuk masa kini dan masa depan (Azra, 2002: 87-112). Pokok-pokok

di atas, menjadi bagian penting dari pembentukan identitas nasional. Ia dihadirkan melalui simbol-simbol dan perayaan untuk mengikat rasa kesatuan (Smith, 1991: 160–63). Dalam kesatuan identitas nasional dengan pokok-pokok tersebut, setiap kali dapat dihadirkan sebagai faktor pemersatu di mana kelompok intelektual pembangun nasionalisme berjuang bersama. Inilah yang menjadi pengikat harapan masa kini dan masa depan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmakusumah. 1982. *Tahta untuk Rakyat*. Jakarta: Gramedia.
- Azra, Azyumardi. 2002. *Historiografi Islam Kontemporer Wacana, Aktualitas dan Aktor Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Gatra, Majalah. 2008. "Surat Pembaca DR. IR. Panji R. Haditono, MH." *Majalah Gatra*.
- Joesoef, Daoed. 2004. *Aku dan Dia: Memoar Pencari Kebenaran*. Jakarta: Kompas.
- Nasution, A.H. 1982. *Memenuhi Panggilan Tugas*. Jakarta: Gunung Agung.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*. Bandung: Mizan.
- Panitia 70 Tahun Momammad Roem. 1978. *Mohammad Roem 70 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman. 1982. *Hidup Itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Pour, Julius. 2009. *Doorstoot Naar Djokja. Pertikaian Pemimpin Sipil - Militer*. Jakarta: Kompas.
- Simatupang, T.B. 1960. *Laporan Dari Banaran Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan*. Jakarta: P.T. Pembangunan Djakarta.
- Sinjal, Daud. 1996. *Laporan kepada Bangsa Militer Akademi Yogya*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Smith, Anthony D. 1991. *National Identity*. London: Penguin Books.

- Soedarmanto, J. B. 2011. *Politik Bermartabat Biografi I.J. Kasimo*. Jakarta: Kompas.
- Sutanto, Himawan. 2006. *Yogyakarta 19 Desember 1948 Jendral Spoor (Operatie Kraai) versus Jendral Sudirman (Perintah Siasat 1)*. Jakarta: Gramedia.
- Tirtoprodjo, Susanto. 1985. *Nayaka Lelana Menteri Bergerilya*. Yogyakarta: UP Indonesia.
- Toer, Pramoedja Ananta. 1999. *Kronik Revolusi Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yusa, Abrar. 1995. *Komat-kamit Biografi Selo Soemardjan*. Jakarta: Gramedia. 

MENELADANI PERJUANGAN KASMAN SINGODIMEDJO

Mundzirin Yusuf

PENGANTAR

Prof. Dr. Mr. R. H. Kasman Singodimedjo adalah salah seorang Pahlawan Nasional yang hidup pada lima zaman, yaitu zaman penjajahan Belanda, zaman kemerdekaan, zaman penjajahan Jepang, zaman Orde Lama, dan zaman Orde Baru. Sebagai seorang yang pernah hidup pada lima zaman, ia memiliki pengalaman yang cukup banyak. Meskipun pernah hidup di lima zaman, ia tetap memiliki akidah Islam yang kokoh dan selalu melaksanakan serta menjaga syariat Islam. Bahkan, ia senantiasa memperjuangkan agar Agama Islam tetap eksis di bumi Nusantara. Kasman Singodimedjo, yang juga pernah menjadi Jaksa Agung pertama dan Ketua BP Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), adalah salah seorang pendiri republik ini. Sebagai pejuang, ia tetap memilih Islam sebagai asas perjuangannya. Oleh para koleganya, Kasman Singodimedjo dikenal sebagai seorang pejuang laksana lilin yang tak kunjung padam. Semangat dan daya juangnya tidak pernah menurun, meski dalam situasi dan kondisi bagaimana pun; ibarat obor, kadang-kadang menyala-nyala, memancarkan api yang menjilat-jilat (Tim Penyusun, 1982).

Kasman Singodimedjo memiliki integritas yang tinggi, memiliki kekayaan yang banyak, meskipun tidak bersifat fisik. Oleh karena itu, Mohammad Natsir mengatakan

bahwa ia meninggalkan kekayaan harta yang bukan fisik, tetapi meninggalkan warisan yang monumental, misalnya: “Suka berkorban dan rela berjuang; dedikatif; dan konsisten dalam hidup” (Suara Muhammadiyah, 1982: 9). Tulisan yang ringkas ini tidak akan menganalisis pengalaman hidup Kasman Singodimedjo secara integral, tetapi hanya membahas perjuangannya. Tujuannya adalah agar kehidupannya dapat diteladani oleh generasi milenial saat ini. Oleh karena itu, kata-kata akhir Kasman Singodimedjo kepada Pak Natsir: “Sir, lanjutkan perjuangan,” sambil memegang tangan Pak Natsir, perlu kita simak.

LATAR BELAKANG KELUARGA

Kasman Singodimedjo lahir pada hari Senin Wage, 8 Muharam 1403 H./25 Pebruari 1904 M di Dusun Clapar, Kalirejo, Bagelen, Purworejo, Jawa Tengah (Ensiklopedia Islam, 1987). Ada pula yang berpendapat bahwa ia lahir pada 25 Februari 1908 (Tim Penyusun, 1982). Ia wafat pada hari Ahad Pahing, 6 Rabi`ul-Awwal 1425 H./25 Oktober 1982 M.¹ Ayahnya (H. Singodimedjo) seorang penghulu yang aktif mengabdikan kepada masyarakat dalam bidang agama dan sosial di desanya (LP3M) UMY dan Mata Bangsa, 2015). Ayahnya juga pernah menjabat sebagai carik desa, *ambtenaar* (Aparat Negeri Sipil/ANS), sebagai pegawai polisi swapraja di Tabanan, Bali dan di Gunung Sugih, Lampung Tengah (Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, 1982). Penghidupan keluarganya sederhana, meskipun mereka memiliki sawah, tegalan, dan tanah pekarangan. Singodimedjo menikah dengan Kartini, seorang wanita yang buta huruf, yang sehari-harinya sebagai penjual kain di pasar (SM, 1982). Perkawinannya dengan Kartini dikaruniai tujuh orang anak, dan yang hidup empat orang. Mereka adalah Kasman, Kasmah, Kasiyem, dan Surtiyati (Tim Penyusun, 1982).

1 Mayoritas penulis tidak menyebut tahun hijriyahnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag, pakar ilmu falak dari Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena dengan bantuannya saya dapat mencantumkan tanggal kelahiran Prof. Dr. Mr. R. H. Kasman Singodimedjo dengan kalender hijriyah.

Isteri Kasman Singodimedjo bernama Hajjah Raden Ayu Supinah Isti Kasiyati, yang dinikahi pada tanggal 17 September 1928 ketika ia masih mahasiswa. Pasangan ini dikaruniai enam orang anak, yaitu Ny. Siam Saputro, Ir. Mohammad Sulaiman Wibisono, Bambang Bagus Toko, Ir. Djoko Bangun Mertani, Ny. Kabul, S. H., dan Dewi Nurul Mustaqimah, dan 13 cucu (Tim Penyusun, 1982). Hajjah Raden Ayu Supinah Isti Kasiyati meninggal pada hari Ahad, tanggal 8 Muharram 1403 H./13 September 1981 M. Setelah isterinya meninggal, Kasman Singodimedjo pun menikah lagi dengan Siti Salamah. Sebagai "Pengkulu"-nya adalah K. H. A. R. Fachruddin, Ketua P. P. Muhammadiyah saat itu. Adapun saksi-saksinya, dari pihak laki-laki adalah puteranya sendiri, Ir. Wibisono, dan dari pihak perempuan adalah Wahyuddin (Basuni, [I], 1982).

Meskipun ia memakai nama belakang Singodimedjo, yang merupakan nama ayahnya, namun rupanya nama tersebut lebih tepat diterapkan bagi Kasman Singodimedjo. Perkataan *Singo* (Singa) adalah binatang yang dikenal sebagai sang raja rimba yang sangat perkasa. Memang, ia seorang pemuda yang perkasa; fisiknya yang pendek tampak kekar dan mampu menunjukkan kekuatan serta selalu tegas dan terbuka, tanpa tedeng aling-aling (Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, 1982). Dalam bahasa Jawa, *Singo* diambil dari kata *sing* yang berarti barangsiapa yang; *dimejo* berarti sesuatu (yang tertinggi) yang bakal dicapai. Maksudnya, seorang pribadi yang bercita-cita tinggi (mulia). Sesungguhnya, yang dimaksud dengan Singodimedjo adalah terkait dengan cita-citanya yang harus dicapai dengan bersungguh-sungguh, karena yang dituju adalah suatu hal yang mulia (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman Singodimedjo, 1982: 42). Menurut Mohammad Roem dan M. Natsir, memang namanya "singa di meja", namun realitasnya ia adalah "singa di mana-mana". Bahkan, dalam anekdot-anekdot muncul "kesingaan" Bapak Kasman Singodimedjo (Tim Penyusun, 1982).

PENDIDIKAN KASMAN SINGODIMEDJO

Kasman Singodimedjo adalah seorang anak desa yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia berkemauan keras untuk

menjadi ilmuwan sehingga di dalam menuntut ilmu betul-betul ditekuninya. Semula, ia berstudi di Sekolah Desa di Kemanukan, kemudian pindah ke *Hollandsch Inlandsche School (HIS*, setingkat sekolah dasar) Kutoarjo, Purworejo. Dengan seizin orang tuanya, ia pindah ke Jakarta mengikuti sahabatnya yang bernama Mas Giman. Sebelumnya, Mas Giman telah menyekolahkan adiknya di Kemanukan yang bernama Kasmah di *HIS met de Bijbel* di Jakarta dan mengangkatnya sebagai anak. Setelah Kasman Singodimedjo ikut kepada Mas Giman, ia pun disekolahkan di sekolah yang sama. Selanjutnya, ia melanjutkan sekolahnya ke *Meer Uitgebreid Large Onderwijs (MULO)*, setingkat SMP, di Magelang (Tim Penyusun, 1982).

Setelah tamat dari *MULO*, ia melanjutkan studinya ke *Algemene Middlebare School (AMS)*, sekolah setingkat SMA. Di samping bersekolah, ia juga aktif belajar agama Islam kepada KH. Ahmad Dahlan (Jawahir, 1982). Sita-cita Kasman Singodimedjo setelah tamat AMS adalah ingin masuk ke *School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA)* atau *Geneeskundige Hoogeschool (GHS)* atau Sekolah Tinggi Kedokteran di Batavia/Jakarta. Sebab, di sekolah tersebut disediakan beasiswa dan setelah tamat dijamin dapat diperkerjakan di situ. Oleh karena itu, ia mengikuti ujian masuk dan lulus. Pada tahun 1923, ia mulai belajar di *STOVIA*. Di sini pula ia bertemu dengan Mohammad Roem yang masuk pada tahun berikutnya, 1924. Disebabkan sangat aktif dalam berorganisasi, Kasman Singodimedjo dianggap berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga dikeluarkan dari *STOVIA*. Alasan ia dikeluarkan adalah karena alasan prestasi; dua tahun ia tidak naik kelas sehingga beasiswanya pun dicabut. Selanjutnya, ia masuk ke Sekolah Tinggi Hukum atau *De Rechten Hoge School (RHS)* bagian Hukum Sosial Ekonomi dengan nilai yang memuaskan (Ensiklopedia Islam, 1987).

PENGALAMAN ORGANISASI

Sejak muda, Kasman Singodimedjo sudah aktif berorganisasi, baik non-keagamaan maupun organisasi keagamaan. Misalnya, ketika di Magelang ia pernah memasuki perkumpulan Darah Jawi. Baginya, organisasi tersebut

dimanfaatkan sebagai tempat belajar, memimpin, dan berpidato (Basuni [I], 1982). Ia juga masuk perkumpulan *Koetoardjoshce Studerenden Bond* (KSB), sebuah organisasi yang para anggotanya terdiri dari para pelajar yang bersekolah di beberapa kota besar di Jawa (Basuni, [III], 1983). Kegiatan Kasman Singodimedjo di tengah masyarakat tidak sebatas itu. Sebelum masuk organisasi *Jong Islamieten Bond* (JIB), ia pernah bergabung dalam *Jong Jawa*, bahkan ia sebagai salah satu pengurusnya (Ensiklopedia Indonesia, 1984). Di situ, ia memperjuangkan masuknya agama Islam sebagai dasar organisasi, dengan alasan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Hal itu dilakukannya bersama-sama dengan Sjamsuridjal, Gus Muso (dikenal dengan Ki Musa al-Mahfudz), dan Suhodo (Basuni [III], 1983). Usul yang sama juga pernah dilakukan oleh H. Agus Salim, namun hal itu juga ditolak (Tim Penyusun, 1982), padahal Kristen dan Katholik telah mendapat keleluasaan untuk memasukkan pelajaran agama mereka. Karena itulah, ia dengan teman seideologinya mendirikan JIB pada tahun 1925 (Ensiklopedia Islam, 1987).

Dalam organisasi JIB, Kasman Singodimedjo menjadi ketua yang ketiga (1930-1935), setelah Sjamsuridjal (1925-1926) dan Wiwoho Purbohadidjojo (1926-1930). Saat itu, umur para anggotanya pada kisaran 14 - 30 tahunan dan jumlah anggotanya mencapai 4000 orang. Sebagai organisasi yang berdasarkan Islam, ia berharap agar dari organisasi tersebut kelak muncul para pemuka dan para pejuang Islam, baik dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia (RI) maupun dalam bidang kemasyarakatan. Setelah JIB berdiri, maka dibentuklah organisasi wanita yang bernama *Jong Islamieten Bond Dames* (JIBDA). Organisasi ini dibentuk karena ada seorang anggota *Jong Java* yang masuk anggota JIB yang bernama Siti Sukaptinah (Basuni [III], 1983).

Pada tahun 1925, Kasman Singodimedjo mendirikan organisasi kepanduan yang bernama *National Indinesische Padvinderij* (Natipij) (Ensiklopedia Indonesia, 1987). Pada kongres pertamanya, pada 2 Mei 1926 telah diadakan himpunan oleh organisai-organisasi pemuda daerah dalam satu wadah organisasi yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia

(PPPI) sebagaimana dikehendaki oleh JIB, berdasarkan anggaran dasarnya. Selanjutnya, tekad persatuan dan kesatuan bangsa diwujudkan pada Kongres Pemuda II. Oleh karena itu, dalam anggaran dasarnya terdapat kata-kata persatuan dan kesatuan bangsa yang kelak merupakan gagasan dan pengertian Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda kedua, pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Kasman Singodimedjo pun hadir dalam kongres ini.

Sementara itu, JIB menerbitkan majalah yang bernama *Het Licht* yang juga memiliki nama lain *An-Nur* (sinar/cahaya/pencerahan) yang dipimpin oleh Mr. Jusuf Wibisono. Kasman Singodimedjo pun sering menulis dalam majalah tersebut, baik menggunakan nama asli maupun nama samarannya, dan menguraikan masalah agama Islam (Basuni [III], 1983). Saat bergiat di JIB, ia juga berkenalan dengan tokoh-tokoh/ulama yang sudah terkenal di masyarakat, seperti HOS Tjokroaminoto, H. Agus Salim, KH. Ahmad Dahlan, dan Syaikh Ahmad Surkati. Bahkan oleh Surkati, ia diminta untuk mengajar kependuan di Perguruan Al-Irsyad (Ensiklopedia Muhammadiyah, 2015). Kegiatan tersebut dilakukan sambil mengajar dan memberi ceramah agama yang telah dilakukan semenjak ia masih sekolah di MULO Magelang. Karena senang berorganisasi, sebagai pelajar yang masih berusia 18 tahun, ia sudah berkenalan dengan KH. Ahmad Dahlan (*Hoofd Bestuur*) Muhammadiyah dan K. H. Abdul Aziz, yang sengaja datang ke Magelang untuk mengisi pengajian (Basuni [VI], 1983). Oleh karena itu, pada tahun 1935 ia sudah mengenal organisasi Muhammadiyah dan secara resmi mulai aktif di organisasi tersebut. Sejak itu juga, ia aktif mengajar di lembaga-lembaga pendidikan milik Muhammadiyah, seperti AMS, Muallimin, Muallimat, MULO, dan *Hollandsch Inlandsche Kweekschool* (HIK) (Ensiklopedia Muhammadiyah, 2015).

Setelah beberapa tahun aktif di Muhammadiyah, ia pun diangkat menjadi Ketua Muhammadiyah Cabang Betawi/Jakarta sekaligus sebagai Koordinator Muhammadiyah Wilayah Jakarta, Bogor, dan Banten. Menurut Hamka, ia mendapatkan hak istimewa untuk hadir dalam Majelis Tanwir, yaitu majelis yang khusus dihadiri oleh konsul-konsul atau Ketua Pimpinan

Daerah yang belum dapat sebutan Konsul (Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, 1982). Pada bulan Mei 1940, diadakan Konferensi Muhammadiyah se-Jawa Barat di Bogor. Saat itu, Kasman Singodimedjo menyampaikan orasinya sehingga ia dituduh melanggar hukum. Ia pun ditangkap dan ditahan oleh Polisi Belanda, *Politie Inlichtingen Dienst* (PID). Padahal, pemerintah Belanda baru saja mengumumkan berlakunya *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) atau keadaan darurat/perang (Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, 1982). Namun, dengan adanya peristiwa tersebut, namanya semakin populer. Apalagi *Landraad* (Pengadilan Negeri) Bogor tidak dapat membuktikan tuduhan dalam sidangnya (Tim Penyusun, 1982).

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, aktivitasnya di Muhammadiyah semakin meningkat hingga wafat. Ia kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua PP Muhammadiyah dan tekun berkantor di Jalan Menteng Raya 62 Jakarta. Dalam setiap rapat dan pertemuan, ia selalu hadir dari awal hingga selesai. Hanya saja, ketika Rapat Kerja Pimpinan (Rakerpim) di Yogyakarta pada bulan Mei 1982, ia sudah tidak bisa hadir lagi karena dirawat di Rumah Sakit Islam (RSI) Jakarta (Basuni [VI] 1983: 5). Pada tanggal 9 Nopember 1963, ia ditangkap dan ditahan bersama-sama para pemimpin Islam lainnya, seperti Hamka, H. Ghazali, Sahlan, Nasuhi, dan lain-lain. Ia dituduh mengadakan rapat gelap di Tangerang untuk membunuh Presiden Soekarno. Saat itu, kekuatan PKI sedang memuncak dan pengaruhnya terhadap Soekarno. Selama ditahan, ia sempat menulis buku *Renungan dari Tahanan*. Setelah keluar dari tahanan, ia aktif di organisasi Muhammadiyah yang telah dimulainya sejak muda (Tim Penyusun, 1982).

Selain di Muhammadiyah, ia juga aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga pemilu tahun 1977 (Jawahir, 1982). Saat itu, ia berkampanye untuk PPP dan mengecam orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Di samping itu, ia juga sebagai anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) – saat diketuai oleh Buya Hamka- keteguhan dan pendiriannya tidak tergoyahkan sehingga hal itu menjadi karakter khasnya. Sebetulnya, ia tidak layak disebut sebagai figur politikus, tetapi

lebih tepat disebut sebagai figur mubaligh Islam yang bersikap terus terang, keras, dan teguh mempertahankan pendirian (Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, 1982).

KARYA DAN JABATAN

Meskipun cita-cita awal Kasman Singodimedjo gagal, ingin menjadi dokter, namun karena niatnya untuk studi menggebu-gebu, maka kegagalannya dapat ditebus. Oleh karena itu, karirnya pun bagus dan lancar, memiliki beberapa karya ilmiah, dan jabatan penting. Sebagai akademisi, ia memiliki beberapa karya tulis, di antaranya adalah (1) Pada tahun 1959 menulis: *O, Anakku*; (2) Pada tahun 1967 menulis: *Renungan dari Tahanan*; dan (3) Pada tahun 1972 menulis: *Rente Bukan Riba*. Di samping itu, ia juga pernah menulis naskah-naskah, seperti *Proses di Magelang*; *Proses di Bogor*; dan *Proses di Jakarta*. Juga beberapa karya tulisnya pernah dimuat di media cetak *Het Licht*, majalah cetak sebagai sarana perjuangan JIB.

Ternyata, karir tersebut mengantarkannya menduduki berbagai jabatan penting sejak masa penjajahan (sebelum masa Perang) hingga ia wafat. Adapun jabatan yang pernah diemban (Suara Muhammadiyah, 16-31 Maret 1982; Tim Penyusun, 1982) oleh Kasman Singodimedjo adalah:

1. Pada tahun 1925-1929 menjadi Pengurus Besar *National Indonesische Padvindery (NATIPY)*, yaitu kepanduan milik JIB.
2. Pada tahun 1939-1940 menjadi Asisten Prof. van der Kolf RHAS.
3. Sebagai Agronom, pada tahun 1941-1943 diangkat sebagai Kepala *Landbouw voor Lichting en Binnenvischery van den Bare Landbouw School* (semacam Dinas Penerangan Pertanian) di Bogor.
4. Pada tahun 1943-1945 diangkat sebagai salah seorang *Daidancho* Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Jakarta.
5. Pada tahun 1945 diangkat sebagai Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Ketua Badan Keamanan Rakyat (BKR) Pusat.

6. Pada tahun 1945-1946 diangkat sebagai Jaksa Agung Pertama RI.
7. Pada tahun 1946-1947 diangkat sebagai Kepala Urusan Kehakiman dan Mahkamah Tinggi pada Kementerian Pertahanan RI dengan pangkat Jenderal Mayor (sekarang: Mayor Jenderal?)
8. Pada tahun 1947-1948 diangkat sebagai Menteri Muda Kehakiman RI.
9. Pada tahun 1948-1949 diangkat sebagai Anggota Badan Pekerja KNIP RI.
10. Ketua Komite Nasional Pusat (Parlemen Darurat).
11. Pada tahun 1949 (selama tiga bulan) ditugas-belajarkan (*Studie Opdracht*) di Eropa untuk mengkaji hukum dan pengadilan militer.
12. Pada tahun 1948-1950 diangkat sebagai Lektor Universitas Islam Indonesia dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Tatanegara.
13. Pada tahun 1950 diangkat sebagai Juru Bicara Keliling Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Jawa.
14. Pada tahun 1950 diangkat sebagai Guru Besar UII dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Tata Negara dan Hukum Pidana.
15. Pada tahun 1950 menjadi anggota penasehat delegasi RI di Konferensi Meja Bundar (KMB).
16. Pada awal April 1954 berkunjung ke Belanda untuk membicarakan pengelolaan perusahaan Belanda Fuch & Rens bersama Dr. A. K. Gani. Kemudian ia menjabat Presiden Direktur perusahaan perdagangan, perajutan, dan pertambangan.
17. Pada tahun 1956 diangkat sebagai Anggota Konstituante RI.
18. Pada tahun 1956 diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Pusat (DEIP), dan Majelis Industri Indonesia (MII) (SM, 01-15 Pebruari 1983).
19. Pada tanggal 24 Desember 1977 dianugerahi gelar *Doctor Honoris Causa* dalam Ilmu Hukum dari Universitas

Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang dipromotori oleh Prof. Dr. Ismail Sunny SH., M. CL, Guru Besar Luar Biasa Hukum Tatanegara. Gelar tersebut diberikan atas tulisan-tulisan, pidato-pidato, cerita-cerita sahabat dan pengabdianya kepada Allah, bangsa, dan negara. Di samping itu, ia berkorban demi umat dan berjuang demi tegaknya cita-cita hukum.

Adapun jabatannya dalam organisasi keagamaan adalah (1) Pada tahun 1930-1935 diangkat sebagai Ketua JIB; (2) Ketua Muhammadiyah Cabang Jakarta, sekaligus Koordinator Muhammadiyah Wilayah Jakarta, Bogor dan Banten; (3) Wakil Ketua PP Muhammadiyah (Majelis Hikmah); (4) Ketua Masyumi; dan (5) Mubaligh.

Melihat jabatan-jabatan tersebut, wajar jika Kasman Singodimedjo dikenal dengan beberapa sebutan seperti sebagai tentara, tokoh kepanduan, ilmuwan (agronom), orator, politikus, diplomat, Jaksa Agung, hakim, tokoh partai, pembesar negara, dan wiraswastawan. Bahkan, menurut Jenderal A. H. Nasution, Kasman Singodimedjo merupakan pemimpin di masa kritis (masa yg bersifat menentukan bagi timbul tenggelamnya negara) yang persyaratannya berbeda dari pada persyaratan “di masa rutin”, yang menonjolkan profesionalitas, seperti teknokrat, teknosof, birokrat, jenderal, dan seterusnya (Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, 1982).

KIPRAH KASMAN SINGODIMEDJO DALAM MENDIRIKAN NKRI

Sebagaimana diterangkan di atas, Kasman Singodimedjo pernah dipenjara. Ia diadili oleh *Landraad* (Pengadilan Negeri) Bogor dan dibela oleh Mr. RM. Sartono. Pengadilan pada akhirnya membebaskan dari segala tuduhan karena unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan. Dengan kejadian tersebut, reputasinya sebagai pejuang kemerdekaan semakin meningkat, karena ia membenci penjajahan dan penindasan (Tim Penyusun, 1982).

Pada tahun 1937, di Surabaya didirikan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), yang para anggotanya terdiri dari warga Muhammadiyah, Persis, dan Nahdlatul Ulama (NU). Jepang

berharap agar MIAI dapat mengembangkan kegiatan umat Islam. MIAI dianggap sebagai tempat bertanya bagi Jepang dalam masalah-masalah keislaman, lebih-lebih MIAI adalah organisasi federasi sebagai wadah perjuangan umat Islam. Jepang juga ingin memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri karena organisasi lain dilarang hidup. Pada tahun 1943, MIAI mengembangkan sayapnya dengan membentuk Majelis Putra dan Keputrian, Baitul-mal, dan menerbitkan majalah "Suara MIAI". Kasman Singodimedjo aktif di dalamnya, namun ia lebih banyak kegiatannya dalam organisasi Muhammadiyah. Pemerintah pendudukan Jepang mengizinkan MIAI berjalan terus.

Melihat gelagat Jepang tersebut, pada tanggal 24 Oktober 1943 MIAI dibubarkan oleh para pengurusnya, termasuk Kasman Singodimedjo. Setelah itu, dibentuklah wadah baru bagi umat Islam Indonesia, yakni Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Saat itu, Kasman Singodimedjo ikut hadir dalam pertemuan atas undangan pemerintah Jepang. Dengan Masyumi, Jepang bermaksud memperalatnya guna mengerahkan *romusha*² untuk kepentingan Jepang. Oleh karena itu, umat Islam didesak untuk mendirikan pasukan bersenjata. Inilah rintisan untuk mendirikan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan Hizbullah di kalangan umat Islam. Sebagai anggota Masyumi, semula Kasman Singodimedjo diangkat sebagai Sekretaris Jenderal, sedangkan ketuanya, Mohammad Natsir. Saat itu, keadaan negara kurang stabil karena kabinetnya jatuh bangun dan silih berganti.

Setelah PETA berdiri, Kasman Singodimedjo pun mengatakan bahwa calon-calon *Daidancho* (Komandan Batalion) dan *Cudancho* (Komandan Kompi)-nya sedapat mungkin diambil dari mereka yang mengerti agama Islam atau pengetahuan tentang umat Islam. Oleh karena itu, wajar jika Kiai Sam'un yang tidak mengerti baris-berbaris diangkat menjadi salah seorang komandan atas paksaan Jepang. Setelah Jepang mendirikan PETA, Kasman Singodimedjo menjadi salah seorang *Daidancho*-nya di Jakarta (Suara Muhammadiyah, 16-31 Maret 1982). Sebagai

2 Romusha adalah sebutan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945.

Daidancho PETA di Jakarta, sejak 31 Oktober 1943 ia memberikan latihan kemiliteran bagi para hakim, jaksa, guru-guru SLTA, dan lain sebagainya. Latihan-latihan ini dilakukan di *Daidan* (Kesatuan) atau tempat lain di bawah pengawasan *Daidancho* Kasman Singodimedjo. Soekarno dan Mohammad Hatta, bahkan, pernah mendapat latihan ini.

Pada tanggal 24 April 1944, diadakan apel PETA di lapangan Ikada (Sekarang Monas). Dalam kesempatan tersebut, *Daidancho* Kasman Singodimedjo mengatakan, agar prajurit PETA selalu memperkuat latihan batin yang didasarkan pada ajaran Islam serta bersikap berani, membela kebenaran, keadilan, dan kesucian. Oleh karena itu, para prajuritnya tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi harus memperhatikan kepentingan masyarakat atas dasar pengabdian kepada Allah. Para prajurit tidak boleh takut mati, karena mati di jalan Allah akan memperoleh titel syahid yang tidak lain jaminannya adalah surga Allah.

Memasuki perjuangan menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 -sebagai *Daidancho* Jakarta bersama *Daidancho* se-Jawa dan Madura- Kasman Singodimedjo dipanggil ke Bandung oleh pimpinan tertinggi Jepang, *Seibu Kikka* (Markas Kemiliteran). Pemanggilan tersebut dalam rangka mempersiapkan Jakarta menghadapi detik-detik kemerdekaan. *Cudancho* Abdul Latief Hendraningrat, sebagai wakilnya, ditugaskan untuk mengambil segala kebijaksanaan untuk mengadakan tindakan positif untuk membantu proses kemerdekaan tersebut (Basuni [III], 1983).

Ketika di Bandung, Kasman Singodimedjo mendengar Jepang menyerah. Ia pun langsung mengadakan pertemuan di Hotel Kota Bandung tempat para *Daidancho* menginap. Di depan kurang lebih 20 orang *Daidancho*, ia mengusulkan agar para *Daidancho* tidak perlu menyerahkan senjatanya kepada Jepang seperti yang diperintahkan karena senjata tersebut dapat dipergunakan untuk perjuangan kemerdekaan selanjutnya. Rupanya, rapat tersebut tercium oleh pimpinan militer Jepang. Kasman Singodimedjo pun diperiksa malam itu juga, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945. Ia diminta untuk

mempertanggungjawabkan aktvitasnya tersebut. Ia mengatakan antara lain bahwa karena Jepang sudah menyerah, maka soal kemerdekaan bangsa Indonesia sepenuhnya menjadi kewajiban bangsa Indonesia untuk memperjuangkannya dan tidak bisa diambil alih oleh Jepang. Ini pula sebabnya terjadi penculikan atas diri Soekarno dan Mohammad Hatta di Jakarta yang terkenal dengan peristiwa Rengas Dengklok.

Melihat jawaban Kasman Singodimedjo yang terus terang itu, menjelang pagi harinya ia dibebaskan. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan diumumkan. Saat itu, Kasman Singodimedjo yang sedang berada di Bandung memperoleh berita tersebut pada siang harinya. Berita ini segera disampaikannya kepada para *Daidancho* dan dianjurkan untuk segera pulang menyelamatkan senjata mereka masing-masing, seperti diusulkan sebelumnya, agar senjata jangan diserahkan kepada Jepang. Ia pun kembali ke Jakarta melewati Purwakarta dan Cikampek yang sebelumnya di daerah itu Soekarno dan Mohammad Hatta diculik. Menurut Nasution, saat menjelang proklamasi terkenallah tiga orang, yaitu Soekarno-Hatta-Kasman. Kasman Singodimedjo dikenal sebagai tokoh militer yang terdepan (Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, 1982).

Setibanya di Jakarta, ia menerima laporan dari *Cudancho* A. Latief Hendraningrat. Kasman Singodimedjo dipanggil oleh Soekarno sebagai Ketua PPKI agar menjadi anggota PPKI segera hadir pada sidang panitia di Pejambon. Saat itu, ada permasalahan tentang keberatan dari pihak non-Muslim (Kristen) agar tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang disusun oleh Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPPKI) tanggal 22 Juni 1945 (*Dokeuritsu Zyunbi Ttoosakai*) pimpinan Dr. Radjiman Wedyodiningrat agar dicabut. Kata-kata itu yakni “... dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Menurut Kasman Singodimedjo, keberatan pihak Kristen dapat mengancam keutuhan negara RI. Memang hal itu sangat dilematis. Hal tersebut sangat menegangkan di kalangan tokoh Islam dalam PPKI karena mereka tidak mau memenuhi tuntutan ini, termasuk Kasman Singodimedjo sendiri. Namun demikian, ia diminta oleh Soekarno untuk melobi Ki Bagus

Hadikusumo agar menyetujui penghapusan tujuh kata tersebut, dan ternyata berhasil (Tim Penyusun, 1982).

Dalam detik-detik yang sangat penting untuk mempertahankan keutuhan dan kesatuan bangsa, sebagai *Daidancho* Jakarta, Kasman Singodimedjo mengalami kegagalan dengan diambilnya senjata milik PETA oleh Jepang di markasnya, di Jakarta. A. Latief Hendraningrat, sebagai wakilnya tidak bisa disalahkan, karena ia sibuk dengan sidang PPKI. Saat itu, lahirlah keinginannya untuk menyusun Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang diambil dari PETA yang meliputi seluruh Indonesia dan ia sebagai pimpinan tertingginya. Atas dasar Dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan maklumat Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang ditandatangani pada tanggal 9 Oktober 1945 oleh ketuanya, yang tidak lain adalah Kasman Singodimedjo. KNIP merupakan MPR pertama. Pada tanggal 5 Oktober TKR juga berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai hari lahirnya TNI/ABRI.

Setelah aktif di KNIP, Kasman Singodimedjo praktis meninggalkan profesinya sebagai militer. Selanjutnya, ia aktif di bidang politik bahkan menjadi bagian penting Partai Masyumi. Ia sebagai ketua periode ketiga pasca Natsir dan Soekiman dan ia menunjukkan disiplin yang kuat (Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, 1982). Pada saat Partai Komunis Indonesia (PKI) memberontak, September 1948, Kasman Singodimedjo melihat sepertinya ada kerjasama antara PKI dengan komunis Belanda untuk merobohkan dan menjajah Indonesia kembali. Setelah PKI memberontak, diadakan rasionalisasi terhadap tentara oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta dan Kasman Singodimedjo ditetapkan menjadi Kolonel. Terlepasnya dari intaian PKI dan Belanda selama bergerilya, menurut Kasman Singodimedjo adalah semata-mata karena pertolongan Allah SWT (Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, 1982).

Setelah itu, terjadi agresi Belanda kedua pada Desember 1948 sehingga Yogyakarta dijadikan ibukota Republik Indonesia (RI) yang diduduki Belanda. Namun demikian, Kasman

Singodimedjo bergerilya sambil menjelaskan bahwa RI masih bangkit dan memberikan semangat perlawanan kepada kolonial. Menjelang penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada RI pada tanggal 1 Januari 1950, ia menjadi anggota penasehat delegasi RI di Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Ia juga diberi tugas untuk mempelajari hukum dan pengadilan militer di Belanda, Inggris, dan India. Sebagai ahli hukum, pada bulan Juni 1955 ia diundang untuk menghadiri *International Jurish Congres* di Athena, Yunani.

Pada tanggal 5 Muharram 1403 H atau 25 Oktober 1982 M, Kasman Singodimedjo berpulang ke rahmatullah dalam usia 78 tahun. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, pada Kamis 8 November 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Kasman Singodimedjo. Pemerintah menilai Kasman Singodimedjo telah berjasa dan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Ia merupakan kader, dari beberapa kader Muhammadiyah, yang diberi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah.

KEISTIMEWAAN KASMAN SINGODIMEDJO

Banyak sekali komentar dari para koleganya terkait dengan keistimewaan yang dimiliki seorang Kasman Singodimedjo. Suasana kehidupan keluarganya selalu tegar, karena ia pandai bergaul dengan siapa pun. Misalnya ada anekdot, mengapa ada yang berpendapat bahwa ia lahir pada 25 Februari 1908? Karena, ia malu kepada adiknya yang lebih dulu masuk sekolah dan berada di tingkat ketiga, sedangkan dirinya masih berada di tingkat pertama. Agar ia dianggap lebih muda dari adiknya, maka tahun kelahirannya dimudahkan. Satu pertanyaan penting mengenai Kasman Singodimedjo terkait dengan kiprahnya. Mengapa Kasman Singodimedjo tidak mau tinggal di Jakarta? Alasannya adalah karena ia ingin hidup dekat dengan keluarga sehingga dapat membantu kebutuhan mereka. Dalam buku *Hidup itu Berjuang Kasman Singodimedjo 75 Tahun* (Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, 1982) disebutkan bahwa Kasman Singodimedjo

pernah mengatakan, “setelah saya pikirkan secara mendalam, saya mengambil keputusan untuk pindah ke Purworejo. Setelah itu, saya bersekolah di Kutoarjo dan Magelang. Saya menumpang tinggal pada satu keluarga. Sebagai gantinya, saya mengerjakan beberapa hal untuk keluarga tersebut, seperti mencuci pakaian, membersihkan peralatan makan, sampai mengepel lantai”.

Sebagai seorang yang pernah belajar ekonomi, Kasman Singodimedjo mulai belajar mempraktikkan ilmu ekonominya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Misalnya, ia berjualan alat-alat tulis yang diperlukan kawannya di sekolah. Bahkan, Solihin Salam mengatakan, jika teman-temannya mencucikan pakaiannya kepada orang lain dengan membayar, maka ia mencuci pakaiannya sendiri. Kelebihan uangnya diberikan kepada adik-adiknya untuk keperluan sekolah, ditabung, dan modal berdagang (jual beli kain sesuai dengan pesanan). Ia juga menulis artikel di koran sebagai korespondensi, memberikan les bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Bahkan pada tahun 1931, ia juga bisa menghajikan bapak ibunya (Tim Penyusun, 1982).

Menurut Saifuddin Zuhri, karir yang mengejutkan adalah Kasman Singodimedjo tampil sebagai Ketua Komite Nasional Pusat (Parlemen Darurat). Tiba-tiba, ia yang berasal dari seorang *Daidancho*, perwira tertinggi dalam susunan PETA, ia menjadi politikus parlemen. Ia tidak menjadi jenderal, sesuai dengan jenjang kariernya dalam dunia keprajuritan (Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, 1982). Pendapat lain disampaikan oleh Jusuf Wibisono. Perbedaan Soekarno dengan Kasman Singodimedjo adalah Soekarno ketika menjelang pidato harus minum dulu, sedangkan Kasman Singodimedjo tidak pakai minum segala, meskipun ia harus berpidato satu sampai dua jam. Saya kagum, demikian kata Yusuf. Meskipun usianya sudah 75 tahun, tatkala mengikuti rapat MUI dan rapat organisasi Islam lainnya, ia masih mau naik bis kota. Bahkan, ia masih bersedia dibonceng dengan sepeda motor (Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, 1982). Adapun menurut Nasution, Kasman Singodimedjo memiliki tenaga hidup atau vitalitas yang tidak sembarangan. Ia energik, selalu menyimpan daya semangat hidup dalam era pergolakan

sekali pun. Ia bagaikan burung “branjangan”, gesit dan cepat hinggap bertengger, berpindah dari satu dahan ke dahan yang lain. Ia tidak tenggelam dihempas gelombang revolusi (Nasution, 1975).

Dalam kondisi seperti itu, Kasman Singodimedjo dengan segala daya dan mobilitasnya yang tinggi, berkeliling menjelajahi Jawa hingga ribuan kilometer dengan berjalan kaki, sambil menghindari dari intipan PKI dan Belanda. Hal itu dibenarkan oleh Jendral T.B. Simatupang dan Abdul Haris Nasution dalam memoarnya. Ada orang yang menyebut perjuangan RI waktu itu adalah perjuangan Soekarno, Mohammad Hatta, dan Kasman Singodimedjo. Ia dikenal oleh pimpinan TNI, khususnya Markas Besar Komando Jawa, sebagai seseorang yang memiliki mobilitas yang tinggi sehingga mampu mengelilingi daerah-daerah dengan berjalan kaki (Simatupang, 1983).

Kira-kira bulan Maret-April 1948, masih menurut Nasution, Kasman Singodimedjo datang di Pos Komando saya di daerah Klaten, kemudian pindah ke Kulon Progo. Saya menerimanya di pos tempat saya di Desa Boro, di sebuah rumah kecil. Kesempatan itu digunakan untuk membriefing dan memecahkan beberapa persoalan. Kesan saya, Kasman Singodimedjo adalah seorang yang selalu penuh harapan, tidak mengenal frustrasi, tidak kenal lelah, tak kenal diam, tak kenal istirahat, seorang yang dapat muncul di mana-mana. Suatu tipe kepemimpinan lapangan yang amat diperlukan dalam sistem gerilya (Nasution, 1975).

Kasman Singodimedjo adalah tokoh umat dan politisi Islam, yang jika ceramah, selalu menjelaskan bahwa al-Qur`an mengandung petunjuk-petunjuk lengkap. Oleh karena itu, kalau mau berusaha, mau kawin, mau berbuat sesuatu, tanya dulu kepada petunjuk al-Qur`an. Ia memang tergolong seorang *redenaar* (orator) yang perlu didengar bila sedang berpidato. Kasman Singodimedjo, kalau dalam pidatonya tidak menampilkan sepotong dua ayat al-Qur`an atau Hadis yang ia pelajari dan siapkan terlebih dahulu, membuat kesan bahwa ia seorang Islam yang taat kepada agama. Ia selalu mengisi jiwanya dengan agama. Pada waktu istirahat (tidak berpidato), diambilnya al-Qur`an dengan terjemahnya yang dikeluarkan

Departemen Agama. Ia tidak pandai membaca huruf Arabnya, tetapi sangat memperhatikan isinya (Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, 1982).

Sebagai seorang pemimpin, Kasman Singodimedjo kuat berpidato berjam-jam tanpa teks dan sanggup berpidato lama tanpa merasa jemu. Mana yang dirasanya orang kurang paham terhadap pidatonya, ia isi saja kata dengan kata: Katakan saja! Pada tahun 1956, sebelum Pemilu I, ia sanggup berbicara pagi, setelah itu tengah hari, sesudah itu petang hari. Petang harinya, ia berangkat ke kota lain dengan mobil di mana perjalanannya menghabiskan waktu selama dua atau tiga jam. Meskipun waktu sudah larut malam, bahkan menjelang pagi, ia berpidato, ia berkampanye sampai waktu subuh (Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, 1982).

Saat menjabat Wakil II Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP), Letjen (purn.) T.B. Simatupang mengatakan bahwa Kasman Singodimedjo membesarkan hati prajurit-prajuritnya yang berada di garis perang gerilya. Salah satu perannya yang perlu dicatat pada zaman gerilya melawan Belanda sebelum penyerahan kedaulatan, ialah kegiatannya menggembleng semangat perlawanan rakyat ke daerah-daerah. Ia tidak dapat tinggal tenang dan tenteram. Ia kebetulan sedang berada di daerah Bojonegoro pada awal serangan Belanda. Sesudah itu, ia telah pergi ke mana-mana, seperti ke Madiun, Ponorogo, dan Semarang. Ternyata, ia sekarang berada di sini. Selanjutnya, ia bergerak ke mana-mana sehingga diperkirakan ia sudah berjalan kaki kira-kira 1000 km (Simatupang, 1983).

Masih terkait dengan sosok Kasman Singodimedjo, Idham Khalid menuturkan bahwa Kasman Singodimedjo adalah pemimpin umat dan tokoh nasional yang berbobot. Tidak banyak jumlah pemimpin umat dan sekaligus tokoh nasional seperti Kasman Singodimedjo. Ia mempunyai orientasi dan dedikasi sebagai pemimpin Islam, di samping sebagai nasionalis yang dengan semangat patriotismenya mengorbankan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan tanah air, kemudian untuk negaranya. Pendiriannya keras dan tegas, tidak tedeng aling-alings, tetapi sportif dan elegan, konsisten dalam perjuangan, tidak kenal

istirahat dan menyerah, dan sifat-sifat lain yang menunjukkan ketekunan, keteguhan hati, dan kebenaran. Masih menurut Idham Khalid, ketika kaum Republikien sedang melakukan perang gerilya, tanpa disangka-sangka, suatu hari Kasman Singodimedjo menyinggahi markas kami. Ia datang seorang diri tanpa pengawalan, tanpa ajudan. Tentu saja berjalan kaki. Semua orang di zaman perang gerilya mesti berjalan kaki, meskipun pergi ke tempat yang jauh. Saya hampir tidak mengenalnya. Ia mengenakan kaos oblong, ikat kepala, memelihara kumis lebat dan menantang. Celananya disingsingkan hingga ke bawah lutut, tanpa alas kaki. Di punggungnya menggendong perbekalan perjalanan jauh yang dibungkus dalam sarung yang dililitkan pada badannya (Panitia Peringatan 75 tahun Kasman, 1982).

Sebagai Wakil Ketua PP Muhammadiyah, pada akhir-akhir saat aktif di Muhammadiyah, keberadaan Kasman Singodimedjo sangat diperlukan. Ia ahli pidato dan jagoan berdakwah. Ia figur yang perlu dicontoh, walaupun banyak yang tidak dapat mencontohnya. Hal yang mengagumkan, seperti yang dikatakan Jusuf Wibisono di atas, meskipun usianya sudah 75 tahun, tatkala mengikuti rapat MUI dan rapat-rapat organisasi Islam lainnya, ia masih mau naik bis kota, bahkan masih bersedia diboncengkan dengan sepeda motor (Tim Penyusun, 1982). Demikian sederetan keistimewaan Kasman Singodimedjo yang diungkapkan oleh beberapa koleganya. Sosok Kasman Singodimedjo adalah panutan yang tegas. Ia adalah pejuang sejati yang rela mengorbankan diri dan mengabdikan hidupnya untuk kepentingan yang lebih luas.

PENUTUP

Kasman Singodimedjo, seorang pejuang lima zaman, sangat layak untuk diteladani oleh bangsa Indonesia di era modern ini. Pada sosok Kasman Singodimedjo, dapat dilihat tentang bagaimana perjuangannya yang gigih, khususnya dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, untuk menutup tulisan ini, ada baiknya disimak kembali pesan Kasman Singodimedjo “Seorang muslim harus berjuang terus, betapapun keadaannya lebih sulit dari sebelumnya. Adanya kesulitan-kesulitan itu tidak membebaskan

seorang Muslim untuk berjuang terus, bahkan ia harus berjuang lebih gigih daripada waktu lampau, dengan strategi tertentu dan taktik yang lebih tepat dan sesuai". Pengalaman-pengalaman Kasman Singodimedjo hendaknya menjadi pelajaran buat bangsa ini. Apa yang telah dicontohnya oleh Kasman Singodimedjo setidaknya akan banyak memberi hikmah dan manfaat kepada bangsa Indonesia tercinta ini.

DAFTAR PUSTAKA

- "Pak Kasman 75 Th," dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 06, 16-31 Maret 1982.
- "Pak Kasman Mendapat Jodoh Lagi," dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 16, Th. Ke-61, 01-15 Oktober 1981
- "Pak Kasman Silaturahmi Di Solo," dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 23, 1-15 Desember 1974.
- "Teladan Dari Pak Kasman," dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 22/62, Th. 02, 16-30 Nopember 1982.
- Basuni, H. Ahmad. 1982. "Teladan Pak Kasman (I): Anak Desa yang Haus Ilmu, dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 23, 01-15 Desember.
- Basuni, H. Ahmad. 1982. "Teladan Pak Kasman (II): Pelopor dan Tokoh Gerakan Pemuda Islam," dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 1/03/Th. 1983, 01-15 Desember.
- Basuni, H. Ahmad. 1983. "Teladan Pak Kasman (V): Politikus dan Tokoh Partai Islam," dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 04, 16-28 Pebruari.
- Basuni, H. Ahmad. 1983. "Teladan Pak Kasman (III): Karir Dalam Ketentaraan," dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 02, 16-31 Januari.
- Basuni, H. Ahmad. 1983. "Teladan Pak Kasman (IV): Pembesar Negara dan Wiraswastawan," dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 03, 01-15 Pebruari.
- Basuni, H. Ahmad. 1983. "Teladan Pak Kasman (VI, habis): Pemimpin Muhammadiyah dan Penunggu Warung" dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 05, 01-15 Maret.

- Ensiklopedia Indonesia*, jilid 6 (SHI-UAJ). Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, 1984.
- Ensiklopedia Muhammadiyah, Sejarah, Tokoh, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Majelis Ekonomi Kewirausahaan PWM DIY dan Lembaga Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Masyarakat (LPSM) UMY dan MataBangsa, 2015.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia*, jilid 15, Jakarta: PT Cipta Adi Pustaka, 1991.
- Fatwa, HAM. 1982. "Percakapan Terakhir dengan Pak Kasman," dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 24/62, 16-31 Desember 1982.
- Jawahir, Muhd. Aktivanus. 1982. "Prof. Dr. Mr. RH Pak Kasman Meninggal Dunia," dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 22, Th. ke-62, 16-31 Nopember.
- Nasution, Abdul Haris. 1975. *Sekitar Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Nasution, Harun, dkk. 1987. *Ensiklopedi Islam (IJKLMNOP)*, Jilid 2. Jakarta: t. p.
- Panitia Peringatan 75 tahun Kasman. 1982. *Hidup itu Berjuang Kasman Singodimedjo 75 Tahun*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Pramuko, Yudi. 2002. *Kasman Singodimedjo*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prodjodikoro, Sawarno. 1982. "Pesan Pak Kasman," dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi 24, 16-31 Desember.
- Simatupang T. B. 1983. *Laporan dari Banaran*, Jakarta: PT Sinar Harapan.
- Sudiro. 1978. *Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Tim Penyusun. 1982. *Mengenang Prof. Dr. Mr. R. H. Kasman Singodimedjo*. Jakarta: Fajar Shadiq.
- Tim Penyusun. 2014. *100 Tokoh Muhammadiyah yang Menginspirasi*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah. 🌟

TENTANG PENULIS DAN EDITOR

Abdul Munir Mulkhan adalah Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Sebelumnya, ia aktif di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saat ini, ia aktif pada berbagai kegiatan di Muhammadiyah. Kiprahnya di Muhammadiyah dimulai sejak tahun 1960. Setelah menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah Cabang Kalirejo, Lampung Tengah (1996-1997), berbagai jabatan dalam jajaran kepengurusan organisasi Islam ini pernah ia duduki. Jabatan yang pernah diembannya, di antaranya, Wakil Sekjen (Sekretaris) PP Muhammadiyah (2000-2005); Anggota Majelis Pendidikan Tinggi (Dikti) PP Muhammadiyah (2005-2010). Di luar lingkungan Muhammadiyah, ia pernah menjadi Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DIY (1985-1990). Selain itu, ia merupakan pengamat masalah sosial keagamaan. Di tengah kesibukannya, ia adalah penulis buku yang produktif. Tidak kurang dari 60 buku lahir dari buah pemikiran dan kerja kerasnya.

Achmad Nurmandi, adalah Guru Besar pada Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Ia pernah menjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY (2009-2013); Direktur Program Pascasarjana UMY (2013-2017). Saat ini, ia menjabat sebagai Wakil Rektor V Bidang Kerjasama dan Internasional UMY (2017-2021). Di tengah kesibukannya, ia masih aktif terlibat dalam berbagai forum ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai akademisi, ia telah banyak menulis buku dan artikel jurnal.

Ahmad Mu'arif adalah Redaktur Suara Muhammadiyah yang aktif mengkaji sejarah Muhammadiyah-Aisyiyah. Ia juga tercatat sebagai Anggota MPI dan Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Saat ini, ia sedang menempuh studi doktoral di UIN Sunan Kalijaga dan bergabung dalam program riset Humanitas Global Indonesia.

David Efendi adalah dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Gelar Master of Art didapatkan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Master kedua dari Universitas Hawaii at Manoa, Amerika Serikat. Karya skripsi S1 telah diterbitkan oleh PolGov UGM pada tahun 2010 dengan judul "The Decline of Bourgeoisie: Runtuhnya Pedagang Pribumi Kotagede". Karya lain yang telah diterbitkan adalah "Muhammadiyah dan Pilpres"; "Matinya Kota"; Civil Society: Teori, Wacana dan Praktik". Saat ini, aktif di Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, Menjadi Ketua Serikat Taman Pustaka Muhammadiyah, Presidium Kader Hijau Muhammadiyah, Direktur Riset di Pusat Studi Muhammadiyah, dan menjadi Presidium Nasional Kader Hijau Muhammadiyah.

Dyah Mutiarin adalah dosen pada Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Menamatkan S1 dan S2 dari Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM). Pada tahun 2006, ia mendapatkan gelar Doktor dari School of Social Science, University Sains Malaysia (USM). Memiliki research interest pada bidang Manajemen Publik dan Kebijakan Publik. Ia aktif menulis publikasi pada berbagai jurnal ilmiah internasional maupun jurnal ilmiah nasional dan rutin berkolaborasi melakukan riset dengan berbagai peneliti baik di Luar Negeri maupun Dalam Negeri. Ia juga aktif menjadi konsultan pada berbagai pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Saat ini, ia mengemban amanah sebagai Kepala Divisi Riset LP3M UMY. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Prodi MIP dan Ketua Prodi MIP UMY.

Faisal Ismail adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ia aktif dalam berbagai forum ilmiah

nasional dan internasional serta produktif dalam menghasilkan karya ilmiah. Di antara buku yang diterbitkan adalah *Islam yang Produktif* (2017). Ia pernah menjabat sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain aktivitasnya di kampus, ia juga produktif menulis pada koran dan media massa lainnya.

G. Budi Subanar, lahir di Yogyakarta pada 2 Maret 1963 dan bergabung dalam Serikat Yesus sejak 1982. Ia menjalani pendidikan filsafat di Jakarta dan teologi di Yogyakarta. Setelah menerima tahbisan imamat pada tahun 1994, ia menjalani studi lanjut di Universitas Gregoriana, Roma. Sejak 2001 menjadi staf pengajar pada Fakultas Teologi Wedabhakti dan Program Magister Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ia aktif dalam berbagai forum ilmiah dan sangat produktif menghasilkan karya ilmiah terkait dengan bidang keahliannya.

Gunawan Budiyanto, adalah dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat ini, ia diberi amanah menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2017-2021). Sebelum menjabat sebagai rektor, ia menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik UMY. Selain sebagai pimpinan pada salah satu Perguruan Tinggi Swasta terbaik nasional ini, ia juga aktif memberi ceramah pada berbagai forum ilmiah baik di dalam maupun di luar negeri serta telah menerbitkan beberapa karya ilmiah. Ia sendiri adalah cucu Ki Bagus Hadikusumo.

Hasse Jubba adalah dosen pada Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ia menyelesaikan program doktor pada Center for Religious and Cross-cultural Studies, Universitas Gadjah Mada (CRCS-UGM) pada tahun 2012. Di sela-sela aktivitasnya sebagai dosen, ia telah mengedit beberapa buku serta menjadi editor/reviewer pada beberapa jurnal nasional. Beberapa karya berupa artikel ilmiah juga telah dipublikasikan baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Saat ini, ia selain aktif pada Pusat Studi Ahmad Syafi'i Maarif School of Political Thought and

Humanity UMY, juga sebagai pengelola Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik.

Martinus Sardi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Ketua Pusat Studi Perdamaian dan Humaniter. Ia pernah menjadi dosen selama 15 tahun di Italia dan Perancis. Ia banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan akademik dan sosial terkait dengan Hak Azasi Manusia (HAM) yang juga merupakan konsentrasinya hingga saat ini. Selain mengajar, ia juga aktif memberikan advokasi terkait dengan isu-isu kemanusiaan di berbagai tempat.

Mega Hidayati, lahir di Pekanbaru pada 31 Mei 1978, adalah Dosen pada Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ia menyelesaikan program doktor pada Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ia juga telah mengedit beberapa buku dan menerbitkan beberapa tulisan pada Jurnal dan Buku. Saat ini, ia aktif pada Pusat Studi Ahmad Syafi'i Maarif School of Political Thought and Humanity UMY.

Mundzirin Yusuf adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kajian Agama dan Budaya menjadi salah satu konsensinya hingga saat ini. Ia telah banyak menghasilkan karya ilmiah dan telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku maupun jurnal terkait dengan bidang keilmuannya. Saat ini, ia aktif di Majelis Dikdasmen PWM DIY.

Siswanto Masruri, lahir di Solo pada 27 Juli 1953, adalah Guru Besar Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping sebagai dosen tetap di UIN, ia juga mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) serta Dosen Tamu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Berbagai karyanya telah diterbitkan khususnya dalam bentuk buku dan jurnal ilmiah.

Siti 'Aisyah adalah Ketua Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dan salah satu Anggota Badan Pembina Harian (BPH) Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta (2017-2021). Di sela-sela kesibukannya, ia aktif mengisi berbagai majelis dan pengajian seperti Pengajian LIVE 'Aisyiyah yang dapat disaksikan secara langsung melalui facebook Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. Ia juga aktif menulis pada "SAKINAH: Buletin Pemikiran Islam Berkemajuan" yang diterbitkan oleh Program MAMPU Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.

Siti Irene Astuti Dwiningrum adalah dosen pada Jurusan Filsafat Sosiologi dan Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Ia meraih gelar Doktor pada Program Sosiologi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada tahun 2009. Ia telah menerbitkan beberapa karya di bidang keahliannya baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal (nasional dan internasional). di antara artikel yang baru saja terbit adalah "Culture-based Education to Face Disruption Era, 2019"; "The Concept of Vocational High School Development Industry-Based in Central Lombok Regency, 2019" dan "The Implementation Values of Multicultural Education Based on Tolerance in Indonesian Schools, 2020".

Sri Margana adalah dosen pada Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ia meraih gelar doktor dari Leiden University pada tahun 2002. Sebagai dosen, ia aktif menulis dan mempublikasikan karya-karyanya. Di antara karya yang telah diterbitkan adalah buku "Pandangan Dunia Maritim Masyarakat Agraris Jawa dan Orang-orang Niaga Eropa Pertama di Istana Mataram, 1558-1646" (Book Chapter); "Peristiwa Geger Sepehi dalam Kajian Historiografis" (Buku); dan "Religion, communism, and Ratu Adil; Colonialism and Propaganda Literature in 1920s Yogyakarta" (Jurnal).

Suhartono adalah Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Semasa menjadi dosen, ia sangat tekun dan memiliki komitmen tinggi dalam mewariskan pengetahuan sejarah kepada mahasiswa pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ia banyak menulis tentang

sejarah, salah satunya adalah *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo hingga Proklamasi 1908-1945*.

Zuly Qodir, lahir di Banjarnegara Jawa Tengah pada 22 Juli 1971. Ia meraih gelar Doktor Sosiologi Politik dan Agama (2006) dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini, ia merupakan Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ia juga mengajar pada Program Magister Ilmu Pemerintahan UMY. Selain meneliti, mantan Presidium Nasional Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (2003-2007) ini banyak menulis buku serta artikel di berbagai jurnal. Salah satu karyanya adalah *Metodologi Politik Pemerintahan: Teori dan Perspektif Keindonesiaan* (2019). 📖

INDEKS

A

A.A. Maramis 39, 87
Abdul Haris Nasution 14, 96,
249, 250, 271
Abdullahi Ahmed An-Na'im
137, 142, 151
Abdul Latief Hendraningrat 70,
245, 266, 267, 268
Abdul Munir Mulkhan xi, 133
Abdul Mu'thi 22
Abdurrahman Baswedan 31, 52,
78
Abikusno Cokrosuyoso 12, 16,
39, 87, 102
Abu Bakar 154
Abu Hanifah 35
Achmad Soebardjo 39, 87, 102
Adam Malik 37
AFNEI 29
Agung Hajjah Andi Depu 31
Agus Salim 1, 12, 16, 32, 39, 87,
102, 109, 222, 223, 224, 226,
236, 239, 259, 260
ahlu al-halli wa al-aqdi 135
Ahmad Basuni 185
Ahmad Dasuki Siradj 47
'Aisyiyah 181, 183
A. K. Gani 263
AKUI 92
Alamsyah Ratu Perwiranegara
88, 217

Algemene Middelbare School
(AMS) 108, 221, 222, 258, 260
Al-Irsyad 32, 91, 95, 260
Al-Ittihadiyah 91
Al-Jami'ah Al-Washliyah 91
al-Qur'an 7, 97, 98, 117, 118, 119,
120, 125, 127, 185, 187, 190,
222
Amerika Serikat 11, 28, 69
A.M. Fatwa 6
Amir Sjafruddin 44, 162, 201, 247
Amrozi 139
A.M. Tambunan 246
Andi Depu 31, 78
Andres Uhlin 150
Arab 136, 233, 238, 241
Arnold J. Toynbee 67
Arudji Kartawinata 165
Asia Timur Raya 10

B

Belanda vii, 2, 5, 7, 8, 9, 28, 29, 30,
32, 34, 35, 36, 60, 68, 69, 71,
75, 90, 91, 95, 107, 108, 113,
133, 162, 163, 200, 204, 209,
210, 219, 220, 221, 225, 226,
236, 239, 240, 244, 247, 248,
249, 250, 255, 258, 261, 263,
268, 269, 270, 271, 272
BKR 37, 62, 71, 75, 79, 91, 200,
262, 268
Boedi Oetomo (BO) 7, 8, 9

Bom Bali 139
 BPUPKI v, 2, 13, 15, 16, 19, 23,
 25, 37, 38, 39, 41, 45, 56, 73,
 74, 82, 87, 88, 101, 102, 106,
 111, 112, 116, 118, 120, 129,
 132, 139, 201, 202, 208, 210,
 215, 218

Budi Utomo 67, 83, 219
 Bukittinggi 248
 Bung Tomo 29
 Burhanuddin Harahap 50, 93,
 105, 249

C

Cindur Mato 228

D

Daan Jahya 37
 Dai Nippon 75, 76, 204
 Darmo Woro 9
 darul harb 148
 Darul Islam 48, 58, 101, 116, 117,
 118, 157
 dar-ul salam 194, 195, 197
 Dar-ul Salam 193, 194
 dar-ul sosialis 195, 197
 darus salam 148
 Dasuki 47, 238
 Dekrit Presiden 49, 95, 99, 104,
 207, 208, 268
 Deliar Noer 88, 247
 Demokrasi Parlementer 104, 106,
 111
 Demokrasi Terpimpin 48, 49, 50,
 51, 94, 104, 106, 111, 120, 127
 Depati Amir 31, 78
 Deradikalisasi 153
 DI/TII 48, 150
 Djamiatul Waslijah 95
 Djarnawi Hadikusuma 122, 216
 Djodi Gondokusumo 50
 Djuanda 49

E

Eropa 3, 7, 19, 139, 188, 189, 193,
 196, 227, 230, 234, 239, 240,
 263

F

Faisal Ismail iv, xi, 27, 286
 Farid Ma'ruf 35, 68, 89, 200, 217
 Fazlur Rahman 151
 feminisme 187, 188, 189, 193
 F. Laoh 9

G

Gatot Mangkupraja 69
 Gatot Taroenamihardja 44, 217
 Geger Talangsari 1989 149
 Gerakan 30 September 1965 105
 Gerakan Warsidi 152
 Ghazali 51, 261
 Ghazali Syahlan 51
 Gunawan Budiyanto iii, iv, x
 Gunawan Mangunkusumo 219

H

hadis 7, 127, 187, 222, 271
 Haedar Nashir iii, iv, v, xi, 83
 Hamim Ilyas 144, 152
 Hamka 51, 260, 261
 Hari Pahlawan 27, 30, 31, 218
 Hatta 1, 2, 6, 10, 12, 19, 24, 29,
 39, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 57,
 71, 74, 75, 82, 87, 91, 103, 104,
 122, 160, 163, 172, 203, 204,
 206, 207, 211, 215, 216, 244,
 245, 246, 248, 266, 267, 268,
 269, 271
 Hayam Wuruk 228
 Hindia Belanda 8, 28, 29, 34, 35,
 60, 75, 95, 209, 258
 Hiroshima 11, 29
 Hizbullah 91, 165, 265
 H.J. Benda 70

- Hollandsch Inlandsche School (HIS) vii, 4, 59, 107, 160, 199, 220, 221, 258 199, 220
- Hollandsch Inlandsche Kweek-school (HIK) 260
- HOS Tjokroaminoto 8, 9, 32, 222, 243, 260
- H. Singodimedjo 31, 256
- I**
- Idham Khalid 272, 273
- I.G. Ketoet Poedja 42
- I.J. Kasimo 246, 248, 250, 254
- Imam Samudra 139, 149
- India 30, 230, 247, 269
- Indische Partij 7, 8
- Indra Jaya 238
- Inggris 29, 30, 67, 247, 269
- International Jurish Congres 269
- IPKI 14, 50
- Islam iv, viii, ix, x, xi, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 161, 163, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201,
- 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 252, 253, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 286
- Iswara N Raditya 14, 24
- Iwa Kusuma Sumantri 74
- J**
- Jakarta Charter 53, 73, 102, 202, 203, 205, 208
- Jamaah Islamiah (JI) 138
- Jamaluddin al Afghani 9
- Jasser Auda 138, 152
- Jenewa 176
- Jepang v, 5, 6, 10, 11, 28, 29, 32, 36, 38, 40, 41, 61, 62, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 87, 89, 101, 102, 111, 116, 121, 129, 160, 161, 163, 164, 165, 171, 200, 215, 245, 246, 247, 255, 265, 266, 267, 268
- Jerman 247
- JIBDA 236, 237, 259
- Johannes Latuharhary 37, 42, 103
- Joko Widodo 31, 52, 78, 201, 210, 218, 269
- Jong Islamieten Bond (JIB) vi, xii, 2, 8, 13, 19, 20, 32, 33, 60, 65, 67, 68, 79, 85, 89, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 161, 164, 166, 167, 171, 181, 183, 184, 200, 213, 214, 218, 219, 222, 223, 224, 225, 226, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 246, 247, 259, 260, 262, 264

- Jong Java 33, 65, 89, 109, 161, 220, 222, 223, 224, 239, 259
 Jusuf Wibisono 32, 237, 238, 260, 270, 273
- K**
- kapitalisme 97, 227
 Karl D. Jackson 138
 Kartini 107, 183, 256
 Kartosoedarmo 181
 Kartosoewiryo 152, 153
 Kementerian Sosial 2, 30
 KH. Abdul Aziz 107, 160, 199
 KH. Abdul Kahar Muzakkir vi, 24, 39, 68, 86, 87, 102, 162, 218
 KH. Abdul Wahab Hasbullah 29
 KH. Abdurrahman Wahid 22
 KH. Abu Bakar bin KH. Sulaiman 86
 KH. Ahmad Dahlan vi, 9, 32, 33, 52, 68, 87, 107, 160, 199, 218, 222, 243, 258, 260
 KH. AR Fachruddin 182, 185
 KH. Abdul Wahid Hasyim 1, 12, 16, 22, 35, 38, 39, 87, 102, 165, 204
 KH. Hasyim Asy'ari 22, 29, 35, 72
 KH. Junus Anis 165
 KH. Mas Mansur 35, 200, 217
 KH. Masykur 248
 KH. Sholeh Iskandar 51
 KH. Sjam'u 78
 KH. Wahib Wahab 165
 KH. Zainal Mustofa 70
 Kiai Sam'un 265
 Ki Bagus Hadikusumo vi, ix, 1, 2, 3, 12, 13, 15, 16, 24, 33, 35, 38, 40, 41, 52, 54, 63, 68, 73, 74, 80, 86, 87, 90, 102, 122, 162, 171, 172, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 215, 216, 217, 218, 245, 267
 Ki Hajar Dewantara 74, 160, 245
 Ki Musa al-Mahfudz 89, 161, 199, 259
 KNIP 1, 37, 44, 62, 71, 79, 90, 91, 103, 104, 106, 111, 114, 117, 161, 181, 184, 217, 246, 249, 255, 263, 268
 Komisariat Pusat Pemerintahan 248
 Konferensi Meja Bundar (KMB) 30, 91, 247, 263, 269
 Kongres Muslimin Indonesia 91
 Kongres Pemuda 2, 13, 33, 67, 260
 Konstituante 16, 45, 47, 48, 49, 55, 56, 68, 72, 76, 77, 79, 104, 106, 111, 114, 115, 116, 117, 120, 124, 127, 131, 132, 162, 181, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 197, 198, 201, 206, 207, 208, 263
 Koor Pria 227
 Kristen 4, 8, 15, 39, 40, 41, 50, 98, 214, 233, 237, 246, 259, 267
 Kumakichi Harada 70
 Kusaeri 70
- L**
- Laksamana Maeda 245
 Lapangan Ikada 36
- M**
- Majapahit 228
 Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) 68, 72, 75, 76, 79, 110, 112, 114, 161, 181, 182, 264, 265
 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 49, 103, 204, 205, 206, 207
 Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) vi, 1, 2, 5, 6, 13, 14, 35, 45, 47, 48, 50, 53, 56, 63, 72, 73, 76, 77,

- 79, 80, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
 99, 100, 103, 104, 105, 106,
 107, 110, 111, 112, 114, 118,
 123, 127, 131, 134, 161, 162,
 165, 167, 175, 181, 182, 183,
 184, 185, 187, 191, 192, 196,
 197, 198, 200, 214, 217, 237,
 246, 249, 264, 265, 268
- Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 133, 261, 270, 273
- Marwati D. Puspongoro 223
- Mas Gimam 258
- Mathla'ul Anwar 91
- Medische Hoge School 221
- Meer Utigrebred Lager
 Onderwis (MULO) vii, 4,
 59, 107, 108, 160, 199, 221,
 222, 258, 260
- Meester in de Rechten (MR) 59,
 109, 113
- Merle Calvin Ricklefs 85
- Mesir 230
- Mitsuo Nakamura 243
- modal sosial 163, 164, 165, 166,
 167, 168, 169, 170, 175, 176, 177
- Mohammad Natsir 32, 35, 48, 50,
 68, 93, 101, 105, 238, 255, 265
- Mohammad Roem 6, 32, 35, 108,
 171, 221, 222, 225, 236, 237,
 238, 239, 246, 253, 257, 258
- Mohammad Yamin 1, 19, 87
- Moh. Yusuf 246
- MPRS 49, 98
- Muallimat 260
- Muallimin 260
- Muchlas 139
- Muhammad Abduh 7, 9, 86
- Muhammadiyah iv, vi, vii, viii,
 ix, x, xi, 1, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 15,
 16, 21, 22, 24, 32, 33, 34, 35,
 52, 53, 54, 55, 57, 65, 66, 68,
 79, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89,
 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99,
 100, 103, 106, 107, 111, 112,
 114, 116, 122, 123, 131, 132,
 133, 134, 155, 156, 157, 161,
 162, 165, 166, 169, 175, 178,
 181, 182, 183, 184, 185, 198,
 200, 204, 205, 206, 209, 210,
 215, 217, 218, 226, 230, 231,
 238, 243, 247, 256, 257, 260,
 261, 264, 265, 266, 269, 273,
 274, 275
- Museum Perjuangan Bogor 32
- N**
- Nabi Muhammad 144, 147, 153,
 187, 233
- Nagasaki 11, 29
- Nahdatul Wathan 91
- Nahdlatul Ulama (NU) 5, 12, 14,
 22, 50, 91, 92, 104, 165, 237,
 265
- NASAKOM 104, 105
- nasionalisme 5, 7, 14, 15, 19, 20,
 21, 23, 33, 41, 45, 68, 73, 85,
 88, 89, 98, 101, 108, 110, 159,
 160, 169, 170, 172, 174, 178,
 194, 196, 213, 214, 226, 229,
 234, 235, 239, 240, 253
- Nasuhi 261
- Negara Islam Indonesia (NII)
 116, 118, 121, 138, 139, 150,
 153
- NICA 29
- Nieto 173, 178
- Njoto 47
- Nugroho Notosusanto 223
- Nyai Walidah Ahmad Dahlan
 vi, 52, 218
- Ny. Datuk Tumenggung 238
- Ny. Emma Puradirejo 238
- Ny. S.Z. Gunawan 238
- O**
- Orde Baru 50, 51, 52, 96, 150, 201,
 207, 244, 255

- Orde Lama 50, 244, 255
 Otto Iskandardinata 71
- P**
- Pagaruyung 228
 Pajajaran 228
 Pancasila ix, xi, 1, 12, 14, 18, 21,
 22, 23, 24, 37, 38, 39, 41, 42,
 43, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 53,
 54, 55, 56, 57, 87, 89, 97, 99,
 101, 103, 104, 106, 107, 112,
 117, 119, 120, 121, 122, 123,
 124, 125, 128, 129, 130, 131,
 132, 135, 139, 149, 150, 152,
 172, 178, 190, 201, 203, 204,
 207, 208, 211, 217
 Pandu Indonesia 171
 Pangeran Mohammad Noor 31,
 78
 Panitia Sembilan v, 73, 87, 122, 172
 Parkindo 14, 50, 246
 Parmusi 96, 133
 Partai Indonesia 50
 Partai Islam Indonesia 13, 35, 89,
 161, 166, 175, 200, 217
 Partai Katolik 50, 246
 Partai Kebangkitan Bangsa 22
 Partai Murba 50
 Pearl Harbor 69
 Pembukaan UUD 1945 37, 39, 40,
 75, 121, 126, 215
 Pemerintahan Darurat Republik
 Indonesia (PDRI) 248, 263
 pendidikan multikultural 171,
 172, 173, 174, 175, 176
 Pepen Nazaruddin 30
 Perang Dunia II 28, 69, 91, 111
 Perang Pasifik 11, 38, 73, 76
 Perhimpunan Basiswa
 Minahasa 9
 Perjanjian Kalijati 28
 Permesta 6, 14, 50, 54, 105
 Perpustakaan Islam Yogyakarta
 226
 Persatuan Islam (Persis) 12, 91,
 95, 265
 Persatuan Sosial Katolik 227
 Perserikatan Ulama 230
 Persia 230
 Perti 50, 92
 PETA v, 2, 5, 6, 36, 37, 82, 111,
 161, 163, 164, 165, 171, 200,
 215, 262, 265, 266, 268, 270
 Piagam Jakarta 2, 11, 13, 37, 39,
 41, 43, 63, 68, 72, 73, 74, 75,
 76, 77, 80, 82, 87, 90, 102, 103,
 117, 121, 122, 123, 129, 134,
 135, 139, 166, 167, 215, 267
 PII 35
 PKI 14, 47, 48, 50, 77, 92, 105,
 111, 112, 123, 187, 191, 246,
 261, 268, 271
 PNI 2, 14, 15, 50, 92, 123, 246
 Politik Etis 219
 PPKI v, 2, 10, 11, 13, 16, 23, 25,
 37, 40, 41, 42, 43, 56, 74, 82,
 88, 90, 91, 101, 102, 103, 104,
 106, 111, 112, 116, 117, 118,
 120, 122, 132, 161, 166, 171,
 181, 200, 201, 209, 210, 215,
 216, 245, 246, 262, 267, 268
 PPTI 92
 Prawoto Mangkusasmito 32, 53,
 88, 95, 99, 105, 131, 197, 198,
 215, 238, 250
 Priyono 223
 PRRI 6, 14, 50, 72, 76, 77, 79, 80,
 92, 96, 105
 PSI 14, 47, 50, 77, 96, 105, 246
 PSII 50, 91, 92, 165
 Purworejo vii, 3, 4, 59, 64, 107,
 160, 183, 199, 243, 244, 256,
 258, 270
 PUSA 91
 Putnam 167, 168

Q

Qonun Asasi NII 153

R

RAA Wiranatakusumah 74

Raden Sjamsuridjal 89

Raden Sukijo 133

Radjiman Wedyodiningrat 73, 267

Rasyid Ridha 7, 9

Rechts Hoge School (RHS) 4, 32,
59, 109, 113, 199, 221, 244,
246, 258

Remy Madinier 116, 117, 120

Rengasdengklok 245

Revolusi Industri 4.0 81

Riaz Hassan 139

Ridwan Saidi 223, 225

RM. Sartono 35, 264

Roger Garaudi 151

Rokeoan Minahasa 9

R. Soepinah Isti Kastiati 183

Rustam Sutan Palindih 238

S

Sahlan 261

Saifuddin Zuhri 5, 270

Sakirman 47

Salamah 184, 257

Samanhoedi 7, 8

Samanhudi 9

Sam Ratulangi 42

Sarekat Islam (SI) 7, 8, 9, 12, 22,
230, 231, 243

Sarikat Buruh Islam Indonesia 95

Sarikat Dagang Islam Indonesia 95

Sarikat Tani Islam Indonesia 95

Sarikat Usaha 230

Sartono Kartodirjo 223

Satiman Wiryosanjoyo 219

Sayuti Melik 74

Selo Sumarjan 247

Siliwangi 228

Singgih 70

Siswanto Masruri xii, 131, 213

Siti Aisyah xi, 181

Siti Irene Astuti Dwiningrum xi,
159

Siti Utami Dewi Ningrum xi, 85

S. Mangoensarkoro 246

SM Kartosuwiryo 48

Soebianto Djyohadikusumo 37

Soedijono 47

Soeharto 96, 201, 209

Soekarno 1, 2, 6, 10, 12, 13, 15, 19,
27, 29, 38, 39, 41, 42, 43, 44,
48, 49, 50, 51, 52, 55, 57, 58,
72, 74, 75, 76, 77, 80, 87, 88,
90, 94, 96, 97, 103, 104, 105,
106, 121, 122, 127, 160, 184,
203, 204, 205, 207, 208, 210,
215, 216, 244, 245, 252, 261,
266, 267, 268, 270, 271

Soekiman 35, 200, 268

Soepinah Isti Kasiati 89

Soepomo 11

Sri Mangoensarkoro 193

Sri Margana xi, 85

STOVIA vii, 4, 59, 107, 108, 109,
113, 160, 161, 199, 244, 258

strukturalisme 191

Subardjo 74

Sudewo, T.M. 238

Sudirman 52, 218, 251, 254

Suhartono Wiryopranoto xi, 59

Suhodo 89, 161, 199, 259

Sukaptinah Sunaryo Mangun-
puspito 237

Sukiman 68, 86, 89, 102, 217, 246,
248, 249, 250

Sultan Hamengku Buwono IX 247

Sumatra Thawalib 230

Sumitro Djyohadikusumo 96

sunnah 120, 136, 146, 152, 153

Supeno 248, 250, 251

Supinah 237, 257

Supriyadi 70

- Surabaya 27, 28, 29, 30, 53, 108,
110, 156, 231, 243, 264
- Susanto Tirtoprojo 248, 250, 251
- Sutan Syahrir 71, 72, 75, 77, 184,
213, 214, 235, 246
- Sutardjo Kartohadikusumo 37
- Sutomo 29, 219
- Syahbuddin Latif 238
- Syaikh Ahmad Surkati 32, 260
- Syamsuddin Sutan Makmur 238
- Sjamsuridjal 109, 110, 161, 199
220, 222, 224, 238, 259
- Syam'un 31
- Sjafruddin Prawiranegara 93
- Syarikat Islam 12, 50, 104, 184
- Syi'ah 149, 154
- T**
- Takashi Shiraishi 243
- Taman Pemakaman Umum
(TPU) Tanah Kusir 269
- Taman Siswa 184
- T.B. Simatupang 250, 271, 272
- Technische Hoge School (THS)
221
- Tentara Keamanan Rakyat
(TKR) 1, 71, 91, 246, 268
- Tentara Nasional Indonesia
(TNI) 1, 71, 82, 209, 268, 271
- Teuku Muhammad Hasan 40, 74
122, 171, 204
- Tom Sculler 169
- Tresna Soengkawati Garnida 187
- Turki 7, 153, 155
- U**
- UNESCO 173
- Uni Sovyet 11
- Universitas Islam Indonesia (UII)
263, 286
- Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (UMY) iv, viii,
ix, x, xi, 54
- Usman El-Muhammady 238
- UUD 1945 11, 37, 39, 40, 42, 43,
45, 48, 49, 73, 75, 82, 90, 94,
99, 103, 104, 121, 126, 139,
161, 166, 171, 215, 245
- V**
- van der Kolf 32, 262
- VOC 28
- vox populi vox dei 135
- W**
- Wael B. Hallaq 113
- Wahyuddin 257
- Wibisono 31, 183, 237, 238, 257,
260, 270, 273
- Wikana 47
- Wiwoho Purbohadidjojo 36, 89,
109, 110, 200, 217, 226, 259
- WJM. Ratulangi 9
- Woodburn Kirby 30, 58
- Y**
- Yahudi 140, 233
- Yogyakarta iv, viii, ix, x, xi, 8, 9,
24, 31, 54, 55, 82, 83, 86, 99,
100, 103, 107, 109, 122, 131,
133, 134, 156, 157, 178, 179,
184, 198, 200, 211, 226, 231,
242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 254, 256,
261, 268, 275, 286
- Yunani 7, 269
- Yusmar Basri 223
- Yusuf Abdullah Puar 226
- Yusuf Qardhawy 134, 136, 140,
141, 149
- Z**
- Zainul Baharuddin 238
- Zuly Qodir xi, 1